SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

SUBTEMA
SEJARAH INDUSTRIALISASI

ektorat
yaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990

959.802
ANH
s

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

SUBTEMA
SEJARAH INDUSTRIALISASI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1990

Penyunting:
Anhar Gonggong

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Depdikbud. dalam program kerjanya tahun 1990/1991 telah menyelenggarakan Seminar Sejarah Nasional V di Gedung APDN Semarang pada tanggal 27–30 Agustus 1990. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka "Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka;" dengan tema : "Sumbangan Sejarah Dalam Pembinaan Bangsa Menghadapi Era Tinggal Landas".

Kesadaran akan arti pentingnya sejarah sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa tidak terhenti dengan tercapainya kemerdekaan yang telah dinyatakan pada 45 tahun (1945 – 1990) yang lalu. Kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sejarah tercermin dengan lahirnya pelbagai lembaga di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk mengkaji, menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai kesejarahan. Demikian pula pelbagai lembaga pendidikan dan penelitian ilmiah juga telah meningkatkan kegiatan mereka di bidang penulisan sejarah. Tidak ketinggalan penulis dan peneliti yang mandiri melakukan kegiatan mereka dengan berbagai macam alasan dan tujuan.

Di lain pihak pesatnya pembangunan pada masa Orde Baru telah meningkatkan kebutuhan akan usaha pembinaan kesadaran sejarah bangsa Indonesia. Tanpa diduga terlebih dahulu, keberhasilan pembangunan nasional itu telah merangsang proses

pembaharuan dalam segala sektor kehidupan bangsa. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran pimpinan dan wakil-wakil rakyat akan lunturnya semangat persatuan dan kesatuan yang terdesak oleh semangat bersaing dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat.

Sementara itu jika dilihat dari jarak waktu pelaksanaan Seminar Sejarah IV yang diadakan pada tahun1985 di Yogyakarta (1985–1990), telah terbentang jarak waktu selama lima tahun. Suatu rentang waktu yang cukup memadai untuk menyelenggarakan suatu Seminar yang berskala nasional. Dalam rentang waktu tersebut tentu para sejarawan telah banyak berusaha dan berhasil melakukan penelitian di dalam pelbagai peristiwa sejarah. Hasil penelitian itu seharusnya disebarkan pada sejarawan lain serta masyarakat pada umumnya. Untuk itulah maka Seminar Sejarah Nasional V ini merupakan forum yang dapat mempertemukan hasil kajian/studi para sejarawan dari seluruh Indonesia, untuk dibahas dan disebarluaskan pada masyarakat.

Dalam seminar ini telah dibicarakan berbagai masalah kesejarahan yang terbagi atas : 1. Sejarah Perjuangan, 2. Pengajaran Sejarah, 3. Penulisan Sejarah, 4. Sejarah Kesenian dan, 5. Sejarah Industrialisasi.

Materi-materi kesejarahan tersebut berasal dari berbagai penjuru tanah air yang merupakan pusat-pusat pemikiran kesejarahan, antara lain seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Ujung Pandang, Medan, Riau dan lain-lain. Makalah-makalah tersebut merupakan hasil penelitian ilmiah yang orisinil, berskala nasional ataupun lokal dan belum pernah dipublikasikan.

Pada akhirnya dengan diterbitkannya hasil Seminar Sejarah Nasional V ini diharapkan kesadaran sejarah pada masyarakat luas menjadi meningkat.

Jakarta, Nopember 1990

PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PADA PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

Hadirin yang saya hormati,

Perkenankanlah saya mengutip beberapa rujukan yang melandasi 3 kegiatan Seminar Sejarah Nasional, Pameran Perkembangan Kebudayaan dan Seminar Pendahuluan yang mulai hari ini kita selenggarakan di Semarang dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

Pertama-tama, ialah amanat GBHN 1988 yang antara lain menyatakan bahwa "Hakekat pembangunan nasional ialah pembangunan yang berbudaya".
Rujukan yang kedua ialah seruan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang "Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia" yang di Indonesia telah dicanangkan secara resmi oleh Bapak Presiden pada tanggal 28 Oktober 1988 yang lalu. Dalam Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia itu kita diharapkan untuk, antara lain : Memperhatikan dimensi kebudayaan dalam pembangunan, memperkuat identitas budaya bangsa dan memperbesar peran serta masyarakat dalam kegiatan budaya.

Amanat GBHN 1988 maupun seruan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia itu tidak disusun tanpa alasan dan

bukan sekedar pemanis kata rangkaian pernyataan untuk didengar telinga.

Sebagaimana kita maklum, masyarakat dan peradaban manusia khususnya di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, sedang mengalami perkembangan yang amat pesat. Baik kekuatan dari dalam masyarakat sendiri maupun terutama kekuatan dari luar dengan kuatnya merangsang penyesuaian tata susunan masyarakat dan pergeseran nilai budaya serta norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dinamika masyarakat dalam menanggapi tantangan zaman, baik yang dipacu oleh peralihan generasi maupun kemajuan teknologi itu, dapat menyebabkan proses akulturasi yang tidak terkendali apabila tidak diimbangi dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan secara terarah dan berkesinambungan.

Perluasan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda mengambil alih peran-peran sosial dari generasi terdahulu, telah merangsang pemikiran yang lebih luas cakrawalanya.

Karena itu bukan hal yang mustahil, kalau kurangnya pembinaan budaya di kalangan generasi muda dapat menyebabkan pendangkalan penghayatan budaya bangsa. Demikian pula pesatnya perkembangan industrialisasi yang didukung ilmu dan teknologi moderen yang berorientasi pada keuntungan materi, telah menggeser nilai-nilai budaya luhur dan menggantikannya dengan nilai-nilai ekonomi yang lebih kuat relevansinya dengan kehidupan masyarakat industri.

Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi, telah memacu dan meningkatkan intensitas kontak-kontak budaya antar bangsa. Walaupun kontak-kontak budaya itu diperlukan sebagai kekuatan luar yang dapat merangsang perkembangan kebudayaan yang terlibat, akan tetapi tanpa kesiapan masyarakat, yang bersangkutan dapat mengakibatkan perkembangan kebudayaan atau akulturasi yang terlepas dari akar budaya bangsa yang bersangkutan.

Atas dasar kenyataan tersebut, kiranya sudah pada tempatnya kalau dengan sungguh-sungguh dilakukan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa sejalan dengan amanat GBHN 1988 dan seruan PBB tentang Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia. Dalam rangka usaha tersebut, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, menyelenggarakan 3 rangkaian kegiatan sekaligus di Semarang dalam rangka 3 rangkaian kegiatan ini besar yang dimulai sejak tanggal 21 Agustus yaitu Peringatan 100 tahun Penemuan Fosil Pithecantropus Erectus di Solo disusul dengan Sidang-sidang Indo Pacific Prekisforic Association di Yogyakarta dan kini di Semarang kita selenggarakan Seminar Sejarah Nasional V serta Pameran Perkembangan Kebudayaan dan Pra Seminar "Jalan Sutra".

Kalau di Solo kita dibawa kembali ke alam budaya Nusantara 1–1½ juta tahun yang lalu, yaitu awal kehidupan manusia Indonesia Purba atau jenis Pithecantropus Erectus, di Yogyakarta kita dibawa serta menelaah kembali asal usul dan perkembangan kebudayaan di masa prasejarah.
Kini di Semarang kita diajak untuk menggali, memahami dan menghayati kebudayaan bangsa dalam arti luas, di masa sejarah.

Hadirin yang saya hormati, kalau kita berpaling ke belakang dan memperhatikan sejarah tidak selalu berarti kita memuja-muja kejayaan masa lalu untuk berpuas diri. Tantangan yang dihadapi oleh nenek moyang kita di masa lampau jauh berbeda dengan apa yang kita hadapi dewasa ini. Karena itu tanggapan dan bentuk perjuangan mereka jauh berbeda dengan tanggapan dan bentuk perjuangan yang harus kita lakukan. Apa yang dapat kita warisi ialah nilai-nilai luhur, nilai-nilai kejuangan yang membawa kejayaan bangsa. Oleh karena itu dengan mengacu pada pengalaman di masa lampau, kita hadapi tantangan masa kini, untuk merencanakan hari depan yang lebih baik. Semuanya itu dapat kita lakukan dengan mengacu pada sejarah.

Rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Kebudayaan baik di Solo, Yogyakarta dan Semarang ini sesungguhnya mempunyai

tujuan utama untuk membangkitkan semangat perjuangan ini mencapai cita-cita bangsa tanpa harus tercabut dari akar budaya atau nilai-nilai luhur yang telah menghantar kita selama 45 tahun. Sesungguhnya masa empat puluh lima tahun itu bukan waktu yang singkat, kalau dikaitkan dengan pesatnya kemajuan ilmu dan teknologi yang telah menimbulkan dampak pemikiran dan kehidupan sosial budaya masyarakat pada umumnya. Karena itu sudah pada waktunya kalau kita berpaling pada sejarah untuk mengetahui adakah perjalanan kita itu sudah tepat pada jalur yang kita tuju.

Sampai berapa jauh perjalanan itu mendekati cita-cita dan adakah perlu koreksi untuk mempercepat pencapaian tujuan.
Semuanya itu dapat diketahui dengan bercermin pada sejarah. Kalau orang-orang Eropa Barat bercermin pada masyarakat "primitive" dalam mengukur kemajuan peradaban mereka, kita harus pandai bercermin pada sejarah dalam mengukur kemajuan pembangunan yang kita capai. Sejarah, khususnya sejarah perjuangan bangsa, merupakan tolok ukur akan ketepatan arah dan keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia.

Atas dasar alasan itulah Seminar Sejarah Nasional V diselenggarakan dengan mengacu pada GBHN 1988 dan Program Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Sedunia yang mengingatkan kita akan arti pentingnya sejarah bukan sekedar sebagai suatu disiplin ilmu melainkan sejarah sebagai suatu rangkaian informasi yang sarat dengan pesan-pesan budaya dalam arti luas. Seminar Sejarah karena itu diselenggarakan bukan semata-mata sebagai arena diskusi ilmiah yang diperlukan untuk pengembangan ilmu yang bersangkutan, melainkan juga sebagai sarana untuk memperluas cakrawala dan membina kesadaran sejarah masyarakat pada umumnya. Karena itu marilah kita simak dengan seksama uraian para pakar dan pelaku sejarah, serta khalayak ramai tentang sejarah bangsa mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya demi kejayaan bangsa. Perlu diketahui bahwa dalam rangka kerjasama kebudayaan antar bangsa, dalam Seminar akan dibicarakan topik-topik khusus tentang "Jalan Sutra" untuk menyambut program UNESCO

yang akan menelusuri jalan perdagangan sutra yang menghubungkan benua Asia dan Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Napak jalan sutra yang dimulai dari Venetia itu akan singgah di pelabuhan-pelabuhan sutra Indonesia pada bulan Januari 1991 dan Seminar Internasional Jalan Sutra akan diselenggarakan di Surabaya.

Akhirnya marilah kita mulai dengan sidang-sidang pertama mendengarkan uraian tamu-tamu kita, menguraikan pemikiran, pengalaman dan saran-sarannya.

Semarang, 27 Agustus 1990

Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional

ttd.

Prof. Dr. S. BUDHISANTOSO

SAMBUTAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
P A D A
PEMBUKAAN SEMINAR SEJARAH NASIONAL V
TANGGAL 27 AGUSTUS 1990

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
Yth. Bapak Menteri Penerangan RI;
Yth. Ibu Menteri Sosial RI;
Yth. Sdr. Ketua DPRD dan Rekan-rekan MUSPIDA Tingkat I Jawa Tengah;
Yth. Sdr. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah;
Yth. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
Yth. Para Sejarahwan, Budayawan dan Peminat Bidang Studi Sejarah;
Para Peserta Seminar Sejarah Nasional V, yang saya hormati dan hadlirin yang berbahagia.

1. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan taufiq dan hida-

yah-Nya, kita sekalian dapat menyertai acara Pembukaan SEMINAR SEJARAH NASIONAL V, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang amat membahagiakan ini, saya pribadi dan atas nama seluruh masyarakat Jawa Tengah, menyampaikan ucapan "Selamat Datang", dan "Terima Kasih", kepada Bp. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bp. Menteri Penerangan, dan Ibu Menteri Sosial, yang telah berkenan menyisihkan waktu, untuk hadir secara pribadi pada acara ini.
Ucapan yang sama saya sampaikan pula kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudara sekalian, khususnya para sejarahwan dan budayawan, yang telah ikut berpartisipasi mensukseskan acara ini.

2. Sebagaimana kita maklumi bersama, kegiatan Seminar Sejarah Nasional V ini mempunyai arti penting dan strategis, terutama dalam rangka mengokoh-mantapkan kedudukan ilmu sejarah nasional dalam sistem pendidikan kita. Melalui kegiatan ini wawasan "Jati Diri" kita akan semakin mantap, cakrawala pandang kita akan lebih luas; bahkan dapat meningkatkan nasionalisme dan tanggung jawab ke masa depan. Paling tidak lewat seminar ini, para cendikiawan kita di bidang ilmu sejarah, dapat memacu kreatifitas untuk menemukan pola terbaik dalam menyampaikan pelajaran sejarah bagi para pelajar, mahasiswa maupun generasi muda.

3. Seperti telah kita rasakan bersama, saat ini berkembang issue, dari hasil Temu Sejarah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, bahwa bidang studi sejarah tidak memperoleh porsi sebagai layaknya bidang studi yang lain, bahkan sebagai "Wahana Pembinaan Bangsa", cenderung kurang mendapat perhatian. Lebih memprihatinkan lagi, bahwa kurikulum bidang studi sejarah tahun 1975 seakan tenggelam atau bahkan ditenggelamkan oleh bidang studi IPS, terutama di SLTP dan SLTA.

Memang telah ada upaya peningkatan-peningkatan kualitas pada kurikulum 1984 bidang studi ini. Akan tetapi, ini pun masih belum ada Garis Besar Program Pengajaran. Pernah bidang studi sejarah ini memperoleh porsi yang cukup mantap, yaitu pada kurikulum tahun 1988. Tapi sejak saat itu hingga sekarang belum ada tanda-tanda bidang studi ini menarik untuk diajarkan.

4. Dari indikator yang saya kemukakan tadi, maka seminar ini sangat bermanfaat, di satu pihak bermanfaat bagi pembangunan sistem pendidikan kita dan di pihak lain bermanfaat bagi pembangunan generasi muda kita di masa-masa yang akan datang. Karenanya saya mengharapkan, agar forum ini dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat membuahkan hasil yang positif bagi kita semua.
   Dapat saya sampaikan, bahwa di dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, disamping ada beberapa masalah pokok pembangunan yang segera diupayakan pemecahannya, pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, merupakan salah satu bagian terpenting dari keseluruhan program pembangunan di daerah ini. Sementara itu "Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi" merupakan satu di antara lima masalah pokok yang dihadapi Jawa Tengah;
   Bertemu pada hal ini, kiranya tak berlebihan jika seminar ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Jawa Tengah, khususnya dalam bidang studi sejarah di sekolah-sekolah.
   Melalui teman-teman/Saudara-saudara sekalian dalam seminar ini, para guru sejarah tak lagi "Ragu-ragu" dengan profesinya.
   Kiranya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memanfaatkan secara optimal hasil-hasil yang dicapai pada pertemuan ini, baik di sekolah-sekolah maupun dalam rangka pembinaan generasi muda dalam belajar sejarah nasional, agar anak-anak kita tidak "Pangling" terhadap sejarahnya sendiri.

5. Memang kita akui, bidang studi sejarah saat ini kurang diminati, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Hal ini terbukti adanya banyak keluhan para guru sejarah kita. Sementara kita tahu, bahwa sejarah nasional mempunyai kriteria khusus dalam pembinaan watak generasi muda kita, seperti menumbuh kembangkan jiwa patriotisme. Disamping itu, melalui pelajaran sejarah nasional, anak-anak kita dapat memahami arti pengorbanan para pahlawan kita dalam menegakkan kedaulatan negaranya. Melihat kenyataan ini, terasa agak memprihatinkan manakala, bidang studi ini menjadi "Samben" bagi anak-anak kita.

   Hal ini tantangan bagi kita semua, terlebih bagi Saudara sekalian, yang memang sangat paham arti pentingnya belajar sejarah nasional. Untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan harapan-harapan sebagai berikut :

   Pertama, Carilah alternatif terbaik untuk merangsang minat belajar sejarah nasional bagi pelajar maupun mahasiswa. Hal ini penting artinya bagi pembinaan semangat guru sejarah.

   Kedua, Manfaatkan forum ini sebagai ajang konsultasi sesama pakar bidang studi sejarah, terutama untuk menemukan sistem yang tepat menulis buku-buku sejarah nasional, sehingga menarik untuk dibaca.

   Ketiga, Demikian pula saya berharap kepada guru-guru sejarah, khususnya di Jawa Tengah, hendaknya jangan cepat putus asa dalam menjalankan profesinya.
   Sebab betapapun bidang studi ini kurang menarik, tapi bidang studi ini sangat besar peranannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

   Demikian beberapa hal yang dapat saya kemukakan pada kesempatan ini. Sebelum menutup sambutan ini, perkenankanlah saya mohon kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan sambutan pengarahan dan sekaligus membuka seminar ini.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati jalannya Seminar Sejarah Nasional V ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

I S M A I L

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dibawakan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Mulai hari ini selama beberapa hari berturut-turut akan berlangsung Seminar Sejarah Nasional ke 5 dan pameran perkembangan kebudayaan Indonesia. Peristiwa ini sama pentingnya dengan sejarah apapun yang akan dibicarakan dalam Seminar serta perkembangan kebudayaan pada umumnya, karena tanpa kita sadari setiap orang, setiap waktu dan dalam setiap interaksi sosial memerlukan sejarah dan mengacu pada kebudayaan yang berlaku. Dalam hal sejarah, setiap orang memerlukannya sebagai bahan pertimbangan dalam setiap tindakan sosialnya. Namun demikian tetapi tidak setiap orang menyadari akan arti pentingnya sejarah bagi kelangsungan hidup dirinya, keluarganya, kelompok sosialnya, bangsanya, maupun umat manusia secara keseluruhan. Orang baru sadar akan arti pentingnya sejarah, kalau ia menghadapi kesulitan, seperti harus mengisi daftar riwayat hidup. mengusut asal-usul dan silsilah keluarganya, ataupun berusaha memahami pertikaian antara bangsa yang menjurus ke arah peperangan besar seperti yang terjadi di wilayah teluk di Timur Tengah dewasa ini. Orang baru berminat untuk mempelajari sejarah, kalau ada tulisan yang menyangkut baik buruknya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya ataupun bangsanya.

Di pihak lain ada pula orang yang mempunyai kesadaran sejarah yang cukup kuat, dan senantiasa ingin membuat sejarah-

nya sendiri atau menulis "his Story" dan bukannya "history" dalam arti yang sesungguhnya. Betapapun karya tulis yang memuat catatan tentang peristiwa di masa lampau itu sangat penting artinya sebagai sumber informasi kesejarahan. Walaupun dalam cara mengungkapkan, maupun dalam cara melihat dan memahami peristiwa di masa lampau itu berbeda. semuanya itu sangat penting artinya bagi ahli-ahli untuk merekonstruksi sejarah.

Memang disadari bahwa menulis sejarah itu bukan suatu pekerjaan yang ringan dan sederhana. Setiap detik terjadi peristiwa sejarah di banyak sektor kehidupan dan yang tidak terbatas dampaknya jangkauan wilayahnya. Oleh karena itu ahli-ahli sejarah menghadapi kesulitan untuk menentukan titik tolak penulisan sejarah. Belum lagi pengaruh ragam tujuan penulisan serta sasaran pembacanya yang belum tentu homogin, serta suasana masyarakat dan suhu politik yang tidak dapat diabaikan pengaruhnya. Hal ini tercermin dalam banyaknya tanggapan, sanggahan dan kritik yang ditujukan pada hasil karya sejarahwan di Indonesia. Boleh dikatakan setiap waktu kita dapat ikuti surat pembaca diberbagai media cetak yang isinya menggugat, menyangkal, meluruskan dan menjelaskan peristiwa sejarah yang pernah dipublikasikan. Seolah-olah penulisan sejarah itu sendiri membuat sejarahnya sendiri.

Di samping ramainya orang membicarakan isi karya sejarah, dewasa ini banyak pula orang yang membicarakan tentang pendekatan konsep dan teori, metode pengumpulan data dan fakta sejarah, serta sistimatika penyajiannya. Hal ini merupakan gejala baik bagi pengembangan sejarah sebagai cabang ilmu pengetahuan, akan tetapi kalau orang berlarut-larut bicara soal metode ilmiah tanpa kesudahan, akhirnya masyarakat yang mulai berminat dan mengembangkan pemikiran kiritikal akan dikecewakan. Sementara orang berdebat soal metode ilmiah, buku-buku sejarah yang dapat diandalkan sebagai sumber informasi andal sudah ketinggalan jaman. Baik isi maupun pendekatannya sudah jauh tertinggal oleh karya-karya sejarah yang ditulis oleh orang asing dengan segala latar belakang sosial-

budaya dan idiologinya dengan tujuan dan sasaran pembaca tertentu pula.

Terlepas dari penilaian terhadap minat kesadaran sejarah dikalangan masyarakat, sesungguhnya kita sangat memerlukan sejarah baik sebagai penjelasan rangkaian peristiwa di masa lampau, maupun kegiatan sejarahwan untuk menggali dan menyajikan fakta sejarah terutama sebagai sarana pemupukan persatuan dan kesatuan bangsa, sarana untuk mengukuhkan identitas bangsa, dan sarana perangsang kreativitas dalam pembangunan bangsa.

Sebagaimana kita sadari, proklamasi kemerdekaan 45 tahun yang lalu telah menimbulkan apa yang oleh sarjana Antropologi Amerika yaitu Clliford Geertz, dinamakan revolusi integrasi ("integratine revolution") di Indonesia. Penduduk di bekas wilayah jajaran Hindu Belanda yang semula hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang kecil dan mandiri, mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang besar. Akibatnya kesatuan-kesatuan itu harus melepaskan ikatan-ikatan kesatuan kedaerahan dan lain-lain ikatan priordial yang terbatas lingkupnya untuk meleburkan diri dalam kesatuan bangsa. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa itulah sejarah menjadi sasaran yang amat penting artinya.

Sejarah harus mampu membangkitkan kebanggaan nasional yang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, dan sekaligus dapat merangsang semangat membangun demi terwujudnya cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Atas dasar alasan tersebut, tepatlah sudah kalau Seminar Sejarah Nasional yang kelima ini diselenggarakan di Semarang sebagai salah satu kota perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan dan sekaligus perjuangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pilihan Semarang sebagai kota perjuangan pembebasan dan sekaligus kota persatuan dan kesatuan bangsa merupakan perlambang bahwa dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa itu harus dilandasi oleh

alasan yang kuat dan ilmiah. Karena itu seminar sejarah ke V ini hendaknya berlangsung secara bebas dan ilmiah, akan tetapi jangan lupa pada tujuan utama ialah mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa secara lebih mantap. Sejalan dengan usaha tersebut, pada waktu yang bersamaan diselenggarakan pula pameran perkembangan kebudayaan Indonesia di Museum provinsi Jawa Tengah. Pameran tersebut merupakan salah satu perwujudan usaha pemerintah untuk memperkuat identitas budaya bangsa sebagai salah satu tujuan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan sedunia yang di Indonesia dicanangkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 28 Oktober 1988 yang lalu.

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah benar- benar menaruh perhatian dan dengan segala kesungguhan berusaha mengembangkan kebudayaan sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat GBHN 1988 yaitu antara lain menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan yang berbudaya. Oleh karena itu baik Seminar maupun Pameran hendaknya menjadi sarana komunikasi dan informasi budaya dalam arti luas. Pembicaraan dalam Seminar hendaknya dilakukan secara bebas dan tuntas, akan tetapi hal-hal yang belum pasti dan memerlukan pendalaman serta diperkirakan dapat menimbulkan keresahan sosial sebaiknya di batasi di ruang sidang dan tidak untuk dipublikasikan. Sedang apa yang diperagakan dalam Pameran hendaknya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendalaman, penghayatan dan inspirasi budaya dalam pelaksanaan pembangunan.

Akhirnya dengan mengucap syukur kehadapan Tuhan Yang Kuasa, dan dengan seijin hadirin sekalian. Seminar Sejarah Nasional V dan Pameran Perkembangan Kebudayaan Indonesia dengan resmi saya buka dan semoga dapat berlangsung dengan baik dan berhasil guna bagi masyarakat Indonesia seluruhnya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR v
SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL vii
SAMBUTAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I JAWA TENGAH xii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN xvii
DAFTAR ISI xxi

MAKALAH–MAKALAH 1

A. SUBTEMA UMUM :
1. Beberapa Catatan Tentang Kesetiakawanan Sosial dan Sejarah Perkembangan Bangsa, *oleh Haryati Soebadio* 1
2. Sejarah Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 45, *oleh M. Kharis Suhud* 8
3. Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan, *oleh Ismail* 19

4. Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional, *oleh Sartono Kartodirdjo* 47

B. SUBTEMA INDUSTRIALISASI

1. Pengaruh Modernisasi Teknologi Pertanian Padi Terhadap Masyarakat Pedesaan Menyongsong Era Tinggal Landas: Suatu Pengamatan Terhadap Beberapa Desa di Jawa Timur, *oleh Aminuddin Kasdi* 61
2. Pegadaian Sebagai Dampak Industrialisasi di Dalam Masyarakat: Satu Kajian Awal, *oleh Tri Wahyuning M. Irsyam* 97
3. Industri Sukabumi Sehabis Perang: Potret Samar Sebuah Perkembangan Fisik, *oleh JR. Chaniago* .. 115
4. Industrialiasasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia, *oleh Suyatno Kartodirdjo* 135
5. Agroindustri dan Subsistensi Multikultur, Pajak, dan Kerja Wajib di Vorstenlanden (1850 – 1990), *oleh Suhartono* 148
6. Industri Perkebunan dan Dampaknya pada Masyarakat: Perkebunan Kopi di Keresidenan Kedu 1850 – 1900, *oleh A.M. Djuliati Suroyo* .. 169
7. Sejarah Industri Rokok Kretek Kudus: Survivalisme dalam Jeratan Struktur, *oleh Suharso* 190

HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL V 216

LAMPIRAN 220

BEBERAPA CATATAN TENTANG KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN SEJARAH PERKEMBANGAN BANGSA.

Haryati Soebadio

Istilah 'kesetiakawanan sosial' kini sangat sering kita gunakan. Maka tidak mengherankan, bila ada pihak-pihak yang berkelakar, bahwa'kesetiakawanan sosial' hanya berupa 'slogan politik' saja, tetapi belum tentu ada makna benarnya. Hal itu mungkin timbul akibat diadakannya secara resmi Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, HKSN, yang kita peringati, secara resmi pula, pada tanggal 20 Desember.

Sehubungan dengan seminar sejarah yang dihadapi di sini, boleh digarisbawahi, bahwa kesetiakawanan sosial memang ada kaitannya dengan sejarah bangsa, berarti dengan sendirinya, juga dengan *politik* bangsa. Hal itu tidak perlu mengherankan ataupun dipertanya-tanyakan. Kesetiakawanan sosial tidak lain daripada yang secara internasional disebut *solidaritas* sosial. Mohon diingat, bahwa gerakan pembebasan dari komunisme dan penguasaan Rusia di Polandia, berarti gerakan bertujuan politik, dilakukan oleh kelompok orang Polandia yang menyebutkan diri tergabung dalam perkumpulan bernama "Solidaritas".

Penggabungan sekelompok orang guna melancarkan suatu gerakan dapat dikatakan tidak mungkin terjadi dan berhasil,

bila tidak ada rasa keterkaitan, persamaan pikiran dan tujuan, yang menumbuhkan rasa solidaritas, setiakawan, antara anggota kelompok, yang memang bertujuan untuk bersatu-padu mengadakan gerakan itu. Bila tidak ada solidaritas, kesetiakawanan antara anggota, maka kelompok akan terpecah-belah, hilang kaitan dan juga maknanya, sehingga tidak akan berhasil mencapai tujuannya.

Hal itu pun sudah berkali-kali terbukti dalam sejarah bangsa Indonesia sendiri. Bukti kekuatan persatuan dan kesetiakawanan antar warga bangsa dapat ditunjukkan dalam keberhasilan kita akhirnya merebut kekuasaan dari tangan asing serta mengusir pengusaha asing itu dari wilayah kita. Sebaliknya bukti perpecahan yang mengakibatkan kegagalan dapat juga ditunjukkan dalam sejarah kita, baik di sisi usaha mengusir kuasa asing, maupun di sisi usaha mereka yang semula bergabung untuk meruntuhkan kuasa sah bangsa sendiri di bumi kita.

Dalam pada itu bukti paling nyata mengenai kekuatan kesetiakawanan atau solidaritas antar semua lapisan bangsa kita terjadi pada tahun 1948/1949. Jelasnya, mulai pada tanggal 20 Desember 1948, ketika pejuang-pejuang bangsa kita memasuki daerah pedesaan sekitar Yogyakarta untuk kemudian melancarkan Sarangan 1 Maret. Kejadian itulah yang diperingati dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, HKSN, setiap tanggal 20 Desember. Boleh kita renungkan apa yang terjadi, apabila pada saat itu seluruh rakyat kita tidak bersatu-padu menghadapi sekalian serangan Belanda. Justru karena seluruh rakyat kita di sekitar Yogyakarta, dalam semua lapisannya bersatu-padu, saling membantu, saling membagi apa yang ada pada mereka itu, maka seluruh rakyat kita, bersama pejuang-pejuang bangsa, mendapat kekuatan moril untuk melanjutkan usahanya mengusir kuasa asing dari wilayah kita.

Itulah pada hakekatnya contoh kekuatan manusia, bila terlaksana kesetiakawan, solidaritas, yang kukuh antar semua lapisan masyarakatnya.

Dalam sejarah bangsa sudah berkali-kali diupayakan pengusiran campur-tangan pihak asing dari wilayah kita. Di masa-

masa awal upaya itu belum menjangkau keseluruhan bangsa kita secara nasional. Namun inti maksud untuk tida 3 mperbolehkan kuasa lain daripada kuasa sendiri di dalam wilayahnya, jelas tampak. Namun pada umumnya sekalian usaha gagal. Dan kegagalannya, sebagaimana dalam telaah sejarah kemudian dapat ditunjukkan, kebanyakan disebabkan karena tidak ada persatuan, keterpaduan dan kesetiakawanan di wilayah yang bersangkutan, bahkan terjadi penghianatan, ataupun perpindahan loyalitas ke pihak-pihak yang justru menguntungkan musuh yang dihadapi, acapkali dengan timbulnya perang saudara yang dimanfaatkan oleh kuasa asing, yang semestinya dianggap musuh. Contoh dengan mudah dapat kita sebutkan dalam peristiwa-peristiwa sejarah kita, sehingga tidak perlu dirinci semua secara satu-persatu di sini. Kita ingat saja berbagai perang setempat untuk mengusir kuasa Belanda yang semakin memasuki wilayah kita. Beberapa kali perang seperti itu berawal ataupun berakhir sebagai perang antar saudara sendiri, sehingga secara mudah dimanfaatkan dan menguntungkan musuh yang sedianya atau sesungguhnya mesti dihadapi bersama. Selain dari itu aneka jenis pemberontakan terhadap kuasa kolonial tercatat dalam sejarah kita di daerah pedesaan ataupun yang mulai dalam perusahaan perkebunan. Namun tidak ada yang berhasil. dengan sendirinya perbedaan persenjataan antara kuasa asing dengan bangsa kita sangat berpengaruh. Keadaan beda senjata, yang pada hakekatnya diakibatkan oleh "revolusi Industri" sejak abad ke–19, memang diakui merupakan faktor kuat dalam tumbuhnya kolonialisme secara luas dalam abad ke-19 itu. Namun, perlu diakui. bahwa dalam perang kemerdekaan kita beda persenjataan itu pun terdapat. Akan tetapi persatuan tekad sedemikian keras berbicara sehingga dalam perubahan suasana sesudah PD II – suaranya seketika tertangkap oleh dunia internasional secara menyeluruh. Andaikata bangsa kita bukan memperdengarkan suara persatuan tekad yang cukup keras, maka tujuan perang kemerdekaan mungkin belum tercapai pada saat-saat kita menginginkannya. Suasana dunia, yang sesudah PD II jenuh perang, memang membantu negara-negara yang menginginkan kemerdekaan dan kedau-

latan sendiri. Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat pada negara-negara bekas jajahan yang lain, usaha kemerdekaan tidak selalu tercapai pada saat itu sesuai apa yang diinginkan. Sedangkan justru karena bangsa kita dalam mengangkat senjata berhasil menunjukkan kebersatuan secara mantap, maka di bidang politik perundingan pun suara bangsa didengar secara mantap dalam dunia internasional.

Kenyataan, bahwa tujuan kemerdekaan kita dapat ditangkap oleh pihak musuh, terutama mereka yang melihat keadaan di lapangan, seperti, misalnya, bekas tahanan berbangsa Belanda, dapat dibaca dalam berbagai buku karangan mereka yang sekarang menulis tentang pengalamannya semasa tahanan kita. Prajurit yang sebelum diberangkatkan ke Indonesia diperintahkan untuk menindas pemberontakan kelompok pengacau kecil di Jawa sebagaimana di masa penjajahan selalu dihadapi, ketika di lapangan, dan apalagi setelah menjadi tawanan perang, melihat dari dekat, bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekedar 'pemberontakan kelompok kecil dan pengacau', melainkan benar-benar perang yang diyakini dan dengan tujuan yang nyata, yaitu kemerdekaan bangsa dan kedaulatan negara sendiri. Hal itu mereka sadari dari suasana kebersatuan yang mereka rasakan semasa ditahan.

Dalam kaitan itu pelajaran yang didapat dalam sekalian peristiwa sejarah kita, ialah, bahwa solidaritas sangat perlu, namun juga sangat perlu terhimpun secara cukup meluas. Tidak mungkin kita menghadapi bahaya musuh secara terpisah-pisah dan kecil-kecilan. Perlu tergalangkan kesatuan tekad secara menyeluruh.

Maka kiranya perlu kita sadari, betapa besarnya jangkauan kesetiakawanan atau solidaritas, sebagaimana melibatkan seluruh bangsa kita pada waktu perang kemerdekaan itu, baik untuk bidang politik, maupun dalam pengembangan sosial-budaya bangsa. Kita tidak mungkin menghadapi pembangunan dalam alam merdeka seperti sekarang, apabila rakyat kita secara keseluruhan tidak menunjukkan kebersatuan dan kesetiakawanan dalam melaksanakan dan mendukung perang kemerdekaan kita waktu itu.

Maka, pada gilirannya, dalam alam kemerdekaan sekarang ini, apalagi dalam menghadapi perkembangan di dunia internasional yang menyangkut segala bidang, kiranya perlu disadari pula, serta diyakini sepenuhnya, keperluan mutlak dari kesetiakawanan atau solidaritas bagi kita sebagai bangsa. Dunia internasional di masa kini cukup menunjukkan akibat–akibat buruk dari kurangnya rasa setiakawan antar bangsa sendiri dan antar bangsa-bangsa secara global.

Di dalam perbatasan bangsa kita sendiri cukup banyak masalah yang kita hadapi sebagai akibat langsung maupun sampingan dari pembangunan yang kini terlaksana. Di satu pihak pembangunan kita memang secara nyata berhasil. Tidak ada yang dapat menyangkal keberhasilan itu. Tanggapan dunia internasionai mengenai keberhasilan pembangunan kita cukup nyata dan nyaring. Namun demikian, tidak dapat disangkal pula, bahwa hasil pembangunan yang belum merata sesuai harapan banyak pihak di dalam bangsa sendiri, menimbulkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan.

Di sinilah tampak kepentingan solidaritas, kesetiakawanan sosial yang perlu dikembangkan antara semua lapisan masyarakat kita secara menyeluruh dan seluas-luasnya. Dalam kaitan ini kesetiakawanan sosial terutama diperlukan, karena pembangunan yang keberhasilannya belum merata secara mutlak, telah menimbulkan kesenjangan-kesenjangan sosial yang pada pihaknya menumbuhkembangkan kecemburuan sosial. Memang kecemburuan merupakan sifat manusia yang boleh dinamakan mendasar. Setiap keluarga yang mempunyai anak, menghadapi kecemburuaan antar anak-anaknya, yang seolah-olah timbul tanpa sebab yang nyata. Mungkin dapat dikatakan, di satu pihak, bahwa kecemburuan memang diperlukan, supaya dapat terjadi saingan sehat yang menguntungkan perkembangan anak untuk mampu hidup mandiri selanjutnya. Namun, di lain pihak kecemburuan juga memiliki segi yang negatif, yaitu menumbuhkan rasa permusuhan dari pihak yang menilai dirinya kuang terhadap pihak yang dianggap lebih. Dalam pendidikan di setiap keluarga memang selalu diusahakan untuk sejauh

mungkin, menghilang rasa cemburu antar kakak-beradik. Akan tetapi, justru karena kecemburuan merupakan sifat manusiawi, maka selamanya akan dihadapi segi-segi negatifnya dalam kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. Dan kecemburuan itu jelas akan mendapat kesempatan berkembang dan meluas, apabila terdapat kesenjangan yang terlalu menyolok antara kalangan di dalam masyarakat.

Mengenai kesenjangan dapat dikatakan, bahwa pada hakekatnya ini pun merupakan sifat khas masyarakat manusia. Manusia memang tidak terlahir sama, dalam arti pada dasarnya sudah akan mengalami beda watak, beda kecerdasan dan bakat, di samping lingkungan pun berpengaruh terhadap perkembangannya sebagai manusia. Namun, perbedaan-perbedaan itu perlu diusahakan supaya tidak tumbuh menjadi kesenjangan yang terlampau jauh menyolok.

Dalam menghadapi masalah kesenjangan yang menyolok dan dapat menajamkan kecemburuan, kesetiakawanan, solidaritas antar kelompok dan perorangan, telah terbukti dapat menangani segi-segi negatifnya secara baik.

Contoh dalam perkembangan sejarah bangsa pun dapat memberi kenyataan. pemimpin, secara perorangan atau sebagai kelompok yang berkuasa, baik yang berada di pihak pemberontak, maupun di pihak yang mengamankan kuasa sah, bila terasa bersetiakawan, menunjukkan solidaritas, dengan keadaan atau penderitaan masyarakat, betapa pun juga, telah terbukti mendapat sambutan dan dukungan masyarakat itu. Hal ini terlihat, misalnya, pada orang seperti Kahar Muzakkar, yang semula mendapat dukungan dan bantuan mutlak dari masyarakat sekitarnya, karena ia dinilai sangat membantu dan melindungi masyarakat pengikutnya itu, sekalipun sudah diketahui kesalahan langkahnya. Namun, pada saat ia lupa diri, maka masyarakat yang semula mendukungnya, seketika berbalik, dan kemudian tidak lagi membelanya dalam usaha, yang pada hakekatnya telah diketahui tidak benar. Semula masih saja ia dibela oleh sekelompok pendukung, karena ia dinilai baik memperlakukan mereka itu. Tetapi, kemudian tidak ada lagi

yang merasa segan untuk meninggalkannya menghadapi nasib sendiri. Rupa-rupanya emosi masyarakat paling tajam tersentuh oleh bukti kesetiakawanan sosial dari pihak yang dianggapnya berkuasa atau dilihatnya sebagai pemimpin. Kiranya hal itu yang mesti kita sadari.

Acapkali dikatakan, betapa pentingnya kita belajar dari sejarah bangsa sendiri. Kiranya pelajaran yang paling penting yang kita dapat ialah justru, bahwa dengan kesetiakawanan berhasil mencapai kemerdekaan. Sedangkan, sebaliknya, banyak usaha bangsa kita di masa lampau untuk mematahkan kuasa asing, tidak berhasil, antara lain, karena tidak ada kebersatuan dan solidaritas atau rasa setiakawanan di masyarakat kita sendiri.

Jelas, kiranya, bahwa untuk menghadapi masa depan bangsa, yaitu supaya dapat mencapai era yang kita sebut 'era tinggal landas', kita sangat memerlukan upaya pemerataan yang lebih adil, supaya tidak akan terdapat kesenjangan sosial yang terlampau menyolok, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat membahayakan stabilitas bangsa. Hal itu hanyalah tercapai, bila semua lapisan dapat merasakan kesetiakawanan, solidaritas, sosial dengan sesama bangsanya. Pada dasarnya tuntutan untuk hidup bersetiakawan, menunjukkan solidaritas, tidak lain hanya berarti, bahwa kita harus menyadari hidup di dunia ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk menjalankan fungsi sosial kita terhadap sesama bangsa sendiri, dan umat manusia secara menyeluruh. Namun, tuntutan hidup seperti itu ternyata tidak dapat dilaksanakan tanpa kesadaran dan upaya yang mantap. Kesadaran disertai upaya yang sungguh-sungguh sangat diperlukan guna mampu menghadapi masa depan bangsa yang lebih gemilang.

SEJARAH SEBAGAI SARANA PEWARISAN NILAI 45

M. Kharis Suhud

A. Pendahuluan

Merupakan kehormatan bagi diri saya, untuk dapat memenuhi permintaan Panitia Seminar Sejarah Nasional V yang berjudul "SEJARAH SEBAGAI SARANA PEWARISAN NILAI 45".

Namun satu hal yang perlu para peserta seminar ketahui bahwa saya bukan sarjana dan bukan ahli sejarah, tetapi hanya sebagai seorang warga negara yang pernah memperoleh "kesempatan sejarah" ikut serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia pada periode perang kemerdekaan tahun 1945-1949, dan selanjutnya mendapat kesempatan sejarah pula untuk ikut mengisi kemerdekaan.

Oleh sebab itu tulisan atau sajian yang akan saya berikan, mungkin masih jauh dari harapan Panitia dan para peserta seminar atau mungkin masih terlalu kering, ataupun bobot ilmiahnya masih kurang memadai.

Seminar sejarah Nasional dalam rangka pengkajian sejarah 45 tahun Indonesia Merdeka dengan mengambil tema: "SUMBANGAN SEJARAH DALAM PEMBINAAN BANGSA MENG-

HADAPI ERA TINGGAL LANDAS" momentumnya saya anggap sangat tepat, karena antara lain:

1. Kita telah mampu mewujudkan kerangka landasan pembangunan pada Pelita IV dan pada Pelita V ini akan kita mantapkan sebagai tahap akhir dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Pertama.
2. Belajar dari pengalaman sejarah selama 4 Pelita, kita masih akan dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan yang berat selama Pelita V yang sedang berlangsung ini, dan pada era tinggal landas nanti akan muncul masalah-masalah baru dan tampilnya tantangan-tantangan baru pula.
3. Pelaksanaan Pelita V merupakan tugas yang berat dan sekaligus merupakan babak kritis yang akan menentukan berhasil atau tidaknya kita melaksanakan pembangunan Nasional yang berkesinambungan, sehingga pelaksanaan Pelita V ini sungguh mempunyai arti yang sangat strategis.
4. Sasaran utama pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua akan diciptakan kualitas manusia dan kualitas masyaraakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan bathin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila.
5. Angkatan 45 secara berangsur-angsur secara wajar dan alamiah tengah menuntaskan tugas sejarahnya, sekaligus bertekad untuk mewariskan nilai-nilai dan idealisme kejuangannya guna menjadikan generasi penerus yang tangguh, tanggap, dan tangguh serta mampu mewarisi semangat 45 dalam rangka memikul nasib dan tanggung jawab bangsa di masa depan.

Dari judul topik yang diberikan kepada saya, dalam batasan kemampuan pengetahuan saya, yang sekali lagi, hanya sebagai seorang warga negara yang pernah mendapat kesempatan sejarah seperti yang saya utarakan di atas, maka saya akan coba

mengungkapkan secara selayang pandang saja apa yang saya ketahui, apa yang saya hayati, apa yang saya rasakan, dan apa yang pernah saya alami serta fungsi dan relevansi sejarah, khususnya "sejarah perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia" sebelum dan sesudah Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

B. Fungsi dan Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dialami oleh setiap bangsa di muka bumi ini.

Suatu adagium yang tidak bisa kita bantah kebenarannya, bahwa fungsi sejarah dimanapun dan kapanpun dapat diangkat sebagai pedoman dan guru yang bijaksana dalam mengisi lembaran-lembaran sejarah berikutnya. Dalam kerangka berpikir "Trimatra" yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan, kita memang tidak boleh meninggalkan makna dari peristiwa-peristiwa sejarah itu, karena sejarah mampu sebagai alat perjuangan, mampu sebagai sarana untuk memperkuat akar persatuan dan kesatuan bangsa, maupun sebagai sarana untuk mengobarkan semangat Patriotisme dan Nasionalisme serta semangat juang dalam upaya mencapai cita-cita bangsa seperti yang pernah kita buktikan pada periode perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, serta mampu sebagai sarana untuk menumbuhkan dan menebalkan kebanggaan berbangsa. Mengalir dari fungsi dan relevansi kesejarahan tersebut maka kita harus mampu memetik apinya sejarah itu sebab bagi suatu bangsa yang berkepribadian, dan ingin tumbuh menjadi kuat dan disegani, perlu belajar dan memetik apinya sejarah, karena sejarah hakekatnya dapat merupakan sumber ilham yang tidak pernah kering, sumber inspirasi yang tak pernah padam, sumber aspirasi yang tak pernah hilang. Mampu-tidaknya bangsa tumbuh menjadi kuat dan disegani sesuai dengan jalan yang dipilihnya, akan

sangat ditentukan oleh mampu-tidaknya bangsa itu belajar dan berdialog dengan sejarahnya. Belajar dari kegagalan dan keberhasilan, belajar dari keganasan dan kearifannya, dari keberingasan dan kelembutannya, serta belajar dari masa kejayaan dan masa surutnya.

Dari berbagai peristiwa dan pengalaman sejarah, maka kita dapat mengetahui posisi kita sekarang ini, ke arah mana akan dituju, kekuatan apa yang telah dan akan kita miliki, kendala dan tantangan apa yang akan timbul dan jawaban apa yang harus diberikan.

Dalam kaitan dengan aspek kesejarahan ini para perintis kemerdekaan kita berusaha membangkitkan kebanggaan dan kebesaran bangsa dengan mengetengahkan kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Namun akhirnya kita ketahui bahwa kerajaan-kerajaan tersebut tenggelam, yang disebabkan oleh rapuhnya kekuatan-kekuatan dari dalam tubuh kerajaan itu sendiri maupun unsur-unsur kekuatan dari luar. Ini semua memberikan pelajaran bagi generasi-generasi berikutnya bahwa kadang-kadang unsur-unsur dan peristiwa-peristiwa yang timbul dari luar tubuh bangsa itu akan sangat dominan. Oleh sebab itu kita perlu sekali mengetahui dan mempelajari peristiwa-peristiwa/perkembangan dunia dengan segala aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa kita. Adanya anggapan/pepatah yang menyatakan bahwa "sejarah itu berulang" memang dirasakan memang ada benarnya seperti misalnya keadaan dunia sekarang ini bila dibandingkan dengan tahun-tahun semasa Perang Dunia ke-2.

Setelah kerajaan-kerajaan (Sriwijaya, Majapahit, Mataram) tenggelam maka bangsa kita terus-menerus menjadi negara jajahan dan bangsa kita terus-menerus berada di alam kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan hampir tiga setengah abad.

Perlawanan-perlawanan bersenjata terhadap kaum penjajah (yang lebih bersifat kedaerahan) seperti perang Diponegoro,

Imam Bonjol, Pattimura, Hassanuddin, Cut Nyak Dien dan lain-lain selalu mengalami kegagalan, sehingga tidak mampu mengangkat harkat, martabat dan harga diri bangsa Indonesia.

Belajar dari kegagalan yang dialami oleh pendahulu-pendahulunya maka perjuangan berikutnya tidak melalui perlawanan bersenjata akan tetapi melalui jalan pendidikan seperti yang dilakukan oleh pergerakan Budi Utomo tahun 1908, dengan pangkal tolak berpikir bahwa dengan memberantas kebodohanlah maka perjuangan bangsa akan berhasil. Perjuangan lewat pendidikan ini akhirnya dapat membangkitkan semangat patriotisme, nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang senasib sepenanggungan, sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda tahun 1928. Berbarengan dengan itu timbullah partai-partai politik yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Puncak dari pergerakan perjuangan tersebut adalah Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi ini hanya sekali terjadi, oleh karena itu mempunyai nilai yang tak terhingga ampuhnya bagi bangsa Indonesia. Sehari setelah Proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 disusul dengan "Deklarasi" yang berwujud pengesahan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam lintasan sejarah Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya telah tumbuh kesadaran akan konsepsi atau paham bagi bangsa kita yang disebut paham integralistik. Integralistik adalah suatu semangat yang mengatasi paham golongan, serta mendahulukan kepentingan umum atau bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan perorangan.

Dalam wujud yang lebih nyata, paham dasar ini telah menumbuhkan kesadaran masyarakat/Bangsa Indonesia untuk melahirkan sosok tubuh yang ternyata telah berkembang menjadi suatu kekuatan yang melahirkan negara kebangsaan Indonesia. Paham integralistik ini telah terangkat kepermukaan menjadi

nilai '45 yang tidak boleh ditinggalkan, karena nilai *inilah yang telah melahirkan Kebangkitan Nasional pada awal abad ke-20. Nilai ini pula yang mencetuskan Sumpah Pemuda 1928 dan mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai ini pula yang melahirkan negara Kebangsaan Indonesia.*

Setelah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita masih dihadapkan dengan berbagai cobaan dan ujian.

Masa antara tahun 1945 sampai tahun 1965 bangsa kita diuji kemampuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Masa ini ditandai oleh bermacam-macam usaha untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, sehingga dalam masa ini nampaknya Bangsa Indonesia berada dalam suasana mencari-cari bentuk jati dirinya. Hal ini mengakibatkan bahwa banyak permasalahan yang sebenarnya tidak sejalan atau bertentangan dengan Pancasila terangkat ke permukaan.

Suasana persatuan dan kesatuan bangsa sedikit banyak telah diuji dengan berbagai pemberontakan, baik yang bersifat separatisme kedaerahan ataupun yang bersifat ideologis politis.

Berdirinya partai-partai politik sebagai konsekuensi dari maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian dari proses demokratisasi, namun di lain pihak berdirinya partai-partai justru mengakibatkan pengkotak-kotakan golongan berdasarkan pada kelompok aliran ideologi masing-masing. Hal ini nampaknya ikut mempertajam proses pertarungan kekuatan-kekuatan politik dalam usahanya memperoleh ataupun merebut kekuasaan. Partai-partai politik itu secara sadar *mengacu kepada pandangan ideologinya* serta kepada tokoh-tokoh masing-masing daripada kepada dasar negara ataupun kepada ideologi nasional. Suasana ini berkembang menjadi konflik ideologis dan memuncak dengan terjadinya konflik ideologis secara terbuka dalam Sidang Konstituante di Bandung tahun 1956 – 1959.

Hal itu menyebabkan terjadinya instabilitas. Situasi yang demikian inilah yang menjadi salah satu dasar dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945. Dengan Dekrit Presiden itu krisis status konstitusional dapat diakhiri, tetapi Dekrit itu ternyata belum berhasil mengatasi konflik ideologi dan beberapa masalah politik yang telah ada.

Suasana setelah Dekrit Presiden ternyata berkembang dengan semakin tajamnya pengkotak-kotakan, baik berdasarkan ideologi maupun kepentingan politik. Suasana revolusioner, jor-joran manipolis, saling mencurigai mewarnai suasana antara tahun 1959 sampai tahun 1965.
Demokrasi terpimpin yang diharapkan dapat mengembangkan demokrasi justru berubah menjadi pemupukan kekuasaan pada diri pemimpin negara.

Dengan kata lain dalam masa ini Pancasila dan UUD '45 yang ada, tidak dijadikan acuan nasional. Pancasila tidak dijadikan landasan pokok dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, bahkan sebagai gantinya muncul thema-thema revolusioner dan nasakom.

Padahal Pancasila seharusnya dibawakan menurut wataknya yang integratif, berkeselarasan dan berkekeluargaan. Begitu pula demokrasi yang kita anut yaitu demokrasi Pancasila tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsi Demokrasi Pancasila seharusnya menjadi sarana untuk menentukan tujuan sarana untuk melestarikan pola kehidupan dan kenegaraan sarana untuk memadukan bangsa, sarana untuk meredakan ketegangan, dan sarana untuk menapis masukan (input) yang perlu diserap bagi kemajuan. Di samping itu telah pula dilupakan aspek-aspek Demokrasi Pancasila baik aspek wujudiah, maknawiah, organisasi, kaidah, tujuan maupun aspek semangat.

Suasana kalut yang demikian itu telah menjadi dasar utama dari kekuatan-kekuatan Orde Baru untuk segera memperbaiki situasi dan mengembalikan bangsa Indonesia ke rel yang sebenarnya, dengan satu tekad untuk melaksanakan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan.

C. Semangat dan Nilai-Nilai 45

Sebagaimana yang telah saya ungkapkan di muka bahwa Proklamasi Kemerdekaan 1945 yang hanya terjadi sekali saja, hakekatnya merupakan titik kulminasi dari rangkaian perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun sebelumnya melalui puncak-puncak manifestasi pergerakan seperti apa yang dinamakan pergerakan "Budi Utomo", yang disebut "Kebangkitan Nasional" tahun 1908 dan "Sumpah Pemuda" tahun 1928. Perjuangan pergerakan kemerdekaan itu telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini jelas bahwa kemerdekaa yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya apabila kita amati dan kita pahami secara mendalam dan menyeluruh, maka semangat dan nilai 1945 akan terlihat dan tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang hekekatnya merupakan penuangan jiwa proklamasi kemerdekaan.

Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila itulah merupakan sumber aspirasi dan motivasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia untuk tetap hidup dalam suasana merdeka lahir dan bathin yang telah diperjuangkan sejak dahulu kala. Pembukaan UUD 1945 yang telah dirumuskan secara padat dan hidmat mengandung makna yag sangat dalam serta mempunyai nilai yang universal dan lestari.

Apabila kita tapis peristiwa-peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat,adil dan makmur seperti yang terkandung di dalam Pembukaan Un-

dang-Undang Dasar 1945, maka kita dapat temukan mutiara-mutiara atau nilai-nilai yang sangat berharga antara lain :

1. **Nilai Idiologis** : yang mengetengahkan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak bisa dipisahkan dari jiwa dan pandangan hidup bangsa kita yaitu Pancasila dan UUD 1945, sebab negara yang dilahirkan oleh Proklamasi Kemerdekaan adalah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya kobaran api semangat para pejuang yang sanggup mempertahankan Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945 harus kita warisi dan harus mampu kita wariskan kepada generasi penerus.

2. **Nilai politis** : bahwa para pejuang Angkatan 45 ternyata dapat "survive" dan pantang menyerah dalam perang kemerdekaan, berkat kobaran patriotisme, nasionalisme, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tanpa mempersoalkan asal-usul, daerah, suku, status sosial, agama atau golongan. Nilai-nilai inipun wajib kita hayati dan kita lestarikan serta kita wariskan kepada generasi penerus.

3. **Nilai historis** : membuktikan bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah atau pemberian dari bangsa lain, tetapi direbut dari tangan penjajah dengan perlawanan yang bersemboyankan "merdeka atau mati" yang dilakukan oleh tentara bersama seluruh rakyat dalam satu untaian kemanunggalannya. Karena itu manunggalnya tentara (ABRI) dan rakyat merupakan syarat mutlak, serta harus kita lestarikan eksistensinya.

4. **Nilai edukatif** : bahwa nilai kejuangan 45 harus mampu menjadi wahana untuk meningkatkan motivasi dan kobaran

semangat bagi generasi penerus, untuk mampu mewarisi nilai-nilai dan semangat 45 agar menjadi generasi yang tangguh, penuh idealisme perjuangan serta dapat menjadi pejuang-pejuang bangsa yang selalu siap membela dan membangun bangsanya sebagai pengamalan Pancasila dalam era tinggal landas menuju masyarakat Pancasila yang adil dan makmur.

D. Penutup

Prestasi perjuangan dan pembangunan di segala bidang yang telah dapat kita capai hingga sekarang ini, di mana kita semua terlibat langsung maupun tidak langsung di dalamnya, harus kita amankan bersama, dan harus dapat kita pelihara dengan sebaik-baiknya, untuk selanjutnya kita kembangkan dan kita tingkatkan, baik kwalitasnya dalam rangka menghadapi dan memenuhi tuntutan sejarah dan masyarakat yang dinamis dan makin berkembang, sekaligus dalam rangka menghadapi berbagai kendala tantangan dan cobaan yang makin hari makin bertambah komplek sebagai akibat logik dari keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dari uraian selintas seperti terungkap di atas, maka diharapkan agar aspek kesejarahan Bangsa Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan yang pernah dan telah menjadi dasar nilai juang angkatan '45 dan yang mendahuluinya, melalui berbagai jalur, dapat dijadikan acuan sekaligus dapat merupakan api berkobarnya semangat juang para generasi penerus, sehingga fungsi sejarah sebagai sarana pewarisan nilai-nilai '45 dapat menjadi kenyataan.

Demikianlah, sekedar apa yang mampu saya sampaikan dalam forum seminar ini, dengan harapan mudah-mudahan para Generasi Penerus mampu mewarisi dan melestarikan semangat dan nilai-nilai juang '45 dalam menyongsong era tinggal landas.

Terima kasih.

PERANAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN

Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan

Ismail

Pendahuluan

Mengawali seminar ini, sebagai insan Pancasilais yang senantiasa iman dan taqwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmad dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menyertai acara Seminar Sejarah Nasional dalam rangka Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka yang berlangsung tanggal 27–30 Agustus 1990 di Semarang ini.

Hadlirin Sekalian yang berbahagia.

Ketika Saudara Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya tertanggal 26 Juni 1990 Nomor 211/F2/U.90 meminta kesediaan saya untuk bertindak sebagai pembicara dalam seminar ini, maka ada empat pertanyaan pokok yang menuntun diri saya untuk menyusun makalah ini,

Pertama, *pokok persoalan apakah* yang harus saya bahas yang kiranya dapat berfungsi sebagai titik temu perhatian di antara para hadlirin sekalian.

Kedua, *sumbangan pikiran apakah* yang harus saya kemukakan agar sub-stansial dapat merupakan pengungkapan sesuatu yang relatif baru, utamanya guna memberikan keluasan perspektif dan cakrawala berpikir bagi kita bersama.

Ketiga, dengan *analisis yang bagaimana* yang harus saya gunakan agar apa yang saya kemukakan mampu mempertemukan dunia konsepsi mereka yang berkecimpung dalam bidang terapan (praktisi) dan mereka yang bergumul dengan ilmu pengetahuan (ilmuwan).

Keempat, *implikasi apa yang diharapkan timbul* dari apa yang saya kemukakan tadi, terhadap perubahan kehidupan yang ingin dicapai kelak.

Setelah merenungkan empat permasalahan tersebut, bahwa suatu uraian tentang "Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan", utamanya yang menyangkut Peranan Sejarah Dalam Pembangunan kiranya *dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut.*

Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama Peran Sejarah Dalam Pembangunan, utamanya dalam masa-masa transisi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern; dari masyarakat agraris yang siap menyongsong era industrialisasi dan tinggal landas, masalah ini senantiasa *menjadi titik perhatian kita yang utama.*

Kedua, pokok permasalahan tadi kaya dengan *alternatif nilai, strategi* dan *indikator* yang barangkali belum banyak terungkapkan.

Ketiga, pokok permasalahan tersebut dapat dipecahkan dan disajikan dalam *derajad middle range (jalan tengah)* sehingga dapat berfungsi sebagai titik temu antara praktisi dan teoritisi. Dan akhirnya permasalahan tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan, utamanya yang menyangkut Peranan Sejarah

dalam Pembangunan, dapat mendorong kita untuk berpikir *introspektif, reflektif* dan mudah-mudahan proyektif di dalam menindak lanjuti serta menapaki arus dinamikanya pembangunan lebih lanjut.

Hadlirin sekalian yang berbahagia.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu yang lalu, kita telah berhasil *merampung tuntaskan pembangunan lima tahun yang keempat*, dan saat sekarang kita memasuki tahapan pelaksanaan Pelita V.

Apabila ditinjau dari kesinambungan pembangunan yang telah dilaksanakan, sejak kelahiran Orde Baru sampai sekarang, Pelita V merupakan bagian dari rangkaian usaha-usaha pembangunan yang berkelanjutan.
Dengan demikian kita dapat *menyaksikan tahapan dan peningkatan* kemajuan yang telah kita capai dalam pembangunan selama ini, baik dalam skala nasional maupun di tingkat daerah.

Berbagai masalah dan hambatan telah kita alami dalam tahun yang lampau, namun dengan jerih payah yang telah kita curahkan bersama secara nasional semua itu berhasil diatasi atau sedang kita selesaikan. Keberhasilan pembangunan yang telah diraih sampai sekarang telah menjadi modal yang sangat berharga untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari arah pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam GBHN, maka Pelita V *mempunyai kedudukan yang sangat penting*, karena pada akhir Pelita V harus sudah teripta landasan yang kuat bagi bangsa kita untuk tumbuh dan berkembang terus sehingga dalam Pelita VI pembangunan Indonesia dapat memasuki proses tinggal landas untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Untuk dapat membahas lebih lanjut judul yang diangkat dalam forum ini, kiranya perlu ada satu bahasa dalam memberikan arti pentingnya *Peranan Sejarah Dalam Pembangunan*, se-

iring dengan laju dinamikanya pembangunan berikut hasil-hasil yang dicapai selama empat Pelita ini. Dan dari sanalah diharapkan dapat kita temukan upaya-upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan sejarah, untuk menopang suksesnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, serta implementasinya di Jawa Tengah ini.

Dengan alur pikiran tersebut, maka uraian saya ini akan disampaikan dengan sistimatika sebagai berikut :

Kesatu : PERANAN SEJARAH DAN PEMBANGUNAN.

Kedua : PERLUNYA KESADARAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN.

Ketiga : MENARIK PELAJARAN DARI SEJARAH : PERLUNYA MASYARAKAT YANG BERKETAHANAN DALAM PEMBANGUNAN.

Keempat : REFLEKSI KESEJARAHAN DALAM PEMBANGUNAN MELALUI STRATEGI WAWASAN JATI DIRI DI JAWA TENGAH.

Kelima : PENUTUP.

I. PERANAN SEJARAH DAN PEMBANGUNAN

Berbicara tentang peranan sejarah dan pembangunan, *memang* merupakan sesuatu yang tidak boleh tidak harus terus menerus diupayakan sebagai suatu nilai *intrinsik* yang mempunyai nilai yang teramat penting dan menentukan. Sebagaimana kita ketahui bersama Garis-garis Besar Haluan Negara *(GBHN)* telah menggariskan apa yang harus dicapai oleh pembangunan nasional :

"Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia".

Dalam hal ini manusia Indonesia seutuhnya, yang merupakan perwujudan atau citra ideal manusia Indonesia, digambarkan sebagai berikut :

"... pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah ... melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya ... keşelarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antar bangsa-bangsa ... keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan akhirat".

Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia menuntut keseimbangan multidimensional pembangunan nasional. Gambaran manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana digariskan dalam GBHN tadi, *menghendaki keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pelbagai dimensi monodualistik sifat manusia* : keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kehidupan jasmani dan rokhani, antara kehidupan fisik dan psikis, antara hakikinya sebagai individu dan warga masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya harus mencakup pelbagai matra manusiawi seperti : pembangunan fisik, mental intelektual, emosional, moral, kewarganegaraan, sosial yang kesemuanya berorientasi pada kaidah negara yang fundamental Pancasila dan UUD 1945.

Dengan mengacu kepada pengertian Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya, dengan demikian dimensi pembangunan berspektrum luas, mencakup mulai dari sekedar pemberian pelayanan sosial (social services), sampai pada aspek-aspek yang lebih mendasar seperti memperkuat bangunan struktur kehidupan sosial masyarakat dan ikatan keluarga, mengembangkan sikap percaya pada diri sendiri dan sebagainya.

Berkaitan dengan itu Ilmu Sejarah juga mengajarkan kepada kita, bahwa hari depan tiap bangsa tidak berkembang dalam suatu vacuum. Melainkan berkembang dari realitas keadaan sekarang. Dengan lain perkataan, hari depan berkait erat kesinam-

bungannya dengan hari sekarang. Dan hari sekarang berkait erat pula kesinambungannya dengan hari kemarin. Jelasnya, antara hari kemarin dengan hari sekarang dan dengan hari depan ada suatu kaitan tali menali kesinambungan.
Itulah yang diajarkan oleh ilmu sejarah kepada kita, yaitu bahwa pada *hakekatnya Ilmu Sejarah berwatak tridimensional,* dalam waktu yang mengalir tanpa henti-hentinya, yaitu kesinambungan antara hari *kemarin, hari sekarang* dan *hari depan.*

Sudah barang tentu pusat perhatian ilmu sejarah adalah "The Past", adalah hari kemarin. Bidang penyelidikannya adalah hari kemarin pula, tanpa batas, mulai dari zaman pra-sejarah, dan mulai Zaman proto-sejarah, Zaman kuno dan Zaman baru, sampai ke Zaman Modern.

Ilmu Sejarah *mencatat dan mengkoleksi segala kejadian-kejadian masa lampau yang penting-penting, kemudian menseleksi mana dari kejadian-kejadian itu yang mempunyai daya pengaruh menentukan (decisive), mana yang mempunyai daya pengaruh dominan, dan mana yang mempunyai daya pengaruh besar, cukupan dan kecil, terhadap perkembangan selanjutnya.*

Pada saat fakta-fakta sejarah itu dikoleksi dan kemudian diseleksi untuk kemudian dirangkaikan dalam suatu berita dan cerita, maka ilmu histori memasuki bidang historiografi, yaitu bidang penulisan sejarah. Bahan-bahan bakunya diambil dari prasasti-prasasti kuno dan arsip-arsip kuno serta modern. Bahan-bahan penunjangnya diambil dari hasil ilmu *archeology* (studi tentang penggalian bumi purbakala), hasil ilmu *anthropology* (studi tentang pertumbuhan manusia sejak purbakala), hasil *ilmu paleonthology* (studi tentang fossil-fossil) dan ilmu penunjang lainnya.
Kesemuanya dikaitkan dengan *"common sense", logika* dan *imajinasi* oleh penulisnya.

Dengan demikian, maka jelaslah kiranya, bahwa antara histori dan historiografi ada kaitannya, tetapi juga ada perbedaannya. Salah satu dari pada perbedaan yang menonjol ialah, bahwa apabila fakta-fakta *histori lebih banyak mengandung*

obyektivitas, maka cerita-cerita historiografi lebih banyak berkadar subyektivitas. Yang terakhir ini tentunya ada hubungannya dengan falsafah hidup serta kepribadian si penulisnya.

Mengingat adanya perbedaan antara histori dan historiografi, serta adanya kaitan kesinambungan antara hari depan dengan hari sekarang dan dengan hari kemarin, sebenarnya sudah menyentuh salah satu isi pokok apa yang kita namakan kesadaran sejarah itu.

Kesadaran sejarah adalah lebih dari sekedar mengetahui fakta-fakta sejarah. *Kesadaran sejarah memang harus dimulai dengan mengetahui fakta-fakta sejarah.* Malahan ada kalanya harus pula pandai menghafalkan kronologi tahun-tahun kejadian dalam sejarah itu. Tanpa adanya ingatan yang kuat akan kejadian-kejadian dimasa lampau kita tidak dapat mengetahui sejarah. Meminjam pendapat seorang ahli, secara analogi maka sejarah dapat diberi definisi sebagai ingatan kemanusiaan yang tercatat.

Namun pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah saja, dan ingatan akan adanya fakta-fakta itu saja, belum menjamin kesadaran sejarah. Kesadaran atau *"consciousness"*, adalah lebih dari itu. Ia mencakup segala cipta-rasa-karsa kita yang bersemayam dalam hati nurani kita.

Kesadaran sejarah adalah *pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah, plus pengetahuan tentang hubungan sebab-musababnya antara fakta-fakta itu.* Kemudian kesadaran sejarah meningkatkan alam pikiran kita kearah pengetahuan adanya hukum-hukum tertentu dalam perkembangan sejarah itu, dengan segala logika dan konsekuensinya. Ahirnya kesadaran sejarah juga harus pandai mengisi hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam segala perkembangan sejarah itu dengan segala cermin dan pelajarannya untuk masa sekarang dan masa depan.

Pokoknya kesadaran sejarah mencakup *pertama*, pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah serta hubungan casualnya; *kedua*, pengisian alam pikiran kita dengan logika; *ketiga*, pening-

katan hati nurani kita dengan hikmah kearifan dan kebijaksanaan, untuk menghadapi masa-masa sekarang dan masa depan dengan belajar dan bercermin kepada pengalaman-pengalaman masa lampau.

Dengan begitu *kesadaran sejarah* adalah suatu sikap kejiwaan atau *"mental attitude" dan "state of mind , yang merupakan kekuatan untuk ikut aktif dalam proses dinamikanya sejarah.* Maknanya ialah, bahwa semua kejadian didalam sejarah itu *mengandung pelajaran,* dan bahwa kita semua selalu menjadi kebijaksanaan setelah ada suatu peristiwa sejarah terjadi. Kita bukan keledai yang akan tertumbuk dua kali kepada tiang dan batu yang sama. Tetapi justru untuk bijaksana lebih dulu, sebelum sesuatu peristiwa terjadi, itulah hikmah kearifan kesadaran sejarah.
Kita tidak akan meninggalkan sejarah, oleh karena sejarah berjalan terus dengan penghidupan kita. Tanah tumpah darah merupakan suatu kesinambungan, dan kita semua adalah pekerja yang membanting tulang untuk kebesarannya. Dari zaman lampau kita menerima kekuatan yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, dari zaman lampau kita menerima niat tujuan dan dorongan keberanian untuk hari depan. Mari kita menyadari tanggung jawab kemerdekaan kita, agar kita makin patut menerima kehormatan sebagai bangsa Indonesia.

Dari kedua kutipan di atas jelaslah kiranya bahwa kesadaran sejarah dapat merupakan motor penggerak bagi pembangunan.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan kita 45 tahun yang lalu, maka hari depan Indonesia yang kita cita-citakan bersama mencakup *tiga kerangka,* yaitu :

Pertama : *Negara Kesatuan* dan Negara Kebangsaan dalam bentuk Republik yang demokratis, dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke.

Kedua : *Masyarkat yang adil dan makmur,* materiil dan spirituil, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu.

Ketiga : *Dunia Internasional Baru*, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; serta berlandasan persahabatan dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia - Afrika dan khususnya dengan negara-negara tetangga dekat.

Kita semua mengetahui, bahwa sebagian dari cita-cita itu sudah tercapai; seperti umpama Negara Rebublik Kesatuan dan Negara Kebangsaan dari Sabang sampai ke Merauke, bersatu dan berdaulat. Cita-cita itu bukan hari depan Indonesia lagi. Melainkan sudah menjadi kenyataannya hari sekarang, dan juga sudah lama masuk dalam hari kemarin.

Kita semua juga mengetahui, bahwa Dunia Internasional Baru yang kita cita-citakan dulu itu, kini sebagian telah tercapai. Sekalipun jauh belum seluruhnya, namun berkat Konperensi AA Bandung maka banyak negara-negara Asia - Afrika telah memperoleh kemerdekaannya, dan dengan demikian salah satu sumber ketegangan dunia yang membahayakan perdamaian Internasional dapat diberantas. Demikian juga, persahabatan kita dengan negara-negara tetangga dekat kita serta dengan negara-negara Asia - Afrika dan lain-lainnya dari Dunia Ketiga telah kita rintis dan kita tingkatkan, bersamaan dengan pemeliharaan persahabatan dengan semua negara lainnya di dunia ini. Dengan lain perkataan, sebagian dari cita-cita di bidang luar negeri jelas bukan hari depan lagi bagi Indonesia. Melainkan sudah menjadi kenyataannya hari sekarang, dan malahan telah menjadi bagian dari hari kemarin.

Yang menjadi hari depan Indonesia adalah cita-citanya tentang masyarakat adil dan makmur, materiil dan spirituil, dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, dimana seluruh rakyat kita hidup aman dan tenteram, kuat dan sentosa, rukun dan damai.

II. PERLUNYA KESADARAN SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN

Kenyataan menunjukkan bahwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak selamanya dihiasai oleh keberhasilan yang gilang gemilang. Kita juga harus mengakui bahwa, *perjuangan suatu generasi tidak selamanya juga menghasilkan sukses besar.* Sebaliknya mengingat pasang surutnya perjuangan. sejarah kita memuat lembaran-lembaran yang diwarnai oleh tantangan, kelemahan dan bahkan juga kegagalan.

Oleh karenanya, kita perlu berupaya agar bangsa Indonesia tetap menjadi kuat dan sentosa. Jelasnya, pada penyelenggara negara, para pemimpin masyarakat dan segenap kekuatan sosial politik harus tetap bersikap wajar ketika mereka mencapai sukses; tetapi juga *tetap memiliki semangat juang yang tinggi pada saat-saat bangsanya mengalami masa yang sulit dan rawan.*

Kita yakin bahwa bangsa Indonesia akan berhasil menciptakan masyarakat adil makmur yang berkeadilan sosial, asalkan kita yang diserahi tugas melaksanakan manajemen nasional benar-benar melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, bertekad membela kepentingan rakyat, benar-benar memantapkan demokrasi Pancasila, sehingga rakyat secara bergairah berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Oleh karenanya mengingat uraian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa kita semua perlu memiliki kesadaran sejarah dan juga berupaya untuk menarik pelajaran dari pengalaman dimasa lampau, baik pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif.

Sikap yang demikian, dibarengi oleh kesediaan mawas diri, diperlukan untuk melahirkan gagasan dinamis yang membawakan kemajuan dan pembaharuan. Dengan perkataan lain, dari sejarah bangsa Indonesia sendiri itulah kita dapat menggali kekuatan-kekuatan untuk menjawab tantangan dan mengatasi hambat-

an, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang merupakan dampak dari percaturan politik internasional.

Sebagai bahan untuk mencapai hasil positif dalam usaha memetik pelajaran dari pengalaman sejarah, dibawah ini dikutip beberapa pengertian yang berasal dari para ahli yang berbunyi sebagai berikut.

"Fakta-fakta mengenai sesuatu, baik mengenai kejadian atau mengenai sikap pelaku politik, pada hakekatnya timbul dalam pikiran pengamat atau sejarawan. Oleh karenanya dapat disebut subyektif. Namun agar permasalahannya dapat dipelajari secara obyektif, maka fakta-fakta itu perlu ditempatkan dalam eksistensi yang merdeka diluar pikiran emosional dari manusia yang bersangkutan. Dengan demikian akan diperoleh pengetahuan dan penilaian yang tak memihak dan benar, bebas dari reaksi pribadi dari seseorang".

Mengingat pendapat tersebut dan agar upaya memetik pelajaran dari pengalaman di masa lampau efektif, pembahasan persoalan-persoalan, termasuk mengenai cara berpikir serta perilaku para pelaku politik dalam kurun waktu yang bersangkutan, *akan dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan situasi politik, kondisi masyarakat, dan faktor-faktor obyektif lainnya.*

Kita semua menyadari bahwa riwayat dari suatu generasi tidaklah berdiri sendiri. Sebaliknya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia *mempunyai sifat kesinambungan.* Kongkretnya, lahirnya dan peranan *Angkatan 66* tidak dapat dipisahkan dari *prestasi Angkatan 45* yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Tingginya semangat perjuangan *Angkatan 45* merupakan kelanjutan dari rintisan jalan dari *Angkatan 28*, khususnya prakarsanya hingga melahirkan prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan bahwa kematangan berpikir dari Angkatan 28 merupakan peningkatan dari jiwa Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh para pemimpin Pergerakan Kebangsaan *sejak tahun 1908.*

Berdasarkan suatu asumsi bahwa proses sejarah seperti dilukiskan di atas itu mengandung pengalaman-pengalaman yang berharga sebagai bahan pelajaran, maka dapatlah disimpulkan bahwa generasi penerus perlu memiliki kesadaran sejarah.

Demikian pula dibarengi dengan *sikap mawas diri generasi Angkatan 45 yang menyerahkan tugas-tugasnya dan fungsi kepemimpinan kepada generasi penerus, harus menunjukkan balans dari karyanya,* baik mengenai segi-segi positif maupun kelemahan-kelemahan yang telah terjadi di waktu-waktu yang silam. Dengan demikian generasi penerus akan memperoleh bekal, baik mengenai pemikiran maupun mengenai perilaku yang bermanfaat.

Jika kita mengadakan penilaian terhadap sikap dan perilaku dari pelaku-pelaku politik dalam suatu kurun waktu yang telah lewat, kita seyogyanya perlu menerapkan suatu kode etik. Artinya hal itu perlu dilakukan secara obyektif dan sejauh mungkin bebas dari pemikiran serta sikap subyektif dan emosional.

Presiden Suharto pernah menegaskan mengenai pentingnya sikap mawas diri, yang perlu diterapkan demi tercapainya hasil-hasil perjuangan. Gagasan Kepala Negara itu berbunyi sebagai berikut.

"Kita harus mampu menggali dan memelihara kekuatan yang telah membuat kita mencapai hasil-hasil perjuangan di masa lampau. Kita juga harus *berani mawas diri* seraya mengakui kekurangan dan kelemahan kita di masa silam, yang telah membuat perjuangan kita belum mencapai sasaran yang kita harapkan".

Jelaslah kiranya bahwa isi sambutan tertulis Presiden Suharto termaksud, mengandung suatu anjuran agar kita semua berani mawas diri sewaktu mengkaji kesalahan dan kelemahan kita dimasa silam.

Dengan sikap mental yang bebas dari pemikiran subyektif dan emosional dalam menilai keadaan negara dan masyarakat serta pelaku-pelaku politiknya, *diharapkan agar dapat ditemu-*

kan butir-butir pemikiran jernih dan gambaran mengenai perkembangan negara dan masyarkat yang tepat, untuk mencegah jangan sampai terulang kembali suatu kegagalan yang mau atau tidak mau akan dihadapkan pada generasi mendatang.

Dalam arti itulah kita memberikan makna kepada sejarah kita. Dalam arti itu pula kita perlu memiliki kesadaran sejarah seperti dijelaskan diatas.

Untuk dapat merealisasikan tujuan nasional seperti diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, disamping diperlukannya kemandirian manusia dan kualitas kehidupan masyarakat, kita semua khususnya generasi penerus, *juga harus memiliki kemampuan untuk memetik pejajaran dari pengalaman di masa lampau.* Artinya, kita perlu memanfaatkan pemikiran, sikap dan perilaku dari generasi pendahulu sebagai contoh dari suri tauladan, sedangkan kesalahan atau kelemahan perlu dicegah supaya tidak terulang kembali.

Generasi penerus tentunya akan menyadari bahwa menjelang datangnya tahun 2000-an mereka harus sudah siap untuk melanjutkan perjuangan Angkatan 45 guna mewujudkan cita-cita nasional yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Bahan-bahan seperti dijelaskan diatas itu sangat diperlukan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau untuk memanfaatkan pemikiran, sikap, dan perilaku dari generasi terdahulu yang positif, sebagai contoh dan suri tauladan.

Jika generasi penerus mampu untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia-manusia Pancasilais yang mandiri; jika mereka secara sadar menerapkan nilai-nilai luhur dan norma-norma kehidupan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta tetap berjuang untuk kepentingan negara dan rakyat, kita semua yakin bahwa generasi penerus akan mampu membangun masa depan bangsa Indonesia yang cerah.

Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang tahu diri ketika ia mencapai sukses besar, dan juga tetap memiliki semangat tinggi

ketika ia mengalami masa yang sulit. Bangsa yang kokoh adalah bangsa yang dapat keluar sebagai pemenang dalam pergumulan melawan kesulitannya sendiri.

Dari sejarah bangsa Indonesia sendiri itulah kita harus menggali kekuatan-kekuatan untuk menjawab tantangan pembangunan dan tantangan masa depan. Kita harus mampu menggali dan memelihara kekuatan yang telah membuat kita mencapai hasil-hasil perjuangan di masa lampau. Kita juga harus berani mawas diri seraya mengakui kekurangan dan kelemahan kita di masa silam, yang telah membuat perjuangan kita belum mencapai hasil yang kita harapkan.

Dengan perkataan lain, dalam menilai, baik mengenai perkembangan negara dan masyarakat, kita harus mendudukkan persoalannya dalam proporsi yang sebenarnya, bebas dari perasaan subyektif emosional. Sebab, pengalaman yang lemah di waktu yang silam, mau tidak mau, merupakan pelajaran dari sejarah. Hal itu berlaku pula bagi generasi mendatang. Dalam arti itu, kita belajar dari sejarah, tidak lain adalah sebagai usaha untuk membuat sejarah baru, membangun masa depan yang lebih cerah.

Pembahasan perkembangan negara dan masyarakat diwaktu silam, yang dilanjutkan dengan pengkajian soal keberhasilan yang dicapai oleh Orde Baru dan diadakannya perkiraan mengenai perkembangan masyarakat dimasa-masa yang akan datang perlu ditempatkan dalam kerangka perspektif sejarah. Dengan sikap mental yang bebas dari pemikiran subyektif-emosional dalam menilai keadaan negara dan masyarakat serta pelaku-pelaku politiknya, diharapkan dapat membuahkan butir-butir pemikiran jernih dan perilaku yang tepat, untuk menghindarkan bermacam-macam tantangan dan bahaya yang, mau atau tidak mau, akan dialami oleh generasi mendatang.

Dalam arti itulah kita memberi makna kepada sejarah kita. Dalam arti itu pula kita perlu memiliki kesadaran sejarah.

Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan dimuka, apabila kita dapat menerima relevansi sejarah sebagai kekuatan

dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya, maka persoalannya adalah memungkinkan pembangunan nasional kita diarahkan ke pembangunan manusia Indonesia seutuhnya ?

Menyadari bahwa pribadi manusia merupakan produk *nature* dan *nurture*, semestinya dalam batas-batas tertentu kita dapat mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya tadi. *sejarah* pelbagai bangsa, telah menunjukkan upaya pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan *kualitas sumberdaya* manusia.

III. MENARIK PELAJARAN DARI SEJARAH : PERLUNYA MASYARAKAT YANG BERKETAHANAN DALAM PEMBANGUNAN.

Proklamasi dan konstitusi telah memberikan definisi tentang siapa bangsa Indondsia. Proklamasi dan konstitusi telah membuat bangsa Indonesia, *masyarkat Indonesia* menjadi *satu masyarakat sejarah* yang mempunyai *identitas* yang mempunyai *integritas* tanpa mana akan terjadi keterpecahan subyek itu dari dalam sendiri.

Lingkungn alam dimana kita tinggal tidak lain adalah seluruh tanah air kita; seluruh kondisi geografis Indonesia dengan segala flora, fauna, potensi hidrogafis, dan deposit sumber alamnya pertama-tama lingkungan tersebut adalah satu lingkungan Nusantara. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun kecil Indonesia merupakan lingkungan dengan imbangan yang khas antara tanah, air, udara dan matahari.
Tepatlah apabila masyarakat kita dinamakan masyarakat Nusantara dengan aneka ragam sub budaya. Dan karena itu pula kita mempunyai corak Bhinneka Tunggal Ika. Adapun keistimewaan kedua adalah kekayaan alamnya, baik itu didalam lingkungan darat, air, tumbuh-tumbuhan maupun lingkungan iklimnya. Sedangkan keistimewaan yang ketiga dari lingkungan alam ini adalah letaknya dalam satu posisi silang, diantara samudra-samudra besar serta diantara benua-benua raya.

Lingkungan yang demikian, tentu saja mempunyai pengaruh terhadap perkembangan masyarakat kita dan ikut pula menentukan corak response kultural yang dikembangkan oleh bangsa kita.

Iklim juga ikut menentukan pola kehidupan masyarakat kita. Musim merupakan faktor yang sangat penting bagi hidup masyarakat Nusantara. Maka itu, pranata mangsa merupakan bagian penting pula didalam sistem masyarakat kita.
Satu gejala penting lagi dari lingkungan ini adalah letaknya pada posisi silang, ini, ikut juga membentuk corak kehidupan masyarakat Indonesia.
Lalu lintas dunia bahkan ikut membentuk perkembangan masyarakat. Apa yang dinamakan lalu lintas dunia bukanlah sekedar lalu lintas fisik, akan tetapi lalu lintas kultural : *lalu lintas* sistem pengetahuan, sistem ekonomi, sistem teknologi, sistem sosial, sistem bahasa, sistem kesenian, dan sistem religi. Arus ekonomi dunia masuk dalam lingkungan ini; demikian arus pengetahuan, teknologi, kesenian, bahasa, sistem kemasyarakatan. Sejarah menunjukkan semua ini.

Maka itu kebudayaan Nusantara pada dasarnya terpaksa menjadi kebudayaan yang terbuka. Ia harus dapat hidup dengan lalu lintas yang lewat di wilayahnya. Masyarakat Nusantara harus berusaha agar semua itu mempunyai *arti yang positif, fungsional,* dan tidak *destruktif,* terhadap perkembangan hidupnya. Mungkin karena situasi yang demikian ini maka kapasitas membangun sintesa berkembang, dan karenanya akulturasi tampaknya telah selalu menjadi kekuatan pokok masyarakat dan kebudayaan Nusantara ini.
Dalam pada itu sifat Nusantara yang demikian itu juga akan membuat masyarakat Indonesia selalu terjalin dengan perkembangan-perkembangan wilayah sekitarnya dan dunia seluasnya. Regionalisme dan sistem global merupakan gejala-gejala yang selalu akan mempunyai refleksinya terhadap perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Demikianlah beberapa hal yang dikemukakan sebagai hasil analisa atas situasi lingkungan masyarakat Nusantara.

Ada satu keterangan yang lebih dapat diterima yang mengatakan bahwa perkembangan sejarah dan lingkungan telah membuat cara berpikir masyarakat kita berbeda dengan cara berpikir masyarakat barat. Kita berpikir secara ketimuran, kita lebih memandang kepada alam, kita tidak berusaha mengolah alam. Sedang cara berpikir bangsa-bangsa barat adalah sebaliknya : menganalisa alam, menyelidiki alam dan menguasai alam. Meskipun mengenai hal ini kiranya masih perlu banyak diadakan penelitian, akan tetapi pandangan ini memang lebih terbuka. Disini masih diakui adanya bakat-bakat manusia yang sama, hanya kemudian mempunyai perkembangan yang berbeda. Mengapa perkembangan itu dapat berbeda ? Salah satu faktor kiranya adalan lingkungan.

Interpretasi yang ingin saya kemukakan berawal dari asumsi ini pula. Sesungguhnya manusia pada hakikatnya mempunyai daya dasar yang sama, entah itu daya fisik, daya psikis, daya intelektual, daya sosial daya kerja. Ini adalah bakat-bakat dasar bahkan daya-daya dasar yang terkandung didalam setiap hidup manusia. Akan tetapi perkembangan ekspresi, manifestasi dari bakat-bakat tersebut memang bisa berlain-lainan, bisa mempunyai konfigurasi yang berbeda-beda.

Untuk memanfaatkan lingkungan alam yang begitu baik, dan begitu memanjakan, orang tentu saja tidak dipaksa berpikir mengenal menguasai alam, tetapi lebih didesak untuk berpikir tentang *kebahagiaan bersama.* Itulah sebabnya maka *kekerabatan, kekeluargaan,* merupakan masalah-masalah yang penting. Gotong-royong, menjadi tulang punggung; bukan saja gotong-royong sebagai cara kerja, tetapi terutama juga gotong royong sebagai sikap mental, gotong-royong sebagai nilai.

Didalam lingkungan alam yang demikian itu kesibukan manusia menghadapi alam dapat dikatakan relatif kecil. Orang tidak perlu banyak memutar otak untuk menguasai alam. Tetapi kerja berpikir itu ditujukan untuk tema-tema lain. Dalam situasi ini perhatian dan pikiran manusia ditujukan kepada

hidup kemasyarakatan, kepada hubungan antara manusia dan manusia. Maka terjadilah bahwa masyarakat kita sudah sangat maju didalam pengembangan pemikiran-pemikiran dan menyusun refleksi-refleksi mengenai hidup, kehidupan, budi pekerti, moralitas, khususnya mengenai hubungan manusia dengan manusia. Ini menjadi tema yang sangat pokok. Disamping itu manusia Indonesia juga mengembangkan refleksi mengenai hubungannya dengan Yang Maha Kuasa, yang memberi kehidupan.

Oleh karena situasi lingkungan hidup masyarakat Nusantara yang demikian itulah, membuat bangsa kita lebih banyak mengembangkan pemikiran mengenai hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhannya maka dengan demikian *pola berpikir masyarakat kita* adalah *pola kekerabatan, pola kekeluargaan, pola keseimbangan,* dan *pola religius.* Hubungan manusia dengan alam kita banyak direfleksikan, karena orang tidak dipaksa untuk mengembangkan itu. Konflik dengan alam mungkin tidak banyak dialami, sementara konflik di dalam masalah membangun manusia dengan manusia ataupun didalam refleksi hubungan manusia dengan Tuhannya lebih kerap dirasakan. *Pola kekeluargaan, pola keselarasan, pola ketentraman,* menjadi lebih ditekankan, untuk menjaga agar kerawanan sosial maupun kerawanan religius tidak merusak kehidupan masyarakat. Bila kebudayaan mempunyai tiga *dimensi dasar* (pertama hubungan manusia dengan manusia; kedua hubungan manusia dengan alam; ketiga hubungan manusia dengan Tuhan), maka dimensi pertama dan ketiga telah berkembang sementara dimensi kedua bersifat konstan.

Dengan demikian dapat kita pahami mengapa dinamika kehidupan sejarah kita lebih nyata berkembang di sektor kemasyarakatan, sektor bahasa (termasuk kesusasteraan di dalamnya), sektor kesenian dan sektor religi. Pengaruh Hindu maupun pengaruh Islam masuk ke Indonesia melewati dan memperkuat unsur-unsur ini. Akan tetapi *perjuangan* masyarakat kita dengan *sejarah modern* membawa masalah baru.

Memang kadang-kadang orang masih belum menyadari perubahan situasi tersebut. Kadang-kadang orang masih tetap hidup didalam suasana masyarakat yang dimanja, sehingga kita masih hidup didalam gaya kebudayaan manja, gaya kebudayaan santai yang tampaknya menjadi sumber utama dari bermacam-macam hambatan mental yang kita alami sekarang. Padahal situasi sekarang meminta agar masyarakat Nusantara hidup dengan pola kebudayaan kerja, bahkan *pola kebudayaan kerja keras.*
Sekaranglah saatnya manusia Indonesia harus memikirkan hubungan manusia dengan alamnya., supaya dengan demikian alam akan tetap memberikan manfaatnya untuk kehidupan kita. Dengan perkataan lain, sekaranglah saatnya masyarakat Indonesia mendapat tugas mengembangkan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan.

Berkaitan dengan hal-hal itulah saat kita sebagai bangsa Indonesia perlu melihat gejala-gejala yang telah saya sebutkan dimuka, dimana kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan dan tantangan pembangunan yang sedemikian kompleks. Dengan demikian dalam konteks kesadaran sejarah, saya sampai pada *kesimpulan* bahwa kita harus menjadi *subyek budaya yang kuat,* yang *tahan* menghadapi perkembangan-perkembangan itu dengan segala kemungkinannya. Untuk ini kiranya konsep *ketahanan sosial budaya* akan memberikan jaminan-jaminan.
Kita menyiapkan, menyongsong, masa depan itu dengan melaksanakan akulturasi yang disertai dengan pelaksanaan enkulturasi. Dengan demikian kita berusaha untuk dapat bertahan, berkembang disepanjang sejarah ini. Dan ini juga merupakan bekal, supaya kita dapat ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Oleh karena pembangunan adalah proses kultural, maka pembangunan nasional itu haruslah dilaksanakan berdasarkan asas akulturasi. Pembangunan adalah satu proses akulturasi. Dengan pembangunan nasional ini kita harus berkembang menjadi subyek budaya yang kuat, yang diperkaya dengan unsur-unsur

kebudayaan modern, terutama unsur ekonomi, unsur teknologi dan unsur pengetahuan.
Akulturasi berarti bahwa didalam perkembangan itu kita menjadi *kuat dari dalam.* Kita tidak boleh hanya kuat karena pinjaman, kuat dari luar, kuat dari lahirnya saja, kuat semua semata-mata.

Kita memang memerlukan unsur-unsur dari luar, dan oleh karena itu kita mencari, membuka diri untuk unsur-unsur tersebut. Akan tetapi semua itu dilaksanakan secara *kritis selektif.* Disinilah artinya asas bebas aktif, ia mendukung proses akulturasi kita. Proses membuka diri, sekaligus diiringi dengan usaha mencari unsur-unsur penunjang dari luar, disamping mempersiapkan perkembangan sendiri dari dalam.

Karena itu menjadi semakin jelas pula bahwa pelaksanaan pembangunan dalam konteks sejarah harus dilaksanakan berdasarkan kepada Wawasan Nusantara. Wawasan ini telah dimiliki dan dikembangkan oleh masyarakat dan kebudayaan kita. Di dalam Wawasan Nusantara ini dinyatakan :

1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Politik.
2. Persujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial dan Budaya.
3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi.
4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

Wawasan Nusantara juga memberikan gambaran yang lebih lanjut mengenai corak kita sebagai subyek budaya, sebab dengan itu kita melihat diri kita sebagai *satu subyek, satu entitas,* yang menjadi bagian dari *proses sejarah* yang lebih besar, baik proses regional maupun proses global.

Sekali lagi, akulturasi dan enkulturasi, adalah sendi-sendi pokok di dalam kehidupan sejarah kita. Dengan adanya kesadaran sejarah, kita akan berkembang menjadi *lebih baru,* men-

jadi *lebih maju*, menjadi *lebih kaya*, akan tetapi *tanpa kehilangan identitas, tanpa kehilangan kepribadian, tanpa kehancuran dasar kultural.*

Satu paham yang juga mencerminkan persepsi atas kenyataan itu adalah paham Ketahanan Nasional.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis nasional, yang berisi kemampuan berkembang didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejak tujuan perjuangan nasionalnya.

Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa kita dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi perjuangan bangsa dalam mempertahankan kehidupan bangsa dan kelangsungan cita-citanya.

Ketahanan Nasional inipun pada hakikatnya adalah ungkapan dari satu persepsi kultural, ungkapan dari kebudayaan nusantara itu. Kehidupan sejarah menurut kebudayaan nasional mengandaikan adanya satu subyek budaya, yang mampu berkembang, menghadapi segala situasi dan kemungkinan. Ketahanan Nasional, mengemukakan bahwa subyek itu mempunyai dua kondisi pokok : kondisi geografis dan kondisi demografis. Dua kondisi ini merupakan sumber daya utama; sumber daya alam dan sumber daya insani. Subyek itu harus berkembang dengan membawa dan memanfaatkan dua kondisi dasar ini. Untuk itulah maka dikembangkan unsur-unsur pokok yaitu : ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan dan teknologi, dengan mana subyek tersebut mengembangkan *dimensi-dimensi utama* didalam kesadaran sejarahnya sebagai bangsa Indonesia.

Ketahanan Nasional bukanlah semata-mata konsep militer. Kembali lagi ia adalah konsep kenegaraan, konsep kebudayaan,

konsep kemasyarakatan karena ia lahir dari dinamika masyarakat dan kebudayaan Nusantara. Dengan paham Ketahanan Nasional, masyarakat Nusantara ingin mengembangkan dirinya, dan serta merta memasuki pola roda sejarah dunia, melewati sistem regional, bergabung dengan sistem global.

IV. REFLEKSI KESEJARAHAN DALAM PEMBANGUNAN MELALUI STRATEGI WAWASAN JATI DIRI DI JAWA TENGAH

Pembangunan yang berwawasan kesejarahan sebagaimana telah diuraikan dimuka, merupakan salah satu sisi upaya peningkatan kualitas manusia dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagai prasyarat kondisioning dalam dimensi Pembangunan Nasional pada umumnya dan Daerah pada khususnya, disamping aspek stabilitas dan kegotong-royongan. Sedangkan peningkatan kualitas manusia yang selaras dengan arus dinamikanya perkembangan jaman, adalah merupakan wujud konsekuensi logis kita untuk memerangi dan mengikis habis kendala "tiga K" yakni : kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Sedangkan di Jawa Tengah, untuk menunjang pencapaian kondisi tersebut, sebagaimana dimaklumi dalam Pelita V ini, Jawa Tengah menitik beratkan pada kebijakan pemecahan 5 (lima) masalah pokok, yaitu :

a. *Kependudukan* yang terdiri dari laju pertumbuhan yang masih relatif tinggi, penyebaran yang tidak merata, dan pertumbuhan angkatan kerja yang belum seimbang dengan perluasan kesempatan kerja. Dalam masalah kependudukan ini juga masih dihadapi persoalan rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat.

b. *Keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam* yang meliputi terganggunya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, masih banyaknya lahan kritis serta belum mantapnya pendayagunaan sumber air, tanah dan ruang.

c. *Pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,* yaitu meliputi pengembangan yang belum serasi antara pendidikan formal dan non formal dan informal. Persoalan mutu dan kesesuaian pendidikan bagi pembangunan daerah serta terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.

d. *Aparatur pemerintah* yang meliputi kemampuan aparatur pemerintah yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan terbatasnya sarana dan prasarana aparatur pemerintah.

e. *Pertumbuhan antara daerah yaitu* terjadinya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan sebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan perbedaan peluang pengembangan.

Sementara itu, guna menjabarkan pemecahan kelima permasalahan tersebut dalam cakupan sektor yang lebih luas, Jawa Tengah berpijak pada konsep dasar strategi wawasan jati diri, yang tidak lain merupakan sub sistem Wawasan Nusantara dan penjabaran doktrin Ketahanan Nasional.
Penerapan strategi Wawasan Jatidiri berangkat dari pemahaman bahwa pendayagunaan *kondisi yang khas* secara *dinamis* kearah "nilai tambah" sebesar-besarnya adalah kunci utama untuk mengoptimasikan bidang apapun. Dengan *pemahaman, penghayatan* dan *pengembangan identitas* atau *jatidiri* secara maksimal, tidak lain bertujuan untuk menciptakan kondisi stabilitas wilayah yang dinamis, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ketahanan, mempunyai daya tangkal mampu mengatasi ancaman, tantangan, hambatan/rintangan dan gangguan.

Strategi wawasan jatidiri merupakan strategi pembangunan yang menempatkan wawasan jatidiri sebagai titik tolak pendekatan, yang memerlukan analisa dan pemahaman terhadap segenap potensi khas yang dimiliki Jawa Tengah, untuk dikembangkan dalam mencapai ketahanan wilayah sehingga dapat makin memperkokoh Ketahanan Nasional.
Pola orientasi yang bersifat kedalam memerlukan analisa dan pilihan langkah untuk memecahkan permasalahan-permasalah-

an yang dihadapi oleh Jawa Tengah dengan mendayagunakan segala *potensi* dan *ciri-ciri unggul* yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Istilah Jatidiri mengandung arti sebagai kepribadian atau seperangkat ciri-ciri khas sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Dalam pengertian ini terkandung pemilihan *sifat-sifat potensial, unik bernilai tinggi, unggul* dan mengandung *daya inspiratif* serta melahirkan *citra spesifik* dan bersifat *relatif kekal.*

Sedangkan orientasi keluar lebih menekankan pentingnya integritas, identitas dan kelangsungan Jawa Tengah sebagai bagian integral (satu kesatuan) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masalah integritas sebagaimana diketahui dan kelangsungan hidup secara relatif tidak menghadapi persoalan, namun masalah *jatidiri* atau *identitas* masih menghadapi tantangan baik yang jelas terlihat maupun yang tidak "kasat mata".

Apabila hal ini kita amati sebagai suatu proses, dapat dilihat bahwa setiap kelompok manusia dalam dimensi kesejarahannya maupun pangkuan ruang wilayah senantiasa mampunyai kecenderungan untuk menampilkan identitasnya; tentu saja dilatar belakangi oleh rasa bangga dan rasa cinta pada lingkungan tempat tinggalnya. Identitas itu diekspresikan dalam berbagai aspek seperti tutur kata, tingkah laku, cara berbusana, jenis makanan, ungkapan seni, gaya dan langgam bahasa, bentuk bangunan beserta penataan ruangnya dan sebagainya.

Kesemuanya itu memancarkan ciri karakteristik masyarakat suatu daerah yang membedakan dengan masyarakat daerah lainnya.

Bertolak dari pengertian tersebut maka Strategi Wawasan Jatidiri mempunyai makna :

a. *Cara dan usaha untuk mendayagunakan segala sumber daya* dalam rangka mencapai tujuan, dengan suatu cara pandang yang menampilkan kegiatan untuk mengenali, memilih, mengerahkan dan mengembangkan potensi serta ciri-cirinya yang mempunyai sifat potensial, unik, bernilai tinggi dan bercitra spesifik.

b. Strategi Wawasan Jatidiri *merupakan strategi pembangunan yang menempatkan Wawasan Jatidiri sebagai titik tolak pendekatan,* untuk menjawab dan memecahkan berbagai tantangan, hambatan gangguan dan ancaman dalam rangka mewujudkan masyarakat dan wilayah yang berketahanan, utamanya dalam ketahanan sosial budaya. Namun di samping itu, Strategi Wawasan Jatidiri sebagai landasan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah juga wahana untuk menterjemahkan kebijaksanaan Nasional di daerah.

Dalam pola operasionalnya, antara orientasi wawasan kedalam dan keluar tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Khusus mengenai wawasan wilayah atau orientasi kedalam jika dikaitkan dengan Doktrin Ketahanan Nasional, maka keseluruhan potensinya mencakup Tri Gatra Alamiah (geografi, kekayaan alam dan kemampuan penduduk) dan Panca Gatra Sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan). Kedua unsur potensi itulah yang harus didaya-guyanakan seoptimal mungkin, guna memecahkan masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi (utamanya lima masalah pokok), sekaligus untuk menangkal segala hambatan dan ancaman yang diperkirakan dapat mengganggu integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa.

Seluruh upaya untuk memecahkan 5 makalah pokok tersebut diarahkan untuk meningkatkan *ketahanan wilayah* serta meningkatkan *harkat* dan *martabat* rakyat Jawa Tengah hal ini memberi isyarat kepada kita agar Jawa Tengah memiliki daya regenerasi dan rekonstruksi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Kesemuanya harus ada dalam bingkai-bingkai sistem-sistem budaya sebagai bagian dari kebudayaan dalam arti luas.

Dalam konteks ini, Strategi Wawasan Jatidiri atau strategi wawasan identitas merupakan perwujudan kehendak untuk memanfaatkan seluruh "harta kebudayaan" yang ada di Jawa Tengah dan seluruh potensi pada masing-masing gatra-

nya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Apabila pengertian yang tersurat dan tersirat dalam lambang daerah dijadikan acuan langkah, pengembangan nilai-nilai ideal filosofis akan menempati tempat teratas, Cakupan garapannya diarahkan untuk terus meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, pelestarian semangat Proklamasi dan kesatuan gerak dan langkah antara rakyat dan para pemimpinnya.

Pengembangan nilai-nilai ideal filosofis dalam konteks sejarah harus mampu mengikis segi-segi negatifnya agar tidak timbul gejala-gejala yang menghambat laju pembangunan. Selanjutnya adalah pengembangan kesenian dan kebudayaan yang berakar pada tradisi untuk menangkal unsur-unsur yang bisa merugikan pembangunan.
Dalam hal ini tentu saja tanpa menutup kemungkinan masuknya unsur budaya asing yang dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan. Berikutnya juga diisyaratkan perlunya pengembangan potensi alamiah yang terkandung di Bumi Jawa Tengah dengan memperhitungkan dampak negatif yang mungkin bisa menggu kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan lingkungan hidup.

Apabila totalitas pembangunan daerah Jawa Tengah dilihat dalam konteks manajemen pembangunan, maka cakupan garapan dari strategi wawasan identitas akan terwujud dalam trigatra alamiah dan panca gatra sosial (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Yang akan dituju adalah terciptanya Ketahanan Wilayah yang tangguh dalam menghadapi semua ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa datang.
Dalam hubungan dengan Wawasan Identitas atau Wawasan Jatidiri ini sekali lagi ditegaskan bahwa sama sekali tidak dimaksudkan untuk membangkitkan fanatisme kedaerahan yang sem-

pit, tetapi untuk menumbuh kembangkan "Nilai Dalam" yang cukup tangguh dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya integritas dan identitas atau jatidiri nasional.

Sebagai wawasan yang berdimensikan kesejahteraan maupun yang bersifat khusus kewilayahan, strategi Wawasan Jatidiri atau strategi wawasan identitas, kaya dengan upaya untuk terus menggali dan memahami sistim-sistim budaya yang ada dan telah berurat berakar di bumi Jawa Tengah. Hingga disini dapat dinyatakan bahwa Strategi Wawasan Jatidiri merupakan wahana untuk memecahkan lima masalah pokok Jawa Tengah, karena lima masalah pokok ini merupakan unsur yang dapat mengganggu, menghambat dan mengancam kelangsungan hidup Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan strategis wawasan jatidiri atau strategi wawasan identitas, Jawa Tengah berupaya untuk menampilkan dan memperjelas identitas/jatidiri dalam kedudukannya sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi lain strategi wawasan jatidiri atau strategi wawasan identitas merupakan wahana untuk melihat dan menampilkan *kesinambungan sejarah.* Sehingga dalam membangun Jawa Tengah tercermin kehendak agar tidak "Kepaten Obor" dan kehilangan jejak dari *sejarah* dan *budaya* masa lampau.

Untuk mengaktualisasikan dan mengoperasikan strategi tersebut ada 7 jalur pendekatan yang dilakukan yakni : Kepemimpinan, Etos Kerja, Solidaritas atau Kesetiakawanan Sosial (Gotong Royong) Seni Budaya, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Arsitektur serta Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tumbuhnya pemahaman tentang Wawasan Jatidiri telah menggugah kesadaran masyarakat Jawa Tengah terhadap potensi etos yang dimilikinya, yang terwujud dalam sikap-sikap positif antara lain tumbuh mekarnya rasa percaya diri dan kemandirian. Dengansikap-sikap positif itu derap pembangunan semakin terpacu dalam gairah juang yang tinggi.

Sementara itu berbagai hasil pembangunan baik fisik maupun non fisik, tampak mencuat nilai tambahnya.

V. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Seminar ini.

Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FUNGSI SEJARAH DALAM PEMBANGUNAN BANGSA, KESADARAN SEJARAH, IDENTITAS DAN KEPRIBADIAN NASIONAL

Sartono Kartodirdjo

I. Pendahuluan

Suatu generasi yang mengalami empat jaman, ialah jaman kolonial, jaman penjajahan Jepang, masa Revolusi dan masa Kemerdekaan, sesungguhnya memiliki pengalaman yang secara wajar membentuk perspektif waktu sebagai unsur pokok kesadaran sejarah. Ironisnya ialah bahwa para pelaku sejarah acap kali terlalu terserap dalam proses aktual kesejarahan sehingga praxisnya menjerumuskan mereka arus dari rangkaian momentum-momentum.

Lagi pula pandangan teleologis atau futurologis menimbulkan negasi terhadap masa lampau yang ditolaknya sebagai sikap romantis jauh dari realitas.

Perlu diingat pula bahwa sebagai protagonis modernisasi ada kecenderungan pada mereka untuk melepaskan dari tradisionalisme, termasuk sejarah sebagai historiografi tradisional. Selanjutnya aktor-aktor pembangunan lebih berurusan denga prognostika jaman yang diperlukan untuk melakukan perencanaan.

Kebutuhan akan pendekatan sinkronis lebih memadai daripada pendekatan diakhronis. Pendek kata selama empat jaman tersebut di atas ternyata tidak terdapat iklim mental yang menumbuhkan kesadaran sejarah.

Di samping kausalitas-kausalitas yang disebut di atas, di sini masih perlu dicantumkan beberapa faktor penyebab yang memperkuat ahistorisme di Indonesia.

Dapat dipahami mengapa penguasa kolonial memandang sejarah sebagai "dinamit" yang mampu menghancurkan bangunan kolonialnya, tidak lain karena kesadaran sejarah akan membangkitkan aspirasi nasionalist yang pada hakekatnya bersifat antithetis atau antagonistis terhadap sistem kolonial.

Tambahan pula sistem pendidikan kolonial mengutamakan pendidikan profesional dalam pelbagai bidang teknologis, maka sejajar dengan perkembangan itu penilaian serta gambaran umum terhadap ilmu eksakta dan teknologi jauh lebih tinggi daripada ilmu humaniora.

Fakta historis yang kita hadapi ialah bahwa di Barat romantisisme serta historismenya menjadi landasan nasionalismenya, sedang di Indonesia nasionalisme tumbuh sebagai reaksi terhadap kolonialisme, lagi pula sebagai kekuatan modernisasi lebih berorientasi ke masa depan.

Bertolak dari fakta historis bahwa di Barat pertumbuhan nasionalisme beserta negara nasional bersumber pada kesadaran sejarah, perlu dipertanyakan disini hal-hal sebagai berikut :

(1) adakah kesadaran sejarah pada bangsa Indonesia pada masa pranasionalisme ?

(2) dengan tidak ada romantisisme di Indonesia yang mendahului perkembangan nasionalisme, jenis kesadaran sejarah apakah yang melatarbelakanginya ?

(3) seberapa jauh kesadaran sejarah menjadi faktor pembentuk kesadaran nasional dan identitas nasional ?

(4) mengapa rekonstruksi sejarah nasional merupakan landasan fundamental bagi konsolidasi kehidupan negara nasional ?

(5) struktur sejarah mana yang memadai fungsi sejarah nasional sebagai legitimasi eksistensi negara nasional ?

(6) seberapa jauh fungsi sejarah dapat mendukung proses pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bangsa khususnya ?

Pertanyaan-pertanyaan di atas secara berturut-turut akan dijawab dalam uraian berikut sekedar untuk menjelaskan betapa penting peranan sejarah dalam eksistensi bangsa serta negara nasionalnya.

II. Sejarah Kesadaran Sejarah Bangsa Indonesia

Ada kesepakatan umum bahwa setiap peradaban dimulai dengan peninggalan tertulis, tidak lain oleh karena tulisanlah yang "menjinakkan" memori (ingatan) manusia serta menyimpan data dan fakta bagi generasi berikutnya, jadi diabadikan. Jadi timbul kemungkinan bagi generasi kemudian untuk mengungkap dan menghidupkan kembali pengalaman masa lampau. Di sini monumen dan dokumen menghadirkan kembali generasi kemudian mengenai pengalaman bersama kepada para nenek-moyang, dengan perkataan lain, di sini kita hadapi suatu reaktualisasi pengalaman kolektif suatu bangsa, lazim disebut sejarah. Transformasi dan kekinian menjadi kelampauan merupakan kesadaran akan aliran waktu yang bergerak menurut garis lampau – kini – masa depan. Di sini perspektif waktu tercipta sebagai bentuk kesadaran sejarah.

Lebih jelas lagi ialah bentuk penulisan sejarah tradisional, seperti Babad, Hikayat, Kronik, dan lain sebagainya.

Kesadaran Sejarah Masyarakat Tradisional

Apabila manusia Indonesia menunjukkan kehadirannya dalam alam semesta melalui penciptaan artifact, keberadaan ruang

dan waktu dalam kesadarannya telah dituangkan dalam tradisi lisan dan tertulis, prasasti, kronik, genealogi, sejarah, babad, dan lain sebagainya.

Pelbagai fakta yang diabadikan dalam tradisi tertulis menimbulkan tempat penyimpanan yang melembaga sebagai historiografi, suatu proses yang amat fundamental dalam formasi peradaban, tidak lain karena dengan demikian manusia dapat "membebaskan diri" dari waktu subyektif, yaitu kesadaran waktu pada manusia individual. Proses obyektivikasi waktu terlaksana melalui proses penulisan sejarah, yang di satu pihak menstrukturasi waktu dan di pihak lain mekonstruksi pengalaman kolektif suatu kelompok.

Kalau kita memperhatikan substansi historiografi tradisional, mencoloklah fakta bahwa manusia belum berhasil sepenuhnya "membebaskan diri" dari pandangan dunia kosmogonis atau religiomagis. Kehadiran mitos di dalam historiografi itu membuktikan bahwa manusia belum sepenuhnya berhasil "mengemansipsi dirinya" dari pandangan dunia kosmosentris. Ini berarti bahwa perspektif waktunya masih bersifat siklis sehingga perspektif historisnya belum sepenuhnya terwujud. Meskipun sudah muncul kesadaran waktu namun belum dapat disebut kesadaran historis, tidak lain karena alam pikiran mitis dan kosmosentris senantiasa cenderung mengulang atau menghadirkan kembali peristiwa religio-magis lewat upacara (ritus).

Lebih lanjut perlu diperhatikan bahwa fungsi mitos adalah esensial bagi kehidupan kelompok oleh karena menjadi prinsip melegitimasikan eksistensinya.

Serat Tantu Panggelaran memuat mitos genesis Pulau Jawa secara fisik, lagi pula terjadinya peradaban Jawa. Baik Sejarah Raja-Raja Pasai maupun Kronik Wajo ataupun Babad Tanah Jawi menunjuk kepada awal kekuasaan dinasti yang serba mitis. Oleh karena asal-mula mitologis menjadi dasar legitimasi eksistensi suatu dinasti maka setiap kali perlu diaktualisasikan lewat upacara, maka kita menghadapi gejala paradoksal, ialah bahwa kesadaran sejarah dituangkan melalui aktualisasi mitos. Suatu

pandangan dengan wawasan seperti itu cerita sejarah berfungsi "menghidupkan kembali" masa lampau, jadi tidak berbeda dengan pementasan tarian serimpi Bedaya Ketawang atau cerita wayang purwa. Dengan terciptanya suasana kesejarahan (historisitas) alam fikiran orang terbentuk perasaan "kesejarahan" *(historical sense)* dan kesadaran sejarah; setiap peristiwa merukan momentum dalam suatu proses atau continuum proses-proses. Konteks temporal menempatkan setiap peristiwa dalam perspektif sejarah, lagi pula setiap benda atau gejala adalah hasil proses perkembangan historis. Di sini timbul optik diakhronis yang mampu mengurangi anakhronisme yang masih dominan dalam alam pikiran mitologis. Proses demitologisasi tercermin dalam bagian akhir historiografi tradisional bersamaan dengan bergesernya wawasan kosmosentris lebih ke arah antroposentrisme.

Perspektif antroposentris menempatkan manusia sebagai aktor dalam kerangka khronologis dan dengan demikian dilepaskannya dari waktu mitologis. Di sini perspektif waktu mengidentifikasi manusia dalam dimensi ruang dan waktu historis, suatu proses sekularisasi yang memperkuat historisitasnya, dan sekaligus meningkatkan kesadaran historisnya.

Historiografi sebagai perbendaharaan kultural peradaban bangsa merupakan simbol eksistensinya dalam waktu dan sekaligus mewujudkan ekspresi kesadaran sejarahnya. Dalam konteks masyarakat tradisional historiografi beserta kesadaran sejarahnya mempunyai kedudukan amat fungsional untuk menopang kontinuitas sebagai prinsip esensial bagi tradisi beserta nilai-nilainya.

III. Kesadaran Sejarah dan Kebangkitan Nasional

Momentum historis dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia terjadi pada akhir dasawarsa pertama abad ke-20, yaitu apa yang lazim disebut Kebangkitan Nasional. Dalam mengikuti pasang-surut, kejayaan dan kemerosotan dan dan keme-

nangan serta kekalahan kehidupan bangsa Kebangkitan Nasional merupakan titik-tolak gerakan kebangsaan mengarah ke revivalisme nasional, maka tepatlah apabila dalam menggambarkan proses sejarah itu dipakai metafor *"Bang-bang Wetan,"* kecerahan di langit timur yang menandai Matahari akan terbit.

Memang gerakan Boedi Oetomo yang merintis proses Kebangkitan Nasional adalah penuh makna terutama apabila dipandang dalam hubungannya dengan munculnya kesadaran nasional, suatu mentifact yang merupakan unsur fundamental dari seluruh proses perkembangan nasionalisme Indonesia.

Berbicara tentang Nasionalisme di Dunia Ketiga sebagai fenomenon historis yang dominan dalam abad ke-20 harus memperhitungkan kehadiran kolonialisme di daerah yang sama. Nasionalisme lahir sebagai kekuatan antagonistis terhadap kolonialisme. Memang tidak dapat diingkari bahwa perlawanan terus menerus terjadi dalam abad-abad sebelumnya, namun pada umumnya merupakan jawaban yang kurang efektif. Faktanya ialah bahwa kolonialisme dengan keunggulan teknologi militer, komunikasi, organisasinya menuntut jawaban yang memadai. Hal ini ternyata hanya dapat dilaksanakan oleh golongan sosial baru, ialah kaum inteligensia, produksi sistem pendidikan modern yang dibangun oleh penguasa kolonial terutama untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu diakui kebenarannya bahwa sistem pendidikan adalah dinamit bagi sistem kolonial. Kaum inteligensia yang diharapkan berperan sebagai teknolog ternyata menjelma sebagai protagonis nasionalisme. Kedudukannya sebagai elite strategis menciptakan kecenderungan ke arah pembentukan elite kekuasaan.

Dalam melacak asal-mula nasionalisme tidak ada jalan lain daripada memahami mentalitas kaum inteligensia tersebut di atas. Bagaimanakah kesadaran mereka mengenai situasi serta kondisi hidup yang mereka hadapi ? Seberapa jauh ada kesadaran sejarah pada mereka ? Apakah kesadaran sejarah itu merupakan sumber inspirasi bagi mereka dalam mencanangkan gerakan mereka ?

Masyarakat kolonial pada hakekatnya bertumpu pada prinsip diskriminasi ras atau warna kulit. Sistem kolonial dalam keseluruhannya, termasuk ekonomi dualistiknya, segregasi sosialnya, politik paternalistiknya, kesemuanya berlandaskan pemisahan menurut garis-warna.

Status kaum pribumi atau *inlander* adalah inferior yang pada hakekatnya mencakup negasi atau pengingkaran hak-hak yang dimiliki oleh golongan penguasa. Untuk golongan ini ada tempat kediaman eksklusif, tempat rekreasi, sekolah-sekolah, kamar tunggu di stasiun, dan lain sebagainya.

Dalam segala bidang kaum kulit putih menempati kedudukan atas. Kriteria pendidikan mengutamakan pendidikan Eropa dengan bahasa Belanda sebagai *lingua francanya.* Bagi kaum pribumi amatlah langka kesempatan untuk menempati kedudukan itu. Suasana serba-terbelakang, perasaan harga-diri rendah, pengingkaran martabat manusia, kesemuanya menciptakan mentalitas yang penuh kompleks-harga diri rendah, perasaan tidak pasti mengenai identitasnya.

Negasi yang dipaksakan kepada kaum *inlander* menciptakan citra-diri yang diliputi oleh sindrom serba-terbelakang yang mencakup kebodohan, kemalasan, kelemahan, kelesuan, fatalisme, apati, indolensi, dan lain sebagainya. Terhapuslah perasaan harga-diri, martabat, kepribadian, pendeknya seluruh sistem kolonial berusaha membudayakan "mentalitas setengah budak". Di mana-mana kaum inlander menghadapi "tuan besar" dengan otoritarianisme, yang kadang-kadang mewujudkan segi kemanusiaannya sebagai paternalisme. Manifestasi "mentalitas yang serba superior" secara lebih nyata terdapat dalam masyarakat perkebunan yang merupakan suatu *"enclave"* di mana hubungan kerja melembaga sebagai hubungan "tuan-abdi atau budak". Dalam masarakat kolonial terdapat universum simbolis penuh dengan diskriminasi, meliputi segala aspek kehidupan. pakaian, bahasa, perumahan, pekerjaan, dan seterusnya.

Apabila hubungan kolonial itu bagi orang kebanyakan adalah biasa dan diterimanya sebagai hal yang wajar, tidak demikianlah halnya bagi kaum terpelajar. Golongan inilah yang dalam posisinya sebagai golongan marginal, yang mampu mengidentifikasikan situasi kolonial beserta permasalahannya. Merekalah yang menyadari betapa beratnya penderitaan rakyat yang serba terbelakang itu. Merekalah yang mengalami keresahan karena mengalami diskriminasi terus-menerus. Meskipun telah berstatus kaum terpelajar, namun tidak berbeda dengan rakyat membawa stigma kaum inlander. Dalam situasi itulah mereka mengalami krisis identitas. Yang lama telah mereka tinggalkan tetapi yang baru belum tercapai.

Krisis mental itulah yang mendorong mereka untuk mendefinisikan situasi mereka, mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, untuk akhirnya merumuskan programnya. Kesadaran akan keterbelakangan di segala bidang menciptakan semboyan "Kemajuan" yang hendak dicapai lewat pendidikan. Telah diketemukan kunci untuk mengatasi keterbelakangan itu.

Meskipun tidak terurai, dalam beberapa kesempatan disinggung kejayaan bangsa di masa lampau. Wahidin dalam diskusinya dengan para siswa dokter-Jawa di Parangtritis "memimpikan" bangkitnya kembali kejayaan Jawa (sic) di masa depan. Sutomo dalam memaparkan program kerja Boedi Oetomo dalam Konggresnya di Yogya menyebut kejayaan Majapahit sewaktu bangsa Indonesia bernavigasi dan berdagang sampai jauh dari Nusantara.

Tidak berlebih-lebihan di sini kalau dikatakan bahwa kesadaran sejarah pada tokoh-tokoh para perintis menjadi sumber inspirasi untuk melancarkan gerakan emansipasi.

Di samping itu lewat sejarahnya orang dapat "menemukan" diri-sendiri atau sebaliknya orang "menemukan" sejarahnya agar dapat mengenal kembali diri-sendiri atau identitas-dirinya. Mirip dengan hal ini ialah apa yang dilakukan oleh Nehru, yaitu mempelajari dan menulis *"Discovery of India"* dia hendak "menemukan" kepribadiannya.

Sistem kolonial serta pendidikannya menyebabkan alienasi terhadap kebudayaan serta sejarahnya dan dengan demikian kehilangan identitas atau kepribadiannya. Tepatlah apabila Nehru berusaha menemukan kembali identitas kebangsaannya dengan membangkitkan kesadaran sejarahnya atau pengalaman kolektifnya.

Perlu ditambahkan di sini bahwa pelajaran atau pengkajian sejarah kecuali memberi pengetahuan faktual tetapi juga melakukan penyadaran; artinya membangkitkan perasaan sejarah *(historical sense)* serta membuka optik historis, atau pemikiran dalam kontekstual historis.

IV. Kesadaran Sejarah dan Identitas Nasional

Pada awal pembicaraan tentang identitas perlu ditegaskan bahwa perkara identitas adalah perkara kebutuhan dasar manusia. Tanpa identitas sukarlah bahkan mustahil dilakukan komunikasi dalam masyarakat. Identitas mendefinisikan status dan peran seseorang, mencakup ciri-ciri pokok seseorang baik yang fisik maupun sosial-budaya.

Identitas tradisional lazimnya mempunyai batasan primordial: ikatan desa, keluarga, suku, agama. Dengan diciptakan negara nasion semua warga negara memperoleh identitas baru, ialah identitas nasional. Identitas ini tidak menghapus identitas primordial, akan tetapi "melampauinya" (mentransendensi).

Sebelum menguraikan identitas nasional sebagai identitas kolektif, seyogyanya kita menambah keterangan lebih lanjut tentang identitas pribadi. Jika seseorang kehilangan memori, antara lain karena senilitas atau penyakit syaraf, timbullah pada dirinya kekacauan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali tidak mampu mengenal identitas-dirinya sendiri, dia juga tidak dapat menentukan identitas orang lain. Akibatnya ialah miskomunikasi terus-menerus.

Identitas nasional sebagai unsur esensial dari kepribadian nasional, suatu kompleksitas terdiri atas sekelompok ciri-ciri

yang mewujudkan suatu koherensi dalam suatu totalitas. Di sini totalitas itu ialah nasion yang mewujudkan suatu kesatuan berkarakter tertentu, sehingga dapat dibedakan dari nasion lain. Yang memberi karakter khusus itu ialah kebudayaan nasional di satu pihak dan di pihak lain pengalaman kolektif atau sejarahnya. Pada kesempatan ini kita membatasi diri pada faktor kedua, tanpa mengurangi pentingnya faktor pertama.

Bertolak dari konsep kepribadian bangsa sebagai analogi konsep kepribadian seseorang jelaslah bahwa kepribadian seseorang adalah hasil perkembangan atau pertumbuhan individu. Di sini totalitas pengalaman individu menjadi keseluruhan pengalaman kolektif atau sejarah bangsa. Ketepatan diagnosis memerlukan riwayat kesehatan seseorang, maka konstelasi sosial-budaya ditentukan oleh sejarah atau pengalaman kolektifnya.

Sehubungan dengan pernyataan di atas di sini perlu ditekankan beberapa ciri pokok identitas nasional, ialah (1) historisitas; (2) ke-unik-an *(uniqueness);* (3) partikularitas atau subyektivitas. Ketiga ciri itu amat erat kaitannya satu sama lain.

Historisitas sebagai ciri utama sebenarnya inheren pada identitas sebagai tumpuan pengalaman kolektif, tidak lain karena pengalaman itu berakumulasi lewat proses historis atau perkembangan waktu sebagai dimensi proses pertumbuhan atau perkembangan. Proses itu terjadi secara unik yaitu bagaimana sebenarnya terjadi dan menghasilkan produk yang kita kenal sebagai identitas. Hasil itu mau tak mau merupakan hal yang khusus atau partikularitas. Subyektivitas menonjol apabila identitas ditempatkan dalam hirarkhi identitas – humanitas – universalitas.

Historisitas yang melekat pada identitas hadir secara menonjol tampil pada peta wilayah Republik Indonesia. Perbatasan daerah-daerah yang dicakupnya, lokasi kota-kota, jaringan komunikasi, kesemuanya sulit diterangkan tanpa melacak asal mulanya di masa lampau.

Hari-hari raya nasional kita pahami hanya dengan mengetahui latar belakang sejarahnya. Kita semua mengetahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini timbul "demam sejarah" untuk menentukan HUT kabupaten. Pengamatan gejala itu menunjukkan adanya kecenderugan umum untuk menetapkan identitas berdasarkan sejarahnya atau lebih tepat proses genesisnya (terjadinya).

Kebutuhan akan identitas lokal justru pada saat pembangunan bangsa dengan identitas nasionalnya. Ternyata tidak ada kontradiksi antara kedua aliran perkembangan itu, oleh karena identitas nasional berfungsi selaku payung yang mencakup jenis identitas lebih sempit, artinya kolektivitas pada identitas lokal lebih terbatas, sedang individualitasnya lebih khusus. Adapun historisitasnya secara kualitatif tidak menunjukkan perbedaan.

V. Kesadaran Sejarah dan Kepribadian Nasional

Dengan lajunya perkembangan negara nasion kita pada umumnya dan bergairahnya pembangunan masyarakat kita khususnya, kehidupan bangsa Indonesia tidak hanya meningkat dinamikanya tetapi juga bertambah besar skala serta ruang lingkupnya, pendeknya kualitas hidupnya meningkat sekali.

Dalam keadaan transitif serta terbawa oleh transformasi manusia Indonesia perlu dikonseptualisasikan kembali. sebagai konstruk perlu distrukturasikan sesuai dengan model atau ideal-type tertentu. Di sini kita menghadapi proses fundamental yaitu bagaimana menggambarkan tipe manusia Indonesia yang adaptif terhadap masyarakat yang semakin teknologis coraknya. Tipe tersebut diharapkan berfungsi penuh dalam masyarakat komposit dan pluralistik, berbudaya teknologis-industrial. Tambahan pula manusia Indonesia hidup dalam universum nilai-nilai yang tercakup dalam ideologi negara, Pancasila.

Pada hakekatnya individualitas dan partikularitas dari nasionalisme Indonesia tercermin pada Pancasila. Telah kita sadari semua bahwa sifat komposit serta pluralistik menuntut adanya

kekuatan integratif, terutama pada tingkat ideologis. Perlu diingat kembali bahwa proses integrasi adalah faktor dominan dalam sejarah Indonesia.

Sepanjang sejarah ada kecenderungan mengarah ke proses integrasi (teritorial) yang secara progresif menuju kesatuan Nusantara. Di samping itu sejak awal abad ini ada proses integrasi lebih pada tingkat sosial-budaya dan politik lewat organisasi nasionalistis. Kalau pada fase perkembangan pembangunan bangsa dewasa ini kita berbicara tentang integrasi, yang dimaksud tidak lain ialah integrasi pada tingkat individual dengan statusnya dalam kolektivitas nasional. Ini berarti banwa dimensi kolektif-nasional harus hadir dalam individualitas setiap warga negara. Adapun dimensi kolektif ialah *unity* (kesatuan), *liberty* (kebebasan), *equality* (persamaan), *personality* (kepribadian) dan *performance/prestasi* (hasil kerja).

Pada tahun 1989 dan 1990 kita semua menyaksikan robohnya sistem komunis-totaliter di Eropa Timur. Rupanya ideologi yang dipaksakan dari atas selama beberapa desenia ternyata tidak mampu menghapus kebutuhan dasar identitas serta nasionalisme yang berakar dalam masyarakat teknik-regional.

Nasionalisme Indonesia termasuk Pancasila, perlu dibudayakan secara wajar berdasarkan keyakinan dan tidak merupakan "make-up" saja. Dengan demikian pertumbuhannya tidak perlu menekan dan menghapus identitas lokal atau regional, sebaliknya hal itu perlu diberi ruang hidup, bahkan diberi kesempatan menyumbang dan memperkaya kebudayaan nasional.

Meskipun dewasa ini pengaktualisasian prinsi-prinsip itu telah berjalan terus, bahkan telah membudaya namun belum dapat dikatakan telah menjadi realitas sepenuhnya. Masih diperlukan konsolidasi terus-menerus. Dalam pada itu ideologi nasionalisme ternyata amat instrumental untuk menopang proses integrasi di satu pihak dan di pihak lain untuk akulturasi terhadap masyarakat industrial.

Pada titik uraian ini perlu dipertanyakan ialah seberapa jauh sejarah dapat berfungsi untuk membangun kepribadian bangsa

di masa depan? Seberapa jauh wawasan sejarah mengenai nasionalisme mampu menopang konstruksi konsep kepribadian bangsa?

Dua fakta sejarah telah membuktikan bahwa konseptualisasi bangsa Indonesia, beserta kulturnya seperti terwujud pada Manifesto Politik (1925) dan Sumpah Pemuda (1928) berasal dari sejarah serta sumber daya kultural bangsa Indonesia. Keberhasilan mengidentifikasi situasi beserta permasalahannya oleh Perhimpunan Indonesia khususnya dan Pemuda Indonesia umumnya. Berdasarkan konsep itu program dapat disusun sehingga perjuangan dapat diorientasikan kepada tujuan tertentu.

Dengan mengikuti pernyataan Karl Popper bahwa ilmu-ilmu sosial adalah sejarah, maka implikasinya logis ialah bahwa sejarah juga dapat diterapkan sebagai *social engineering*. Untuk dapat melakukan fungsi itu sejarah perlu dihayati dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, antara lain mampu mengekstrapolasikan kecenderungan sehingga berdasarkan hal itu dapat dilakukan prediksi atau proyeksi. Tidak berlebih-lebihan apabila dikatakan bahwa suatu "planning" yang semata-mata didasarkan atas pendekatan sinkronis, tidaklah bulat. Pendekatan diakhronis akan memperkuat proyeksi tersebut.

Apabila pembangunan bangsa difokuskan pada mengkonstruksi kepribadian bangsa, sedang pengalaman kolektif masa lampau inheren dalam struktur kepribadian itu, maka sejarahlah merupakan unsur esensial bagi kepribadian bangsa. Dengan demikian pengkajian sejarah menjadi *conditio sine gua non* bagi formasi identitas dan personalitas bangsa. Jelaslah pula bahwa sejarah dapat dirumuskan "bentukbagaimana bangsa membenarkan eksistensinya".

Dengan menyadari kedudukan dan peran sejarah dalam rangka pembangunan bangsa, sejarawan diharap berusaha meningkatkan profesinya sehingga hasil usahanya dapat menjadi sumbangan yang berharga bagi pembangunan bangsa.

VI. Epilog

Setelah tujuan Revolusi Indonesia tercapai bangsa Indonesia memasuki tahun 1950-an dengan mengalami kejutan bahwa sebagai bangsa merdeka ada kebutuhan akan identitas nasional, sehingga dapat memperkenalkan dirinya di antara bangsa-bangsa dengan kepribadian nasional yang mantap. Negasi akan hal itu selama masa penjajahan membawa dampak bahwa tidak dikenal bangsa dan dengan demikian terjadi alienasi. Untuk menemukan kembli dirinya perlu direkonstruksi sejarahnya dengan wawasan Indonesia - sentrisme. Sejak Seminar Sejarah Nasional Pertama pada tahun 1957 sampai dewasa ini telah diusahakan pelbagai daya-upaya dalam historiografi Indonesia, namun dampaknya di bidang pengajaran sejarah belum tampak jelas. Apalagi lewat pengenalan sejarah kesadaran nasional dapat dipupuk dan identitas nasional menjadi landasan kuat bagi pembangunan bangsa maka jelaslah bahwa pengkajian sejarah mempunyai fungsi fundamental dalam pembangunan bangsa serta pembentukan manusia Indonesia bermartabat.

PENGARUH MODERNISASI TEKNOLOGI PERTANIAN PADI TERHADAP MASYARAKAT PEDESAAN MENYONG-SONG ERA TINGGAL LANDAS : SUATU PENGAMATAN TERHADAP BEBERAPA DESA DI JAWA TIMUR

Aminuddin Kasdi MS.

1. Latar Belakang

Selama tiga dekade terakhir menjelang berakhirnya abad ke-20 (1960–1990) telah terjadi pergeseran yang cukup mendasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang pada kurun waktu sebelum 1960, 85% merupakan masyarakat pedesaan, agraris, dan tradisional menuju ke kehidupan masyarakat kota (urban), industri, dan modern. Perubahan-perubahan itu telah mer suk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk ke lingkungan masyarakat petani di Jawa Timur. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang berpengaruh luas terhadap berbagai aspek kehidupan petani di Jawa Timur ialah dilancarkannya modernisasi teknologi pertanian, khususnya teknologi pertanian padi. Hal itu wajar karena porsi pertanian padi di Provinsi Jawa Timur menempati porsi ter-

besar baik areal lahan maupun hasil produksinya, dibanding dengan areal dan produksi jenis pertanian lainnya. Tabel 1 menunjukkan porsi pertanian padi di Provinsi Jawa Timur.

Modernisasi pertanian padi pada prinsipnya bertujuan meningkatkan produksi tanaman guna memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan meratakan pembangunan ke seluruh pelosok pedesaan. Berbagai usaha seperti intensifikasi, ekstensifikasi, difersifikasi, dan rehabilitasi telah dilakukan untuk mencapai tujuan itu.

Tabel 1 Porsi Produksi Padi di Jawa Timur Tahun 1987, Dibandingkan dengan Produksi Jenis Pertanian Lainnya

Jenis Tanaman	Produksi total (ton)
1. Padi	7.587.550
2. Jagung	2.282.025
3. Ubi Kayu	4.019.252
4. Ubi Jalar	139.552
5. Kacang	136.094
6. Kedele	416.610
7. Kacang Hijau	46.068
8. Sorgum	4.993
9. Jambu mete	29.573
10. Kelapa	242.017
11. Kopi	83.928
12. Cengkih	51.438
13. Kapuk Randu	106.984

Sumber : Jawa Timur dalam angka, hal. 87 – 97

Berbicara tentang modernisasi pertanian tidak dapat dilepaskan dengan dilancarkannya "Revolusi Hijau" pada dasa warsa 1960-an. Revolusi Hijau pada dasarnya adalah usaha peningkatan produksi pertanian (pangan) secara cepat. Peningkatan itu

diperoleh melalui penerapan teknologi baru penggunaan varietas unggul. input-input modern yang tepat serta dibarengi cara bercocok tanam secara tepat pula (Dibyo Prabowo, 1988, 80 – 81).

Tinggi-rendahnya tingkat produksi pertanian antara lain juga ditentukan oleh tingkatan penerapan teknologi pertanian. Indikatornya ialah meningkatnya pemakaian sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, bibit unggul, dan alat-alat pertanian seperti pompa, mesin-mesin sebagai pengganti peralatan tradisional (Hadi Prayitno, Lincolin Arsyad, 1986 : 127).

Kemajuan dan pembangunan di bidang apa pun tidak dapat dilepaskan dari kemajuan teknologi. Revolusi pertanian didorong oleh penemuan mesin-mesin dan cara-cara baru dalam bidang itu. Demikian pula "revolusi hijau" mulai tahun 1969/1970 disebabkan oleh penemuan teknologi baru dalam bibit padi dan gandum yang lebih unggul dibanding bibit-bibit sebelumnya.

Menurut Mosher ada lima syarat yang harus dapat dipenuhi dalam pembangunan atau modernisasi pertanian, yaitu : (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani (2) teknologi yang senantiasa berkembang (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal (4) adanya perangsang produksi bagi petani (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Di samping syarat-syarat mutlak di atas menurut Mosher diperlukan lima syarat lagi, walaupun tidak mutlak tetapi akan memperlancar pembangunan atau modernisasi pertanian, yaitu : (1) pendidikan pembangunan (2) kredit produksi (3) kegiatan gotong royong petani (4) perbaikan dan perluasan tanah pertanian (5) perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Dalam hal teknologi, Mosher tidak mengartikan sebagai ilmu yang berhubungan dengan ketrampilan di bidang industri melainkan teknologi pertanian diartikan sebagai cara-cara bertani. Mubyarto dalam karangannya, *Pengantar Ekonomi Pertanian,* mengemukakan bahwa yang lebih perlu disadari adalah pengaruh dari suatu teknologi pada produktivitas pertanian. Tekno-

logi baru yang telah ditetapkan dalam pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanah, modal ataupun tenaga kerja (Mubyarto, 1989 : 235).

Lebih dari itu Gulry Hunter secara rinci menyusun daftar hal-hal yang diperlukan untuk memajukan pertanian yang terdiri atas: pengolahan tanah lebih baik, benih dan varitas bibit lebih unggul, lebih banyak memakai pupuk, perputaran penanaman yang tepat, perlindungan tanaman, pengintegrasian pemilihan ternak dan sistem ekonomi pertanian, pengaturan dan perediaan air yang cukup, transportasi, jalan dan jembatan yang memadai, bahan bakar serta tenaga buruh yang murah, penanaman dilakukan dua kali fasilitas penyimpanan yang baik. Faktor penunjang yang tidak kalah pentingnya antara lain sistem pemilikan dan ukuran pemilikan tanah, koperasi, sarana pemasaran, penelitian, dan pengembangan pertanian (Guy Hunter, 1969 : 113).

Pemerintah melancarkan revolusi hijau terutama melalui program Bimas (Bimbingan Masal), yang dilaksanakan sejak 1963-an. Melalui Program Bimas para petani antara lain : (1) dibimbing tentang cara-cara lebih baik untuk menumbuhkan tanaman padi (2) didorong untuk memilih bibit unggul, menggunakan pupuk pestisida, dan keperluan produksi lainnya yang akan disediakan (3) diberikan fasilitas kredit bank dan (4) pemerintah memperkuat keberadaan koperasi di pedesaan.

Pada tahun-tahun berikutnya Program Bimas melibatkan berbagai unsur terkait seperti Departemen Agraria, pemerintah daerah, bank dan lain-lain dengan slogan Panca Usaha Tani, yaitu : (1) meningkatkan irigasi (2) memakai bibit pilihan (3) menggunakan pupuk dan pestisida (4) memperbaiki cara-cara menggarap dan (5) memperkuat koperasi di desa-desa (E. Roekasah - D.H. Penny, 1967 : 60 - 69).

Setelah tiga dasa warsa, pembangunan pertanian tersebut memperlihatkan hasil yang memadai dan berbagai perubahan telah terjadi pada kehidupan masyarakat pedesaan, khususnya di bidang produksi padi sebagai bahan pangan utama. Tabel 2

menunjukkan peningkatan produksi padi selama dua dasa warsa lebih. Perubahan itu juga dibuktikan, Indonesia saat ini dinilai sebagai salah satu negara Asia yang berhasil meningkatkan perekonomiannya termasuk dalam hal mencukupi pangan, khususnya beras.

Tabel 2 Pertumbuhan Produksi Padi Jawatan Luar Jawa Tahun 1960 – 1983

Th.	Luas tanah (ribuan ha)			Produksi/1000 ton			Rata-rata
	Jawa	Luar Jawa	Ind	Jawa	Luar	Ind.	
1960	4,32	2,96	7,28			10,17	
1961	3,99	2,87	6,86			9,58	
1962	4,09	3,19	7,28			10,28	
1963	3,65	3,08	6,73			9,16	
1964	3,66	3,32	6,93			9,16	
1965	4,01	3,32	7,33			10,24	
1966	4,12	3,57	7,69			10,75	
1967	4,02	3,49	7.51			10.40	
1968	4,26	3,76	8.02	7.07	4.59	11.67	
1969	4,29	3,72	8.01	7.50	7.75	12.25	
1970	4,30	3,83	8.14	7.89	5.25	13.14	
1971	4,41	3,80	8,32	8.44	5.24	13.72	
1972	4,33	3,56	7.90	8.11	5.08	13.18	
1973	4,57	3,84	8.40	8.86	5.74	14.61	
1974	4,73	3,78	8.51	9.44	5.84	15.28	
1975	4,65	3,84	8.49	9.33	5.85	15.18	
1976	4,47	3,90	8,37	9.56	6.28	15.84	
1977	4,38	3,98	8.36	9.33	6.54	15.88	
1978	4,75	4,18	8.97	10.61	6.92	17.52	
1979	4,63	4,18	8.80	10.68	7.19	17.87	
1980	4,78	4,28	9.00	12.53	7.64	20.16	
1981	5,05	4,34	9.38	13.96	8.33	22.76	
1982	4,75	4,27	9.02	14.05	9.14	23.19	
1983	4,59	4,37	8.96	14.40	9.57	23.97	

Sumber : Leon Mears, Rice and Food Self. Safficiency in Indonesia, BIES, 1984 : 122 – 138

Kebersihan itu diakui oleh dunia internasional tatkala Presiden Soeharto diundang untuk menghadiri pertemuan FAO *(Food Agriculture Organization)* di Roma th. 1985 sebagai wakil negara berkembang. Di antara negara utama produsen beras, menurut data FAO hanya pertumbuhan produksi beras Birma yang mampu mengunggulinya. (Anne Both, 1990 : 15 – 40).

Meski masalah pangan telah teratasi, tetapi masalah lain timbul. Ledakan penduduk mengakibatkan tekanan penduduk terhadap tanah dan kebutuhan bahan pangan yang menurut intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi, tetapi masalah penyediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru dan mereka yang tergusur melahirkan masalah baru, di samping masalah konsentrasi pemilikan tanah, perubahan hubungan kerja, pudarnya nilai-nilai tradisional, dan menyempitnya lapangan kerja di bidang pertanian (Wolfgang Clauss 1988 : 1).

2. *Permasalahan*

Tidak dapat dipungkiri, setiap modernisasi (baca pembangunan) termasuk di bidang pertanian, bila ingin berhasil harus dilandasi oleh ciri-ciri penyelenggaraan usaha berdasar atas prinsip rasionalitas, efisiensi, produktivitas, dan teknik produksi yang maju (Sartono Kartodirdjo, 1987 : 1). Cloffon Wharton yang mengkatagorikan tiga tahap klasifikasi negara-negara produsen komoditas pertanian sebagai tahap I/trandisional), tahap II (tradisional komersial), dan tahap III komersial, agaknya menempatkan kondisi negara kita dewasa ini berada tahap II. Dalam fase transisi modernisasi teknologi pertanian padi dengan sendirinya akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat petani di pedesaan yang pada dilirannya perubahan-perubahan itu merupakan suatu persoalan tersendiri.

Apabila pemakaian terknologi produksi maju dan modern menimbulkan dampak negatif. Persolan-persoalan itu antara lain:

a. Seberapa jauh pengaruh modernisasi teknologi pertanian padi terhadap eksploitasi sumber daya alam khususnya tanah untuk meningkatkan produktivitasnya hingga mampu mengimbangi tekanan demografis. Dengan terjadinya perubahan akibat pemakaian teknologi modern, mestinya terjadi pula perubahan pada pemilikan atau penguasaan tanah.

b. Seberapa jauh pengaruh pemakaian teknologi pertanian yang rasional komersial di satu pihak serta penyempitan peluang kerja di bidang pertanian di lain pihak terhadap peluang kerja di pedesaan, dengan ciri-ciri sumber daya manusia di pedesaan yang pada umumnya tanpa ketrampilan dan berpendidikan rendah.

c. Pemakaian teknologi modern di bidang pertanian padi mestinya mendatangkan perubahan sosial budaya pada masyarakat petani di pedesaan. Bila hal itu ada perubahan sosial budaya yang bagaimana telah terjadi, positif seperti peningkatan pendapatan petani, perbaikan gizi, peningkatan produksi dan lain-lain yang negatif mengapa para petani kurang antusias terhadap fasilitas kredit maupun pemakaian mesin-mesin pertanian, kurang antusias menjadi anggota KUD dan lain-lain.

d. Modernisasi teknologi pertanian juga mengubah persepsi petani terhadap hubungan kerja yang komersial. Bagaimana pengaruhnya terhadap pola hubungan patron klien, solidaritas tradisional seperti gotong royong, sambatan, sinoman, "rewang", dan lain-lain yang sebelumnya menjadi ciri khas masyarakat pedesaan.

3. *Perubahan Sosial Budaya Akibat Modernisasi Pertanian*

Dampak lain sebagai akibat modernisasi teknologi pertanian ialah perubahan struktur kesempatan kerja di pedesaan. Sebenarnya perubahan-perubahan itu merupakan hal yang wajar dan timbul dari sistem produksi baru yang menyertai pengembangan teknologi pertanian yang baru, komersialisasi, rasionalisasi

pertanian sebagai suatu sistem perusahaan dan differensiasi sebagai gejala yang lazim menyertai proses industrialisasi.

Monsher menganggap teknologi pertanian senantiasa berubah. Perubahan itu diperlukan sebagai syarat mutlak dalam pembangunan pertanian. Apabila tidak ada perubahan dalam teknologi maka pembangunan pertanian pun terhenti. Produksi terhenti kenaikannya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang makin meningkat oleh hama penyakit yang makin merajalela. Dalam hal ini Monsher mengartikan teknologi pertanian sebagai cara-cara bertani (Mubyarto, 1989: 235).

Modernisasi teknologi pertanian kenyataannya mencakup pemakaian bibit unggul (VUTW = Verietas Unggul Tahan Wereng), insektisida, dan pestisida, pupuk, intensifikasi, irigasi bantuan kredit melalui penyelenggaraan pertanian yang lebih canggih. Di satu pihak tindakan itu mendorong pelaksanaan pertanian sebagai usaha yang rasional dan efisien hingga mampu mencapai produktivitas dan keuntungan secara maksimal. Di pihak lain modernisasi pertanian yang menerapkan mekanisasi dan traktorisasi juga mengakibatkan penggeseran kesempatan kerja di pedesaan. Terjadinya perkembangan dan penggeseran itu menyebabkan prinsip-prinsip gotong-royong yang selama berabad-abad menjadi ciri kehidupan masyarakat petani di pedesaan tidak dapat lagi sepenuhnya dipegang. Kehidupan para petani mulai terarah pada prinsip rasio nalisasi, efisiensi, dan komersial. Masalahnya dalam kurun waktu hampir selama tiga dasa warsa sampai sejauh mana perubahan-perubahan itu telah terjadi sebagai akibat langsung modernisasi pertanian pada sendi-sendi kehidupan sosial budaya masyarakat petani di pedesaan.

a. Struktur Pemilikan Tanah

Sebagai akibat tekanan demografi, struktur pemilikan tanah atau penguasaan tanah menjadi sangat mencolok dalam struktur agraria. Seperti proses fragmentasi, ketunakismaan di satu pihak, dan derajat konsentrasi di pihak lain. Proses itu menjadi makin kuat akibat terjadinya proses komersialisasi antara dua

ujung polarisasi pemilik tanah luas dan pemilik tanah sempit, sementara itu modernisasi teknologi pertanian yang dilancarkan sejak Pelita I sangat meningkatkan proses tersebut (Sediono M.P. Tjondronegoro, 1990:1–14); padahal pada permulaan dasar warsa 1960-an tatkala pelaksanaan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) dan UUPBH (Undang-udang Pokok Bagi Hasil) baru saja dimulai dan kemudian macet, kesimpulan tersebut telah nampak mencolok (tabel 3), bahkan di desa-desa tertentu seperti di Sambirejo, Mantingan, Ngawi dan Desa Bukur, Patianrowo, Nganjuk persentasi tuna kismanya melebihi 40% dari seluruh penduduk desa (tabel 4 dan 5). Meningkatnya kemakmuran pada dasa warsa 1970–1980-an menunjukkan kecenderungan ke arah parselisasi dan polarisasi tanah yang makin menguat.

Tabel 3 Stratifikasi Sosial Berdasarkan atas Pemilikan Tanah di Jawa Timur pada Tahun 1960-an

Jumlah penduduk Jawa Timur	Jumlah Cacah	Jumlah RT/KK	%	Stratifikasi Sosial
Total	21.828.020	–	100	–
Penduduk Kotamadya	1.878.628	–	–	–
Penduduk Kotamad-ya + Kota Kabupaten	2.182.802	–	10	
Penduduk Pedesaan	19.645.218	2.806.460	90	–
a. Tak bertanah	8.363.283	1.194.755	–	(100%)
b. Pemilik tanah	11.281.935	1..611.705	–	(42,56%) terdiri dari
1.0,00–0,50 ha	–	933.615	–	(33,27%) tani miskin
2. 0,51–5,00 ha	–	673.051	–	(23,98%) tani sedang
3. 5.01–10,0 ha	–	4.369	–	(0,16%) tani kaya
4. 10,01–dst.	–	670	–	(0,02%) tuan tanah

Sumber: Diolah dari Sensus Penduduk 1961, Sensus Pertanian 1963, dan E. Utrecht, Landreform in Indonesia, BIES, Vol. V No. 3, P.76–88

Tabel 4 Jumlah Pemilik dan Luas Tanah yang Dimiliki di Desa Sambirejo, Sampel 865

No.	Luas tanah (hektar)	Jumlah	%	Keterangan
1.	Tak bertanah	546	63,12	
2.	Pemilik Tanah	319	37,88	
3.	a. 0,00 – 0,50	(175)	20,23	
	b. 0,00 – 1,00	(101)	11,68	
	c. 1,10 – 2,00	(26)	3,01	
	d. 2,10 – 5,00	(13)	1,504	
	e. 5,00 – 10,00	(1)	0,116	
	f. 10,00 – lebih	(3)	0,347	
	Jumlah	865	100%	

Sumber: Buku Leter C Desa Sambirejo, tahun 1963

Tabel 5 Jumlah Pemilikan dan Luas Tanah yang Dimiliki di Desa Bukur, Sampel 953

Luas Pemilikan Tanah (Ha)	Jumlah	Prosentase
Tidak memiliki	546	57 %
0 – 0,50	294	30,9%
0,51 – 1,00	70	7,4%
1,01 – 2,01	25	2,62%
2,01 – 5,00	13	2,62%
5,00 – lebih	5	0,42%
Jumlah	953	100%

Sumber : Buku Leter C, tahun 1963

Berdasarkan atas laporan hasil studi Dinamika Pedesaan Survai Agronomi Ekonomi 1979 (SDP–SAE) yang memusatkan perhatiannya pada masalah pertanahan serta kelembagaan yang

ada hubungannya dengan masalah pertanahan telah melakukan penelitian di desa-desa di Jawa Timur (3 desa), Jawa Tengah (3 desa), Jawa Barat (6 desa), dan Sulawesi Selatan (3 desa) menyimpulkan bahwa proses pemiskinan (puperisasi) dalam hal pemilikan tanah/penguasaan tanah di desa-desa memang tengah terjadi (tabel 6), (Gunawan Wiradi, Makali, 1984.43–104).

Kenyataan lainnya ditunjukkan oleh tabel 7 yang memberikan gambaran pengepingan pemilikan tanah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat pada dekade 1970-an. Indeks *gini* pemilikan tanahnya rata-rata di atas 0,77; suatu tingkat keseimbangan yang berat. Dari tabel 7 ini pula dapat dilihat bahwa sekitar 55% rumah tangga di Desa Geneng, Jati dan Sukasari merupakan rumah tangga tunakisma. Rumah tangga pemilik tanah sekitar 45%, itu pun masih harus dibedakan menjadi lapisan petani miskin (berlahan sempit), petani sedang, dan petani kaya. Malahan di Desa Geneng dan Janti lebih dari 55% luas tanah dimiliki oleh kurang dari 45% rumah tangga.

Tabel 6 Perubahan Jumlah Tuna Kisma Selama 10 Tahun (1970/1971) – 1980/1981) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat

Desa	Jumlah RT (1972) (%)	Jumlah Rumah Tangga Tuna Kisma		Pertambahan Tuna Kisma (%)
		(1970/1971) (%)	(1980/1981) (%)	
A. JAWA TIMUR	–	–		–
1. Geneng	131	38	60	22%
2. Janti	132	52	56	4%
3. Sukasari	114	41	50	9%
B. JAWA TENGAH	–	–	–	–
1. Kebanggaan	143	26	58	32%
2. Wanarata	138	1	28	27%
3. Rawasari	106	48	65	17%

1	2	3	4	5
C. JAWA BARAT	–	–	–	–
1. Sentul	107	5	30	25%
2. Mariuk	114	23	70	37%
3. Jati	128	22	32	10%
4. Suka ambil	148	–	23	–
5. Balida	140	-	59	–
6. Warga Binangun	1388	–	73	–

Sumber: Gunakan Wiradi-Makalli, Penguasaan tanah dan Kelembagaan, dalam: *Prospek Pembangunan Eko Pedesaan Indonesia*, 1984, hal. 55.

Tabel 7 Jumlah Rumah Tangga Pemilik Tanah/Sawah, Rata-rata Luas Pemilikan dan Indeks Gini di Jawa Timur dan Lain-lain Tahun 1982

Desa	Jumlah Resep (RT)	Jumlah RT		Rata-rata Pemilikan		Indeks* Gini
		Tunakisma	Memiliki sawah	Per Rumah Tangga	Per Pemilik	
	(RT)	(%)	(%)	(ha)	(ha)	
1	2	3	4	5	6	7
A. JAWA TIMUR	–	–	–	–	–	–
1. Geneng	131	60	40	0,37	0,55	0,78
2. Janti	132	56	44	0,22	0,51	0 67
3. Sukasari	114	50	50	0,37	0,73	0,85
B. JAWA TENGAH	–	–	–	–	–	–
1. Kebanggan	143	58	42	0,29	0 68	0 84
2. Wonoroto	138	28	72	0 32	0 44	0,61
3. Rawasari	106	64	36	0,31	0,87	0 85

1	2	3	4	5	6	7
C. JAWA BARAT	–	–	–	–	–	–
1. Sentul	107	30	70	0,38	0 54	0 60
2. Mariuk	114	70	30	0.50	1 67	0 87
3. Jati	128	32	68	0 39	0 57	0.71

Sumber : Gunawan Wiradi-Makali. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan, dalam. *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, 1984, hal. 52)

Indeks *gini* adalah suatu alat ukur distribusi. yaitu angka yang menunjukkan rasio antarluas busur dan luas segi tiga dalam kurva Lorena, yang berkisar antara 0 sampai 1. Angka 0 = sempurna, artinya seluruh luas tanah terbagi rata antara rumah tangga di desa dengan masing-masing memiliki luas yang sama. Angka 1 menunjukkan ketimpangan mutlak, artinya seluruh tanah di desa hanya dimiliki oleh seorang saja.

Ironisnya setelah hampir dua dasa warsa dilaksanakannya modernisasi teknologi pertanian pada tahun 1980-an justru jumlah tuna kisma di Jawa Timur meningkat. demikian pula di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Meningkatnya proporsi tuna kisma itu jelas akan menimbulkan masalah-masalah sosial bila penyediaan kesempatan kerja di luar pertanian tidak digalakkan.

Seperti halnya lapisan tuna kisma. lapisan petani miskin atau petani berlahan sempit (pemilik lahan 0,1 – 0.5 ha) selama satu dasa warsa (1973–1983) secara nasional jumlahnya meningkat dari 57,9% menjadi 63,1%, tetapi jumlah petani sa-

Tabel 8 Jumlah Rumah Tangga Petani Berdasar Golongan Luas Pemilikan Tanah Tahun 1973 – 1983

Daerah Pedesaan / Tahun	0,5 ha	0,5 ha	Jumlah
1	2	3	4
Jawa			
1973	4.211.5	3.067.8	7.279.3
	(59,9)	(42,1)	(100)
1983	6.983.2	4.078.5	11.061 7
	(63,1)	(36,9)	(100)

1	2	3	4
Luar Jawa			
1973	1.376,0	3.511.9	4 997,9
	(28,2)	(71 8)	(100)
1983	2.133.5	5.364 5	7.498 0
	(28,5)	(71.5)	(100)
Indonesia			
1973	5.587,5	6.79,7	12 167,2
	(45,9)	(44,1)	(100)
1983	9.116,7	9.443.0	18.559.7
	(49,1)	(50,9)	(100)

Sumber : Biro Pusat Statistik Tahun 1985

ngat miskin (dari 0,1 – 0,2) menunjukkan gejala menurun. Diduga karena lahan sempit yang telah tidak ekonomis lagi untuk diolah pemiliknya terpaksa dilepas kepada orang lain atau lapisan lain yang lebih mampu. Jumlah petani golongan ini menurun dari 36,4% pada tahun 1973 menjadi 16,4% pada sensus pertanian 1983. Sebaliknya petani sedang (pemilik lahan 0,5–0,99 ha) dan petani kaya (pemilik lahan lebih dari 1 ha) yang pada sensus pertanian tahun 1973 berjumlah 14,4% dan 21,2% meningkat menjadi 29,3%.

Berdasarkan atas data-data di atas tidak dapat dipungkiri lagi bahwa akumulasi tanah telah terjadi. Data tabel 6 dan 7 memberikan gambaran atau petunjuk proses akumulasi pemilikan tanah yang tengah berlangsung.

b. Cara Pengolahan Lahan

Cepat atau lambat modernisasi teknologi pertanian pasti akan menggeser pemakaian alat pengolahan tradisional seperti bajak, *garu* (garpu-grobak), dan alat pengambilan air memakai timba dengan alat pengolahan hasil teknologi modern seperti traktor dan pompa. Penggeseran itu menyebabkan makin

berkurangnya pemakaian binatang ternak dalam produksi pertanian. Peralihan pemakaian teknologi tradisional ke teknologi modern tidak dapat dihindari karena tuntutan efisiensi dalam proses produksi, misalnya keperluan untuk menanam pada musim yang tepat, dalam tempo yang cepat pula. Faktor lainnya makin langkanya tenaga kerja di pedesaan.

Namun demikian pemakaian hasil-hasil teknologi modern seperti pompa disel dan traktor nampaknya baru dinikmati oleh para petani kaya atau petani yang memiliki/menguasai lahan pertanian luas. Hal itu ternyata dari hasil penelitian di Desa Mariuk Jawa Barat dan Desa Geneng, di Jawa Timur. Di kedua desa itu petani pemilik traktor ialah petani-petani bertanah luas, yaitu mereka yang memiliki tanah garapan masing-masing antara 1,5 ha – 9,0 ha.

Sebagian besar pemilik traktor membelinya dengan KIK (Kredit Investasi Kecil) atau memanfaatkan fasilitas kredit lewat dealer. Hanya sebagian kecil dari mereka membeli dengan tunai (Masjidin Siregar – Aladin Nasution, 1984:139). Menurut hasil Survey Agro Ekonomi tahun 1983 traktor mulai memasuki lingkungan petani kaya di Jawa Timur sekitar tahun 1980-an, karena dalam SAE 1975 traktor itu belum ada di desa penelitian. Masuknya traktor di lingkungan petani kaya di Jawa Barat nampaknya 10 tahun lebih awal. Tabel 9 menggambarkan perkembangan pemakaian traktor di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Mengapa petani di Jawa Timur pada umumnya, khususnya para petani berlahan sempit tidak lebih tertarik pada traktor dibanding dengan usaha tani di kawasan Asia lainnya. Sebab utamanya karena sempitnya lahan pertanian, rendahnya tingkat upah, tingginya biaya operasional dan harga pembelian traktor baru. Kendala itu menghambat bertambahnya pembelian traktor, dan perluasan sistem sewa yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas luasnya lahan.

Masalah lain yang paling penting dalam pertanian di samping unsur lahan, adalah masalah pengairan atau irigasi. Bagi mereka yang memiliki lahan pertanian dengan sistem irigasi teknis ataupun setengah teknis masalah pengairan tidak lagi menjadi persoalan.

Tabel 9 Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja, Pria, Ternak dan Traktor Per Ha Tahun 1970/1971 dan 1980/1981

Desa	Tenaga Pria		Ternak			Traktor			
	1970 / 1971	1980 / 1981	Perubahan (%)	1970 / 1971	1980 / 1981	Perubahan (%)	1970 / 1971	1980 / 1981	Perubahan (%)
Jawa Timur									
1. Janti	325	316	– 3	51	47	– 8	0	0	0
2. Geneng	446	227	– 48	110	39	– 65	0	12	+)
Jawa Tengah									
1. Rowosari	472	371	– 27	61	40	8	0	0	0
2. Kebanggan	231	210	– 10	43	65	51	0	0	0
3. Wonoroto	422	445	5	68	66	3	0	0	0
Jawa Barat									
1. Mariuk	265	227	– 14	22	1	– 97	0,5	16	3208
2. Jatisari	960	593	– 38	9	13	44	0	0	0

Sumber : Masjidin Siregar – Aladin Nasution;
Perkembangan Teknologi dan Mekanisasi di Jawa, 1983–158.

Salah satu penghambat dalam peningkatan intensifikasi pertanian ialah masalah pengairan yang belum tersedia sepanjang tahun. Sejak Pelita I pemerintah telah banyak mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya air yang ada dengan membangun waduk-waduk, bendungan-bendungan, saluran, dan sebagainya. Di beberapa daerah yang tidak terdapat pengairan grafitasi, digunakan air tanah, terutama pada musim kemarau. Di berbagai desa di Jawa Timur proses pompanisasi atau deselsasi tengah berlangsung, misalnya di Desa Geneng, Ngawi terdapat tidak kurang 24 buah, sedang di Desa Kenep, sebuah desa kecil di selatan Kota Nganjuk terdapat lebih dari 15 pompa air.

Dari data yang dikumpulkan, ternyata petani pemilik pompa tidak pernah melaporkan kepada lurah atau camat sehingga sulit untuk mengawasi pemasangannya, padahal pemerintah sendiri telah menetapkan bahwa eksploitasi sumber daya alam (termasuk pemboran air) harus seizin pemerintah setempat. Mengingat usaha ini menyangkut kepentingan orang banyak, pemerintah setempat seolah-olah tidak tahu-menahu, namun tidak berarti para petani tidak mau mengurus administrasi pemasangan pompa. Mungkin para petani tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh hingga tidak memanfaatkan fasilitas kredit yang ada dan mereka mengambil prakarsa sendiri.

Pompa-pompa itu selain untuk mengairi sawahnya sendiri, juga dioperasikan untuk kepentingan petani lain dengan sistem sewa per jam. Dengan dimikian petani yang tidak mampu membeli, dapat memanfaatkan jasa itu, namun kemudian muncul pameo, bila dahulu yang bekerja (Jawa : buruh) adalah buruh tani dan petani miskin, sekarang terbalik yang memburuh justru orang-orang kaya yang memiliki faktor-faktor produksi seperti huller dan lain-lain.

Tujuan pemilikan traktor dan pompa juga tidak terlepas dari unsur usaha (bisnis), hingga para pemilik traktor tidak jarang mengubah fungsi mesin traktor menjadi pompa air atau slep. Tujuan pola tanam yang tepat musim traktor menjadi pompa air atau slep. Tujuan pola tanam yang tepat musim secara serempak menyebabkan makin pendeknya waktu pengolah-

an lahan, hingga kebutuhan traktor sangat dirasakan. Apalagi bila saluran irigasi tidak mampu memenuhi kebutuhan air. Ternyata kehadiran traktor dan pompa air meskipun terpaksa harus menggusur tenaga manusia yang bekerja secara tradisional dapat diterima sebagai suatu keharusan, di lain pihak bursa tenaga kerja pada masa tanam juga terus meningkat, hingga upah kerja para buruh tani pun meningkat pula, akibat kurangnya tenaga kerja pada musim tanam yang serempak. Dengan demikian traktorisasi dan pompanisasi tidak menimbulkan keresahan, dan dari sudut ekonomi masih memungkinkan. Dengan demikian pengusahaan pompa oleh petani akan terus berkembang pada masa-masa mendatang, Tabel 10 berikut memberikan gambaran kelas petani yang paling banyak memiliki traktor.

Dengan berhasilnya rehabilitasi sarana irigasi, berbagai bendungan dan pompanisasi areal penanaman padi telah meningkat dari 1.154.611 ha padi sawah dan 68.129 ha padi gogo pada 1970 menjadi 1.455.454 ha. padi sawah dan 81.547 ha. padi gogo pada tahun 1987 (Jawa Timur dalam angka, 1987. 67).

Tabel 10 Jumlah Petani Pemilik Pompa Air dan Traktor Menurut Luas Pemilikan Sawah Tahun 1981

Kelas pemilikan sawah (ha)	Jumlah pemilik Pompa air (orang)	Jumlah pemilik traktor (orang)
1. 1,50 – 1,90	1	1
2. 2,00 – 2,99	5	3
3. 3,00 –	3	2

Sumber : Data primer

Di samping terus meningkatnya luas areal tanaman produksi rata-rata hektar juga meningkat dari 24,17 padi sawah dan 18,45 padi gogo pada 1970 menjadi 38,01 padi sawah dan 28,94 padi gogo pada tahun 1987. Cara pengolahan yang belum dapat digantikan oleh teknologi modern ialah pembuatan pematang, pemindahan bibit dari persemaian ke lahan penanaman

(Jawa : tandus, tanam), dan pekerjaan menyiangi padi, masih dikerjakan tenaga manusia secara tradisional, namun dewasa itu pasaran tenaga kerja untuk hal itu juga telah sangat kompetitif (borongan). Apabila pemupukan masih dilakukan oleh tenaga manusia, maka penyemprotan insektisida atau pestisida dilakukan memakai semprotan modern untuk menggantikan "merang (Jw. jerami)," dan juga dilakukan dengan pesawat terbang (tahun 1967 – 1968).

c. *Cara Memanen*

Musim yang sangat menggembirakan dalam siklus kehidupan sosial pedesaan yaitu tatkala musim panen tiba (Jawa: mongso panen). Tidak ada satu musim pun yang sesibuk musim panen, karena semua penduduk sibuk mencari bawon", sebagai upah membantu menuai padi milik keluarga atau tetangga (derep). Alat yang dipakai disebut *"ani-ani"*.

Keadaan menjelang panen seperti di Desa Kenep, sebelah selatan Kota Nganjuk, Jawa Timur pada masa lalu dapat dilukiskan sebagai musim yang penuh keceriaan, dengan langit bersih angin sepoi-sepoi di tengah-tengah lautan padi yang menguning keemasan (Jawa : ngemping) di sana-sini mulai berdiri terop dari daun kelapa (Jw. blarak), karena pemilik tanaman padi menyelenggarakan upacara *"wiwit"* atau *"methil"*, suatu upacara menandai dimulainya pemetikan butir-butir padi yang telah masak, dengan melakukan upacara selamatan di sawah.

Dengan berdirinya terop-terop penduduk desa dan sekitarnya mulai berbondong-bondong berkumpul di dekat areal tanaman padi yang akan dipanen (Jawa, baris), siap untuk membantu menuai padi pemilik sawah. Penderep dari luar kampung disebut *nglanjo*. Apabila para penderep itu mendapat pesan khusus, atau karena diajak oleh pemilik pemotongan padi itu disebut ani-ani. Upah mereka yaitu bagian tertentu dari padi yang mereka potong disebut *bawon*. Penentuan bawon biasanya sepertujuh, seperdelapan dan seterusnya (*moro pitu, moro wolu,* dan seterusnya). Penunjukan itu berdasarkan atas kriteria keluarga, tetangga dekat, atau orang yang memiliki hubungan

dekat, dan mereka yang membantu menyiapkan lahan tanpa menerima upah (Jawa = rewang).

Dilaksanakannya modernisasi teknologi pertanian, khususnya melalui program Bimas pada tahun 1970-an mengakibatkan sistem derep atau bawon itu berangsur-angsur tetapi pasti digantikan oleh sistem kerja borongan. Alat yang dipakai bukan lagi ani-ani, melainkkan sabit. Penanaman bibit unggul seperti jenis PB 5, PB 8, IR 36, IR 34, C. %, dan Cisadane memiliki tinggi batang padi merata (Jawa : rampak) dan tegak lurus, sehingga pemanenan padi dengan menggunakan sabit dirasa lebih efisien.

Menurut hasil survai yang dilakukan Collier, pada tahun 1987, meneliti ulang desa-desa yang disurvai pada tahun 1970, terbukti panen derep yang dulu perhektar dikerjakan 200–500 penderep dengan sistem bawon, saat ini cukup mengupah 10–20 orang. (Sediono MP Tjondronegoro, 1990.3). Sistem derep dan bawon sekarang telah dianggap tidak efisien, upah padi dalam bentuk bawon dianggap terlalu mahal. Pekerjaan lebih efisien, cepat selesai dengan upah yang dapat diperhitungkan secara pasti, dapat dibayar dengan uang atau padi dalam jumlah tertentu, bila mengganti penderep dengan tenaga buruh upahan atau borongan. Dalam proses pergeseran ini mereka yang banyak kehilangan lapangan pekerjaan ialah para wanita.

Pada masa silam sistem *sambatan, sayan, rewang* (saling membantu), *sakap-menyakap, ngepak-ngedak* menjadi ciri umum pedesaan; saat ini sistem itu makin memudar.

Persepsi petani mengenai keuntungan di bidang pertanian juga berubah. Dahulu padi yang dipanen setelah dikeringkan, diikat sebelum digunakan disimpan dulu dalam lumbung setelah melalui suatu upacara (jawa: slametan). Sekarang padi yang telah tua dijual di sawah dengan sistem tebasan. Ternyata sistem tebasan lebih menguntungkan dan praktis, di samping untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini memberikan petunjuk bahwa komersialisasi telah meluas

di desa-desa. Sistem tebasan meluas di daerah-daerah dataran rendah, sedang di berbagai daerah pegunungan sistem *derep* masih berlaku.

Beberapa indikator dapat dipakai untuk mengukur tingkat komersialisasi petani pedesaan, antara lain:

a. penggunaan tenaga upahan dalam produksi padi
b. efisiensi untuk mengurangi biaya
c. pemanenan secara tertutup atau borongan
d. penjualan padi secara tebasan atau langsung (Collier, (1990:8).

d. Pengolahan Pasca Panen

Pengolahan pasca panen seperti pengeringan padi bertangkai memerlukan perawatan demikian rumit. Setelah bibit padi yang ditanam dari jenis baru yang mudah dirontokkan pemrosesannya makin sederhana dan mudah. Apalagi bila ada bak penjemuran. Demikian pula pengolahan beras bergeser dari pekerjaan rumah tangga yang memakai alat tumbuk tradisional seperti alat tumbuk (Jawa. *alu*), lesung atau *lumpang*, ke mesin-mesin menggiling ***huller*** atau *sleep,* milik pengusaha atau petani kaya. Irama lesung berbunyi (Jawa: *grundung*) yang dilakukan ibu-ibu di desa tatkala ada yang akan punya hajat tinggal kenangan.

Hulerisasi di desa-desa serta beroperasinya tengkulak-tengkulak padi dengan mobil ke rumah-rumah petani menggusur lapangan pekerjaan para buruh penumbuk padi dan penjual beras eceran, yang biasa dilakukan para wanita pedesaan. Wanita-wanita itu banyak kehilangan pekerjaan. Mereka kemudian pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Bagi mereka yang minimal tamat SD, apalagi yang tamat SLTP atau SLTA pekerjaan di atas dianggap terlalu berat serta tidak menarik. Dari pada di desa harus melakukan pekerjaan itu lebih baik mereka pergi ke kota untuk bekerja apa saja, seperti pembantu rumah tangga, pedagang asongan, bahkan tidak jarang mereka terjerumus kelembah hitam: pelacuran. Data-data tentang sebab-sebab penduduk bermigrasi ke kota memberikan

petunjuk bahwa kemiskinan sebagai faktor utamanya (Mubyarto, 1977:134–136).

Menarik untuk diperhatikan tentang perkembangan jumlah WTS (Wanita Tuna Susila) dan mucikari di Jawa Timur selama lebih kurang satu dasa warsa, nampak terus meningkat. Pada tahun 1972 jumlah WTS di Jawa Timur yang tercatat ada 9.702, meningkat menjadi 13.038 (33,36%) pada tahun 1978. Catatan terakhir pada kantor statistik Jawa Timur ada 14.114 WTS yang tersebar di seluruh kabupaten dan kotamadya (1982) (meningkat 44,12%). Mereka kebanyakan berasal dari daerah pedesaan (Jawa Timur dalam angka, 1987: 67). Tabel 11 menunjukkan perkembangan jumlah WTS, germo, dan mereka yang berhasil direhabilitasi dari tahun 1972 sampai 1987. Tabel 12 menggambarkan pengangguran wanita di Indonesia antara tahun 1971–1980.

Menurut perhitungan Peter Timer "Teknologi Huler" telah merampas lapangan pekerjaan tidak kurang dari 100.000 – 160.000 lapangan kerja wanita pedesaan (Mubyarto, 1977: 39–59). Tabel 13 menggambarkan penggunaan tenaga kerja yang terus berkurang dalam pertanian padi di desa-desa Jawa pada umumnya dan Jawa Timur khususnya selama sekitar 100 tahun dari 1875–1980.

Haruslah diakui betapa pun besarnya pengangguran yang timbul karena teknologi baru di bidang produksi dan pengolahan padi jenis baru nampaknya keresahan secara besar-besaran tidak terjadi. Ini memang menimbulkan teka-teki bagi banyak pengamat luar.

Tabel 11 Jumlah Wanita Tunasusila di Jawa Timur Tahun 1972–1987

Jenis	1972	1978	1987
1	2	3	4
1. Dalam bordil	7.745	11.089	14.114
2. Di luar bordil	1.957	2.102	–

1	2	3	4
3. Lokalisasi	1.957	294	–
4. Jumlah germo	460	2.552	–
5. Jumlah WTS yang telah disensus	1.949	4.333	–
6. Jumlah WTS yang direhabilitasi :			
a. bekerja	16	119	–
b. kawin	113	428	–
c. diambil keluarga	–	–	–
d. pulang ke tempat asal	847	855	–
e. lain-lain	–	51	–

Sumber : Statistik Jawa Timur, 1981 hal. 334

Tabel 12 Persentasi Wanita Penganggur di Indonesia Tahun 1971–1980

	1971	1980	% kenaikan
1	2	3	4
A. PEDESAAN			
1. Pengangguran terbuka	27,9	50,8	1,8
2. Pengangguran tertutup	45,4	50,6	1,1
B. PERKOTAAN			
1. Pengangguran terbuka	26,1	31,2	2,8
2. Pengangguran tertutup	40,3	44,2	1,1

1	2	3	4
C. JUMLAH TOTAL			
1. Pengangguran terbuka	27,3	44,4	1,6
1. Pengangguran tertutup	44	49,1	1,1

Sumber : BPS, Sensus 1971 dan 1980

Tabel 13 Penggunaan Tenaga Kerja dalam Pertanian Padi di Jawa selama 100 tahun (1975–1960) – Jam/ hektar)

Tahun	Persiapan						
	Benih dan persiapan sawah	Pemindahan bibit	Jumlah	Pemeliharaan	Panen	Pengeringan Penyimpanan	Semua kegiatan
1875–1980	666	233	899	466	390	134	1899
1924–1930	318	356	704	820	531	68	1523
1968–1969	345	224	650	287	260	69	1275
1977–1980	242	212	454	356	294	48	1152
% Perubahan 1968–1969–1977–1980.	–30	– 5	–20	– 8	+ 13	– 19	– 10

Sumber : Chris Manning, Revolusi Hijau, Kesempatan kerja dan Perubahan Ekonomi Jawa, dikutip dari Prospek Pedesaan 1987 : 39–59

Persoalan itu dapat dijelaskan melalui kriteria yang oleh lingkungan petani berlahan sempit dianggap rasional. Kehidupan yang terserap dalam keterbatasan ekonomi yang merendah, asal bisa hidup (Jawa: *pokoke urip*) memaksa untuk terus bergulat mempertahankan kelestarian ekonomi mereka yang oleh Chayanov (1966) disebut sebagai "pemerasan diri sendiri' atau menurut Geertz (1963) sebagai "involusi pertanian" Dalam keadaan semacam itu mereka harus bekerja keras dan lama untuk setiap hari guna memperoleh pendapatan secara minimal. Dengan kondisi tenaga kerja melimpah karena keluarga besar, mereka lebih suka memilih preferensi kombinasi berbagai kegiatan yang mampu menjamin survivalitas ekonomi keluarga meski hanya memberikan penghasilan sangat minimal. Alternatif yang dipilih menghindari usaha yang lebih produktif namun kadar spekulasinya tinggi. Akibatnya para petani berlahan sempit terikat oleh kehidupan rutin. Pada umumnya mereka menganut apa yang disebut James C. Scott (1976) sebagai "Etika Subsistence," yaitu prinsip mengutamakan memperkecil resiko *(risk minimization)* dari pada *profit maximization.* Dengan rasionalitas demikian mereka menerima dan menerapkan setiap sarana produksi pertanian modern yang ditawarkan oleh pemerintah.

Pertama, petani berlahan sempit lebih tanggap terhadap pemakaian pupuk. Terbukti penggunaan pupuk perhektar pada petani berlahan sempit lebih banyak dibanding dengan petani berlahan luas (1 ha), dalam usaha mereka untuk mempertinggi produksi seperti terlukis pada tabel 14.

Kedua, petani berlahan sempit menguasai provinsi luas lahan usaha tani lebih produktif dibanding petani berlahan luas. Petani berlahan sempit mampu melaksanakan penanaman dua kali dalam setahun, seperti tergambar pada tabel 16 sudah barang tentu pelaksanaan penanaman padi tersebut memerlukan tenaga tidak sedikit.

Ketiga, petani berlahan sempit mengolah lahan pertaniannya dengan intensif sekali, karena itu mereka memerlukan tenaga

kerja lebih besar dibanding dengan tenaga kerja yang diperlukan oleh petani berlahan luas.

Pengerahan tenaga kerja yang banyak memang diimbangi dengan produktivitas yang lebih tinggi dibanding produktivitas penanaman padi pada lahan yang luas (lihat tabel 15).

Tabel 14 Jumlah Pemakaian Pupuk dalam Program Bimas Semitap Hektar Menurut Luas Usaha Tani Tahun 1982 – 1983

Golongan Luas tanam	Luas Tanam (ha)	JENIS PUPUK					Semua Jenis Pupuk
		Urea (kg/ha)	TsP/ DAP (kg/ha)	KCL (kg/ha)	ZA (kg/ha)	PKK kimia (kg/ha)	
–0,25	513461,80	228,87	90,46	4,57	2,66	0,47	326,94
0,25–0,49	903946,39	194,40	78,54	5,53	2,64	0,48	281,57
0,50–0,99	1325671,49	160,29	66,36	6,29	2,62	0,42	235,96
1,00–1,99	1208850,19	125,59	52,57	5,57	2,99	0,47	219,69
2,00	823568,56	118,92	46,71	4,55	1,62	0,36	98,56

Sumber: BPS, Tabel Analisis Sensus Pertanian 1983

Tabel 15 Produksi Padi Setiap Hektar Menurut Luas Usaha Tani di Jawa dan Bali Tahun 1971 – 1978

Luas Tanam	1970/1971	1971	1978	Ketr.
– 0,2	n.d	3916	3925	–
0,2 – 0,5	2942	3435	3485	–
0,5 – 1,0	2477	3320	3348	–
1,0 – 2,0	2397	2948	3241	–
2,0 +	2335	2694	3271	–

Sumber: Prospek Pedesaan 1987, hal. 34

Tabel 16 Luas dan Persentasi Sawah yang Dapat ditanami Padi Duakali dalam Setahun Menurut Golongan Luas Sawah yang Ditanami

Golongan Luas Sawah yang Ditanami (ha)	Luas (ha)	Persentasi (%) terhadap Total	Total Luas Sawah (ha)	Persentasi (%)
– 0,49	432.724.62	28,68	1.508.500,5	100
0,50 – 0,99	519.980,41	21,73	2.377.899,0	100
1,00 – 1,99	524.263,51	14,60	3.668.081,0	100
2,00 – 4,99	378.270,03	8,06	4.447.985,9	100
5,00 +	115.835,63	4,36	5.396.699,2	100

Sumber: BPS, Tabel 57, Sensus Pertanian 1982

e. Transportasi dan Penjualan Padi

Perkembangan teknologi transportasi di Jawa Timur tercermin pada pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di seluruh wilayah itu. Bila pada tahun 1970 jumlah kendaraan bermotor dari berbagai jenis yang digunakan sebagai angkutan berjumlah 18.478 (Jawa Timur dalam angka 1970, hal. 279) menjadi 143.609 pada tahun 1987 Jawa Timur dalam angka 1987. 166) berarti meningkat 678%. Kemajuan teknologi itu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pertanian (padi). Apalagi dengan meluasnya sistem tebasan. Pengangkutan padi dengan cara memikul yang memerlukan puluhan tenaga, tidak akan dijumpai lagi, diganti oleh angkutan bermotor sampai yang beroperasi ke pelosok-pelosok desa. Lebih dari itu tengkulak dari petani kaya akan pengusaha dengan mobilnya juga mendatangi rumah-rumah petani yang menjual padi.

Di muka telah diuraikan bahwa di daerah dataran rendah sistem derep dengan bawonnya secara berangsur-angsur mulai lenyap. Menurut pengakuan para penebas dari daerah Pare, Kediri, dan penebas dari daerah Sawahan, Nganjuk sistem derep dan bawon tinggal bertahan di daerah pegunungan. Di daerah-daerah yang pada tahun 1970-an merupakan daerah santri

dengan ikatan gaya santri (Islam) yang kuat seperti di sekitar Jombang dan Mojokerto (Sartono Kartodirdjo, 1987.75) sistem tebasan yang komersial secara luas telah menggantikan sendi-sendi ikatan komunal (Wawancara pada bulan April dan Mei 1990).

Pemerintah dengan lembaga BULOG berusaha menampung produksi padi yang melimpah lewat KUD-KUD. Koperasi-koperasi itu memperoleh fasilitas kredit Bank BRI, guna melakukan pembelian beras secara garis besar KUD menempuh empat pola pembelian beras atau padi. *Pertama,* KUD melakukan pembelian secara murni dan langsung dari para petani. yaitu bagi KUD yang memiliki mesin giling standar. *Kedua,* KUD melakukan pembelian gabah, pemrosesan beras-nya diserahkan kepada pengusaha (baca : Cina) *Ketiga,* KUD membeli beras dari para bakul kemudian distandarkan, dan pola keempat, KUD membeli beras yang telah (standar) dari pengusaha (baca: Cina). Dengan pola semacam itu seperti biasa KUD harus bersaing dengan tengkulak yang bertindak lebih lanjut lebih agresif, dibanding dengan KUD yang sering dilihat birokrasi, interes pribadi, harga penawaran rendah, dan pembayaran yang tertunda-tunda.

f. Perusahaan Pola Konsumsi

Salah satu faktor yang membedakan masyarakat pedesan dan perkotaan adalah konsumsi. Dengan berhasilnya pembangunan sektor pertanian, meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani, serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti sarana transportasi, komunikasi serta penerangan menjadikan "jarak" antara masyarakat desa dan kota makin hilang. Tradisi lama, kepercayaan, bentuk rumah, bahasa, pakaian, tontonan atau hiburan, termasuk makanan telah berubah.

Di perbagai pelosok pedesaan, di Jawa Timur sampai dasa warsa 1960-an, lapisan buruh tani, tani miskin, dan tani sedang masih membagi makanan pokoknya "nasi" menjadi tiga musim selama setahun, yaitu musim panen dengan konsumsi nasi beras) (April – Juli), musim kemarau, (nasi – *gaplek)* (Juli –

Oktober), dan musim paceklik pada bulan Nopember – Maret dengan konsumsi nasi jagung. Ubi kayu dan jagung sebagai bahan pokok berbagai kue, telah digantikan oleh tepung beras dan terigu. Dengan melimpahnya produksi beras setahun penuh seluruh lapisan masyarakat telah mampu mencukupi kebutuhan konsumsinya dengan bahan-bahan pangan itu.

Dalam hal berpakaian, pakaian tradisional seperti kain panjang, selop, blangkon, ikat kepala (iket) juga telah lenyap dari pandangan mata. Jenis-jenis pakaian itu telah digeser oleh berbagai mode pakaian terakhir, meskipun dibuat dari bahan sederhana. Rambut potongan pendek menggantikan "konde" yang terkenal itu. Adat menjamu sesama tamu wanita dengan sekapur sirih dalam nampannya yang khas, (di Jawa disebut *wadah kinang* atau tempat sirih) juga telah lenyap.

Bentuk-bentuk rumah pun telah mengalami "revolusi", dari bentuk, struktur, dan arsitektur tradisional menjadi bangunan rumah modern. Rumah-rumah di desa sekarang hampir semuanya menghadap ke arah jalan. Tidak jarang di pedesaan yang makmur seperti di Kecamatan Gondang Legi, Kecamatan Turen, Kecamatan Batu, Malang, desa Mojo Kendil Kecamatan Ngranggut Nganjuk, Desa Slemanan, Kecamatan Undanawu Blitar, rumah-rumah "orang desa" tidak kalah megahnya dengan rumah para "priyayi" kota. Perubahan yang sedemikian cepat juga berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan komunal *sambat-sinambat* seperti tatkala mendirikan rumah di pedesaan. Aspek-aspek komunal tersebut telah digeser oleh arsitek, tukang, dan buruh upahan karena bentuk bangunan rumah modern keahlian profesional itu. Tinggi dalam tahap-tahap tertentu seperti pemasangan kuda-kuda atau saat-saat menempati rumah batu mereka mengundang tetangga atau sanak keluarganya.

Pola konsumsi lain yang juga berubah dan makin menyamai konsumsi kota dipercepat oleh berbagai media komunikasi massa seperti koran, radio, TV, ataupun film, juga ikut menyebarluaskan pola gaya hidup perkotaan. Komoditas yang diperjualbelikan di pedesaan dengan fasilitas kredit ataupun tunai bukan hanya kebutuhan pokok saja, tetapi juga barang-barang seperti kaset, tape recorder, alat kecantikan, dan berbagai

keperluan yang ditawarkan dari pintu ke pintu dan dipasok pabriknya di kota. Dengan demikian pedesaan telah menjadi pasar potensial. Karenanya kebutuhan uang di masyarakat petani juga makin meningkat.

Perubahan kehidupan yang tampak melanda masyarakat petani juga menyentuh keseniannya. Kesenian tradisional dan seniman-seniman yang berkualitas rendah dalam keadaan "hidup segan mati tak mau" bersaing ketat dengan tape dan video dengan sewa yang rendah tetapi amat populer. Kesenian tradisional seperti kuda kepang, jaranan, kentrung, tanjidor, wayang kancil, wayang orang tinggal namanya saja. Cabang-cabang kesenian seperti ketoprak, ludruk, tayup, dan wayang kulit harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang tengah terjadi agar dapat bertahan.

Perubahan-perubahan sosial di samping karena pengaruh revolusi hijau, secara langsung atau tidak, juga disebabkan oleh revolusi pendidikan, komunikasi, dan trasportasi. Pendidikan tingkat menengah sekarang telah menjadi kebutuhan pokok pemuda pedesaan, untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari sekedar "bekerja sebagai petani di ladang". Bukan suatu hal mustahil anak buruh tani berkat keuletan, ketekunan dan ketabahannya mampu menyelesaikan pendidikan tingkat universitas.

Tidak kalah pula pentingnya revolusi transportasi sebagai hasil pembangunan selama Orde Baru yang patut dibanggakan. Alat pengangkutan seperti pedati *(cikar)*, bendi *(sado)* yang dahulu juga menjadi "simbol" status sosial petani kaya di pedesaan telah diganti kendaraan bermotor. Oleh karena itu jumlah kendaraan bermotor khusus untuk angkutan di Jawa Timur selama satu setengah dasa warsa telah meningkat sekitar tujuh kali.

g. Tanggapan Petani Terhadap Modernisasi Teknologi Pertanian Padi.

Meskipun modernisasi teknologi pertanian padi bertujuan untuk meningkatkan produktifitas petani, ternyata antara

petani berlahan sempit dan petani berlahan luas terdapat perbedaan tanggapan. Kedua kelompok petani itu sama-sama menyambut gembira kebijaksanaan pemerintah dalam hal bibit unggul, pemakaian pupuk, insektisida/pestisida, dan perbaikan irigasi. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya areal tanaman padi dan pendapatan tiap-tiap tahun.

Lain halnya terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam hal kredit bank/Bimas dan tawaran kredit untuk traktor. Para petani kaya lebih tertarik dan memanfaatkan fasilitas itu. Sebaliknya para petani kecil kurang tertarik terhadap traktor karena dianggap kurang atau tidak ekonomis.

Terhadap fasilitas kredit petani berlahan sempit juga kurang tertarik karena itu kurang memanfaatkannya. Berdasarkan atas hasil Survai SAE keengganan itu disebabkan atas perhitungan bahwa kredit yang ditawarkan walaupun menarik juga dirasa akan menimbulkan resiko yang relatif besar. Kenyataannya hasil produksi lahan sampai 0,75 belum memberikan surplus yang mencukupi, seandainya ada musibah menimpa. Dalam keadaan normal porsi hasil produksi lahan seluas itu baru mencukupi 40 % kebutuhan total petani. Sisanya 60 % harus ditutup dengan cara bekerja apa saja yang memberi hasil atau serabutan seperti seperti tergambar pada tabel 17 (Sediono MP, 1990 : 3 – 15). Akibatnya golongan petani ini mengalami kesulitan tatkala pelunasan kredit tiba. Mereka terpaksa harus menjual apa saja, atau hutang sana-sini, bukan tidak jarang mereka terpaksa menunggak.

Perlu dikemukakan bahwa dalam pertanian subsisten kegiatan produksi bercampur dengan kegiatan konsumsi. Hasilnya dibagi dua untuk konsumsi dan untuk pasar. Tidak jarang porsi yang mereka jual ke pasar hanya sebagian kecil dari produksi tersebut. Dengan kondisi yang demikian sudah barang tentu secara logis sukar untuk memenuhi kriteria pemberian kridit oleh kreditor. Di pihak lain kredit bagi petani sendiri merupakan sesuatu yang dianggapnya "rawan".

Tabel 17 Persentasi Pendapatan Rumah Tangga dari Berbagai Sumber Selama Setahun dalam Tahun 1976 di Enam Desa Sampel SDP Menurut Golongan Penguasaan Tanah

Desa	Stratum	n	Sumber Pendapatan				
			Usaha tani (%)	Buruh tani (%)	Peda-gang (%)	Peng-rajin (%)	Lain-lain (%)
Desa A	I	30	11,7	64,7	12,7	0,2	10,7
	II	15	37,0	55,4	0	0	7,0
	III	14	76,0	9,6	0	0	13,6
Desa B	I	24	11,9	52,1	17,4	0,2	18,4
	II	12	49,0	22,3	23,5	1,0	4,2
	III	24	74,6	9,5	3,3	0	13,6
Desa C	I	25	55,1	22,2	21,5	0,8	0,4
	II	12	85,4	14,3	0	0,1	0,2
	III	23	92,5	3,5	3,4	0,1	0,4
Desa D	I	30	26,2	4,4	32,4	25,5	11,5
	II	15	36,9	1,4	32,7	17,1	11,9
	III	15	44,7	0,4	44,5	7,1	3,3
Desa E	I	20	24,3	42,3	2,8	8,0	22,5
	II	20	44,0	9,8	4,3	5,5	36,1
	III	20	64,4	3,0	0	4,3	28,4
Desa F	I	21	28,8	25,4	22,8	1,3	21,7
	II	21	72,5	10,0	10,1	2,3	5,1
	III	18	76,3	0	20,1	2,1	1,5

Keterangan :

n = jumlah rumah tangga sampel

I = rumah tangga pemilik lahan 0 – 0,25 ha

II = rumah tangga pemilik lahan 0,25 – 0,50 ha

III = rumah tangga pemilik lahan 0,50 ha lebih

Sumber : Data primer SDP Survey Rumah Tangga Petani 1977
Dalam PRISMA, 3 April 1978, hal. 44

Meskipun belum dapat dipastikan apakah golongan petani subsisten itu sebagai penunggak terbesar dari kredit yang disalurkan lewat Bimas, kenyataannya kredit itu terus menerus mengalami penunggakan yang tiap tahunnya meningkat. Tabel 18 menunjukkan jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah tunggakan dari tahun 1971/1972 sampai dengan 1984/1985.

Tabel 18 Penyaluran Kredit Bimas dan Inmas pada Tahun 1971/1972 – 1984/1985 (000.000)

Tahun	Realisasi Penyaluran (Rp.000.000)	Pengembalian (Rp.000.000)	Tunggakan		Petani (orang)
			(Rp.000.000)	%	
1971/1972	9.815,1	9.463,7	351,4	3,5	1.538,4
1972/1973	15.330,8	14.569,4	761,4	4,9	2.071,4
1973/1974	36.452,3	33.651,7	2.840,6	7,7	3.106,9
1974/1975	53.096,5	48.437,2	4.659,3	8,7	3.603,2
1975/1976	72.288,5	64.902,3	7.386,3	10,21	3.581,9
1976/1977	71.314,3	61.364,4	9.949,9	13,95	3.004,1
1977/1978	62.084,7	51.543,4	10.541,3	16,97	2.434,5
1978/1979	60.282,9	50.371,4	9.911,5	16,44	2.151,1
1979/1980	49.503,9	42.482,8	7.020,1	14,18	1.606,5
1980/1981	50.115,2	40.545,1	9.570,1	19,09	1.519,8
1981/1982	62.501,8	45.280,5	17.221,3	27,55	4.740,2
1982/1983	59.353,7	37.379,7	21.974	37,02	481,9
1983/1984	23.493,2	16.349,7	7.143,5	30,04	563
1984/1985	5.649,7	4.415,8	1.233,9	21,84	154,9

Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 1987/1988

Di samping faktor di atas, faktor lainnya karena kredit di mata petani miskin dianggap sebagai transaksi secara luas dan tidak harus "berarti" komersial. Kredit mereka anggap salah satu bentuk tolong-menolong sebagai bantuan kepada petani, seperti membantu kepada rekan mereka yang kesusahan bagi mereka yang mampu. Hubungan ini berlandaskan atas hubungan "kekeluargaan antara kedua pihak, tidak bersifat formal. Karena itu ikatannya pun longgar.

4. *Kesimpulan*

Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan bahwa modernisasi teknologi pertanian yang bertujuan meningkatkan produktifitas petani di bidang pangan (padi) demikian pengaruh luas dalam berbagi aspek kehidupan petani.

Pengaruh tersebut di satu pihak bersifat positif seperti cukupnya bahan pangan, meningkatnya pendapatan, serta diterimanya secara luas oleh masyarakat petani teknologi pertanian padi, yang pada gilirannya menimbulkan perubahan kehidupan petani baik dalam hubungan kerja, tradisi komunal, dan makin meluasnya alat-alat teknologi modern. Sisi negatifnya menurut hemat penulis ialah terjadinya polarisasi yang cenderung makin tajam antara petani kaya dan petani miskin, dan belum siapnya lapisan petani golongan bawah untuk memanfaatnya fasilitas finansial yang disediakan seperti fasilitas kredit. Sehubungan dengan itu agar pembangunan akan modernisasi pertanian yang tengah berproses mampu menjangkau sasaran lapisan masyarakat petani paling bawah, buruh tani dan petani miskin seyogyanya yang berwenang dalam masalah itu memberikan kemudahan-kemudahan namun yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial.

Daftar Pustaka

1. Aminuddin Kasdi, 1990, *Masalah Tanah dan Keresahan Petani Jawa Timur* 1960 – 1965, Tesis S.2, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
2. BPS, 1971; *Statistik Indonesia*, BPS, Jakarta.
3. *Jawa Timur dalam Rangka*, 1970 Kantor Statistik Jawa Timur, Surabaya.
4. Faisyal Kasrino, ed., 1984; *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
5. Hunter, Gury, 1969, *Modernizing Peasent Societies*, Oxford University, New York.
6. Hadi Prayitno – Lincoln Arsyad, 1986; *Petani Pedesaan dan kemiskinan*, BPFE, Yogyakarta.
7. Jawa Timur Dalam Angka *1987, Kantor stastistik Jawa Timur, Surabaya.*
7. *Jawa Timur Dalam Angka* 1987, Kantor stastistik Jawa Timur, Surabaya.
8. Mubyarto, 1989 *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3BS, Jakarta.
9. P3PK UGM, *Prospek Pedesaan 1987, 1988, 1989* dan *1990.*

10. *Prisma*, No. 1 Th. XVII, Januari 1988.
No. 2 Th. XIX, 1990

11. *Mimbar Jawa Timur*, Media Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 104 April 1989, No. 105–106, Juni 1989, dan No. III Nopember 1989.

12. Sensus Pertanian 1963, 1973 dan 1983.

PEGADAIAN SEBAGAI DAMPAK INDUSTRIALISASI DI DALAM MASYARAKAT : SATU KAJIAN AWAL

Tri Wahyuning M. Irsyam

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penulisan sejarah ekonomi Indonesia agaknya tidak sepesat perkembangan penulisan sejarah politik Indonesia. Banyak faktor yang harus dihadapi oleh para sejarawan ekonomi antara lain:

a. Para sejarawan ekonomi dihadapkan pada kesulitan memperoleh data. Mereka semata-mata hanya tergantung pada sumber-sumber resmi saja. Dengan demikian mereka hanya dapat menyusun dan menganalisa bahan yang tersedia. Sementara para ilmuwan lainnya dapat menggunakan sumber-sumber alternatif sehingga mereka mampu mengatasi kelemahan ataupun prasangka yang terkandung dalam bahan-bahan yang diperoleh dari pihak pemerintah mengenai soal ekonomi.

b. Di dalam penulisannya, mereka dihadapkan pada kebutuhan untuk mengimbangi kecenderungan-kecenderungan jangka panjang dengan gejala-gejala jangka pendek. Para ilmuwan ekonomi politik misalnya, dengan mudah akan melewatkan masa depresi tahun 1930-an dalam pembahasan mengenai periode liberal, karena depresi ini agaknya tidak mempengaruhi garis kebijaksanaan pemerintah secara radikal.

Sedangkan bagi para sejarawan ekonomi, depresi tersebut terjadi bersamaan dengan adanya hama yang menyerang tanaman tebu dan kopi di Pulau Jawa. Hal ini membawa dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia, pengaruhnya terutama nampak pada penanaman modal, organisasi-organisasi perusahaan serta penentuan lokasi dan jenis tanaman yang dipilih oleh perkebunan besar maupun perkebunan rakyat. Dengan demikian bagi sejarawan ekonomi apakah depresi dalam hal ini harus dilihat sebagai bahan analisis yang penting ataukah didiamkan dan dalam rencana jangka panjang akan dijadikan tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia selama abad ke-20.

c. Sifat Indonesia yang sangat heterogen menyebabkan para sejarawan ekonomi harus berhadapan dengan persoalan yang serba rumit. Misalnya dengan cara bagaimanakah mereka harus mengintegrasikan informasi-informasi dan gagasan mengenai perkembangan pada lokasi geografis yang berlainan dan pada berbagai lapisan dalam masyarakat (O 'Malley, 1988:13–15).

Meskipun ada beberapa kesulitan yang dihadapi, tidak berarti bahwa tidak ada sejarawan yang menulis mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Cliva Day misalnya, seorang sejarawan ekonomi Amerika, pada tahun 1904 menghasilkan satu karya yang berjudul. *"The Policy and Administration of the Dutch in Java'.* Karya ini ternyata mampu mengilhami para ilmuwan lain untuk menulis di masa lampau maupun masa kini. Misalnya yang dilakukan oleh : Furnivall (1944). Boeke (1953, 1961) Van Leur (1955), Geertz (1963, 1965) Onghokhan (1975), The Kian Wie (1979). Sumitro Djojohadikusumo (1989) dan lain sebagainya.

Perkembangan industrialisasi di Indonesia ditandai dengan munculnya perkebunan-perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta. Industri perkebunan dapat dikatakan mulai benar-benar berkembang pada tahun 1870. Perkembangan ini didukung oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu. Pada waktu itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Agraria yang me-

mungkinkan untuk menyewa lahan atas dasar kontrak jangka panjang.

Salah satu akibat dari munculnya industri perkebunan tersebut adalah adanya perubahan dalam sistem ekonomi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, di samping itu juga muncul sekolah-sekolah kejuruan untuk mendidik tenaga-tenaga trampil dan urbanisasi.

Makalah ini mencoba untuk menguraikan salah satu dampak dari industrialisasi di bidang ekonomi, khususnya lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah Pegadaian. Pembahasan dalam uraian ini diawali dengan perkembangan industrialis di Hindia Belanda yang pada akhirnya mendorong didirikannya lembaga-lembaga keuangan termasuk pengadilan.

Salah satu faktor yang mendorong didirikannya pegadaian adalah adanya praktek riba seperti rentenir, ijon dan sebagainya dalam masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu jalan keluar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang tunai agar tidak terjerumus dalam praktek-praktek tersebut di atas. Makalah ini juga akan menguraikan bagaimana perkembangan pegadaian dan sejauh mana pengaruhnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia hingga tahun 1930.

Dalam kajian awal ini, penelitian hanya dilakukan hingga tahun 1930, berdasarkan pertimbangan hanya dilakukan pada masa itu karena kondisi keuangan di tingkat makro maupun mikro sedang menurun akibat memburuknya perekonomian dunia. Keadaan ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan uang kontan pada masyarakat (mikro) karena nilai mata uang turun, sedangkan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari melonjak. Kebutuhan akan uang kontan yang semakin meningkat itu harus diantisipasi oleh Pemerintah Hindia Belanda agar rakyat tidak terjerat hutang pada rentenir, lintah darat, tengkulak dan bank-bank gelap yang biasanya meminta bunga yang tinggi.

Dengan pembatasan ini diharapkan akan dapat dijajaki kemungkinan untuk mengembangkan studi ini lebih lanjut sebagai studi lengkap tentang pegadaian.

2. *Perkembangan Industri di Hindia Belanda Sampai Dengan 1930*

Industri perkebunan baru benar-benar berkembang pada tahun 1970 ketika mulai diberlakukannya Undang-Undang Agraria. Dengan undang-undang tersebut pihak swasta dimungkinkah untuk menyewa lahan dalam bentuk jangka panjang. Para pemilik pabrik gula misalnya, yang telah berpengalaman dalam usaha pertanian secara besar-besaran, mengambil kesempatan tersebut untuk mengembangkan diri di daerah dataran tinggi (Laanen, 1987 : 241). Di samping penanaman secara besar-besaran, teknik pengolahannya pun juga mengalami perubahan yaitu mulai dipakainya peralatan yang lebih modern.

Perubahan dalam pemakaian peralatan yang lebih modern dan memadai berkaitan dengan hakekat dari industrialisasi yaitu suatu proses pergantian teknologi produksi, dari cara-cara yang tradisional sifatnya ke cara-cara modern. Proses ini pada dasarnya merupakan satu bagian dari proses yang lebih luas, yaitu modernisasi masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah terjadinya proses transformasi di dalam masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupannya (Schoorl, 1988 . 1).

Perkembangan industri di sektor perkebunan meliputi produksi hasil bumi yang laku di pasaran internasional. Tanaman-tanaman tersebut antara lain adalah teh, yang mengalami perkembangan yang cukup berarti sesudah tahun 1879. Tanaman karet mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 1910, bahkan antara tahun 1910–1913 terjadi ledakan produksi karet *(rubber boom).* Produksi kelapa sawit baru mengalami peningkatan yang cukup penting pada tahun 1921, padahal pabrik-pabrik kelapa sawit telah didirikan di daerah Sumatra Timur, yaitu di sekitar daerah perkebunan kelapa sawit pada tahun 1911. Kopi mengalami peningkatan produksi sekitar tahun 1880-an. Sementara tembakau yang penanamannya dipusatkan di Surakarta, Yogyakarta, Besuki dan pantai timur Sumatra, pada tahun 1870-an memperlihatkan kenaikan ekspor yang cukup berarti (Laanen, 1987 : 139–163).

Antara tahun 1915 hingga tahun 1930-an industrialisasi di Hindia Belanda mengalami perkembangan pesat, terutama industri perkebunan (Hart, 1942 : 102–103). Industrialisasi ini disertai dengan perluasan produksi untuk tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional seperti gula, karet, tembakau dan kopi. Mengenai perluasan produksi ini dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1 Perluasan Produksi Selama Tahun 1910 – 1939 Rata-rata Setahun dalam Ribuan Metrik Ton

Produksi tanaman utama	1910–1911	1920–1929	1930–1939
Gula	1.490,9	2.352,3	1.685,3
Karet	22,3	162,9	315,0
Tembakau	108,2	109,0	113,4
Kopi	52,6	94,6	120,1

Sumber : J.T.M. van Laanen, *Sejarah Statistik Indonesia*, halaman 142

Dalam keadaan seperti ini Indonesia berarti memiliki posisi sebagai pengekspor bahan mentah terbesar seperti yang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2 Ekspor Indonesia ke Pasaran Internasional tahun 1929 (dalam jutaan gulden)

Tipe Ekspor	Nilai	%
Produksi perkebunan swasta	688	47,7
Produksi perkebunan rakyat	395	27,4
Hasil tambang	261	18,3
Hasil hutan dan lain-lain	96	6,6

Sumber : Boeke, *The Evolution of Netherlands Indies Economy*, halaman 22

Boom produksi dan ekspor ke pasaran internasional terhenti ketika depresi ekonomi melanda dunia tahun 1930. Seluruh kondisi sosial ekonomi menjadi buruk, ekspor turun seperti yang digambarkan pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3 Ekspor Indonesia ke Pasaran Internasional Tahun 1933 (dalam jutaan gulden)

Tipe ekspor	Nilai	%
Produksi perkebunan swasta	181	38,7
Produksi perkebunan rakyat	125	26,7
Hasil Tambang	130	27,8
Hasil Hutan dan lain-lain	32	6,8

Sumber : Boeke, *Ibid*, halaman 22

Tabel 4 Persentasi Ekspor Indonesia dalam Nilai Keseluruhan Ekspor Dunia Tahun 1927, 1933, dan 1938.

Tahun	%
1927	1,7 %
1933	1,61 %
1938	1,69 %

Sumber : Boeke, *Ibid*, hal. 22

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, maka diperlukan sarana-sarana lain untuk memperlancar kegiatan yang ada. Sarana tersebut antara lain adalah dibangunnya jalan kereta api pada tahun 1860-an, dan mulai dioperasikan tahun 1867. Jalan kereta api tersebut menghubungkan Semarang – Yogya karta (O 'Malley 1987:241).

Di samping jalan kereta api, juga dibangun irigasi, sekolah-sekolah kejuruan untuk mendidik tenaga trampil dengan upah

rendah. Sementara itu, berdirinya pabrik-pabrik sebagai sarana indutrialisasi ternyata mengakibatkan munculnya tuntutan di bidang lain seperti tuntutan akan kebutuhan tenaga yang cukup besar. bahan baku yang memadai, modal yang besar, tersedianya pasar yang luas, sarana transportasi dan komunikasi yang memadai, sarana pendidikan yang cukup, tersedianya bank dan asuransi, sarana kesehatan, rekreasi, yang mana seluruh aspek tersebut saling berkaitan. Tuntutan tuntutan tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan struktur di dalam masyarakat dengan munculnya kelas menengah di satu pihak, dan kelas buruh di lain pihak.

3. Dampak Industrialisasi Bagi Masyarakat

Salah satu dampak penting dari industrialisasi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat adalah adanya perubahan sistem ekonomi dari ekonomi subtantif menjadi ekonomi pasar. Salah satu perubahan yang ada dalam masyarakat adalah dipergunakannya uang sebagai alat pembayaran. Dengan demikian fungsi uang sebagai alat pembayaran, erat kaitannya dengan cara berlangsungnya peralihan dari perekonomian tanpa uang ke perekonomian uang dan perdagangan yang terbuka. Faktor penting yang mendorong perkembangan ke arah itu adalah intensifnya pemerintah melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanannya serta pemungutan pajak (Sumitro, 1989.2).

Dalam rangka pemungutan pajak misalnya, pemerintah haruskan pajak dibayar dengan uang. Kebijaksanaan ini menyebabkan uang memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian rumah tangga di pedesaan. Dengan demikian secara berkala rakyat harus menyediakan uang dalam jumlah tertentu untuk melunasi kewajiban membayar pajak.

Dari kenyataan ini, harus diakui bahwa pengaruh sistem pemerintahan Barat terhadap masyarakat Indonesia dalam peralihannya ke ekonomi uang dapat dikatakan besar. Bahwa keharusan untuk menyediakan alat-alat pembayaran telah mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting di bidang ekonomi, hal ini nampak dari mulai ditanamnya tanaman-tanaman tertentu seperti jagung dan kelapa untuk memperoleh uang.

Tanaman tersebut di kalangan rakyat dikkenal sebagai tanaman *pajeg* (Sartono, 1989) Cara lain yang ditempuh untuk memperoleh uang adalah dengan cara bekerja sebagai buruh di kota atau di perkebunan-perkebunan milik orang Barat.

Pengaruh perekonomian dunia terhadap masyarakat pedesaan dirasakan semakin besar. Hal ini nampak dari membanjirnya barang-barang produk luar negeri seperti alroji, sepeda barang-barang kelontong, mesin jahit dan lain sebagainya di daerah pedesaan. Keadaan ini selain menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru juga menyebabkan digantikannya barang-barang seperti daun pisang digantikan oleh piring, batu api digantikan oleh korek api, minyak kacang digantikan oleh minyak tanah dan adanya kecenderungan bahwa masyarakat semakin banyak menggunakan alat-alat yang terbuat dari besi, kaca dan alat-alat lain yang berasal dari luar. Barang-barang tersebut hanya bisa diperoleh dengan uang sebagai alat penukarnya (Sumitro, 1989:5).

Bagi para petani miskin, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif tersebut, maka kredit merupakan satu-satunya jalan keluar (O' Malley, 1988:351). Suatu sumber kredit yang penting bagi petani miskin adalah kredit yang ditawarkan oleh para saudagar. Mereka biasanya adalah pemborong hasil-hasil pertanian untuk didistribusikan lebih lanjut, baik di dalam negeri atau untuk diekspor. Melalui uang muka mereka "mengikat petani" untuk menjual hasil tanamannya kepada si saudagar atau si pemberi kredit tadi. Jika tanamannya tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka si petani kehidupannya akan "terikat" pada si pemberi hutang.

Kredit bisa juga diperoleh dari *Cina Mindering*. Istilah *mindering* berasal dari kata *in mindering* yang artinya mengurangi. Dengan demikian mindering diartikan sebagai : jumlah yang dipinjam dibayar secara cicilan. Jadi istilah Cina Mindering diartikan sebagai : Orang Cina yang kerjanya meminjamkan uang, terutama kepada penduduk pribumi, menurut sistem yang berdasarkan pembayaran berkala, dengan jangka waktu pelunasan yang singkat (Van Guteem, 1919.106).

Cina-cina mindering ini seringkali dianggap lintah darat dan pemeras, karena dalam memberikan pinjaman mereka mengenakan bunga yang tinggi. Kredit yang diberikan oleh Cina mindering ini kerapkali dimanfaatkan oleh kaum wanita desa untuk keperluan rumah tangga atau untuk keperluan dagang kecil-kecilan (bakul), di samping itu juga kuli-kuli dan buruh-buruh perkebunan juga memanfaatkan kredit ini. Kredit-kredit tersebut di atas disebut sebagai kredit yang tidak terorganisasi (Simitro, 1989:24, O 'Malley, 1988:351 van Laanen, 1987. 348).

Jenis kredit ini biasanya mempunyai pengaruh yang kurang baik bagi si peminjam, karena bunga yang harus dibayar tinggi sementara penghasilan mereka biasanya kecil. Hal ini menyebabkan mereka tetap tergantung kepada si pemberi hutang (O 'Malley, 1988:352). Kenyataan tersebut di atas menyebabkan pemerintah mencari jalan keluar untuk membantu masyarakat agar mereka tidak terjerumus dalam praktek-praktek riba seperti rentenir, ijon dan lain-lain. Jalan keluar yang ditempuh oleh pemerintah adalah mendirikan lembaga-lembaga keuangan seperti bank-bank rakyat dan pegadaian.

4. *Perkembangan Pegadaian di Hindia Belanda Hingga Tahun 1930*

a. *Pegadaian Sebelum Tahun 1990*

Pegadaian pertama di Hindia Belanda dibuka di Batavia pada tahun 1746 atas prakarsa Gubernur Jenderal van Imhoff. Modal pertama yang dimiliki oleh Pegadaian adalah f. 7.500.000 di mana 2/3 nya yaitu f.5.000.000,– merupakan pinjaman yang diberikan oleh Persekutuan Dagang Hindia Belanda (VOC) (Furnivall, t.t. : 1).

Pada tahun 1794, seluruh usaha pegadaian diambil alih oleh VOC dan pada tahun 1795 seluruh asset dan modal pegadaian yang dilampiri dengan pertanggungan jawab dari pihak VOC diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Pada tahun 1809, ketika Daendels menjabat sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda, ia melakukan reorganisasi seluruh sistem pemerintah-

an. Ia juga menetapkan aturan-aturan untuk menyelenggarakan "bisnis' pegadaian sebagai suatu pelayanan umum *(public service).*

Ketika Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (1811–1816) Raffles, yang ketika itu menjabat sebagai gubernur jenderal mengeluarkan kebijaksanaan baru di bidang pegadaian. Ia mengalihkan pegadaian pada lisensi-lisensi perorangan. Lisensi-lisensi tersebut kebanyakan diberikan kepada orang Cina. Lisensi yang diberikan kepada mereka dalam kenyataannya memberatkan penduduk pribumi yang memanfaatkan jasa pegadaian, sementara pemerintah sendiri menemui kesulitan untuk mengawasi praktek-praktek yang tidak wajar yang dilakukan oleh pemegang lisensi seperti misalnya penyelewengan dalam melakukan pelelangan (dalam hal ini mereka seringkali melakukan manipulasi), suku bunga pinjam yang terlalu tinggi, pemeliharaan barang-barang gadai yang tidak baik dan lain sebagainya (Akira, 1974.189). Pada tahun 1814, pemerintah menghapuskan sistem lisensi tersebut, dan sebagai gantinya dipakai sistem pelelangan dan penyewaan. Dengan diberlakukannya sistem ini berarti banyak pejabat pemerintah yang dilibatkan untuk menanganinya (O 'Malley, 1988:358).

Ketika Inggris kalah dalam pertempuran, maka pada tahun 1816 wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Pemerintah Belanda. Dalam mengelola pegadaian, Pemerintah Belanda meneruskan kebijaksanaan yang ada dan secara bertahap memperluas sistem penyewaan di seluruh Jawa. Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi penyewa atau masyarakat di satu pihak, di lain pihak si penyewa/masyarakat dituntut untuk membuat pinjaman-pinjaman menurut ketentuan yang berlaku. Tetapi pelaksanaan kebijaksanaan baru ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, terbukti pada tahun 1856 muncul berbagai keluhan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, seperti mereka (pihak pengelola) tidak menaati ketentuan mengenai tarif yang telah ditetapkan, sementara jaminan-jaminan yang disita dianggap sebagai milik dari broker-broker pegadaian.

Pada tahun 1870, atas dorongan Menteri Jajahan De Waal, sistem lisensi diperkenalkan kembali. Setiap orang dapat memperoleh lisensi untuk membuka usaha pegadaian dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dengan demikian pada tahun 1878 jumlah pegadaian meningkat dengan cepat dari 242 menjadi 987 (Furnivall, tt : 1). Melihat perkembangan yang pesat itu, pemerintah kemudian memberlakukan kembali sistem penyewaan pada tahun 1880. Sistem tersebut dilengkapi dengan undang-undang yang dirancang untuk mencegah persaingan di antara pegadaian-pegadaian yang ada.

Untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada di sekitar pengelolaan pegadaian, maka pada tahun 1900 pemerintah memutuskan untuk mengadakan survai di bawah pengawasan De Wolff van Westenrode. Survei tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan. Dengan survei ini diharapkan diperoleh data-data yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan perbaikan-perbaikan apa yang harus dilakukan (Furnival, t.t. : 2, O 'Malley, 1987:358).

b. Pegadaian pada Tahun 1900 – 1906

Masa ini seringkali disebut sebagai masa eksperimen, karena dalam survai yang dilakukan De Wolff seringkali mengadakan eksperimen-eksperimen untuk mendapatkan cara terbaik dalam mengelola pegadaian.

Setelah melakukan penelitian di Batavia, dan sejumlah eksperimen di sana, ia kemudian meneruskan eksperimennya dengan membuka pegadaian di Sukabumi pada tanggal 12 Maret 19 01, di mana administrasinya langsung dikelola oleh pemerintah.

Maksud dari administrasi langsung tersebut adalah .

1) Membebaskan rakyat dari cengkraman orang-orang Cina yang meminjamkan uang.
2) Memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mereka yang ingin memperoleh uang dari barang-barang mereka; pelayanan tersebut mereka berikan dalam bentuk:

a) batas waktu yang sama bagi orang kaya maupun ~~misskin~~ dalam meminjam uang

b) pinjaman diberikan dengan cepat tanpa pengurangan yang bertetangan dengan aturan

c) sistem penyimpan barang-barang jaminan diperbaiki agar nilai barang tersebut tetap

d) para petugas pegadaian dalam melaksanakan tugasnya tidak diperkenankan menjadi penadah barang curian (Furnivall, t.t. : 2–4)

Eksperimen ini ternyata dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, dan hal ini dapat dilihat dari perkembangan bisnis pegadaian di Sukabumi. Pada tahun 1903, dibuka 4 pegadaian lagi. Pada tahun 1904, rasa kehilangan yang sangat besar dirasakan oleh pegadaian, sehubungan dengan kematian de Wolff. Ketika ia meninggal baru ada 6 pengadaan, semuanya terletak di daerah Jawa Barat, dan dalam tahun berikutnya dibuka 6 buah pegadaian lagi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan pada tanggal 23 Februari 1906 diumumkan bahwa sistem managemen yang dikelola oleh negara dapat dianggap telah "lulus" pada tahap eksperimen. Meskipun sistem managemen tersebut dianggap telah lulus ujian, namun sistem tersebut tidak dapat diperkenalkan ke seluruh negeri secara serentak karena dalam melaksanakannya diperlukan latihan staf. Setiap pegadaian membantu melatih staf dari pegadaian yang baru.

c. *Pegadaian Hingga Tahun 1930*

Sistem managemen tersebut akhirnya dapat dimasyarakatkan, dan pada tahun 1907 dibuka 16 pegadaian dan dalam tahun 1916 semua pegadaian yang ada di seluruh Jawa dan Madura telah diambilalih oleh negara, kecuali di daerah-daerah kesultanan dan sistem kontrak sewa merupakan prerogratif kesultanan. Jumlah pegadaian ketika diambil alih oleh negara adalah 318 buah. Jumlah itu terus berkembang hingga mencapai 459 buah pada tahun 1921, di mana pegadaian mulai diperkenalkan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Madura.

Melihat keadaan demikian ini, para broker pegadaian Cina segera mengatur siasat untuk menghadapi sistem pengelolaan oleh negara. Langkah yang ditempuh oleh para broker Cina ini adalah dengan mengorganisasi kelompoknya untuk menguasai penawaran di pelelangan-pelelangan. Dalam hal ini pemerintah tidak tinggal diam, segera dikeluarkan satu peraturan yang mengatur sistem pelelangan. Bahkan lebih jauh diambil satu keputusan bahwa tidak ada jaminan yang harus dijual melalui lelang untuk harga yang kurang dari uang yang dipinjamkan, ditambah dengan bunga. Bila harga tersebut tidak dapat dicapai maka barang yang ada dibeli oleh pemerintah dan diselesaikan di kemudian hari dengan cara menjualnya.

Tiap pegadaian memiliki ruang penjualan di mana dalam penjualan barang-barang yang dibeli oleh pemerintah tadi, seringkali diperoleh penawaran-penawaran yang bagus. Dengan cara ini harga barang tetap dapat dipertahankan, sementara para broker Cina tidak dapat seenaknya melakukan penawaran.

Cara lain yang dilaksanakan pemerintah untuk menghadapi para broker Cina ini adalah dngan jalan membuka sebuah ruang pameran khusus di Batavia untuk menjual barang-barang tertentu kepada turis (baik turis mencanegara maupun turis domestik) dan orang-orang yang berminat.

Perkembangan lain dari pegadaian antara tahun 1907–1930 adalah didirikannya suatu cabang dari Bank Tabungan Negara yang diharapkan dapat menarik juga orang-orang datang untuk mendepositokan sebagaian uang yang diperolehnya dari pegadaian. Pada tahun 1930, status pegadaian dikukuhkan menjadi perusahaan negara, melalui *Stadblaads* nomor 226.

5. *Arti Pegadaian Bagi Masyarakat*

Seperti telah dikatakan sejak awal, bahwa pegadaian didirikan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan uang tunai agar tidak terjerumus dalam praktek riba seperti rentenir, ijon dan sebagainya. Dengan demikian masyarakat memandang pegadaian sebagai tempat orang yang kepepet butuh uang kontan (Kompas 1 Mei 1990).

Lebih dari itu, pegadaian adalah tempat bagi mereka yang segan menghadapi prosedur yang rumit, bahkan mereka dapat membawa uang tunai dengan jaminan barang-barang yang kurang berharga seperti sarung, giwang emas 2 gram, selendang, alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Barang-barang yang mempunyai nilai yang lebih besar seperti sepeda, arloji, kalung dan lain-lain.

Melihat beragamnya barang yang digadaikan, maka jumlah pinjaman dan bunganya pun berbeda-beda, yang dapat dilihat dari daftar di bawah ini :

Nilai Barang Jaminan dan Bunganya

A.	f.10 – f.25 . . . 2% untuk tiap 15 hari, ———	18 %/ tahun.
B.	f.26 – f.50 . . . . 2½%/bulan ———————	30% / tahun.
C.	f.51 – f.75 . . . 3%/bulan ———————	36% / tahun.
D.	f.76 – f.100 . . . 3%/bulan ———————	36% / tahun.
E.	f.101 – ke atas . . . 1% / bulan ———————	12% / tahun.

Kebijakan tersebut nampaknyaditeruskanhingga sekarang seperti yang ada dalam daftar di bawah ini :

Jenis Pinjaman dan Bunganya

Katagori A	:	Pinjaman Rp 2.500,– – Rp 20.000,–	3% / bulan.
B	:	Pinjaman Rp 21.000,– – Rp 40.000,–	3% / bulan.
C	:	Pinjaman Rp 41.000,– – Rp 150.000,–	4% / bulan.
D	:	Pinjaman Rp 151.00,– – ke atas	4% / bulan.

Jika kita hitung lebih lanjut, maka bunga yang dikenakan oleh pegadaian dirasakan cukup tinggi. Kita ambil contoh, bila kita meminjam Rp 100.000,– maka jumlah yang harus dikembalikan berikut bunganya adalah Rp 104.000,–. Sebenarnya maksud pegadaian mengenakan bunga yang cukup lumayan adalah karena pegadaian tidak membiarkan si penggadai untuk membiarkan barang-barangnya tidak tertebus, karena semakin

lama berarti semakin banyak bunga yang harus dibayarnya, yaitu Rp 4.000,– per bulan.

Tujuan pegadaian bukan itu, melainkan mendorong agar penggadai cepat-cepat menebus kembali barang-barangnya yang pasti jauh lebih besar nilainya dari pinjaman.

Kebijakan pegadaian dalam hal barang-barang yang tidak ditebus dalam waktu yang telah ditentukan adalah melelang barang-barang tersebut. Tetapi biasanya waktu pelelangan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan, melainkan masih memberikan kelonggaran sekitar 2 – 3 bulan. Jadi bila si penggadai menggadaikan barangnya pada bulan Januari untuk jenis gadaian katagori A atau B, maka jika barang jaminan tidak ditebus pada bulan Mei, maka barang yang digadaikan itu akan dilelang pada bulan Juli atau Agustus. Kelonggaran waktu yang diberikan, tanpa dikenai bunga tambahan. Kelonggaran semacam ini, barangkali yang menjadi kekuatan pegadaian hingga sekarang (Kompas 1 Mei 1990).

Kemudahan yang diberikan oleh pegadaian dalam rangka membantu kesulitan ekonomi masyarakat adalah bila terjadi bencana yang menimpa masyarakat seperti banjir, kebakaran, gempa dan lain-lain maka barang-barang yang digadaikan dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tuntutan menurut aturan atau bunga. Di samping itu barang-barang yang disita, dipinjamkan kepada fakir miskin, dan pihak pegadaian masih memberikan bantuan berupa pakaian. Dalam hal ini pihak pegadaian biasanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan masyarakat (Furnivall, t.t. : 11).

Pegadaian ternyata berperan dalam perubahan sistem ekonomi yang terjadi, karena sistem perekonomian barter yang selama ini dianut oleh masyarakat dialihkan menuju pada suatu ekonomi uang dengan cara menghargai barang yang digadaikan dengan uang. Lebih jauh lagi pegadaian juga memperkenalkan suatu sistem dari *cash economy* (ekonomi tunai) ke *credit economy* (ekonomi kredit).

Bagi masyarakat sendiri, pegadaian dirasakan sangat membantu kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Hal ini

dapat dilihat pada masa krisis di mana jumlah barang-barang gadaian meningkat. Bahkan tahun paling sukses dalam usaha pegadaian adalah tahun 1929. Pada tahun itu keuntungan bersih yang diperolehnya mencapai jumlah f. 12,9 juta. Dapat dikatakan bahwa peningkatan keuntungan telah dimulai sejak tahun 1926, di mana jumlah barang-barang yang digadaikan sekitar f. 49,5 juta, dan pada tahun 1929 meningkat lagi sekitar f.55,9 juta. Hal ini erat kaitannya dengan krisis ekonomi dan kegagalan panen. Pada tahun 1930 jumlah barang yang disita juga mengalami kenaikan dari f.45 juta menjadi f. 6,4 juta, dan jumlah barang-barang yang dibeli hampir 50% dari semua yang ditawarkan dalam pelelangan (Furnivall, tt. : 8–9).

6. *Kesimpulan*

Salah satu dampak industrialisasi yang sangat berpengaruh dalam masyarakat adalah perubahan sistem ekonomi. Pegadaian yang sejak semula didirikan untuk menyelamatkan masyarakat dari tekanan-tekanan dan malapraktek dari para broker pegadaian Cina, dalam kenyataannya mampu memelihara keseluruhan perekonomian penduduk pribumi. Kehadiran pegadaian terutama dirasakan kegunaannya dalam peralihan dari suatu perekonomian barter menuju pada suatu ekonomi uang, karena pegadaian memungkinkan masyarakat untuk menjual atau mengubah barang-barangnya menjadi uang. Dalam kaitannya dengan sistem kredit *(hire purchase)*, di mana ia menggerakkan modal dan memudahkan peralihan dari ekonomi tunai *(cash economy)* ke ekonomi kredit *(credit economy)*.

Pegadaian juga berusaha untuk mendidik masyarakat pemakai jasa pegadaian agar meminjam uang bila memang perlu, karena ada kecenderungan untuk dipakai membeli barang-barang yang konsumtif. Hal ini tentu saja merupakan satu pemborosan.

Hal lain yang perlu dicatat adalah bahwa ada perbedaan antara pegadaian di Eropa dengan di Indonesia. Di Eropa, pegadaian semata-mata banknya orang miskin, sementara di Indonesia pegadaian dimanfaatkan oleh semua orang.

Daftar Pustaka

Verslag Betreffende den Gouvernements Pandhuisdienst over het jaar : 1925 – 1930

Boeke, J.H. "Pandcrediet als kleincrediet", dalam *Koloniale*
1919 *Studien,* no. 1 Februari.

1953 *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Examplified by Indonesia,* Institut of Pacific Relation, New York.

1961 "Objective and Personal Elements in Colonial Welfare Policy", dalam *Indonesian Economic The Concept of Dualism in Theory and* Policy, vol. 6,

1946 van Hoeve, The Hague *The Evolution of The Netherlands Indie Economy,* New York, Institut of Pasific Relations.

Burger, D.H. *Sejarah Ekonomis dan Sosiologis Indonesia* II,
1970 II, Djakarta, Pradnjaparamita.

Day Clive *The policy and Administration of The Dutch in Java,*
1966 Singapore, Oxford Universyti Press

Djojohadikusumo, Sumitro, Kredit Rakyat di Masa Depresi,
1989 Jakarta, LP3ES.

Furnivall, J.S. *Netherland Indie : A Study of Plural Economy,*
1944 Campridge, Cambridge University Press.

t.t. "State Pawnshops in Netherlands India", dalam *Studies in The Economic and Social Development of The Netherlands East Indies.*

Geertz, C 1963 *Agricultural Involution : The Process of Ecological Change in Indonesia,* Berkeley, University of California Press.

1965 *The Social History of an Indonesian Town,* Cambridge Massachusetts Institute of Technology Press.

Gutem, van V.B. "Tjina Mindering" : Eenige aantheekenigen over het Chineesche geldschueterswezen op Java, dalam *Koloniale Studien,* 1, Februari

Ingelson, John 1986 *In search of justice : Workers and Union in Colonial Java : 1908 – 1926,* Singapore, Oxford University Press.

Hart, G.H.C. 1942 *Toward Economic Demecracy in The Netherlands Indie,* New York. Institute of Pacific Relation

Laanen, J.TM. van dan Creuzberg, Pieter 1987 *Sejarah Statistik Economi Indonesia,* Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Leur, J.C. van 1955 *Indonesian Trade and Society : Essays in Asian Social and Economic History,* van Hoeve The Hague.

O 'Malley, et. al (penyunting), 1988 *Sejarah Economi Indonesia,* Jakarta, LP3ES

Nagazumi, Akira, "The Pawnshop Strikes of 1922 and The 1974 Indonesian Political Parties". dalam *Archipel, 8.*

Onghokham 1975 The Residency of Madiun : Priyayi and The Nineteenth Century, Thesis Doctor, Yale University.

Thee Kian Wie 1977 *Plantation Agriculture and Export Growth: An Economic History of East Sumatera,* 1863 – 1942, Jakarta, National Institute of Economic and Social Research.

INDUSTRI SUKABUMI SEHABIS PERANG: POTRET SAMAR SEBUAH PERKEMBANGAN FISIK*

JR. Chaniago

1. Pendahuluan

Benar juga kata orang-orang pintar bahwa sejarah itu tidak mungkin ada bilamana tidak ada campur tangan para sejarawan. Jarak antara peristiwa sebagaimana ia terjadi dengan sebagaimana ia dikisahkan sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan sejarawan itu sendiri. Karena itu sejak semula saya tidak begitu heran bilamana sebagian monografi di Sukabumi saling merujuk kepada tulisan JM. Knaud yang menyatakan bahwa nama Sukabumi berasal dari Cikolle, yang kemudian oleh Andries de Wilde (mantan administratur Perkebunan Gunung Parang) ditukar dengan nama Sukabumi.[1]

Terlepas dari persoalan nama di atas, baik nama Sukabumi sebagai kota maupun sebagai kebupaten, wilayah ini tidak punya arti apa-apa kalau tidak dihubungkan dengan wilayah sekelilingnya. Jika Kabupaten Sukabumi dimisalkan sebagai jaringan, maka Kota Sukabumi hanyalah salah satu dari komponen jaringan itu secara keseluruhan.

---

* Tulisan ini bahannya sebagian berasal dari hasil penelitian di bawah koordinasi PSP IPB–ITB – ISS Belanda (1989–1990).

Jika Kota Sukabumi diletakkan sebagai pusat jaringan itu, maka kota itu tidak punya arti apa-apa kalau wilayah sekelilingnya tidak memberikan andil kepadanya. Begitulah kondisi dan potensi alam sekelilingnya memungkinkan ia berperan. Untuk periode Wilde sekitar tahun 1815, peranan Kota Sukabumi mungkin hanya sebagai transito dari produk pertanian dan perkebunan di sekitarnya. Perkebunan selanjutnya memang memberikan peranan baru kepadanya: sebagai wilayah peristirahatan, daerah tujuan wisata, dan beberapa dekade kemudian sebagai pusat industri.

Begitu juga Kabupaten Sukabumi dalam kontek regional memiliki peranan sendiri pula. Konstelasi regional ini terutama dapat dilihat dalam hubungan sebagai wilayah penghubung antara Kabupaten Bogor dengan Cianjur, maupun sebagai sebuah wilayah yang potensial untuk daerah Jawa Barat bagian selatan.

Karena itulah, jika kita runut latar belakang Sukabumi paling kurang satu abad belakangan ini, terlihat bahwa Sukabumi telah berkembang dengan pesatnya. Wilayah ini lambat laun berubah menjadi pemukiman yang ramai. Seirama dengan itu berbagai prasarana umum seperti pasar, tempat ibadat, dan lain sebagainya mulau mengikuti dari belakang. Desa-desa baru sebagai luapan atau perluasan desan sekitarnya muncul pula.

Selain itu gemuruh Tanam Paksa dan kemudian diikuti dengan masuknya modal-modal swasta mengubah wilayah ini bukan hanya menjadi areal perkebunan kopi, tetapi juga beberapa tanaman ekspor lainnya. Tanaman ini merambat di sekitar lereng-lereng gunung dan dataran tinggi dalam wilayah Kabupaten Sukabumi sekarang ini. Tentu saja perluasan perkebunan ini memunculkan pula pemukiman baru.

Seirama dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun prasarana perhubungan seperti jalan raya dan rel kereta api. Hal ini sejalan pula dengan keinginan pemerintah kolonial untuk membuka wilayah di sepanjang lereng Priangan. Jalan raya Bogor ke Cianjur lewat Sukabumi sudah selesai sejak 1873. Sementara itu rel kereta api Jakarta – Bogor yang dibangun sejak 1869

sudah rampung pula tahun 1873. Rel ini kemudian diteruskan ke Cicalengka (1884) dan Garut (1889). Jalan kereta api Bogor – Sukabumi sudah mulai dipakai untuk angkutan barang dan penumpang sejak bulan Maret 1882 dan setahun kemudian Cianjur.[2]

Salah satu dampak makin berkembangnya prasarana jalan dan jembatan adalah munculnya sistem transportasi, dan pada gilirannya pula membuka isolasi daerah ini. Terbukanya wilayah Sukabumi dengan dunia luar berarti memasuki satu proses baru, dari wilayah yang terisolasi, kemudian memasuki tatanan ekonomi dunia. Pembukaan wilayah ini sekaligus meningkatkan lapangan kerja. Kecuali transportasi, proses pembukaan wilayah Sukabumi memungkinkan majunya sektor perdagangan, kerajinan, industri, pertanian, pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan.[3]

Implikasi dari hal itu dapat dicontohkan dengan munculnya konsentrasi perdagangan dan transportasi di sekitar stasiun kereta api atau terminal bus penumpang. Sukabumi yang sebelumnya hanya mengenal angkutan tradisional (umpamanya pedati) yang menghubungkan satu pasar dengan pasar dengan pasar yang lain, kemudian mulai mengenal jenis angkutan darat yang baru seperti kereta api dan mobil.

Dari segi pemerintahan, pada mulanya Sukabumi hanyalah bagian dari Kabupaten Cianjur yang telah lebih dahulu memperoleh status kabupaten. Dari status kepatihan dari Cianjur, kemudian sejak 1 Juni 1921 Sukabumi menjadi kabupaten sendiri.[4] Perubahan status ini tentu tidak terlepas dari peranan dan potensi ekonomi yang dimiliki Sukabumi. Sebelum Kabupaten Sukabumi terbentuk, terlebih dahulu sudah lahir pemerintahan kota Sukabumi. Hal ini sejalan dengan undang-undang desentralisasi yang dikeluarkan tahun 1903 yang memungkinkan lahirnya dewan-dewan lokal sejak tahun 1905. Melalui undang-undang desentralisasi ini, di kota-kota yang jumlah orang Eropanya sudah cukup dominan dimungkinkan membentuk dewan kota yang anggotanya sebagian dipilih dan sebagian lagi diangkat oleh gubernur jenderal. Buat Kota Sukabu-

mi hal itu terwujud sejak 1 april 1914 atau sekitar tujuh tahun sebelum Sukabumi secara keseluruhan bertukar status menjadi kabupaten. Pada tahun 1914 itu buat pertama kali Dewan Kota Sukabumi terbentuk.[5] Pada mulanya tanpa walikota (burgemeester). Walikota Sukabumi yang pertama baru diangkat pada tahun 1926, sedangkan bupati Sukabumi pada tahun 1921 (atau lima tahun lebih dahulu). Jika walikota Sukabumi dipegang oleh seorang Belanda, maka patih/bupati Sukabumi selalu dijabat bumiputra.

Besar sekali kemungkinannya bahwa perkembangan wilayah administrasi berhubungan erat dengan perluasan fungsi ekonomi. Pada tahun 1935 Kabupaten Sukabumi terdiri dari enam distrik dengan sejumlah onder-distrik di bawahnya. Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Kabupaten Sukabumi menjadi *keh* sebagai bagian dari *Bogor Shu*. Dan pada masa Republik Indonesia dikembalikan menjadi Kabupaten Sukabumi. Setelah terbentuknya Negara Kesatuan pada tahun 1950 wilayah Sukabumi menjadi daerah otonom setingkat daerah tingkat dua, yang dipimpin oleh seorang bupati.

Nama distrik pada masa Belanda diubah menjadi kawedanan dan onder-distrik menjadi kecamatan. Dengan dasar itu Kabupaten Sukabumi memiliki 6 kawedanan, 21 kecamatan, dan 144 desa. Kemudian status kawedanan diubah menjadi kantor penghubung/pembantu bupati. Kecamatan yang tercatat sejak tahun 1950 adalah : Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Baros, Kecamatan Cisaat, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Nagrak, Kecamatan Cikembar, Kecamatan Cikajang, Kecamatan Cicurug, Kecamatan Parungkuda, Kecamatan Kalapanunggal, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Warungkiara, Kecamatan Cisolok, Kecamatan Jampang tengah, Kecamatan Nyalindung, Kecamatan Sagararanten, Kecamatan Jampang Kulon, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Ciracap.

2. *Pertumbuhan Industri di Sukabumi Sejak 1950*

Struktur perekonomian Kabupaten Sukabumi banyak di pengaruhi latar belakang fisik, berbagai prasarana, dan fasilitas

lokal yang tersedia di wilayah ini. Dari segi topografis saja, permukaan tanah di bagian utara yang bergelombang dan bagian selatan yang berbukit-bukit, dan tidak sama tinggi permukaan tanah dibanding dengan permukaan laut, sangat menentukan corak dan ragam aktivitas industri di kabupaten ini. Terlepas besar-kecilnya skala industri, aktivitas industri ini relatif terkonsentrasi ke kecamatan saja. Prasarana pendukung seperti jalan raya sangat mempengaruhi persebaran industri. Pada tahun 1950-an sebagian besar industri masih mengandalkan tenaga manusia. Hanya beberapa saja dari kegiatan industri itu yang disamping memakai tenaga manusia juga mempergunakan alat-alat mesin. Kegiatan industri yang terakhir ini pada umumnya dimiliki oleh pengusaha kuat.

Industri kerajinan yang berkembang pada awalnya baru berupa kerajinan tangan/rumah tangga seperti mengolah bahan mentah dari tanah liat, kayu, kulit/tanduk, logam, tekstil, dan bahan anyaman. Sebagaimana kerajinan tangan/rumah tangga aktivitas ini dicirikan pula oleh tenaga kerja atau buruhnya yang sebagian besar merupakan anggota keluarga dan karena itu mereka tidak memperoleh upah. Tentu saja ciri ini berlaku untuk semua usaha sejenis. Belum atau tidak adanya anggota keluarga yang bisa dijadikan tenaga kerja, menyebabkan pengusaha kecil ini merekrut tenaga lainnya yang dibayar secara penuh.

Industri kerajinan/rumah tangga ini masih mempergunakan teknologi sederhana, namun demikian para pekerjanya harus memiliki keterampilan tertentu (skill) dan bahkan daya seni tertentu pula. Seringkali keterampilan dan bakat seni ini diperoleh dan dibina secara turun-temurun.

Industri alat pertanian dan pengolahan hasil pertanian yang berkembang adalah . industri sandang, pangan, alat-alat rumah tangga, alat pertanian, alat angkutan pertanian, dan bahan bangunan. Di samping itu karena sebagian wilayahnya dipakai untuk perkebunan maka bermunculan pula usaha pengolahan hasil perkebunan pabrik teh, minyak sereh, rumah asap, dan lain sebagainya. Di Sukabumi bagian selatan, khususnya di sekitar

pantai Pelabuhan Ratu juga berkembang industri pengolahan hasil laut dan fasilitas penunjangnya seperti perikanan, dan pabrik es untuk kebutuhan pendingin hasil perikanan laut.

Industri kerajinan rakyat di samping mengolah hasil pertanian/perkebunan, juga ada yang mengolah bahan mentah dari tanah, kayu, kulit/tanduk, dan anyaman. Beberapa wujud industri kerajinan rakyat ini adalah peralatan dapur dari tanah/kaleng/bambu, anyaman, karpet (bulu domba atau dari mandong), besi, keramik, tanduk, gerabah, batu permata, dan sebagainya. Berbagai industri kecil yang menghasilkan alat pertanian atau mengolah hasil pertanian terwujud pula dengan adanya : pabrik tapioka, gaplek, tahu-tempe, kecap, penggilingan padi, pandai besi, rumah asap, pabrik teh, pembuatan bata, genting, dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari pengelompokan, jenis dan jumlah perusahaan industri pada tahun-tahun pertama sesudah perang kemerdekaan, maka gambarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pengelompokan dan Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Sukabumi Tahun 1950

No.	Pengelompokan	Jumlah Jenis	Jumlah Perusahaan Industri	Persentasi Perusahaan Industri
1	2	3	4	5
1.	Kel. Industri bahan makanan	21	190	17,76%
2.	Kel. Industri minuman	2	5	0,47%
3.	Kel. Industri Tekstil	6	6	24,30%
4.	Kel. Barang keperluan kaki	4	38	3,55%
5.	Kel. Industri kayu	3	13	1,21%

1	2	3	4	5
6.	Kel. Industri Rumah Tangga	1	77	7,20%
7.	Kel. Kertas dan karton	2	4	0,37%
8.	Kel. Industri kecil	2	8	0,66%
9.	Kel. Barang dari karet	3	5	047%
10.	Kel. Industri kimia	3	9	0,84%
11	Kel. Industri Gerabah	4	9	8,50%
12.	Ke. Industri Logam	3	219	20,47%
13.	Ke. Pabrik Mesin, reparasi mesin, mobil, motor sepeda.	5	24	2,24%
14	Ke. Macam-mcam industri	7	93	8,69%
15.	Ke. Listrik dan radio	2	9	0,84%
16.	Kel. Angkutan dan Veem	1	11	1,03%
17.	Kel. Industri Pariwisata	4	15	1,40%
	J u m l a h	73	1070	100,00%

Sumber : Jawatan perindustrian Kabupaten Sukabumi 1950–1952 dan hasil penghitungan penulis

Memperhatikan jenis dan banyaknya perusahaan industri yang muncul maka akan terlat bahwa kelompok industri tekstil (khususnya tenun mesin dan ATBM) menduduki urutan pertama. Urutan kedua dan selanjutnya diduduki oleh kelompok industri barang logam, kelompok industri bahan makanan, macam-macam industri, dan kelompok industri gerabah.

Meneliti dengan seksama dari sumber aslinya, maka pertenunan selain berkembang di pinggiran Kota Sukabumi, juga secara khusus tumbuh subur di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Di Cisaat kegiatan ATBM sebagian besar ditemui di desa-desa

Selajambe, Selaawi, Cisarua, Cimahigirang, Cimenteng, Cidadap, Citamiang, Gentong, Panindarang, Bakanjambang, Kuta, Cibaraja, dan lain sebagainya.

Industri barang logam banyak tumbuh di Cisaat, Nagrak, Sekaraja, dan beberapa tempat di sepanjang jalan raya utama. Pandai besi sejak dulu sudah berkembang di Desa Cibatu-Cisaat. Sedangkan industri makanan tumbuh di sekitar Cisaat, Cibadak, Cicurug, dan pinggiran Kota Sukabumi.

Memperhatikan data-data lepas itu, terlihat bahwa perusahaan industri ini membujur sepanjang jalan raya Sukaraja - Sukabumi - Cisaat - Cicurug. Garis ini adalah juga jalur utama Ciawi - Sukabumi - Cianjur, sebagai jalan keluar dari pemasaran produk industri Sukabumi ke Bogor, Jakarta, dan Bandung.

Bagaimana dengan lokasi persebarannya? Catatan berikut akan memberikan gambarannya :

Tabel 2 Lokasi Penyebaran Industri Menurut Banyaknya Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Tahun 1950

No.	Lokasi Menurut Kecamatan	Jumlah Perusahaan	Persentasi perusahaan
1.	Sukaraja	128	11,90%
2.	Sukabumi	578	54,01%
3.	Cisaat	214	20,01%
4.	Cibadak	40	4,48%
5.	Cicurug	29	2,71%
6.	Parung Kuda	1	0,10%
7.	Baros	4	0,38%
8.	Nyalindung	1	0,10%
9.	Pelabuhan Ratu	66	0,16%
10.	Cisolok	1	0,10%
	Jumlah	1070	100,00%

Sumber : Jawatan Perindustrian Kabupaten Sukabumi 1950–1952 dan hasil penghitungan penulis

Dari tabel di atas terlihat bahwa walaupun industri pertenunan, kerajinan dan pandai besi, serta industri makanan berada pada urutan yang menonjol pada tahun 1950, yang berarti seperti sudah disebutkan terletak pada garis Sukaraja - Sukabumi - Cisaat - Cicurug, namun dari penyebaran usaha industri terlihat ada variasi-variasi.

Persoalan yang belum terjawab adalah mengapa pada kecamatan-kecamatan tertentu termasuk kecamatan yang padat penduduknya. Sedangkan dari luas wilayah kecamatan-kecamatan tersebut termasuk wilayah yang sempit.

Cisaat memang termasuk kecamatan terpadat. Walaupun penduduknya menduduki urutan kedua setelah Saraganten, namun luas wilayahnya hanya seperdelapan Saraganten. Perkembangan industri pertenunan, kerajinan dan pandai besi, rupanya telah menarik minat orang untuk melakukan migrassi ke kecamatan ini. Menurut Informasi sementara yang kami terima dari beberapa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan ATBM ini, sebagian dari mereka mengatakan bahwa ada yang menjadikan kegiatan ATBM sebagai sumber nafkah utama. Hal ini antara lain disebabkan karena sebagian dari mereka sebelumnya bekerja sebagai buruh tani.

Bagaimana mengenai latar belakang pengusaha industri kecil itu. Dari 73 buah jenis industri dengan 1070 buah perusahaan dikelola oleh empat etnis pengusaha : Cina, Arab, Belanda, dan penduduk asli (Indonesia). Rincian dari latar belakang etnis pengusaha industri di Kabupaten Sukabumi 1950 adalah sebagai berikut .

Tabel 3 Latar Belakang Etnis Pengusaha Industri di Kabupaten Sukabumi Tahun 1950

No.	Latar Belakang etnis	Jumlah	%
1.	WNI	236 orang	22,06%
2.	Arab	18 orang	1,68
3.	Belanda	24 orang	2,24
4.	Penduduk Asli Indonesia	741 orang	69,25
5.	Tidak diketahui,	51 orang	4,77
	Jumlah	1077 orang	100,00%

Sumber : Hasil penghitungan penulis

Memperhatikan tabel di atas terlihat bahwa penduduk asli memang berperan penting dalam penciptaan industri kecil (69,25%). Sebagian besar penduduk asli bergerak di sektor pertenunan (21,07%), pandai besi (16,71%) dan meubel (5,10%). dan kerajinan tanduk (4,45%).

Pengusaha Cina menonjol dalam bidang : meubel (1,67%). tukang emas (1,29%), tukang sepatu dan minyak kacang (1,2%). Dari catatan tersebut ada rangkaian antara penyediaan bahan-bahan setenah jadi di bidang permeubelan dan sepatu, yang setelah dihaluskan nilai tembaganya dinikmati oleh pengusaha WNI.

Pengusaha Arab lebih tertarik pada industri kasur, sedikit meubel, wangi-wangian, menyamak kulit, dan pengapuran. Walaupun jumlahnya tidak begitu menonjol, namun mereka tersebar ke berbagai jenis usaha. Hal yang cukup menarik adalah pengusaha Cina pada masa ini belum begitu tertarik pada bidang pembuatan ijuk dan sisir, minyak sereh, reparasi mesin tulis, menyamak kulit, bahan bangunan, kerajinan tanduk, lio, anyaman, dan pengasihan ikan dan terasi. Bidang-bidang ini masih didominasi para penduduk asli. Baru kemudian lapangan

ini juga menarik perhatian pengusaha Cina, umpamanya usaha bahan bangunan yang sekarang sudah banyak diminati mereka.

Sayangnya belum diperoleh gambaran status hukum dari usaha-usaha yang dilakukan. Diperkirakan pengusaha-pengusaha asing, Cina, dan Arab lebih baik memilih . NV, CV, dan Firma sebagai badan hukum mereka, sedangkan penduduk asli selain bersifat perseorangan banyak yang sudah bergabung dengan koperasi, baik yang sudah memiliki badan hukum maupun belum. Hal itu terlihat dari daftar koperasi yang dikeluarkan Jawatan Perindustrian Kabupaten Sukabumi yang menyebutkan bahwa dari 93 buah koperasi baru sekitar 30 buah yang sudah terdaftar di jawatan tersebut.

Dari segi daya serap tenaga kerja atau yang memungkinkan angkatan kerja bekerja di bidang industri ini terlihat bahwa industri pertenunan (baik masin maupun ATBM) menyerap banyak angkatan kerja, setelah itu bidang lain-lain seperti penggilingan padi, berbagai usaha bahan bangunan, dan industri makanan juga menonjol. Jumlah keseluruhan sekitar 7070 orang.

Bagaimana dengan situasi sewindu kemudian. Jumlah perusahaan industri tentu menunjukkan peningkatan. Menurut catatan sementara jenis industri di Kabupaten Sukabumi pada tahun 1959 berjumlah 67 buah, dan perusahaan industrinya 2165 buah. Dari jumlah itu berhasil diserap sekitar 8888 orang tenaga kerja. Bila dikelompokkan berdasarkan jenis industri dan jumlah perusahaan industri maka gambarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Pengelompokan, Jenis dan Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Sukabumi Tahun 1958

No.	Pengelompokan	Jumlah & Jenis Industri	Jumlah Perusahaan Industri	Persentasi Perusahaan Industri
1.	Kel. Industri bahan makanan	20	589	7,21%
2.	Kel. Industri minuman	5	5	0,23%
3.	Kel. Industri tekstil	7	323	14,92%
4.	Barang keperluan kaki	3		5,36%
5.	Kel. Industri kayu	3	100	4,62%
6.	Kel. Industri meubel dan Alat rumah Tangga	1	59	2,73%
7	Kel. Kertas dan Karton	1	4	0,18
8.	Kel. Indutri kulit	3	11	0,51%
9.	Kel. Barang dari karet	4	426	19,68%
10.	Kel. Industri kimia	3	13	0,60%
11.	Kel. Industri Gerabah	6	160	7,39%
12.	Kel. Industri barang logam	5	229	10,58%
13.	Kel. Pabrik mesin, reparasi mesin, mobil, motor, sepeda.	1	20	0,92%
14.	Kel. Macam-macam industri	8	61	2,81%
15.	Kel. Listrik dan radio	1	9	0,42%
16.	Kel. Angkutan dan veem	1	4	0,18%
17.	Kel. Percetakan	1	5	0,23%
	J u m l a h	67	2165	100,00%

Sumber : Hasil penghitungan penulis

Dari petunjuk di atas terlihat bahwa urutan lima besar pada perusahaan industri adalah : industri makanan, industri barang karet, industri tekstil, dan industri barang-barang dari logam. Bila dilihat dari pengelompokan/jenis yang diminati, urutannya adalah : industri makanan, macam-macam industri, industri tekstil, dan gerabah.

Membandingkan keadaan ini dengan tahun 1950 terlihat bahwa situasinya sudah mengalami perubahan, bukan hanya dari banyaknya perusahaan industrinya, juga pada urutannya. Industri tekstil tergeser oleh industri makanan. Industri barang karet muncul sebagai muka baru setelah mengalami penurunan drastis akibat perang (pendudukan Jepang dan revolusi fisik).

Seperti juga situasi pada tahun 1950 banyaknya jenis usaha tidak menjamin banyaknya perusahaan. Industri bahan makanan menduduki urutan pertama banyaknya jenis usaha, namun perusahaan-perusahaan industri makanan hanya menduduki urutan kedua banyaknya jumlah perusahaan.

Bagaimana dengan lokasi persebarannya : apakah ada perluasan persebaran atau tetap sebagaimana gambaran tahun 1950. Perhatikan data-data berikut ini :

Tabel 5 Lokasi Persebaran Industri Menurut Banyaknya Kecamatan di Sukabumi Tahun 1959

No.	Persebaran/Kecamatan	Banyaknya Perusahaan	Persentasi Perusahaan
1	2	3	4
1.	Kecamatan Sukaraja	76	3,51%
2.	Kecamatan Sukabumi	695	32,10%
3.	Kecamatan Sisaat	219	10,12%
4.	Kecamatan Baros	23	1,06%
5.	Kecamatan Parung Kuda	43	1,90%

1	2	3	4
6.	Kecamatan Kelapanunggal	31	1,43%
7.	Kecamatan Cicurung	51	2,36%
8.	Kecamatan Surade	11	0,51%
9.	Kecamatan Bikidang/Ciracap	39	1,80%
10.	Keca9tan Pelabuhan Ratu	53	2,45%
11.	Kecamatan Cisolok	12	0,55%
12.	Kecamatan Jampang Kulon	12	0,55%
13.	Kecamatan Cikembar	47	2,17%
14.	Kecamatan Jampang Tengah	64	2,96%
15.	Kecamatan Sagaranten	20	0,92%
16.	Kecamatan Nagrak	19	0,88%
17.	Kecamatan Lengkong	18	0,83%
18.	Kecamatan Warung Kiara	26	1,20%
19.	Kecamatan Ciomas	9	0,42%
20.	Kecamatan Nyalindung	48	2,22%
21.	Kecamatan Cibadak	107	4,94%
22.	Tidak diketahui	542	25,03%
	J u m l a h	2165	100,00%

Sumber : Hasil penghitungan penulis

Dari catatan di atas terlihat bahwa semua kecamatan sudah memiliki industri namun jalur Sukaraja, Sukabumi Cisaat, Cibadak, Cicurug, masih tetap merupakan tempat yang ideal. Makin dekat ke kota Sukabumi dan jalur utama Sukaraja – Sukabumi – Cibadak – Ciawi, maka makin mungkin industri berkembang. Makin baik prasarana perhubungan, maka makin subur industri di sepanjang jalur itu. Perhatikan beda antara jalur Baros, Sagaranten, Surade dibanding dengan Cibadak, Cikem-

bar, Pelabuhan Ratu, Cisolok, sama-sama dari arah utara ke selatan dengan jalur paralel, tetapi pertumbuhannya berbeda. Selain berhubungan dengan banyaknya penduduk, luas tidaknya tanah pertanian mungkin juga sangat ditentukan oleh tingkat kesuburan tanah.

Bagaimana dengan latar belakang pemiliknya atau etnis mana yang sangat aktif bergerak pada periode ini, informasi berikut akan memberikan gambaran :

Tabel 6 Latar Belakang Etnis Pengusaha Industri di Kabupaten Sukabumi Tahun 1959

No.	Latar Belakang Etnis	Jumlah Perusahaan	Persentasi Perusahaan
1.	WNI / Cina	142	6,57%
2.	Arab	178	8,22%
3.	Belanda	16	0,75%
4.	Indonesia Asli	1829	84,46%
	J u m l a h	2165	100,00%

Sumber : Hasil penghitungan penulis

Dari catatan di atas terlihat bahwa jumlah orang pribumi dan Arab yang berwiraswasta makin banyak dibanding dengan pada tahun 1950. Sedangkan orang Cina, dan Belanda persentasinya menurun. Hal ini tidak mengherankan karena pada tahun-tahun awal 1950-an ini ada pemulangan sejumlah orang Belanda dan Cina ke negeri leluhurnya, dan kampanye anti Cina yang terbawa oleh arus Benteng Group-nya Sumitro makin mempersulit langkah mereka. Tempat yang ditinggalkan orang Cina dan Belanda itu sebagian ditempati oleh orang Arab dan pribumi.

Terdapat delapan jenis status hukum perusahaan industri ketika itu. Kedelapan jenis status hukum itu dapat digambarkan sebagai berikut. Sebanyak 1523 buah perusahaan bersifat perseorangan, 37 buah berbentuk NV, 14 buah CV, 15 buah kongsi/gabungan, 4 buah firma, 12 buah Koperasi, 2 IMA, 16 buah berada di bawah yayasan atau organisasi tertentu, dan sisanya tidak diketahui. Dengan demikian sebagian besar perusahaan industri di Kabupaten Sukabumi belum memerlukan bentuk perusahaan yang teratur dan pembagian kerja yang jelas. Dengan dasar hukum seperti CV, NV, Firma sifat kekeluargaan sebetulnya masih menonjol. Namun begitu sebagian besar para wiraswasta di Kabupaten Sukabumi pada masa itu berkesimpulan belum merasa perlu. Faktor modal mungkin salah satu kendala. Situasi ini tentu saja berbeda menjelang Pelita I atau sepuluh tahun setelah tahun 1958.

3. Kesimpulan

Struktur perekonomian Sukabumi sangat dipengaruhi oleh kondisi alam dan fasilitas lokal yang dimilikinya. Bilamana kita menyusuri wilayah Sukabumi dari utara ke selatan baik melalui Baros – Sagaranten, maupun dari Cibadak ke Pelabuhan Ratu, akan kelihatan perbedaannya. Dataran tinggi penuh dengan perkebunan, dataran rendah di utara dan di pantai selatan berkembang sektor industri.

Dari semua konsentrasi industri itu, jalur Ciawi – Cibadak – Sukabumi – Sukaraja, menduduki tempat teratas. Karena itu tidaklah mengherankan kalau penduduk lebih padat di bagian utara, khususnya di Cisaat – Cibadak, di tempat mana industri kecil dan rumah tangga berkembang dengan pesatnya.

Catatan kuantitatif yang disampaikan tentu saja belum dapat menangkap persoalan yang subtentif, seperti arah gejala sebelum dan sesudah periode 1950–1960. Karena itu masukan yang disampaikan pada seminar, tentu saja akan memperkaya wawasan untuk penyempurnaan tulisan ini.

CATATAN :

1. JH Knaud, *Herinneringen aan Soekaboemi*
2. Jacques Van Doorn and Willem J. Hendrix, *Casp 9* hal. 12
3. *Ibid.*, hal 9 dan 16
4. Stbl Nomor 21 Tanggal 25 April 1921
5. Stbl Nomor 310 Tahun 1914

Bahan Penulisan

A. Arsip

1. "Daftar prusahaan-perusahaan dalam daerah Sukabumi, 1 Nopember 1950", (1 bundel).
2. "Daftar pandai besi di Cisaat, 30 September 1950" (1 bundel).
3. "Daftar pandai besi di Cibadak, dan Cicurug, serta daftar pengrajin anyaman bambu-jaksi pandan di Cisaat, 1950" (1 bundel).
4. "Daftar perusahaan-perusahaan bahan makanan di Kabupaten Sukabumi, Oktober 1950" (1 bundel).
5. "Daftar perusahaan-perusahaan dalam daerah kota Sukabumi" (2 lembar).
6. "Daftar pertenunan desa dalam daerah Sukabumi (Pelabuhan Ratu dan Cisaat) 1950" (1 bundel).
7. "Daftar Lio-Lio di daerah Sukabumi, 1950" (2 lembar)
8. "Peta lepas Kecamatan Cisaat, 1950" (1 lembar).
9. "Daftar Koperasi dan calon Koperasi di daerah Kabupaten Sukabumi, 1952" (3 lembar).
10. "Laporan bioskop di daerah pengawasan Jawatan Perindustrian dan kerajinan di Sukabumi, 1951" (1 lembar)

11. "Daftar perusahaan-perusahaan dalam daerah perindustrian Kabupaten Sukabumi, 1 Juni 1952" (1 lembar).
12. "Daftar perusahaan-perusahaan dalam kota Sukabumi, 1952" (?), (1 lembar).
13. "Daftar tambahan perindustrian baru dari bulan Januari –Desember 1956 dalam wilayah perindustrian kota Kecil dan Kabupaten Sukabumi"' (1 bundel).
14. "Daftar pendirian baru perusahaan industri Kabupaten Sukabumi dari bulan Januari–Desember 1957" (1 bundel).
15. "Daftar perusahaan-perusahaan kerajinan perak yang mendapat pembagian perak pemerintah yang tercatat pada Jawatan Perindustrian Kabupaten Sukabumi 1957" (1 lembar).
16. Daftar pertenunan, perajutan, penggilingan padi, huller gabah, pabrik es, percetakan, veem, 1959" (1 bundel).
17. "Daftar laporan angka-angka produksi bulan Nopember 1958" dari wilayah Kabupaten Sukabumi" (3 lembar).
18. "Daftar banyaknya perusahaan industri sampai akhir Mei 1958 yang tecatat dalam wilayah Kabupaten Sukabumi" (1 bundel).
19. Daftar perusahaan-perusahaan asing yang telah mengajukan permohonan dalam daerah Kabupaten Sukabumi, 1958" (1 bundel).
20. "Daftar perusahaan industri/kerajinan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi 1959" (1 bundel).
21. "Daftar penghasilan dan keadaan perusahaan industri, 1959" (1 lembar).
22. "Daftar perusahaan/kerajinan dalam wilayah Kabupaten Sukabumi" (1 bundel).
23. "Daftar penghasilan dan keadaan perusahaan industri di wilayah Sukabumi, 1960" (3 lembar).

24. "Daftar pertemuan koperasi desa kecamatan Cisaat, 27 Desember 1960" (1 bundel).

B. Buku, Majalah dan Manuskrip

1. Knaud, JM. *Herinneringen aan Soekaboemi.*
2. *Soekaboemi tempo doeloe (1988)* Soekaboemi: tp, 1988.
3. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten *Soekaboemi* (manuskrip).
4. *Casp 9.*
5. *Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah Djawa Barat* 1945–1965. Bandung: Bakipda, 1965.
6. "Laporan Penelitian/Penyelidikan Pasar Keju dalam wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi". Koleksi Arsip Nasional No.227 Kab. Presiden.
7. *Republik Indonesia: Propinsi Djawa Barat.*

INDUSTRIALISASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT INDONESIA

Suyatno Kartodirajo

I

Dewasa ini studi historis tentang ekonomi semakin menarik karena berbagai faktor, antara lain bahan-bahan dokumenter dalam bidang ekonomi (seperti perpajakan, harga, daftar milik tanah) cukup berlimpah karena administrasi pemerintahan yang semakin baik. Di samping itu masalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang telah menaruh minat bagi para ahli (Sartono Kartodirdjo 1981). Dalam perkembangan ekonomi muncullah masalah dominan yaitu masalah proses pembangunan khususnya dan modernisasi pada umumnya, termasuk industrialisasi. Pembangunan, modernisasi industrialisasi adalah gejala-gejala yang saling berhubungan. Modernisasi di negara-negara Barat melalui dua proses yaitu komersialisasi dan industrialisasi. Pada kebanyakan negara-negara sedang berkembang modernisasi lebih merupakan akibat dari komersialisasi dari pada industrialisasi dan birokrasi (David E. Apter, 1965: 43, 67). Modernisasi adalah suatu partikularistik dari pada pembangunan. Industrialisasi sebagai aspek spesifik dari pada modernisasi dapat

dijelaskan sebagai periode dalam masyarakat dalam mana peranan-peranan fungsional strategis dikaitkan dengan manufaktur (David E. Apter, 1965: 67). Adalah tidak mungkin bagi suatu negara yang melaksanakan industrialisasi tanpa menerima dan melaksanakan modernisasi.

Industrialisasi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu masyarakat dan bangsa secara keseluruhan untuk memproduksikan aneka rupa barang kebutuhan masyarakat. Pembangunan pabrik-pabrik tidak selalu menunjukkan proses industrialisasi, dan pabrik bukan satu-satunya sistem produksi barang. Di Asia Tenggara pembangunan pabrik-pabrik lebih mencerminkan ekspansi negara-negara maju, meskipun masyarakat yang bersangkutan ikut serta dalam proses, peningkatan pengetahuan dan kemampuan mencipta aneka ragam barang (M. Dawan Rahardjo, 1987).

Industrialisasi sebagai suatu proses dapat mencakup periode-periode jangka panjang, menengah (medium) dan pendek. Pembagian semacam ini menunjukkan bahwa industrialisasi sebagai suatu proses merupakan bagian dari sejarah ekonomi dan sejarah sosial. Studi industrialisasi di Inggris yang mencakup waktu, dari tahun 1700 sampai 1939, yang dikerjakan oleh C.P. Hill, dalam bukunya *British Economic and Social History 1700-1939 (1957),* kiranya cukup jelas bahwa masalah industrialisasi merupakan permasalahan yang dapat dimasukkan ke dalam tema sejarah ekonomi dan sejarah sosial. Adapun periode jangka panjang dari studi sejarah ekonomi dapat mencakup waktu satu abad atau lebih, bahkan mungkin hanya beberapa dekade saja. Periode jangka menengah (medium) dapat mencakup waktu lebih dari satu dekade, dan periode jangka pendek pada umumnya mencakup waktu beberapa tahun saja, yang kurang dari satu dekade saja (J.S. Dugdale, 1962).

Pada umumnya ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari suatu fungsi di dalam subsistem atau di dalam masyarakat yang meliputi aktivitas produksi, distribusi dan jasa. Dan dalam hal ini masyarakat merupakan pengatur suatu subsistem. Tingkah laku masyarakat serta karakteristiknya dipe-

lajari dalam sosiologi. S.R. Parker, dalam sebuah bukunya yang berjudul *The Sociology of Industry*, menjelaskan bahwa masalah-masalah aplikasi teknologi dalam industri, organisasi nilai-nilai yang mengatur tingkah laku ekonomi merupakan permasalahan yang dipelajari dalam bidang sosiologi industri. Sosiologi industri bertujuan menjelaskan berbagai perkembangan dari berbagai jenis masyarakat serta pengaruhnya satu sama lain. Upaya penjelasan ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang dipertanyakan oleh masyarakat-masyarakat atau negara-negara industri, antara lain:

(1) Bagaimana dan ke mana arah perubahan dalam masyarakat industri
(2) Mengapa perkembangan negara-negara industri masih cenderung terikat kepada nilai-nilai budaya dan politik mereka sendiri di dalam membentuk organisasi kerja?
(3) Adakah kemungkinan perkembangan industri akan mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat?

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dipelajari pula dalam bidang sejarah ekonomi dan sejarah sosial, yang menekankan penjelasan ideografis dari perkembangan masyarakat di masa lampau. Masalah industrialisasi dan dampaknya terhadap masyarakat merupakan masalah-masalah yang kompleks dan dipelajari dari bidang sejarah, sosiologi industri dan ekonomi.

II

Untuk memperoleh ilustrasi historis yang komparatif tentang industrialisasi di Indonesia, kiranya perlu dibahas secara ringkas proses industrialisasi di negara-negara baru yang telah berhasil membentuk negara kebangsaan *(nationstate)*, terutama di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara baru itu sementara berupaya memantapkan integrasi politik dan stabilisasi politik, negara-negara itu berupaya pula dalam usaha melaksanakan pembangunan ekonomi. Kira-kria seperempat abad

yang lalu, telah terjadi pengalihan kembali kegiatan ekonomi secara besar-besaran ke kawasan Asia Timur. Dalam kegiatan ekonomi ini, Jepang telah memegang peranan kunci dalam industrialisasi, yang dalam waktu singkat telah mendominasi kegiatan ekonomi dunia. Negara industri baru (NIB) yaitu Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Di kawasan Asia Tenggara, lima negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Muangthai) telah pula menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dari kurun waktu sebelumnya, terutama sebelum tahun 1940. Dari tahun 1960an sampai awal tahun 1980an, merupakan kurun waktu di kawasan negara-negara tersebut, di mana telah terjadi transformasi industri. Pemerintah negara anggota ASEAN terlihat membuat strategi pembangunan ekonomi dengan cara mendorong industrialisasi. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah menempuh kebijaksanaan industrialisasi (Mohamed Ariff & Hal Hill, 1988), yang antara lain sebagai berikut:

(1) Kepercayaan bahwa prospek pasar internasional dari barang-barang primer di masa depan, yang merupakan bagian terbesar barang-barang dari daerah ini, sangat memprihatinkan.
(2) Daya tarik bagi ASEAN ialah kenyataan bahwa di negara-negara baru di kawasan Asia Timur itu telah cepat pertumbuhan ekonominya karena dorongan dan dukungan ekspor.
(3) Pendapat kaum intelektual, termasuk teknokrat serta pembuat kebijakan pembangunan, yang mulai meninggalkan konsep "pesimisme ekspor", yang menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi ke dalam. Dan kemudian mereka mengambil langkah orientasi baru dengan memasukkan modal dari badan pembangunan internasional.
(4) Sejak tahun 1981, yang relevan dengan Indonesia ialah merosotnya harga-harga mata dagangan, terutama minyak. Dan akibatnya Indonesia harus mengembangkan barang-barang ekspor baru.

(5) Pembangunan pada masa penjajahan bersifat berat sebelah yang lebih cenderung pada sektor pertanian saja, khusus pada ekspor tanaman perdagangan. Dengan demikian kebijakan ASEAN, terutama Indonesia upaya meningkatkan ekspor industri dianggap sebagai cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan itu.

Semua negara ASEAN, kecuali Muangthai mempunyai pengalaman penjajahan dalam kurun waktu yang panjang, semuanya termasuk Muangthai telah berfungsi sebagai sumber bahan mentah. Dan Singapura berfungsi sebagai pusat perdagangan dan pasar bagi barang manufaktur dari negara-negara industri Barat. Politik kolonial tersebut telah mengakibatkan keterbatasan dan keterasingan industrialisasi di kawasan Asia Tenggara; oleh karena itu, negara-negara baru di kawasan Asia Tenggara, terutama ASEAN memusatkan perhatian pada kebijakan ini bukan saja dipandang sebagai simbol modernisasi dan kemerdekaan ekonomi, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan ekonomi, seperti tercermin spesialisasi yang berlebihan dalam produksi barang primer. Bahkan industrialisasi dimaksudkan pula untuk memberikan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat, yang sangat nampak di Indonesia.

Pada akhir tahun 1940-an Filipina memimpin industrialisasi di kawasan tersebut dengan membangun industri substitusi impor. Malaysia memulai industrialisasi sejak kelahiran Federasi Malaysia merdeka pada tahun 1957. Pada tahun 1959 Muangthai telah membuat langkah-langkah industrialisasi yang lebih konkret. Pengalaman Indonesia pada kurun waktu tersebut berbeda sangat tajam dengan tiga negara yang disebutkan tadi. Pada kurun waktu 1950an, Indonesia mungkin merupakan negara yang paling kurang maju dalam proses industrialisasi dibandingkan dengan negara-negara berkembang utama mana pun (Mohamed Ariff & Hal Hill, 1988). Nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1950an an stagnasi ekonomi selama paruh pertama tahun 1960an telah meng-

akibatkan lambannya pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi di Indonesia. Nasionalisme ekonomi yang tidak memberikan kesempatan modal asing ikut berperan dalam industrialisasi telah mengakibatkan sektor manufaktur tidak tersentuh oleh usaha pribumi, karena kekurangan modal (Frank H. Golay, et. al., 1969 : 1262 - 162-163).

Pada tahun 1950an Indonesia melaksanakan Pembangunan Lima Tahun pertama, yang menitikkan pembangunan perusahaan-perusahaan negara, ternyata memperlambat industrialisasi dan terhentinya bantuan finasial kepada perusahaan swasta (Frank H. Golay, et. al., 1969: 163-164). Satu rencana pembangunan lagi yaitu Rencana Delapan Tahun dibuat dalam masa terpimpin. Perekonomian Indonesia semakin terkendali, dan semakin luasnya campur tangan pemerintah dan makin meningkatnya pengawasan administratif langsung. Kebijaksanaan Orde Lama yang bersifat melihat ke dalam *(inwardlooking)* saja telah dirasakan tidak dapat mengembangkan industrialisasi. Nasionalisme ekonomi yang ditempuh Orde Lama telah mengakibatkan kemunduran industri-industri ekspor (Anne Both dan Peter Mc.Cawley, 1987).

Lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 dengan program pembangunan ekonomi, laju pertumbuhan dan perkembangan industri sangat menggembirakan, terutama setelah tahun 1970-an. Berbagai sektor industri sejak 1977 menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum 1968, misalnya industri tekstil, industri logam dan mesin, industri kimia dan lainnya. Pertumbuhan sektor industri selama tahun 1970-an, hampir seluruhnya sektor industri modern.

Struktur industri tahun 1970-an, berdasarkan data sensus industri 1974/1975 dibedakan tiga golongan perusahaan yaitu:
(1) Perusahaan besar dan perusahaan sedang, yang masing-masing mempekerjakan 100 orang lebih, dan mempekerjakan 20-90 orang.
(2) Perusahaan kecil mempekerjakan 5–19 orang tenaga kerja.

(3) Kerajinan rumah tangga: perusahaan-perusahaan industri tanpa menggunakan tenaga kerja yang digaji.

Menjelang tahun 1980 persentasi industri-industri sebagai berikut: 96% industri rumah tangga; 3,5% industri kecil; 0,4% industri sedang; 0,1% industri besar (M. Dawam Rahardjo, 1986 : 21).

Perkembangan industri-industri padat modal yang berskala besar pada awal tahun 1980-an mencerminkan prioritas yang diberikan Pemerintah Indonesia untuk perkembangan industri dasar (bahan baku), terutama pengolahan sumber-sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Pada Repelita I dan Repelita II telah mulai dibangun beberapa Industri dasar, seperti semen dan pupuk urea (Thee Kian Wie, 1988: 30). pada awal Repelita III dikembangkan dan ditingktkan produksi industri-industri dasar, Seperti berbagai macam pupuk (ZA urea, TSP), aluminium, semen, besi baja, kertas dan pulp. Meskipun industri baja adalah pada modal, namun pembangunan industri ini memungkinkan berkembangnya industri-industri pengecoran, penempatan baja serta pengerjaan logam yang padat karya.

Laju pertumbuhan industri-industri pesat itu antara lain didorong oleh penanaman modal asing (PMA) yang telah diatur dalam undang-undang PMA tahun 1967 dan undang-undang penanaman modal dalam negri (PMDN) tahun 1968 dan kedua undang-undang ini merupakan landasan hukum yang kuat bagi pengusaha-pengusaha asing dan nasional untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai kegiatan produktif, termasuk sektor industri pengolahan (Thee Kian Wie, 1988: 105), proyek-proyek PMA berasal dari negara-negara maju (USA, Jepang, Jerman Barat, Negeri Belanda, Inggris) dan negara-negara sedang berkembang (Hongkong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Filipina). Jepang dan Amerika Serikat adalah dua negara investor terbesar di Indonesia, lebih dari 70% dari seluruh jumlah penanaman modal asing sebesar US$ 9,6 milyar. Dari jumlah itu

AS ambil bagian 40%, dan Jepang ambil bagian sekitar 30% dari jumlah total.

III

Industrialisasi di Indonesia, dengan meluasnya penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri mempunyai dampak yang sangat besar dalam pembangunan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam struktur pasar telah terjadi industri oligopoli, di mana sebagian besar komoditi dalam pasar dikuasai beberapa perusahaan, bahkan prilakunya yang menyatu telah menimbulkan struktur pasar yang bersifat monopolistik atau oligopoli kolusif. Beberapa jenis industri oligopoli, antara lain adalah industri bir, semen, sepeda motor, mobil, tepung terigu, buah-buahan dalam kaleng, kaca lembar dan lain-lainnya. Masing-masing industri ini menguasai pasar di atas 85% (N. Hasibuan, (1985).

Karena industri oligopoli menggunakan teknologi padat modal, maka kesempatan kerja yang terbuka sangat terbatas, sehingga menjadi beban sosial masyarakat, kiranya cukup jelas bahwa dampak pembangunan industri di Indonesia dengan PMA telah menimbulkan konsentrasi modal serta *economic enclaves*, yang membentuk struktur pasir yang oligopoli. Apabila keadaan semacam ini tidak dapt terkendali akan mengakibatkan unsur-unsur negatif yaitu:

(1) Beban sosial konsumen yang tinggi
(2) Menyempitnya kesempatan kerja
(3) Meningkatnya kesenjangan pendapatan
(4) Menimbulkan rintangan yang lebih besar dalam kesempatan berusaha (N. Hasibuan, 1985)

Dalam prespektif sejarah perekonomian yang dialami oleh negara-negara bekas jajahan, suatu kenyataan bahwa penanaman modal asing mempunyai motivasi, antara lain:

(1) Industri-industri di negara-negara Barat memerlukan bahan mentah yang umumnya dikuasai oleh dunia ketiga.

(2) Perkembangan yang cepat dari industri-industri di negara-negara maju, makin memerlukan penguasaan langsung dan terjamin atas industri ekstratif di dunia ketiga. Motivasi PMA ini sangat terasa sekali pada era kolonial.

Program industrialisasi di Indonesia mempunyai sifat marginal dan berjangka panjang, maka industri di Indonesia akan terlibat pada fakta ialah pentingnya sektor pertanian dan besarnya potensi pasaran domestik, dan sifat ini merupakan suatu keunikan dalam industrialisasi di Indonesia, yang berbeda dengan industrialisasi di Taiwan, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura, dari sudut sejarah perekonomian Indonesia seperti pernah dilaksanakan di Indonesia tahun 1950an, strategi melihat ke dalam *(inward-looking)* diperhatikan. Meskipun demikian strategi melihat keluar *(out ward-looking)* sangat penting untuk memasukkan modal asing, demi cepatnya laju industrialisasi. Pada Pelita III dan Pelita IV, pengembangan sektor industri telah berfungsi menunjang pembangunan sektor pertanian, seperti industri penghasil sarana produksi modern (pupuk, obat-obatan), penghasil alat-alat pertanian dan pengalaman hasil pertanian. Strategi pembangunan sektor pertanian dan sektor marginal akan mempunyai dimensi pemerataan industri kecil, yang akhirnya nampak kurang atau tidak mempunyai kemampuan lagi untuk bersaing dengan industri besar dan sedang. Dalam proses industrialisasi di Indonesia industri-industri besar yang moderen ternyata memerlukan dukungan-dukungan dari satuan-satuan usaha kecil yang dapat membuat atau menghasilkan barang-barang komponen atau suku cadang.

Industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, tidak saja di negara-negara maju, tetapi juga di negara-negara sedang berkembang yang dimulai atau masuk dalam proses industrialisasi, seperti Indonesia sendiri. Perubahan-perubahan yang nampak ialah perluasan pasar, dari wilayah lokal ke wilayah nasional dan internasional. Di kota-kota besar terjadi kehidupan kumuh yang disebabkan arus urbanisasi yang besar, di samping pertumbuhan penduduk

kota itu sendiri karena kelahiran. Pada tahun 1970-an Pemerintah DKI telah melaksanakan program perbaikan kampung (PKK), dan program ini merupakan cara pemecahan dari masalah kehidupan kumuh di ktota besar. Survai yang dibekukan tahun 1969 oleh BPS (Biro Pusat Statistik) terhadap mutu perumahan di Jakarta menunjukkan bahwa kondisinya jelek, 68% dari seluruh keluarga tidak mempunyai jamban, 80% tidak mempunyai listrik dan 68% tidak mempunyai air bersih. Rumah tidak permanen berdinding gedek, berlantai tanah dan atap rumbia meliputi 44% (BPS, Indonesia 1968-1969 Jakarta Survey. Perkembangan perkotaan ini tidak saja merupakan jawaban terhadap industrialisasi, tetapi juga konsekuensi dari transformasi sosial.

Dampak industrialisasi terhadap masyarakat di kota kecil, antara lain dikemukakan kasus kehadiran industri percarian gas alam TP Aron pada pertengahan tahun 1974 di kawasan sekitar Lhokseumawe, Aceh. Dari hasil penelitian Dr. M. Ali Basyah Amin Abdullah, seorang ahali ekonomi dari Universitas Syiah Kuala, tentang kehadiran industri PT. Aron dan dampaknya terhadap masyarakat adalah sebagai berikut : terbukanya kesempatan kerja yang besar yang menyerap penganggaran, munculnya prasarana dan sarana ekonomi seperti jalan dan transportasi, pasar, toko-toko, telekomunikasi, bank, perkreditan, perdagangan pergudangan, penginapan, rumah makan. Sedag dampak negatif telah pula terasa, seperti polusi air bersih dan udara, pemukiman semakin sesak, meningginya temperatur, kenaikan harga barang-barang, dan perbedaan yang menyolok dalam kehidupan dalam kawasan industri tersebut (M. Ali Basyah Adnan Abdullah 1990).

Industrialisasi di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir ini telah membawa dampak perubahan yang luas dalam masyarakat. PMA telah menimbulkan konsentrasi modal dan *economic enclaves*, seperti hadirnya industri oligopoli dan konglomerat. Dengan kebijaksanaan pemerintah yang menempuh deregulasi dan debirokratisasi lebih mendorong usaha swasta sehingga laju industrialisasi semakin dipacu. Adanya struktur

pasar yang berubah telah menumbuhkan persaingan yang semakin ketat.

Meskipun demikian tidak dapat dihindari bahwa industrialisasi juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Perluasan kawasan industri berarti pula terjadinya proses pembebasan tanah pertanian, dan pada gilirannya petani akan mengalihkan kegiatan ekonominya dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Hal ini berarti petani harus meninggalkan desanya untuk migrasi ke kota-kota, yang akan menambah beban sosial dan ekonomi pemerintah kota.

Industrialisasi telah pula mengakibatkan rusaknya lingkungan alam, yang akhirnya mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi (sosial, budaya dan alam).

Daftar Pustaka

Ariff, Mohamed & Hal Hill, *Industrialisasi di Asean.* Jakarta LP3ES, 1988.

Apter, David E. *The Politiks df Moodernization.* Chicago, The Universiti of Chicago Press. 1965. Booth, Anne dan Peter McCawley, *Ekonomi orde baru.* LP3ES, 1987.

Booth Anne. et.al., *Sejarah Ekonomi Indonesia.* Jakarta, LP3-ES, 1988.

Baum, Warren C., dan Stkes M. Tolbert., *Investasi dalam pembangunan. Pelajaran dari pengalaman Bank dunia.* Terjemahan B.B. Teku Jakarta, UI–Press., 1988.

Dugdale, J.S., *Economic and Social History.* London, 1962.

Golay, Frank H., et.al, *Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia* New York, Ithaca, Cornel University Press, 1969.

M. Dawan Rahardjo, *Transformasi pertanian, Industrialisasi dan kesempatan kerja.* Jakarta UI Press., 1986.

———, *Perekonomian Indonesia.* Jakarta, LP3ES 1987.

Parker, S.R. et.al., *Sosiologi Industri.* Jakarta, PT Bina Aksara, 1985.

Thee Kian Wie, Industrialisasi Indonesia. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Artikel-artikel

Achmad T. Birowo, 'Pembangunan Pertanian dan Strategi Industrialisasi Indonesia', *Prisma.* No. 5 Agustus 1972.

N. Hasibuan, 'Oligopoli di Indonesia: Kasus Sektor Industri' *Prisma,* No. 2, Tahun XIV, 1985.

M. Alibasyah Amin Adnan Abdullah, *'Industrialisasi dan Masalah Ketenagakerjaan di Kawasan Sekitar Lhokseumawe.* Makalah Seminar Ilmu-Ilmu Sosial dan Kongres HIPIIS VI, 1990 16–21 Juli 1990 di Yogyakarta.

Sartono Kartodirdjo, 'Aspek Sejarah dalam Ekonomi Pembangunan', *Ekonomi dan Keuangan Indonesia,* Vol. XXIX, No. 3, 1981.

Thee Wie, 'Perubahan Ke Arah Industrialisasi Berorientasi Ekspor Peluang dan Rintangan', *Prisma,* Tahun XIX, No. 3, 1990.

AGROINDUSTRI DAN SUBSISTENSI MULTIKULTUR, PAJAK, DAN KERJA WAJIB DI VORSTENLANDEN (1850–1990)

Suhartono

Pengantar

Agaknya tidak dapat disangkal lagi di dalam pengajian sejarah Indonesia umumnya dan sejarah sosial ekonomi khususnya terdapat kecenderungan baru. Sejak dua dasawarsa terakhir ini kajian sudah bergeser dari sejarah perusahaan ke sejarah petani, buruh, dan sejarah pedesaan dan kalau boleh disebut mulai ditonjolkan sejarah wong cilik. Sejarah perusahaan koloniall kurang memberi sumbangan langsung terhadap perkembangan kajian dewasa ini. Bahkan para peneliti Barat pun sudah mengubah orientasi penelitian yang memperhatikan hal ikhwal petani dan pedesaan. Bukan semata-mata petani menjadi subyek, tetapi ia disorot ketangguhannya dan ketahanannya dalam memikul beban ekonomi untuk kepentingan kelompok sosial di atas suasana desa *(supra village sphere)*. Memang pergeseran orientasi tidak terjadi secara dratis, tetapi berlangsung dalam waktu relatif lamban, tetapi toh berjalan juga. Fasseur sudah memulainya tetapi keuntungan kolonial tetap menjadi hasil penelitiannya (Fasseur, 1975). Walaupun bukan studinya yang

utama, van Niel mengukur berat-ringannya Tanam terhadap petani (van Niel. 1972). dan Pelzer masih secara umum memperhatikan keterlibatan petani dalam agroindustri (Pelzer, 1978)

Kecenderungan baru terhadap petani sebagai golongan sosial yang sangat berjasa dalam agroindustri mulai digarap. Walaupun bukan penelitian tentang Indonesia, tetapi dampak penelitian Scott dan Popkin, sangat luas dan berpengaruh terhadap peneliti kita (Scott, 1978; Popkin, 1979). Usaha untuk mengamati terus siapa petani yang berjasa itu sebenarnya dilakukan oleh Knight dalam penelitiannya tentang petani di Pekalongan (knight, 1983). Fernando di Cirebon (Fernando, 1982), Elson di Pasuruan dan Probolinggo (Elson, 1985). Jadi, kalau diperhatikan pengamatan terhadap petani di suatu lokasi dengan spesifikasinya makin banyak dilakukan para peneliti.

Hal ikhwal petani memang luas sekali yang dapat ditinjau dari berbagai demensi. Sartono Kartodirdjo telah mengkaji resistensi petani dalam bentuk gerakan sosial keagamaan (Sartono Kartodirdjo 1973) dan dalam bentuk perbandingan gerakan petani dari beberapa etnik telah diteliti oleh Michael Adas (Adas, 1979).

Sebenarnya yang menjadi tujuan makalah ini adalah untuk mengungkapkan seberapa jauh respons petani terhadap agroindustri. Peneliti yang sudah disebut di atas hanya meneliti satu lokasi dengan satu jenis komoditas ekspor, tetapi makalah ini akan mengungkap satu lokasi dengan multi komoditas ekspor. Kalau beban petani dari satu jenis tanaman menimbulkan protes petani maka di lokasi yang terdapat multi tanaman dapat dipastikan gerakan dan protes petaninya lebih hebat, laten, dan endomis.

Sehubungan dengan hal di atas dicakup permasalahan yaitu: Seberapa jauh beban pajak dan kerja wajib petani menyebabkan timbulnya resistensi. Pada tingkat subsistensi mana yang masih dapat ditoleransikan petani? Semakin banyak beban petani dari agroindustri semakin keras pula respons petani. Permasalahan di atas dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak

uraian dan memberi bingkai jawaban terhadap korelasi dan dampak agroindustri terhadap petani.

Sistem lungguh (apanage)

Vortenlanden atau daerah-daerah kerajaan – Surakarta dan Yogyakarta– merupakan inti atau pusat kerajaan *(kuthagara dan negaragung)* pernah menguasai *mancanegara* timur, barat dan *pesisiran* sebelum tahun 1830. Sebagai kerajaan agraris, Mataram mempunyai pemerintahan teratur yang didasarkan pada mekanisme tanah kerajaan. Pada dasarnya tanah seluruh kerajaan adalah milik raja. Karena status dan perannya famili dan birokrat kerajaan mendapat lungguh sebagai tanah jabatan yang dapat disamakan dengan gaji. Mereka adalah pemegang lungguh (patuh) yang menikmati hasil tanah lungguh selama menjadi birokrat kerajaan (Soepomo, 1927: 8).

Hak menikmati hasil lungguh sifatnya hanya sementara dan sewaktu-waktu lungguh itu dapat dicabut raja, karena hak tanah itu sifatnya sementara *(nggadhuh)*. Patuh tinggal di kuthagara sedang letak lungguh ada di *negaragung*, berjauhan tempatnya. Oleh karena itu *patuh* mengangkat orang kepercayaannya yaitu bekel untuk mengerjakan lungguh. Jadi fungsi *bekel* adalah mengorganisasikan lungguh agar menghasilkan sesuatu untuk kepentingan *patuh*. Hasil tanah itu berupa pajak yang dibayarkan oleh *bekel* kepada *patuh* yang dapat berujud natura atau uang.

Sebagai penanggungjawab pengolahan lungguh dan proses produksinya *bekel* tidak dapat mengerjakan sendiri tetapi dibantu oleh petani di kabekelannya. Kedudukan petani adalah sebagai penggarap yang sesungguhnya dan panen di bagi dua *(maro)* hasil: 2/5 bagian *patuh*, 2/5 bagian petani, dan 1/5 bagian *bekel* (Rouffaer, 1931 : 73).

Dilihat dari hubungan yang berlaku dalam sistem lungguh dapat diamati adanya kekuasaan raja yang mutlak, sedangkan *patuh* mengimitasi kekuasaan raja. Untuk menunjukkan kekuasaannya patuh memaksa agar loyal padanya. Meskipun

jelas sekali adanya dua golongan sosial yang tidak sama kedudukannya namun terdapat hubungan harmonis, patronklien antara *patuh* dan petani. Hubungan simbiotik dan diadik merupakan pola tetap dalam jaringan sosial dari sistem lungguh. Memang ada superordinasi dan subordinasi namun keduanya menyadari statusnya. Sudah barang tentu petani menduduki tempat yang rendah dan lemah dalam hubungan ini.

Dapat dipastikan kedudukan *patuh* yang tinggi dan diperkuat oleh kekayaan dari *lungguhnya* menyebabkan petani tidak dapat menolak perintahnya. Oleh karenanya, pajak, kerja wajib, dan pungutan ekstra sedapat mungkin dipenuhi oleh petani. Sebagai wong cilik mereka menyadari kedudukannya yang lemah dan memang tidak ada kekuatan untuk menolak perintah *patuh*. Pemberian hak mengerjakan sawah *(nganggarap)* kepada petani sudah merupakan keuntungan sebab tidak semua petani berhak mendapat garapan.

Letak tanah lungguh tidak teratur dan simpang siur yang menyulitkan administrasi dan keamanan. *Patuh* Kerajaan Yogyakarta lungguhnya ada di Surakarta, demikian sebaliknya. Dalam rangka perbaikan administrasi dan birokrasi kolonial maka penguasaan tanah lungguh mulai ditertibkan. Konfik antar patuh menyebabkan terjadinya perang desa *(dessa oorlog)* yang mendominasi situasi pedesaan. Sebab utama perang desa adalah perselisihan sewa tanah dan perubahan status desa yang umumnya tidak menguntungkan petani (Rouffaer, 1931 : 107).

Diduga bahwa terpencarnya letak lungguh memang karena tanah kerajaan masih luas sehingga raja tidak sulit menetapkan lungguh seorang birokrat. Akan tetapi kemudian merupakan kesengajaan raja untuk mengurangi jumlah *cacah* yang terlalu besar tidak timbul koordinasi sehingga membentuk *cacah* yang besar dan dapat mengganggu kedudukan raja. Jadi, fragmentasi dan pemencaran lungguh adalah politik raja untuk mengendalikan politik kerajaan yang bersumber di pedesaan.

Di dalam sistem lungguh, petani tidak hanya membayar pajak tanah dalam bentuk barang dan uang, tetapi dengan tena-

ga kerja. Pada dasarnya tenaga kerja petani sangat dibutuhkan menurut jalur vertikal dan horisontal. Jalur vertikal, petani melayani kerja wajib untuk patuh dan jalur horisontal melayani desa. Kerigaji adalah kerja wajib untuk *patuh* yang dilakukannya setahun tiga kali yaitu setiap Gerebeg. Selain itu petani menyediakan tenaga *panen* yang setiap saat dapat digunakan patuh dan jenis kerja ini sifatnya okasional yang menyibukan petani.

Kerja wajib untuk desa disebut *kerigan* untuk perbaikan infrastruktur desa seperti jalan, parit, pagar, dan lain-lain, sedangkan perbaikan yang sifatnya okosional yaitu pada waktu terjadi banjir, gempa, tanah longsor, dan lain-lain. petani melakukan kerja untuk desa.

Jenis kerja wajib yang sifatnya okasional jumlahnya mencapai empat puluhan (Rouffaer, 1931 : 87). Meskipun frekuensi kerja ini tidak sama banyaknya namun kalau dihitung melelahkan petani. Pada dasarnya kerja wajib ini untuk memenuhi kepentingan *patuh* dan birokrat kerajaan, seperti *pameling, pasumbang, tukon empon-empon*, dan lain-lain. Selain itu kerja wajib untuk keperluan "dinas" diminta juga kepada petani seperti pajang, pasisiran, pejendralan, dan lain-lain.

Di dalam sistem lungguh kedudukan petani yang rendah dimanfaatkan oleh *patuh* dan birokrat kerajaan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan kata lain kehidupan di atas suasana desa ditanggung oleh petani. Keadaan seperti ini kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan.

Agroindustri

Sejak akhir abad XVIII lungguh di vorstenlanden disewakan kepada orang Belanda dan Cina dalam persil yang tidak luas. Usaha pihak swasta ini khususnya dalam mengolah dan mengembangkan beras menjadi besar dan mendesak kepentingan VOC dan akhirnya VOC melarang kegiatan pihak swasta atau sekurang-kurangnya membatasi.

Penyewaan lungguh untuk waktu yang lebih panjang di mulai setelah tahun 1816. Agaknya keadaan seperti ini menguntungkan kedua belah pihak. Penyewa untung karena hasilnya laku di pasar, sedangkan *patuh* mendapat uang sewa tanpa harus susah payah. Berkas propaganda dari Nahuys van Burgst kemudian menjadi residen Yogyakarta, penyewaan tanah makin berkembang (Carey, 1986 : 127 – 128).

Pada tahun 1847 di Vostenlanden terdapat 47 perkebunan, 5 di antaranya adalah pabrik gula milik gubernur, 1 tembakau, 4 penyewa tanah kosong, dan 5 perkebunan kopi. Beberapa nama pengusaha perkebunan kopi : F. Darlang dan W. Willing dan perkebunan tebu : P.H. de la Bretonniere dan J.E. Henderschee, semuanya di daerah Yogyakarta dan perkebunan kopi di Surakarta dikuasai oleh keluarga Dezentje.

Meskipun sejak pertengahan abad XIX perusahaan perkebunan berkembang pesat, tetapi tidak semua perkebunn itu mengusahakan komoditas ekspor, bahkan sebagaian besar dari mereka mengusahakan komoditas untuk pasar dalam negeri dan yang sangat laku adalah beras.

Empat jenis perkebunan besar ternyata mengalami puncaknya dalam waktu yang tidak bersamaan. Perluasan tanaman kopi di Surakarta menunjukkan hasil yang tinggi sampai dengan tahun 1860. Tanaman tebu baru diperluas tahun 1857 dan sejak itu produksi gula terus meningkat. Baru tahun 1860-an tanaman tembakau diperluas dan hasilnya memberikan harapan dan keuntungan besar (KV : 1860).

Pada tahun 1857 gubernur mengeluarkan undang-undang persewaan tanah yang baru dan rupanya undang-undang ini lebih banyak memberikan kebebasan dan keleluasaan berusaha. Akibatnya dalam waktu singkat jumlah perkebunan meningkat pesat, pada tahun 1864–1879 naik dari 79 menjadi 102. Kenaikan produksi itu dibarengi oleh permintaan pasar yang tinggi pula. Hal ini dapat diikuti dari harga kopi yang melambung tinggi pada tahun 1846 – 1857.

Sementara itu perkembangan tanaman indigo mencapai puncaknya pada pertengahan abad XIX. "Kejayaan" indigo digantikan oleh tembakau dan tebu yang memuncak pada tahun 1864 – 1870. Pasar Eropa untuk indigo sepi karena terjadinya perang Jerman – Perancis tahun 1870, meskipun produksinya naik sedikit. Dalam hal produksi indigo, Yogyakarta memegang peran utama dalam mensuplai pasar Eropa. Pada tahun 1848 produksi indigo Yogyakarta mencapai 68.3% dari produksi keseluruhan (Houben, 1987 : 246).

Pada tahun 1830 daerah Surakarta menghasilkan indigo 30 pk. th dan sampai dengan 1840 produksinya terus meningkat. Selain karena permintaan pasar internasional, indigo digunakan penduduk sebagai bahan pewarna. Batik dan tenun menggunakan indigo sebagai pewarna. Meningkatnya produksi indigo memerlukan pabrik pengolahan. Pada tahun 1846 didirikan 8 pabrik dan 1863 menjadi 20 pabrik. Arealnya mencapai 2.000 bau dan menghasilkan 60.000 A. pond. Arealnya menempati daerah Klaten dan Kartosuro yang merupakan persawahan yang subur dan banyak airnya (*KV.*, 1860). Di daerah Yogyakarta tanaman indigo menempati daerah Bantul, Kalasan., dan Sleman. Residen Valck memerintahkan mengambil bibit tarum kembang dari Bagelen karena jenis tarum ini cocok ditanam di daerah Yogyakarta. Pada tahun 1837 tanaman indigo mempunyai areal 167 *jung* atau menempati desa-desa dengan 8.424. *cacah*. Tahun 1851 arealnya meningkat menjadi 5.000 bau dan terus sampai 8.033 bau pada tahun 1862.

Sebelum 1850 industri gula secara kecil-kecilan di Yogyakarta diusahakan oleh orang Cina. Setahun kemudian produksinya 24 pk/th. Sehubungan dengan permintaan gula di pasar Eropa meningkat maka arealnya diperluas. Tahun 1860 didirikan pabrik gula di Yogyakarta dengan tenaga air. Setahun kemudian di wilayah itu didirikan 4 pabrik dan 7 buah lagi sedang dibangun dan 1 di antaranya dengan tenaga uap. Di Surakarta juga tidak ketinggalan dalam perluasan areal tebu. Pada tahun 1860 di Surakarta terdapat 8 pabrik dengan tenaga air dan 9 pabrik menggunakan sapi dan kerbau sebagai pabrik

giling tebu. Produksi gula di Vorstenlanden cukup tinggi, dan produksinya dapat dilihat dalam tabel 3 dan 4, dan tabel 1 dan 2 tentang produksi perkebunan selain tebu.

Selain itu daerah Mangkunegaran juga menghasilkan gula yang mengambil lokasi di Kartosuro dan Karanganyar. Perkebunan itu didirikan dengan pertimbangan resiko yang tinggi. Namun dengan enterpreneship yang baik perkebunan Mangkunegaran berkembang pesat. Perkebunan Mangkunegaran dirintis oleh Mangkunegoro IV (1853–1881), yang mendapat bantuan gubernemen. Sejak pemerintahannya lungguh bangsawan dicabut dan diganti traktemen setiap bulan. Lungguh itulah yang kemudian dijadikan perkebunan Mangkunegaran.

Produksi kopi Mangkunegaran pada tahun 1852 mencapai 10.394 pk. dan pada tahun 1865 meningkat menjadi 20.270 pk. Pada tahun 1852 produksi kopi Mangkunegara adalah tiga kali kasunanan dan bahkan pada tahun 1865 produksi kopi kasunanan hanya 61 pk., produksi yang sangat rendah. Tiga tempat yang merupakan areal kopi adalah Malangjiwan, Karangpandan, dan Wonogiri.

Dua buah pabrik gula Mangkunegara terletak di Comomadu (1861) yang digerakkan oleh dengan tenaga uap dan mesin modern dan Tasikmadu (1871) yang digerakkan dengan tenaga air. Tasikmadu mempunyai areal 65 ha yang menghasilkan 3.700 kw gula atau rata-rata 37 kw/ha, sedang harga gula pada waktu itu adalah f 32,–/kw. Areal Tasikmadu adalah 140 ha., lebih luas dari pada Colomadu. Akan tetapi dua pabrik itu pimpinannya dipegang oleh Belanda. Perkebunan lain yang dimiliki Mangkunegara adalah tembakau, teh, kina, indigo, dan padi, yang merupakan perusahaan kecil (Pringgodigdo, 1950 : 47–52).

Pajak dan Ekstraksi

Sudah menjadi kelaziman bahwa kehidupan kerajaan agraris tergantung dari pajak dan upeti dari petani. Walaupun pajak itu bagi petani dirasa terlalu berat tetapi ia berusaha melunasinya.

Bagi petani pajak harus bayar dengan uang maka ia harus mencari atau "membeli" uang, artinya petani harus menjual hasil panennya atau menjual tenaga kerjanya. Dapat ditambahkan bahwa dalam proses monetisasi di pedesaan uang sukar diperoleh dan akibatnya nilai uang tinggi. Oleh karena itu para *patuh* menetapkan sawahnya sebagai *siti pamahosan* yang pajaknya di bayar uang.

Mengenai beratnya pajak yang dibayar petani dapat diketahui dari pendapatannya. Pada tahun 1888 petani sebuah distrik di Surakarta, dengan garapan setengah bau, memanen dua kali setahun dan menghasilkan tidak lebih dari f 50,– Pekarangan dan lain-lainnya menghasilkan sekitar f 30,– Seluruh pendapatannya berjumlah f 80,– dan kalau ia membayar pajak polisi *(gunung)* f 40,– dan berbagai *pasumbang* dan *pundhutan* berjumlah f 50,– maka ia harus mencari tambahan f 10,– (Broos-hooft, 1888a : 12).

Di Yogyakarta hasil sawah kelas I, II, dan III masing-masing adalah f 64,–, f 48,– dan f 24,– sedangkan pajaknya berturut-turut f 12,–, f 10,– dan f 8,– Kalau pengeluaran sekitar f 90,– setahun maka dapat dipastikan kehidupan petani ada di bawah subsistensi *(De Locomotief,* 14 Maret 1888).

Menjelang depresi pertanian tahun 1884 seorang buruh pabrik menerima upah 30–60 sen/hari, atau f 9,– – f 18,–/ bulan. Kalau ia membeli beras, trasi, garam, cabe, candu, dan lain-lain berjumlah 35 sen maka upah yang diperolehnya tidak mencukupi lagi (Brooschooft, 1888 . 4–5). Dapat ditambahkan bahwa petani panen tidak setiap tahun dengan baik, tetapi sering terserang hama lebih dari setahun. Demikian pula buruh pabrik dan perkebunan tidak bekerja sepanjang tahun, tetapi bekerja musiman. Dilihat dari kelangsungan bekerjanya jelas kebutuhan hidup buruk tidak tercukupi oleh upahnya.

Perluasan perkebunan di pedesaan Vorstenlanden sejak pertengahan abad XIX mempercepat monetisasi karena perusahaan perkebunan dan pabrik membayar upah kerja. Sejak itu pula kerja upah cenderung meningkat. Namun demikian kerja tradisional tetap berjalan. Sementara itu tanah dan tenaga kerja

petani sudah dicaplok oleh perkebunan. Perkebunan menggunakan tanah petani untuk tanaman indigo selama 6 bulan, kopi lebih dari 36 bulan, tebu 18 bulan, dan tembakau 9 bulan.

Kerja wajib diperkebunan dan pabrik indigo dirasakan oleh petani berat sekali. Jika dihitung maka kerja wajib yang dilakukan petani berjumlah 270 hari/tahun. Di perkebunan tebu keadaannya sedikit lain. Meskipun petani bekerja keras tetapi ia mendapat tambahan pendapatan dari kerjanya sebagai kuli tebang, kuli angkut, akan menyewakan gerobak, dan lain-lain. Di perkebunan kopi kerja wajib lebih ringan dari pada di kedua perkebunan di atas. Bedanya, pada tanaman kopi kerja wajib lebih ringan tetapi berlangsung dalam waktu lama. Kerja wajib diperkebunan tembakau sekitar 150 hari/tahun dan termasuk ringan seperti di perkebunan kopi. Bedanya pada soal waktu; perkebunan tembakau memerlukan waktu 9 bulan, sedangkan perkebunan kopi lebih dari 3 tahun (Ms. KITLV H 773).

Petani yang telah dicaplok tanahnya menderita beban multi pajak dan kerja wajib. Upah kerja ternyata sudah tidak layak lagi. Akibatnya petani dan buruh hidupnya tidak layak dan selalu defisit anggarannya. Keadaan inilah yang menyebabkan petani dan buruh tidak puas terhadap tindakan perusahaan perkebunan dan pabrik. Beberapa orang sarjana telah meneliti eksploitasi perusahaan perkebunan terhadap petani, misalnya Knight di Pekalongan, Elson di Pasuruan dan Probolinggo. Di daerah itu dominasi monokultur menjadi sebab timbulnya protes petani. Namun keadaan di Vorstenlanden jauh berbeda, petani menderita tekanan pajak dan kerja wajib yang berat karena di satu lokasi terdapat multikultur, misalnya indigo, tebu dan tembakau. Tebu dan indigo memerlukan air banyak sedangkan tembakau sedikit kurang dalam menggunakan air. Oleh karena itu areal tebu dan indigo menempati dataran rendah yang kaya air di lereng selatan dan tenggara Merapi, sedangkan tanaman kopi menggunakan lahan kering yang sedikit air yaitu di dataran tinggi Merapi dan lereng barat Lawu.

Pengelolaan multikultur di satu lokasi jelas memberatkan petani. Beberapa contoh misalnya Distrik Klaten terdapat per-

kebunan indigo, tebu, dan tembakau demikian pula yang terdapat di Distrik Prambanan, Delanggu, Kartosuro, Sragen, Srandakan, Bantul dan Sleman. Protes petani di tiga perkebunan itu jauh lebih keras dibanding dengan di perkebunan kopi. Di perkebunan kopi protes petani lebih lunak dan cenderung menampilkan ideologi tandingan. Gerakan diareal persawahan yang digunakan sebagai tanaman tebu dan indigo protes dan gerakannya lebih radikal dan banyak menggunakan kekuatan fisik dalam menghadapi perusahaan perkebunan, Mengenai lokasi dan jenis-jenis perkebunan yang ada dapat dilihat dalam gambar terlampir.

Resistensi Petani

Ciri-ciri timbulnya resistensi petani adalah kehidupan subsistensi yang tidak dapat ditoleransikan lagi. Tekanan pajak dari gupermen dan tekanan kerja wajib dari perkebunan menciptakan kembali situasi seperti sebelum adanya campur tangan perkebunan ke pedesaan. Elite kultural sebagai pimpinannya menandingi ideologi kolonial yang selama ini membuat stagnasi dan ketidakdinamisan lembaga-lembaga tradisional yang menurut elite itu lembaga dan masyarkatnya yang sudah menyatu merupakan kehidupan kolektif. Nonaktifnya lembaga tradisional berarti kehidupan masyarakat pedesaan menjadi kurang bermakna yang sekaligus menghilangkah eksistensi masyarakat pedesaan.

Dilihat dari lokasinya maka resistensi petani dibedakan menjadi dua tempat yaitu di pusat kerajaan dan di pinggiran. Daerah pinggiran biasanya dijadikan basis resistensi. Namun aliansi dua lokasi terjadi karena keduanya saling tergantung dalam memimpin dan mengalokasikan kekuatan menghadapi penguasa. Intrikistana terus berkembang keluar dan pecah sebagai gerakan petani di pedesaan. Gerakan Mangkuwijoyo di Klaten (1865) dan Suryongalagan di Yogyakarta (1882) adalah contoh resistansi yang meluas dari pusat kerajaan-kerajaan ke pedesaan.

Realitas kehidupan petani makin berkurang karena pencaplokan tanah dan tenaga kerja mereka. Diciptakannya resis-

tensi merupakan usaha balas dendam kepada perkebunan yang lebih menyengsarakan dan merugikan petani. Resistensi individual muncul dalam berbagai bentuk pencurian terhadap pihak-pihak yang merugikan petani., pembakaran tebu dan gudang tembakau (Scott, 1985). Dalam bentuk kolektif, *kecu* merupakan resistensi yang paling ditakuti perkebunan Groneman, 1887).

Resistensi kolektif dapat bercorak gerakan sosial dan gerakan sosial keagamaan. Keduanya susah dipisahkan karena secara ekonomis petani dirugikan oleh perkebunan dan untuk memunculkan satu protes diperlukan bingkai religius yang mampu menampung aspirasi dan ketidakpuasan petani sehingga dapat memenuhi dan memperkuat harapan petani. Resistensi keagamaan muncul dalam bentuk perguruan, tarekat, pesantren yang diperkuat dengan ilmu kebal dan bela diri. Beberapa contoh dapat ditunjukkan di daerah Surakarta antara lain . Bagus Jedik (1839) di lereng Merapi, mbok Nyai Rakhmat (1871) di Sragen, Imanrejo (1888) di Tawangmangu, Tirtowiat alias R. Joko (1888) di Ketitang, Kartosuro, dan lain-lain (Suhartono (1989). Di Yogkarta resistensi dalam bentuk perguruan antara lain : Sarip Prawirosentono (1840), Hasan Maulani (1842), Akhmat Daris (1843), Singotruno (1848), dan lain-lain (Sartono Kartodirdjo, 1973 . 66).

Meskipun Surakarto dan Yogyakarta mendapat tekanan dari perusahaan perkebunan yang sama beratnya tetapi resistensinya tidak terjadi dalam waktu yang sama. Di Yogyakarta resistensinya terjadi sebelum pertengahan abad XIX karena banyaknya kerja wajib dari perkebunan indigo, sedangkan di Surakarta terjadi setelah pertengahan abad XIX. Sejak itu di Surakarta terjadi perluasan perkebunan, khususnya terutama tanaman tebu yang banyak membebani petani.

Setelah mengikuti berbagai bentuk resistensi seperti yang dipaparkan di atas maka latar belakang ideologi dari pimpinan tidak dapat ditinggalkan resistensi sehingga gerakan mereka makin radikal dan militan (Sartono Kartodirdjo, 1973 . 8–11). Setiap gerakan tidak hanya mempunyai ideologi tunggal, te-

tapi beberapa ideologi itu campur satu dengan yang lain. Sudah barang tentu tujuan ideologi itu adalah ingin membentuk masyarakat sejahtera yang harmonis.

Akhirnya resistensi petani banyak terjadi di daerah persawahan dari pada di tegalan. Dengan kata lain di perkebunan indigo, tebu dan tembakau frekuensi gerakannya lebih sering daripada di perkebunan kopi. Selain itu dapat dimengerti bahwa di situ lokasi dengan multi tanaman memungkinkan lebih banyak timbulnya resistensi karena di tempat itu tekanan pajak dan kerja wajib berat sekali.

Kesimpulan

Pergantian patron dari para *patuh* ke perusahaan perkebunan tidak mengurangi beban dan tekanan kepada petani tetapi justru sebaliknya. Berbagai macam kerja wajib, penyerahan wajib, dan sejenisnya baik kualitas dan kuantitasnya justru lebih banyak diserap oleh perkebunan. Konsekuensi lain dari pergantian patron adalah kerugian petani yang makin banyak. Dengan kata lain, ektraksi dan eksploitasi terhadap petani makin dalam. Di sisi lain perkebunan mendapat keuntungan dengan cara yang tidak *fair,* artinya petani tidak diberi imbalan yang seimbang. Secara umum tidak ada tetes ke bawah *(trickle down)* dari keuntungan yang diperoleh perkebunan yang diberikan kepada petani dengan layak, lebih-lebih lagi perkebunan telah mencaplok hampir semua milik petani.

Dalam sistem lungguh resiprositas hubungan dimanfaatkan perkebunan untuk menggali keuntungan lebih banyak. Meskipun perkebunan memberi upah kepada petani sebagai imbalan kerjanya, tetapi upah itu sangat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup yang diperlukannya. Dalam hal ini petani belum terdesak untuk berpikir cepat dan cara menolak, dan sementara petani menerima beban yang makin berat dari perkebunan. Memang relativisme subsistensi petani sukar diketahui sampai batas mana ia melakukan resistensi. Namun tergabungnya beberapa faktor baik sosioekonomis dan ideologis maka resistensi petani tidak dapat ditolak kehadirannya.

Resistensi petani menjadi kuat dan radikal jika terjadi akumulasi ketidakpuasan baik karena pajak maupun kerja wajib. Sudah disebutkan di muka bahwa Vorstenlanden terdapat banyak yang ditanami multikultur sehingga di lokasi itu juga mendapat tekanan ganda. Respons petani di lokasi itu juga seimbang dengan beratnya tekanan dari perkebunan. Frekuensi dan kualitas tekanan dari perkebunan diimbangi dengan pembalasan berupa pencurian, pembakaran, *kecu*, dan gerakan sosial keagamaan. Keadaan seperti ini sangat mendominasi di pedesaan Vorstenlanden.

Daftar Pustaka

Adas, Nicheel, *Prophets of Rebollions, Millenarian Protest Movements against the European Colonial Order* The University of North Carolina Press, 1979.

Brooshooft, P *Solosche Cateehismus.* Semarang: H. van Alphen, 1888a.

— . Memorie over den toestend in Indieter b

— . *Memorie over den toestend in Indieter begeliding van de open brif op 7 Maart 1888 door 1255 ingezetenen van Nederlandsch– Indie gezonden aan 12 Heeren.* Semarang: t.p., t.t.

Carey, P.B.R. "Waiting for the 'Just King': The Agrarian World of South- Central Java from Giyanti (1755) to the Java War 1825–1830)". *Modern Asian Studies,* 20: 1986): 59–137.

Elson, R.E. *Javanese Peaseants and the Colonial Sugar Industry. Impact and Change in an East Java Residency 1830–1940.* Singapore : Oxford UP.

Fasseur, C. *Kulturstelsel en Koloniale Baten. De Nederlanse Exploitatie van Java, 1840–1860.* Leiden: Universitaire Pers. 1975.

Fernando, M.R. *Peasants and Plantations Economy: The Social Impact of the European Plantation Economy in Cirebon*

Residency from Cultivation System to the End of the First Decade of the Twentienth Century. Disertai Universitas Monash, Melbourne, 1982.

Groneman, J. *De Ketjoe Geschiedenis.* Dordrecht: J.P. Reviers, 1883.

Haspel, C. van den. *Overwicht in Overleg: Hevormingen van justitie, grondgebriik en bestuur in de Vorstenlanden of Java 1880–1930.* Dordrecht: Foris, 1985.

Houben, V.J.H. *Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta 1830–1870.* Disertai Rijksuniversiteit Leiden, 1987.

Jonqiere, P.W. *Kort geschiedkundig overzicht van de landhuur in* Soerakarta. Ms. KITLV H 773.

Knight, R. "Kaum Tani dan Budidaya Tebu di Pulau Jawa Abad ke XIX", Anne Booth (eds), *Sejarah Ekonomi Indonesia.* Jkt: LP3ES 1988.

Kolonial Verslag (KV), 1860.

De Locomotief, 14 Maret 1870.

Niel, R. van. "Measuurement of Change under Cultivation System in Java, 1837–1851, *Indonesia, 14 1972: 89–109.*

Pelzer, Karl J. *Planter and peasant : Colonial Policy and Agrarian Struggle in East Sumatra, 1863–1947. 's-Gravenhage :* Martinus Nijhoff, 1978.

Popkin, Samuel L. *The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam.* Berkeley : University of California Press, 1979.

Pringgodigdo, R.M.A.K. *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rujk.* 's-ravenhage : Martinus Nijhoff, 1950.

Rouffaer, G.P. "Vortenlanden", *Adatrechbundels,* 34, 1931: 238–378.

Popkin, Samuel L. *The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam.* Berkeley : University of

California Press, 1979.

Pringgodigdo, R.M.A.K. *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenegorosche Rijk.* 's-ravenhage : Martinus Nijhoff, 1950.

Rouffaer, G.P. "Vorenlanden", *Adatrechtbundels,* 34, 1931: 238–378.

Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rurl Java.* Singapore : Oxford UP., 1973.

Scott, James C. *The Moral Economy of the Peasants; Rebellion and Subsistence in Southeast-Asia. New Haven:* Yale UP., 1978.

—. *Weapon of the Weak. Everyday Form of Peasant Resistance.* New Haven : Yale UP., 1985.

Soepomo, R. *De Reorgannisatie van het Agrarisch Stelsel in het Gevest Soerakarta,* 's-Gravenhage : L. Gerretsen, 1927.

Suhartono. *Apanage dan Kekel. Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta.* Disertai UGM, 1989.

Lampiran 1

Tabel 1 Produksi Perkebunan di Yogyakarta, 1848–1900

Tahun	Jml prs	luas/ bau	kopi/ pk.	gula/ pk.	indigo A. pond	tembakau/ pk.
1948	–	44.877	50.071	27.900	6.740	–
1850	–	38.796	44.782	18.600	200	–
1855	57	29.859	53.341	22.810	14.540	–
1860	102	161.618	50.059	46.841	56.771	66.484
1864	115	198.881	56.319	63.470	82.391	1.045.152
1870	–	–	69.700	89.600	67.400+	3.430
1880	172	300.888	84.392	198.178	126.328	13.038
1885	150	249.517	36.721	410.310	307.668+	9.417
1890	143	258.655	8.378	332.256	289.534+	17.052
1895	138	273.322	17.938	496.189	216.524+	41.310
1900	125	246.127	36.988	725.425	243.767+	92.574

Sumber : V.J.H. Houben, *Kraton Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta*, 1830–1870. Disertai RU Leiden, 1987:244;
C. CH. van den Haspel, *Overwicht in Overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880–1830*. Dordrecht : Foris, 1985 : 270. + = kg

Tabel 2 Produksi Perkebunan di Yogyakarta, 1949–1990

Tahun	Jml prs	luas/ bau	kopi/ pk.	gula/ pk.	indigo/ A. pond	tembakau/ pk.
1849	–	12.836	1.810	–	163.980	130
1850	–	13.023	110	–	185.192	133
1856	49	10.937	–	19.592	377.300	–
1860	52	–	40	46.841	278.370	1.780
1863	–	–	–	16.500	256.504	–
1880	53	88.247	217	277.049	240.365+	271
1885	50	91.736	100	644.079	232.106+	302
1890	50	92.814	65	474.790	236.774+	453
1895	49	93.024	268	773.399	192.723+	24.613
1900	44	88.542	1.398	865.094	161.267+	20.669

Sumber : V.J.H. Hauben, *Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta*, 1930 – 1870. Disertai RU Leiden, 1987: 245. C. Ch. van den Haspel, *Overwicht in Overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en betuur* in de Vorstenlanden op Java 1880–1930. Dordrecht: Foris, 1985: 272–273

Tabel 3 Perkebunan Tebu di Surakarta (1862)

Daerah	Perusahaan Perkebunan	Areal/ bau	Buruh	Produksi/ pk.
Kartosuro	3	2.591	1.575	11.860
Klaten	9	11.722	6.523	40.239
Boyolali	41	8.790	4.527	21.734
Sragen	41	13.710	3.661	13.039
Jumlah	41	36.313	16.286	86.872

Sumber : V.J.H. Houben, *Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta*, 1830 – 1870. Disertai RU Leiden 1987 : 276

Tabel 4 Perkebunan Tebu di Yogyakarta (1862)

Perkebunan	Areal/Bau	Buruh Tetap	Produksi/pk.
Tebu			
Sonosewu	6,430	4.481	4.500
Bantul	1.022	1.516	–
Ngemplak	585	259	3.000
Rejokusumo	–	–	–
Sedayu	–	715	500
Kedaton Pleret	853	602	–
Kenayan	1.693	530	2.008
Banjararjo	1.731	614	4.500
Gejayan	1.075	506	1.200
Salakan	1.609	4.481	5.043
Jumlah	14.998	13.704	20.751

Sumber : W.J.H. Houben, *Kraton en Kumpeni. Surakarta en Yogyakarta*, 1830 – 1870. Disertai RU Leiden 1987 : 277

Lampiran 2

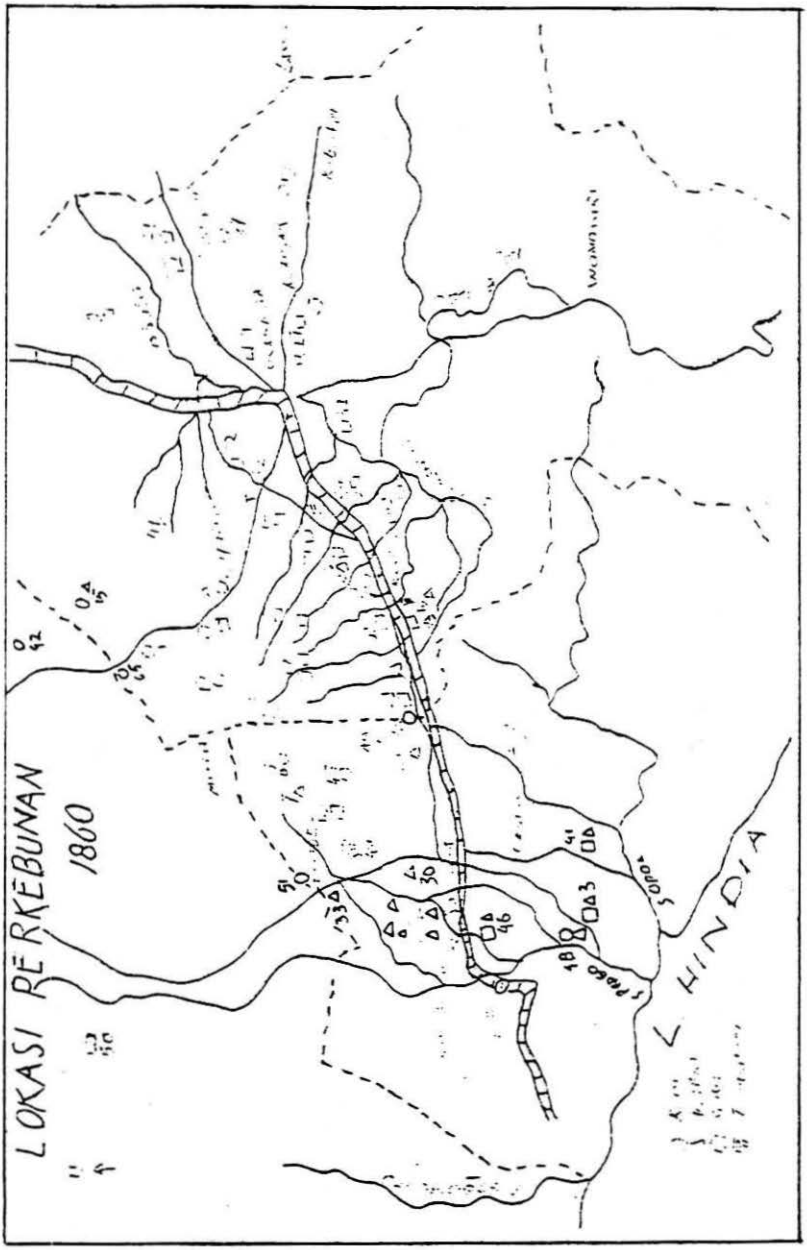

Lampiran 3

Lokasi Perkebunan

1. A m p e l
2. Asinan
3. Bantul
4. Baros
5. Bedaya
6. Blitaran
7. Bulus
8. Canden
9. Cebongan
10. Ceper
11. Delanggu
12. Demakijo
13. Donggeng
14. Drono
15. Gagatan
16. Gegermoyo
17. Gemampir
18. Gondangwedi
19. Jamus
20. Jetis
21. Jetiskunden
22. Junggrangan
23. Jungkare
24. Kadirejo
25. Karanganyar
26. Kartosuru
27. Kebonromo
28. K e j i w a n
29. Kemudo
30. Kepurun
31. Larangan
32. Mlangjiwan
33. Mandiro
34. Manjung
35. Melambong
36. Melati
37. Ngarum
38. Patukan
39. Penggung
40. Pisangan
41. Plered
42. Plumbon
43. Prambanan
44. Randugunting
45. Salakan
46. Sonosewu
47. S i m o
48. Selarong
49. Tegalwaru
50. Temanggung
51. Tempel
52. Temulus
53. Tulung
54. Wonosari.

INDUSTRI PERKEBUNAN DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT : PERKEBUNAN KOPI DI KERESIDENAN KEDU 1950 – 1990

A.M. Djuliati Soroyo

Pengantar : Industrialisasi dan perubahan sosial

Dari berbagai pengalaman negara-negara yang telah maju hampir dapat dipastikan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang telah mereka capai adalah berkat industrialisasi yang mereka laksanakan. Proses industrialisasi berkelanjutan telah mendorong pertumbuhan ekonomi negara semakin pesat. Proses ini oleh banyak sejarawan ekonomi, misalnya Phyllis Deane, dinamakan "revolusi industri" yang melahirkan modernisasi dan perubahan sosial besar-besaran.[1] Demikian pula Indonesia, sebagai negara berkembang yang ingin meningkatkan kemakmuran dan kesejahtraan rakyatnya juga telah mulai melaksanakan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi bertahap. Tahap-tahap ini secara berkesinambungan tertuang dalam Repelita I (1969–1974) hingga Repelita V (1989–1994) atau juga disebut sebagai era pembangunan 25 tahun pertama sebagai landasan untuk industrialisasi tahap kedua atau era tinggal landas, di mana ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh dengan kekuatan sendiri.

Tidak berbeda dengan industrialisasi di negara-negara lain, proses industrialisasi di Indonesia yang sedang berjalan pada saat ini juga membawa perubahan pada masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat berkembangnya suatu masyarakat dari basis ekonomi agraris dengan keseluruhan sistem sosial yang masih tradisional atau praindustrial, menjadi masyarakat berdasar ekonomi industrial yang memproduksi barang jadi untuk konsumsi domestik maupun luar negeri. Industrialisasi tidak bisa tidak menuntut modernisasi baik dalam pola pikir, teknologi, sistem sosial maupun sistem budaya masyarakat.[2] Namun makalah ini tidak bermaksud untuk mengaji perubahan-perubahan yang sedang dan akan terus terjadi sejak masa Orde Baru, melainkan akan menengok ke masa silam ketika sejenis proses industrialisasi telah terjadi di mana dampak perubahan telah mengendap. Masa itu adalah abad XIX yang lebih dikenal sebagai abad Tanam Paksa dan dilanjutkan dengan abad "tanaman bebas".

Berangkat dari kaidah ilmu sejarah bahwa dalam penelitian sejarah dituntut pengungkapan fakta-fakta sejarah serinci mungkin agar mampu merekonstruksi kejadian masa silam secara lengkap dan gamblang, maka penelitian haruslah memilih lokasi terbatas, kurun waktu tertentu serta tema yang jelas. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini memilih industri perkebunan kopi di bekas Keresidenan Kedu sebagai studi kasus dalam rentangan waktu antara 1830–1890. Penelitian ini berkisar pada permasalahan sekitar bagaimana daerah Keresidenan Kedu dikembangkan sebagai perkebunan kopi pada masa Tanam Paksa dan bagaimana pelaksanaannya. Selanjutnya bagaimana dinamika rakyat dalam menghadapi proyek perkebunan pemerintah ini. Mengapa sistem Tanam Paksa dapat mendorong perkembangan ekonomi dan industri di pedesaan dan perubahan-perubahan apa yang terjadi dalam masyarakat desa sebagai dampaknya.

Kondisi Ekologis dan Latar Belakang Masyarakat kedu Sekitar Tahun 1830

Konon Karesidenan Kedu adalah "pusarnya" Pulau Jawa karena terletak kurang lebih di tengah-tengah Pulau Jawa, tepatnya di antara Keresidenan Semarang di pantai utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta di pantai selatan. Daerah i ni merupakan suatu kawasan yang dikelilingi rantai pegunungan, berselang-seling dengan gunung-gunung tinggi berapi di sepanjang perbatasannya, kecuali di barat tenggara. Dua buah sungai yang besar yaitu Progo dan Elo mengalir ke arah selatan membelah lembah dan dataran rendah yang luas membentang di wilayah bagian selatan.

Daerah pegunungan Kedu ternyata sangat cocok untuk tanaman kopi yang paling produktif ditanam di ketinggian antara 750–1500 meter. Pada akhir abad XVIII Horsfield telah menemukan tanaman kopi di lereng utara Gunung Merbabu.[4] Daerah yang lebih rendah merupakan lahan subur untuk budidaya padi dan tembakau. Dan memang daerah ini merupakan salah satu permukiman penduduk paling kuna yang telah membentuk masyarakat petani sawah. Paling tidak sejak abad IX masyarakat petani di sini telah memiliki sistem sosial dan sistem pemerintahan demikian canggih hingga mampu menghasilkan monumen budaya seperti candi Borobudur.

Sebagai daerah permukiman kuna dan berkat kesuburan tanahnya penduduk Kedu relatif cukup padat terutama di daerah dataran rendahnya. Paling tidak sejak zaman Kerajaan Mataram Baru (abad XVII) Kedu telah menjadi gudang beras kerajaan dan pemberi andil dalam penyediaan tenaga kerja.[4] Kedudukannya tidak berubah ketika Inggris merebut Kedu pada tahun 1812 dari kedua kerajaan Yogyakarta dan Surakarta.[5] Demikian pula ketika Belanda menguasai Kedu sejak tahun 1816 dan memasukkannya menjadi wilayah *gupermen* (daerah kekuasaan langsung Pemerintah Hindia Belanda) Kedu tetap merupakan daerah pertanian yang relatif berkembang.

Apabila budidaya padi sawah di dataran rendah, padi *gaga*, jagung dan umbi-umbian di tanah kering atau dataran tinggi telah diusahakan petani sejak seribu tahun yang lampau, maka tembakau mulai ditanam para petani sejak akhir abad XVIII.

Para petani penguasa tanah-tanah luas yang disebut *sikep* adalah juga petani wiraswasta. Selin menanam padi mereka juga mengusahakan tanaman tembakau yang sangat dicari oleh para tengkulak Cina untuk diperdagangkan sampai ke Pulau Pinang.[6] Sebaliknya kopi baru mulai dibudidayakan di halaman rumah dan kebun-kebun petani sejak sekitar tahun 1815. Pemerintah kolonial (Inggris maupun Belanda) mendorong rakyat untuk menanam kopi, yang mula-mula disambut petani dengan cukup positif karena dapat menambah bahan yang laku dijual. Kebijakan ini tentu tidak terlepas dari kepentingan pemerintah kolonial untuk mengekspor kopi sebagai komoditi yang semakin laku di pasaran dunia.[7]

Sekitar tahun 1830 masyarakat desa di Kedu seperti masyarakat petani pada umumnya terdiri atas keluarga-keluarga petani *sikep* yang menguasai tanah sebagai tulang punggung desa. Merekalah yang memikul beban utama yaitu sebagai pembayar pajak dan pemasok tenaga kerja untuk kepentingan desa dan pemerintah. Salah seorang dari para *sikep* dipilih menjadi kepala desa yang disebut *bekel*, baik karena ia merupakan keturunan *cikal bakal* desa (pendiri desa) atau sebagai pemimpin sekelompok petani yang membuka sawah-sawah baru dan desa baru. Sebagai akibat Perang Diponegoro banyak sawah-sawah drusak dan desa ditinggalkan. Para petani yang kembali dari pengungsian kemudian memperbaiki kembali sawah-sawah yang rusak secara bergotong-royong dan menempati kembali desa-desa lama. Pemimpin kelompok petani ini dipilih menjadi kepala desa yang belum tentu mantan kepala desa yang terdahulu.[8] Kepala desalah yang bertindak selaku kepala pemerintahan desa. Ia bertugas memungut pajak di desanya dan menyerahkannya ke pemerintah, menyerahkan tenaga kerja dan bertanggung jawab terhadap keamanan desa.

Sebenarnya sistem pemilihan kepala desa baru diperkenalkan oleh Raffles demi menyukseskan, pajak tanah *(landrente).* Pada masa pemerintahan Mataram para kepala desa mencalonkan diri dengan kesanggupan membayar pajak untuk desanya, kemudian diangkat oleh raja atau mereka yang diberi wewenang.[9] Namun sistem pemilihan yang diperkenalkan Raffles

hampir tidak berjalan sampai tahun 1860-an. Hal ini karena kepala desa adalah tokoh kuat, baik karena dia lebih kaya daripada petani-petani yang lain dan menjadi patron mereka, atau seorang keturunan kepala desa atau cikal bakal yang disegani warga desa. Dengan demikian orang kuat ini juga yang mengajukan diri untuk diangkat sebagai kepala desa, meskipun secara administrasi dilaporkan sebagai hasil pemilihan.[10]

Selain kepala desa sebagai pemimpin formal terdapat pula semacam dewan orang tua-tua yang terdiri atas para sikep yang telah lanjut usia serta parapemuka desa yang lain. Mereka merupakan dewan penasihat kepala desa untuk masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan adat misalnya masalah warisan, tanah *gantungan* dan sebagainya.[11]

Selanjutnya apabila para *sikep* merupakan kelas petani mampu karena sebagai penguasa tanah pertanian mereka menyandang beban pajak yang utama, di bawah mereka adalah petani *indung* yang hanya memiliki pekarangan dan rumah. Mereka hidup dari hasil pekarangan, berjualan atau menyewa sebagian sawah dan hewan bajak dari *sikep*. Sedikit banyak mereka mempunyai ketergantungan kepada para *sikap* ini sebagai *patron* mereka. Di bawah mereka masih terdapat para *mondok* yaitu orang-orang bujangan atau sudah kawin yang menumpang sebagai buruh dari para *sikep*.[12] Maka secara umum masyarakat desa merupakan masyarakat yang berlapis berdasarkan sedikit banyaknya penguasa atas tanah. Sebagai penguasa paling luas kepala desa menduduki lapisan paling atas bersama para pemuka desa yang lain. Di bawah mereka adalah lapisan *sikep* sebagai petani mampu, disusul para *indung* yang hanya memiliki pekarangan dan rumah atau hanya rumah *(indung tempel)*. Akhirnya paling bawah adalah para mondok yang tidak memiliki apa pun dan tidak pula memikul beban kewajiban. Antara petani lapisan di atasnya terdapat semacam ketergantungan karena kedudukan mereka sebagai golongan yang lebih lemah secara ekonomis ataupun sosial.

Di atas struktur desa adalah kekuasaan kolonial yang terdiri atas perangkat pejabat pribumi maupun pejabat Belanda yang

mengawasi mereka. Birokrasi ini terdiri atas bupati sebagai kepala distrik. Selanjutnya *demang* membawahi beberapa *sub-demang* yang membawahi beberapa *onderdistrik* yang membawahi beberapa desa. Perangkat pejabat pribumi ini berada di bawah kekuasaan residen sebagai penguasa tertinggi di kerisidenan beserta satu atau lebih asisten residen yang langsung mengawasi para bupati. Di bawah mereka adalah para *kontrolir* dengan tugas memberikan bimbingan dan nasihat kepada para demang dan bawahannya, mengawasi langsung segala kegiatan pemerintahan dan memberikan laporan kepada residen.

Perkebunan Tanam Paksa Kopi

Mengingat kondisi Pulau Jawa pada sekitar tahun 1830 yang masih belum banyak mengembangkan ekonomi uang, Tanam Paksa merupakan sistem eksploitasi kolonial Belanda yang bisa mendatangkan untung sebanyak-banyaknya, dengan biaya semurah-murahnya dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kebijakan ini terutama didorong oleh krisis keuangan yang hebat akibat Perang Diponegoro karena pemerintah Hindia Belanda terpaksa menanggung hutang sampai f 32.000.000,–. Di samping itu Negeri Belanda yang kehilangan Belgia berarti kehilangan daerah industri tekstil untuk ekspornya.[13] Karena industri Belanda belum berkembang, ia memerlukan komoditi ekspor dari negeri jajahan yang sedang laku di Eropa terutama kopi, gula dan nilai (indige) sebagai bahan perdagangannya.

Bahwa sistem Tanam Paksa dapat menjamin keuntungan yang banyak, murah dan cepat adalah karena sistem ini merupakan perpaduan unsur-unsur tradisional dan moderen. Unsur-unsur tradisional terdiri atas tanah, tenaga dan modal rakyat, kekuasaan feodalistik pejabat pribumi dan ikatan kemunalisti rakyat desa. Termasuk unsur-unsur moderen adalah organisasi produksi, modal dan teknologi Barat. Dengan perpaduan ini dapat dijamin kepatuhan rakyat mengerjakan tanam paksa dan pemerintah memiliki semua sarana yang diperlukan untuk menjadikan Pulau Jawa sebuah perkebunan besar dengan hasil melimpah.[14]

Pelaksanaan sistem Tanam Paksa di Kedu tampaknya disesuaikan dengan kondisi ekologis daerah ini. Seperti telah disinggung di atas daerah pegunungan Kedu sangat cocok untuk budidaya kopi. Jauh sebelum Tanam Paksa sebagian petani Kedu di daerah Sumowono dan Ngasinan telah menanam kopi sebagai penghasilan sampingan, di samping padi sebagai usaha pokok. Ternyata pasaran kopi semakin baik, terlihat dari harga f14,– per *pikul* pada tahun 1818 melonjak hingga f33,– pada tahun berikutnya dan masih terus meningkat menjadi f35,– pada tahun 1822.[15] Terdorong oleh keuntungan yang menggiurkan ini semakin banyak petani menanam kopi, baik di halaman-halaman rumah mereka *(paggerkoffij)*, di kebun-kebun dekat desa *(tuin koffij)* maupun ditanam di hutan yang tanpa pemeliharaan *(bosch koffij)*. Kopi tanaman bebas bebas penduduk ini disebut kopi *monosuko*. Rakyat cukup menambah pendapatan petani meskipun pemerintah menuntut 40% hasil kopi diserahkan sebagai pajak, sisanya dapat diijual kepada pemerintah atau dijual bebas. Melihat prospek kopi yang semakin baik, pemerintah kolonial mulai memaksa rakyat memperluas tanaman kopi dengan membuka tegal-tegal tersebut kepada rakyat untuk tanaman kopi pemerintah sejak tahun 1822. Paksaan ini membuat rakyat mulai membenci tanaman kopi pemerintah. Menurut Residen Valck rakyat membenci tanaman kopi pemerintah karena kebanyakan kebun jauh dari desa dan ketakutan kepada pengawas yang setiap kali datang memeriksa kebun. Akibatnya banyak kebun terbengkelai karena rakyat hanya mengerjakan apabila pengawas datang. Sebaliknya pohon-pohon kopi milik rakyat dirawat baik dan tumbuh subur di halaman rumah-rumah. Apalagi dengan sering terjadinya kecurangn dalam pembayaran harga kopi atau pembayaran pajak kopi pemerintah semakin tidak populer.[16]

Ketika Tanam Paksa harus dilaksanakan di Kedu pemerintah berusaha menyesuaikannya dengan keadaan setempat. Karena rakyat tampaknya lebih menyukai *paggerkoffij* dan *boschkoffij* maka residen memerintahkan penanaman 2,8 batang kopi pada tahun 1831 dilanjutkan dengan 1,5 juta batang tahun berikutnya dengan cara penanaman tersebut.[17] Namun karena bersifat

paksaan rakyat secara diam-diam menentangnya dengan cara memperlambat penanaman. Di Temanggung misalnya banyak pohon belum ditanam sehingga penanaman tambahan tahun berikutnya terpaksa ditangguhkan.[18] Namun tekad pemerintah untuk menyukseskan Tanam Paksa tetap tegar. Dengan menggunakan "prentah alus" para bupati dan di bawah pengawasan pejabat pribumi dari *demang* hingga *bekel* (kepala desa) maka tak ada pilihan lain bagi rakyat kecuali tunduk melaksanakan tanam paksa kopi. Kebun-kebun kopi semakin ekspansif menempati tanah-tanah belukar atau tegal petani setelah tanah-tanah di sekitar desa habis dipakai. Lambat-laun kebun kopi meluas ke daerah pegunungan yang makin jauh dari permukiman penduduk yang berarti makin menjadi beban kerja yang berat. Sementara itu *paggerkoffij* tetap ditingkatkan penanamannya di halaman-halaman rumah penduduk karena pekerjaan lebih ringan.

Pada pertengahan abad XIX kedua telah merupakan kebun kopi baik kopi pemerintah maupun kopi *monosuko* milik rakyak. Pemerintah memegang monopoli penjualan kopi dalam arti semua kopi milik siapa pun harus dijual kepada pemerintah dengan harga dan kualitas yang ditentukannya sendiri. Di satu pihak hal ini jelas merugikan petani karena tidak dapat menjual kopi dengan bebas sesuai dengan harga pasar. Misalnya harga kopi yang ditetapkan pemerintah tahun 1840 adalah f10,– per *pikul* padahal harga di Amsterdam adalah f22,34. Ketika tahun 1859 harga kopi di Amsterdam telah naik menjadi f37,41 pemerintah di Jawa masih tetap memberi harga f10,– per *pikul*.[19] Namun di pihak lain, meskipun petani banyak dirugikan baik tenaga, waktu dan harga kopi yang rendah, mereka masih menerima pendapatan sampingan yang lumayan setiap tahun, rata-rata lebih tinggi daripada pajak tanah *(landrente)* yang harus mereka bayar seperti tampak pada grafik 1. Dalam angka absolut dapat dilihat besarnya "uang masuk desa" setiap tahun hanya dari hasil kopi seperti tampak pada tabel 1. Dari sisa pembayaran kopi yang ratusan ribu gulden setiap tahun dapat digambarkan bahwa terdapat peningkatan kemakmuran di kalangan petani. Daya beli mereka yang agak meningkat me-

mungkinkan mereka membeli barang kebutuhan hidup lebih banyak, menambah hewan bajak, membayar tenaga buruh atau memperluas kebun kopi *monosuko* miliknya sendiri.[20] Tentu hal ini belum berarti bahwa kemakmuran tersebut dinikmati secara merata oleh setiap petani. Justru pada masa Tanam Paksa menjadi kesenjangan antara sebagian kecil petani yang bertambah kaya dan sebagian besar petani lain yang hanya menikmati sedikit saja dari kemakmuran itu dan bahkan memikul beban kerja yang semakin berat. Tentang hal ini masih akan dibahas kemudian.

Setelah Tanam Paksa berjalan sekitar 20 tahun kehidupan ekonomi di Kedu tampak semakin berkembang. Misalnya pertanian tembakau rakyat (Java Tabak) yang sejak dahulu menjadi keahlian petani Kedu tampak semakin meningkat produksinya, terutama di Distrik Probolinggo di selatan serta Distrik-distrik Jetis (Temanggung) dan Kedu (Parakan) di utara. Produksi tembakau rakyat yang hanya sekitar 16.000 *pikul* pada tahun 1832 meningkat menjadi 42.000 *pikul* pada tahun 1866.[21] Sebuah perusahaan Belanda mendirikan pabrik pengolahan daun tembakau untuk cerutu dan tembakau *rajangan* (diiris halus-halus) untuk pasaran luar negeri dengan cara membeli tembakau rakyat atau menyewa sawah-sawah petani dan dikerjakan oleh para petani juga. Sementara itu banyak pula petani menjual langsung daun tembakau kepada tengkulak Cina atau menjualnya dalam bentuk *rajangan*. Usaha tembakau ini mendatangkan keuntungan cukup besar pada petani, apabila mereka tidak dipermainkan oleh para tengkulak Cina.[22]

Selain usaha tembakau berkembang pula industri gula di Kedu yang seluruhnya diusahakan oleh fihak swasta khususnya orang-orang Cina.[23] Pabrik-pabrik gula ini masih dalam bentuk tradisional dengan alat penggilingan tebu sederhana yang digerakkan oleh orang atau lembu serta alat-alat pengolahan gula yang sederhana. Pada tahun 1860 terdapat 23 buah pabrik gula, tersebar di desa-desa sekitar distrik-distrik Magelang, Probolinggo dan Menoreh. Adanya pabrik-pabrik gula mendorong usaha tani baru yaitu penanaman tebu serta lapangan kerja baru sebagai pekerja di pabrik gula atau kuli angkutan.

Apabila pada tahun 1830 luas tanam tebu yang sebagian besar diusahakan sendiri oleh para petani adalah 3.000 *bahu* dengan produksi 16.000 *pikul* maka pada tahun 1853 produksi mencapai 42.000 *pikul* dengan luas areal kira-kira 7.000 *bahu*. Seorang petani tebu memperoleh penghasilan f120,– per *bahu* tegal sedang sebelumnya ia hanya menanam palawija yang bernilai sangat rendah di pasaran.[24]

Dengan monetisasi yang semakin berkembang ini menyebabkan perdagangan kebutuhan sehari-hari semakin ramai. Monetisasi juga mendorong berbagai industri kecil rakyat seperti minyak kacang, minyak kelapa dan tikar pandan.[25]

Dampak Perkebunan Tanam Paksa Kopi dan Perubahan Sosial

Adalah menarik bahwa rakyat Kedu dengan beban kerja cukup banyak baik untuk tanam paksa kopi atau tarum maupun untuk berbagai kerja wajib (di bidang pekerjaan umum, pelayanan pejabat dan penjagaan keamanan) masih dapat mengembangkan berbagai usaha tani atau pekerjaan lain. Untuk memahaminya perlu diteliti berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari sistem Tanam Paksa.

Adanya Tanam Paksa menyebabkan petani mendapat tambahan beban kerja menanam kopi dengan segala pekerjaan yang berkaitan. Tradisi yang sejak dahulu berlaku adalah bahwa kewajiban bekerja sebagai salah satu bentuk pajak dibebankan kepada petani *sikep*, yaitu mereka yang menguasai tanah dibebaskan dari kerja wajib. Sejak Kedu berada di bawah kekuasaan kolonial, pemerintah semakin banyak menuntut kerja wajib dari petani. Itulah sebabnya pemerintah mengizinkan pembagian sawah-sawah di desa di antara para petani, baik sawah bekas *lungguh* pejabat Mataram, sawah-sawah yang rusak akibat maupun sawah-sawah baru. Dengan makin banyaknya petani yang menerima andil sawah desa semakin banyak pula tenaga kerja wajib pemerintah.[26] Tanam Paksa semakin memperkokoh sistem pembagian tanah komunal ini *(tanah sanggan)*. Para pe-

nguasa tanah tidak lagi disebut *sikep* melainkan *kuli kenceng (kuli baku)*, artinya mereka yang wajib bekerja untuk pemerintah.

Namun demikian tidaklah berarti semua warga desa memperoleh *sanggan* yang sama. Sebagian kecil petani kaya, khususnya *bekel* tetap menguasai sawah yang luas karena sebagai kepala desa tetap diberi hak menguasai tanah yang jauh lebih luas dari pada petani biasa, di samping bebas dari sebagian besar kerja wajib dan menikmati berbagai hak istimewa.[27] Tanam Paksa kopi memberikan kesempatan kepada *bekel* untuk menanam kopi di sawahnya sendiri, tak jarang dikerjakan oleh warga desa sebagai kerja wajib. Dengan cara ini ia dapat meningkatkan pendapatannya di samping berbagai keuntungan lain. Dengan kekayaannya ia dapat memperluas usaha lain seperti menanam tembakau atau tebu. Perkembangan ini menyebabkan kesenjangan antara petani kaya dan sebagian besar petani yang tidak kaya di desa semakin tampak. Beberapa orang petani di daerah Ngasinan dan Menoreh bahkan dapat menjadi pengusaha perkebunan kopi dengan mempekerjakan banyak tenaga khususnya pada musim panen kopi.[28]

Apabila Tanam Paksa memberikan kesempatan kepada strata teratas dari masyarakat desa untuk menjadi kaya, maka mereka yang termasuk strata di bawahnya juga mendapat sawah *sanggan* juga berarti menikmati jaminan tersebut dan betapa pun beratnya beban kerja yang ditanggungnya. Memang dapat terjadi si petani melepaskan haknya atas sawah *sanggan* bila beban kerja dirasa sangat berat. Namun hal itu dilakukannya selama ia masih mungkin mendapatkan tanah di tempat lain. Pemerintah pun berkepentingan memperoleh jaminan tenaga kerja yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu. Dengan demikian ada saling ketergantungan antara petani yang membutuhkan tanah dan pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja. Keadaan ini menyebabkan berkurangnya ketergantungan hidup petani kepada kepala desanya dibandingkan dengan masa sebelum Tanam Paksa ketika, kepala desa masih merupakan patron yang menguasai tanah-tanah di desa.

Demikian pula halnya dengan para *indung* dan *mondok* yang tidak menguasai tanah. Hubungan ketergantungan mereka dengan *kuli kenceng* penguasa tanah juga agak melemah. Dengan semakin luasnya monetisasi semakin banyak pula pilihan mereka untuk bekerja, baik di berbagai perkebunan, berbagai jenis industri, berjualan, atau menggantikan tugas kerja wajib para *kuli kenceng* dengan menerima upah.

Suatu perubahan yang penting adalah struktur kekuasaan di desa. Apabila pada masa sebelum Tanam Paksa kekuasaan kepala desa terbatas terutama pada pemungutan pajak tanah, dan dalam hal-hal tertentu didampingi oleh dewan penasihat yaitu tetua desa, sejak masa Tanam Paksa kepala desa menjadi penguasa tunggal dengan kekuasaan yang semakin besar. Pemerintah kolonial membutuhkan tanah dan tenaga kerja untuk membangun perkebunannya. Untuk itu kepala desa adalah tokoh kunci yang menjembatani pemerintah kolonial dan rakyat desa. Melalui kepala desalah pemerintah memperoleh tanah dan tenaga kerja beserta segala informasi yang diperlukan. Maka selain sebagai pemungut pajak, kepala desa juga berkuasa membagi tanah *sanggan*, mengerahkan petani untuk kerja wajib, mengawasi pekerjaan tanam paksa, memelihara keamanan dan bertugas memenuhi segala kepentingan pemerintah yang lain. Dari sinilah kepala desa diberi berbagai hak istimewa seperti *bengkok* yang luas, persentasi pungutan pajak, bagian hasil kopi dan sebagainya.[29] Namun kepala desa tidak pula berkuasa mutlak, karena pemerintah kolonial dengan sistem birokrasinya yang berdasarkan prinsip legal rasional berusaha melakukan kontrol terhadap seluruh aparatnya, juga terhadap sepak terjang kepala desa.[30]

Sebagai akibat sistem Tanam Paksa yang mendorong semakin banyaknya tugas-tugas kerja wajib yang menghabiskan separuh waktu kerja petani sepanjang tahun membuat masyarakat desa menjadi komunitas yang mempunyai ikatan komunal yang kuat dengan warga desa yang terikat erat dengan desanya. Kerja wajib yang dikaitkan dengan penguasaan tanah membuat warga desa sulit melepaskan diri dari desanya. Hal ini berarti menghambat migrasi ke daerah lain, khususnya bagi petani

kuli kendeng. Mereka hanya bekerja di luar desa yang masih terjangkau oleh jarak perjalanan pulang ke desanya, atau mereka harus mencari pengganti untuk menjalankan tugas-tugas kerja wajib.[31] Mereka yang mempunyai mobilitas tinggi untuk mencari nafkah di tempat yang jauh adalah para *indung* dan *mondok*, kelas proletar yang tidak memikul beban pajak atau kerja wajib. Merekalah kebanyakan yang mengambil kesempatan bekerja di bidang industri, transpor, buruh perkebunan atau bangunan sebagai pekerjaan bebas.

Industri Perkebunan Kolonial : Industrialisasi Tanpa Kelanjutan

Setelah mengikuti perkembangan industri perkebunan pada masa Tanam Paksa serta dampak perubahan masyarakat yang ditimbulkannya, perlu diadakan evaluasi mengenai model "industrialisasi" yang terjadi pada abad XIX di Jawa. Dengan mengambil kasus Keresidenan Kedu dapat diketahui bahwa di satu pihak adanya perkebunan untuk ekspor seperti kopi telah menyerap banyak tenaga kerja serta memperluas monetisasi di pedesaan. Pada gilirannya keadaan ini mendorong berbagai kegiatan ekonomis dengan munculnya berbagai jenis perkebunan dan industri, baik yang diusahakan rakyat maupun pihak swasta asing. Dalam hal penggunaan teknologi ternyata sedikit saja yang menunjukkan penerapan teknologi moderen walaupun untuk ukuran zaman tersebut. Baik penanaman, pemeliharaan dan pengambilan hasil hampir tidak berbeda dengan cara-cara tradisional, kecuali bibit jenis baru (*Coffea Arabica* untuk kopi, atau jenis *Manilla tabak* untuk tembakau) yang tumbuh bersama-sama dengan jenis-jenis lokal. Hal ini berlaku baik pada perkebunan pemerintah maupun perkebunan swasta. Unsur modernisasi yang menonjol adalah dalam hal organisasi dan manajemen perusahaan, yaitu pemerintah langsung menangani sejak dari penanaman, pemeliharaan, produksi dan pemasaran dengan monitoring dan kontrol yang ketat.

Sedikitnya teknologi moderen dan mekanisasi juga tampak pada perusahaan swasta baik perkebunan maupun industri. Berbagai perusahaan swasta Eropa di bidang perkebunan tembakau yang mulai banyak beroperasi sejak tahun 1860-an pada

umumnya menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan petani.[32] Misalnya hanya tempat penyortiran tembakau, pengeringan serta penyimpanan menggunakan bangunan yang besar dan kuat. Demikian pula dengan perkebunan swasta kopi yang mulai menanamkan modalnya sejak tahun 1870 pada dasarnya tidak banyak menggunakan teknologi yang berbeda dengan teknologi tradisional.[33] Perusahaan gula milik Cina bahkan tetap menggunakan teknologi sederhana sementara pabrik-pabrik gula milik Belanda di daerah lain telah menggunakan mesin-mesin moderen. Hal ini disebabkan kurangnya modal dan tiadanya bantuan pemerintah untuk meningkatkannya menjadi pabrik-pabrik gula moderen.[34]

Industri-industri yang ada hanya menghasilkan bahan primer untuk kepentingan ekspor dan tidak mengembangkan industri pengolahan barang jadi. Dengan demikian industri-industri ini tidak menghasilkan sebuah proses industrialisasi berkelanjutan yang menghasilkan industri-industri lain, menyerap lebih banyak tenaga buruh tani dan meningkatkan kemakmuran seluruh masyarakat secara terus-menerus. Dengan kata lain tidak menghasilkan revolusi industri seperti halnya negara-negara Barat. Hasil jangka panjang yang diperoleh adalah kemiskinan yang melanda hampir seluruh pedesaan di Jawa di akhir abad XIX. Antara lain ini disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk yang pesat dan berjubel di pedesaan, hidup di atas tanah pertanian yang semakin sempit. Juga karena sebagian besar perkebunan menyusutkan produksinya dan mengurangi tenaga kerja, baik karena tanah semakin kurang subur maupun seebagai akibat depresi dunia (sekitar tahun 1885–1890) yang menurunkan harga bahan ekspor daerah tropis secara drastis.[35]

Agaknya pemerintah kolonial memang tidak bermaksud untuk mengembangkan industrialisasi sepenuhnya di negeri jajahan, karena bukankah negeri jajahan adalah pasar yang luas bagi barang-barang industri mereka ?

Catatan

1) Phyllis Deane, 1965, *The First Industrial Revolution* (Cambridge : Cambridge University Press), h. 1.

2) *Ibid.*, h. 254–275; berbagai karya lain dibaca mengenai perubahan sosial sebagai akibat industrialisasi, antara lain Peter N. Stearns. 1975, *European Society in Upheeval* (New York/ London: Macmillan); F.H. Cardoso, "The Industrial Elite in Latin America", dalam Henry Bernstein, 1973, *Underdevelopment and Development* (Hammondsworth : Penguin Books) h. 191 – 204.

3) Horsfield "Narretive df a Journey Through Java", *Raffles Collection 46*, India Office Library.

4) Kesaksian De Haan, duta VOC untuk Mataram yang mengunjungi (melewati) Kedu tahun 1622 melihat sawah-sawah yang terhampar sampai ke kaki bukit sejauh mata memandang. Lihat laporan de Haan dalam J.K.J. de Jonge, 1869, *De Opkomst van het Nederlandsch Gezag over Java*, I, (s'Gravenhage : M. Nijhoff), h. 294–298.

5) M.L. van Deventer, *Het Nederlandsch Gezag over Java en* Onderhorigheden sedert 1812 (s'Gravenhage : M. Nijhoff), h. XIII–XVII, 32.

6) J. Crawfurd, "Reports upon the District of Cadoe (1812)" *Residentie Archief Kedu 242*, ANRI.

7) Bahwa kopi merupakan komoditi ekspor VOC sejak abad XVII dapat dilihat dari penanaman paksa kopi di Priangan sejak tahun 1677. Lihat J.W. Klein, 1931, *Het Preangerstelsel (1677–1871) en Zijn Nawerking* (Delft : Waltman Jr).

8) Lihat W.B. Bergsma, 1880, *Eindresume,* II, (Batavia: Landscrukkerij), h. 154; *De Residentie Kadoe* (Batavia : Afdeeling Statistiek), h. 131.

9) Para kepala desa adalah orang-orang yang mengontrak pajak pada tanah-tanah jabatan dari para pejabat raja Mataram. Mereka yang sanggup membayar paling tinggi menjadi kepala desa, Lihat J. Crawfurd, "Reports", *RA Kedu 24 A,* ANRI; F.G. Valok, "Gegeevens over Kedoe (1831–1858)", *Adatrechtsbundels, XIV,* h. 113.

10) Lihat L. Adam, 1924, *De Autonomie van het Indonesische Dorp* (Amersfoort : S.W. Melchior), h. 35.

11) Lihat "Statistiek van Java 1822, Residentie Kedoe", *RA Kedu 7,* ANRI.

12) Valek, *op. cit.*, h. 113–114; pelapisan masyarakat seperti diketemukan pada awal abad XIX ini masih ditemukan hingga tahun 1887. Lihat Laporan Residen Kedu Wiselius, "Onderzoek naar den Omvang van de Heerendiensten en Dessadiensten in de Residentie Kedoe", bab III, *Mailrapport 1888, no. 54.* MK ARA.

13) Mengenai hutang pemerintah Belanda lihat Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (Kuala Lumpur; Oxford University Press), h. 244–245; tentang perang Belanda Belgia yang berakhir dengan lepasnya Belgia pada tahun 1830 lihat I.J. Brugmans, 1983, *Paardenkracht en Mensenmacht* (Den Haag: M. Nijhoff), h. 76–77.

14) C. Fasseur, 1975, *Kultuurstelsel en Koloniale Baten* (Leiden: Universitaire Pers), h. 11.

15) "Historisch Overzight", *RA Pasar Ikan 1068, ANRI.*

16) Valek, laporan 16 Juli 1827, *Kedu 11, ANRI; W. van*

Hoogendorp," Over de Staat: No. 2, *Coleeectie Baud 177,* MK ARA.

17) *De Residentis, op. cit.*, h. 110.

18) *Loc. cit.*

19) *"Historisch, -Oversight", RA Pasar Ikan 1068,* ANRI, mengenai harga kopi di Amsterdam, periksa Fasseur, *op. cit.* h. 260.

20) Lihat *Algemeen – Verslag*, laporan tahunan dari residen antara tahun 1830 – 1880, *Kedu 2, 3, 4B,* ANRI.

21) *De Residentie, op. cit.*, h. 96–97.

22) Pedagang-pedagang Cina dari luar Kedu maupun dari Kedu sendiri banyak berdatangan ke tempat-tempat penanaman tembakau. Mereka memberi persekot (uang muka) kepada para petani sebagai hutang berbunga dan dibayar dengan tembakau untuk menekan harga. Akibatnya banyak petani, kepada desa sampai pejabat atas (bupati) terlibat hutang dengan Cina, misalnya di Temanggung. Lihat *missive* Residen Hoogeveen, *Exhibitum, 3 Juni 1868* no. 46, MK ARA.

23) Lihat misalnya laporan residen Hartman, "Beschrijving", *Kedu 9 ANRI.*

24) *De Residentie, op. cit.* h. 101–103, *Cultuur Verslag 1860 dan 1863* dalam *RA Pasar Ikan 1076 dan 1077,* ANRI.

25) Lihat *Algemeen–Verslag 1830–1880; Cultuur Verslag 1857, 1858, 1860, 1863, RA 1047, 1076, 1077, 1086,* ANRI.

26) Laporan Rost van Toningan *Exhibitum, 9 Nopember 1867 No.* $C^{r}\,Z^{11}$ *(*$N^{10}\,Z^{11}$*) Kabinet,* MK ARA.

27) Wiselius, Onderzoek", *Mailrapport 1880 No. 54,* MK ARA. khusus Bab III.

28) Misalnya seorang petani bernama Rantes di distrik Ngasinan pada tahun 1963 dapat menghasilkan 150 *pikul* dari perkebunan kopinya. Lihat laporan tanaman kopi dalam "Verza-

meling", *AC(Archief Cultures) Pasar Ikan 304,* ANRI.

29) Wiselius, "Onderzoek", bab III, *Mailrapport 1888 No. 54* MK ARA.

30) Setelah tahun 1970 pemerintah tampak lebih ketat mengawasi para kepala desa dan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Tahun 1875 143 kepala Desa dipenjara dan 14 dipecat; tahun 1876 60 kepala desa dihukum tutupan karena melalaikan tugas. *Algemeen Verslag 1875 dan 1876, Kedu 5,* ANRI.

31) Lihat laporan F. Fokens tentang heerendiensten *%indersumen,* Bagian ke I, jilid 2, tahun 1901, khusus Kedu, h. 67–69.

32) Liat *Cultuur Verslag 1874, Archief Cultures 1036,* ANRI.

33) *Ibid.*

34) *De Residentie, op. cit.*, h. 103.

35) Liat R.E. Elson, 1984, *Javanese Peasants and the colonial Suger Industry* (Singapure : Oxford University Press), h. 137–142; lihat juga *Kolonial Verslag 1983, Bijlage C. (5. 5) Kadoe.*

Lampiran 1

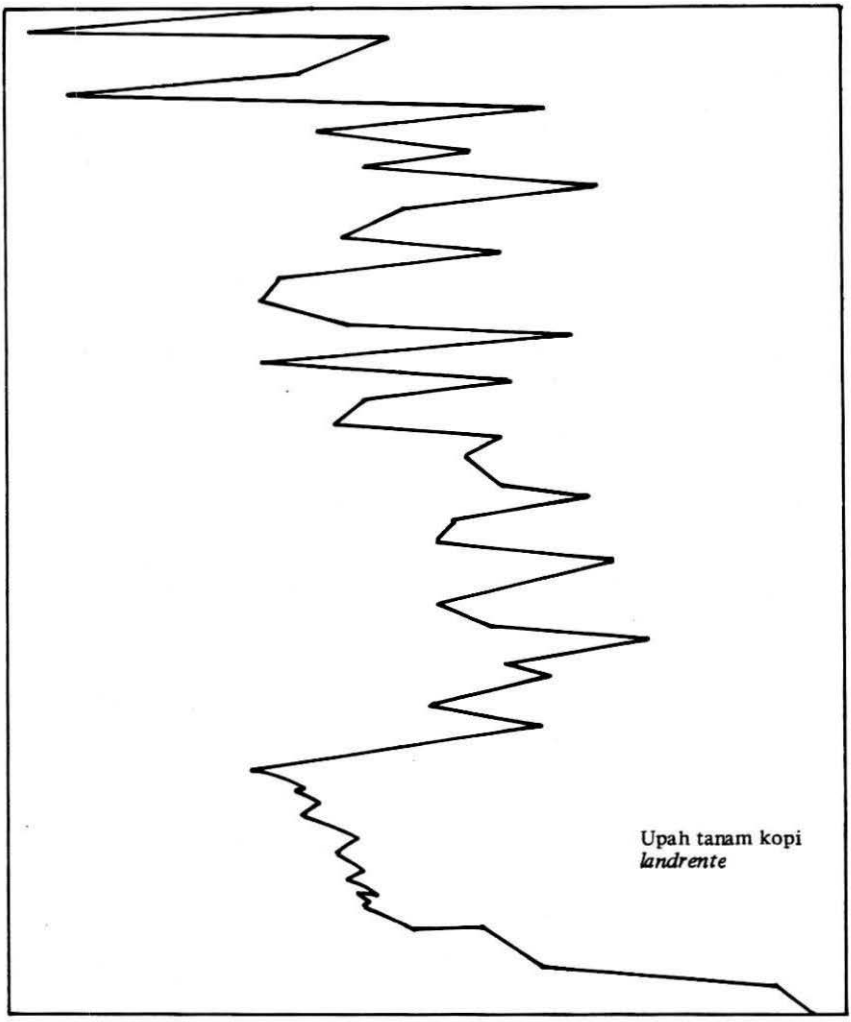

Grafik 1. Upah Tanam Kopi dan *Landrente* per Rumah Tangga di Keresidenan Kedu, 1822–1880

Sumber : *De Residentie* (1871), h. 112–115, 158–162; "Historisch" *RA Pasar Ikan* 1068, ANRI; *KV* 1871–1881

Lampiran 2

Tabel 1 Jumlah Pembayaran Kopi, Landrente, dan Sisa Pendapatan Petani di Kedu 1840–1870

Tahun	Pembayaran Kopi (f)	Landrente (f)	Sisa Pendapatan (f)
1	2	3	4
1840	1.062.270	575.696	486.574
1841	1.281.452	580.284	701.168
1842	1.133.317	590.874	542.443
1843	1.314.267	591.834	722.433
1844	933.237	601.387	331.850
1845	622.467	608.258	14.208
1846	879.427	610.718	268.709
1847	607.586	609.143	– 1.557
1848	704.814	612.359	92.455
1849	362.080	610.950	– 248.870
1850	749.269	605.206	144.063
1851	862.690	598.214	264.476
1852	594.667	628.564	– 33.879
1853	428.898	606.296	– 177.398
1854	865.497	606.063	259.434
1855	815.779	572.649	243.130
1856	469.710	594.596	– 124.886
1857	711.340	596.757	114.583
1858	771.777	590.886	180.891
1859	665.968	585.795	80.173

1	2	3	4
1860	1.081.003	605.364	475.639
1861	1.011.834	613.105	398.729
1862	563.540	617.057	– 53.517
1863	1,257.240	614.577	642.663
1864	467.750	600.370	– 132.620
1865	1.043.157	612.742	430.415
1866	1.225.498	596.123	629.375
1867	1.190.418	628.323	562.095
1868	662.959	631.793	31.166
1869	1.050.468	629.179	421.289
1870	985.636	737.044	248.592

Sumber : "historisch overzight" RA Pasar Ikan 1068, ANRI; De Residentie, h. 112-115, 160–162

SEJARAH INDUSTRI ROKOK KRETEK KUDUS: SURVIVALISME DALAM JERATAN STRUKTUR

Suharso

1. Pendahuluan

Saat sekarang mulai bermunculan teknik-teknik perencanaan perkotaan mendasarkan pada peramalan kemungkinan-kemungkinan kecenderungan di masa lalu dari sumber-sumber sejarah. Kemudian berkembang suatu pengertian yang kaya akan sejarah tentang perencanaan perkotaan adalah berguna bahkan sangat diperlukan. Bahkan kita harus mengubah kecenderungan-kecenderungan yang menolak analisis sebagai suatu dasar peramalan, merupakan pendekatan yang masuk akal dan diandalkan. Di samping itu sejarah memang menarik, sejarah mencerminkan evolusi umat manusia mulai dari penghuni-penghuni gua dan pengembara sampai suatu masyarakat yang "meng-kota", ini merupakan sejarah kebangkitan kota-kota dan daerah-daerah metropolitan mereka.

Untuk mengungkapkan infra struktur kota tidak cukup menggunakan metode deskriptif seperti lazim dipakai dalam sejarah konvensional, melainkan perlu memakai analisis struktural. Tambahan pula infrastruktur itu kompleks sifatnya dan memerlukan definisi multifaktor berdasarkan berbagai aspek kehidupan historis pada tingkat lokal. Analisis berdasarkan in-

terpretasi satu faktor ekonomi, sosial atau politik saja tidak akan cukup untuk menerangkan pola-pola sejarah.

Pendekatan menurut satu garis penelitian akan terlalu bersatu pihak dan keterangannya terlalu sederhana. Untuk mencakup suatu kehidupan historis yang bersegi banyak itu perlu diadakan analisis multidimensional. Kompleksitas kehidupan historis akan dapat diuraikan tidak hanya sebagai kesatuan yang terdiri atas faktor-faktor itu, tetapi bagaimana jalinan faktor-faktor itu dalam interaksinya dan mana di antaranya yang dominan; penganjur pendekatan ini adalah sejarawan Sartono Kartodirdjo.

Namun apabila kita mau mengamati sejarah industri beberapa perusahaan atau katakanlah komunitas dari sebuah perkotaan mendekatinya dari sejarah ekonomi kiranya tidak begitu disalahkan. Sejarah ekonomi secara garis besar mempunyai perhatian mengenai kegiatan ekonomi masa lalu. Masalah-masalah yang ada hubungannya dengan seorang sejarawan ekonomi, luasnya sama dengan minatnya terhadap pertumbuhan, kemandekan, merosotnya ekonomi, kemakmuran kelompok-kelompok individual dalam ekonomi senada dengan arah perubahan ekonomi serta hubungan timbal balik antarorganisasi ekonomi dan kegiatannya; untuk masalah terakhir ini pemusatan perhatian pada struktur masyarakat adalah keharusan (Taufik Abdullah, 1985 : 171).

Kiranya pendekatan-pendekatan di ataslah yang digunakan mengupas atau menganalisis makalah yang berjudul "Sejarah Industri Rokok Kretek Kudus : Survivalisme Dalam Jeratan Struktur". Yaitu sebuah perkembangan sejarah industri rokok kretek yang sarat dengan pergumulan organisme perilaku, sistem kepribadian, sistem budaya dan struktur sosial, serta etos kerja yang tak kenal menyerah pada kondisi jeratan struktur politik dan birokrasi.

2. *Latar Belakang Historis Munculnya Rokok Kretek Kudus dan Pranata Sosialnya*

Kota Kudus yang merupakan "ibukota Kabupaten Kudus" yang sejak abad XVIII sudah berada di bawah kekuasaan Peme-

rintah Belanda. Di samping sebagai ibu kota dahulu Kudus juga merupakan salah satu kota kawedanan yang ada di Kabupaten Kudus. Sampai tahun 1921, Kabupaten Kudus terbagi atas empat kawedanan yaitu Kawedanan Kudus Kota, Cendono, Undaan dan Trenggalek.

Dahulu Kudus juga memiliki alun-alun di mana di tengahnya ada pohon beringin yang saat sekarang telah ditebang – dan sejak tahun 1969 alun-alun itu diubah menjadi Simpang Tujuh dengan berbagai pertokoan di sebelah timurnya. Daerah pusat Kota Kudus terbagi menjadi dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Gelis yang mengalir ke arah selatan. Wilayah barat dikenal dengan nama Kudus Kulon dan wilayah timur dikenal dengan nama Kudus Wetan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan kuno yang dibuat Belanda. Di Kudus Kulon terdapat sebuah menara kuno dan masjid, di sekitarnya ada kompleks makam Sunan Kudus. Menara ini terletak di desa yang bernama Kauman, pada zaman penjajahan Belanda Desa Kauman masuk sebagai Desa Perdikan. Di daerah ini bermukim orang keturuanan Cina yang berasal dari hokian.

Kudus wetan yang terletak di sebelah timur Sungai Gelis merupakan pusat pemerintahan daerah Kabupaten Kudus dulunya pusat pemerintahan bentukan Belanda yang menggunakan konsep tata kota pesisir. Di kawasan ini pada periode kolonial merupakan tempat pemukiman orang-orang Eropa dan perkampungan Cina. Di sepanjang jalan dari alun-alun menuju arah timur, kejurusan kota Kabupaten Pati terdapat pemukiman orang-orang Belanda – perkampungan Cina terdapat di sekitar alun-alun, antara lain di Kampung Panjunan, Kramat, Wergu Kulon dan daerah sekitar Pasar Anyar (yang sekarang jadi Monumen Menara Kudus) (Syafwandi, 1985:17).

Di sekitar kota tepatnya di Desa Dema'an ada orang-orang Arab keturunan Sayid Abdullah Baagil, di sekitar alun-alun ke barat ada daerah yang sering disebut Pekojan tetapi kesemuanya pada intinya tata kota lama Kudus adalah Kudus Kulon yang diarsiteki Sunan Kudus serta Kudus Wetan yang diarsiteki Belanda.

Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus merupakan Daerah yang terletak di sebelah utara dari Pulau Jawa. Luas daerah Kabupaten Kudus meliputi sekitar 425,16 km^2, dengan sejumlah penduduk 566,079 jiwa, hingga tiap-tiap km rata-rata dihuni oleh 1.332 Jiwa yang mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 96,41 % – Katolik dan Protestan 2,81 %, Hindu 0,01 %, Budha 0.63 % dan lain-lain 0,01 %.

Dilihat dari segi geografis, wilayah Kabupaten Kudus terbagi menjadi tiga bagian :

1. Sebelah utara merupakan dataran yang terkenal daerah Pegunungan Muria, sebagian tempat ziarah makam Sunan Muria
2. Bagian tengah merupakan daerah dataran yang terkenal sebagai daerah industri terutama rokok kretek – juga dikemukakan banyak peninggalan sejarah seperti Menara Kudus, dan berbagai makam yang dikeramatkan
3. Sebelah selatan merupakan daerah dataran rendah dan rawa-rawa

Kudus termasuk jalur daerah kawasan industri sepanjang pantai utara Jawa, sebagai asal daerah rokok kretek, di Kudus pernah tercatat 239 buah pabrik rokok kretek mulai dari yang kecil sampai yang besar.

Nama Kudus erat sekali hubungannya dengan masjid di Kudus Kulon. Masjid tersebut didirikan oleh Sunan Kudus pada tahun 956 H atau 1546 M, Nama Kudus berasal dari bahasa Arab Al Quds yang berarti kesucian. Menurut cerita rakyat, sewaktu Sunan Kudus menunaikan ibadah haji, ia singgah ke Baik al Makdis (Al Quds) untuk memperdalam ilmu agama. Pulangnya ia membawa oleh-oleh berupa batu bertulis huruf Arab – untuk memperingatinya maka kota itu dinamakan Kudus.

Menurut legenda setempat – mBah Kiai Telingsing yang mula-mula menggarap tempat yang kemudian menjadi Kota Kudus. Beberapa orang menyebut dia orang Cina Islam namanya semula The Ling Sing. Adanya cerita-cerita yang demi-

kian menunjukkan tempat itu sudah agak berarti – sebelum dijadikan kota suci oleh Sunan Kudus. Kota Kudus menjadi terkenal karena kemunculan pabrik-pabrik rokok kretek pada paroh pertama abad dua puluh ini – kemunculan usaha khas bagi orang alim Islam ini sesungguhnya banyak sekali yang mendasarinya, *pertama* semangat dagang yang militan dari pola perdagangan pesisir sehingga melahirkan etos kerja yang tinggi. *Kedua*, hal pertama ternyata melahirkan masyarakat golongan menengah yang kuat modalnya. *Ketiga* pengaruh Sunan Kudus yang demikian kuatnya sehingga menembus batas zaman.

Hal pertama dapat dijelaskan – seperti kita ketahui bahwa pada awal abad XX kita menyaksikan suatu perkembangan penting dalam pengalaman sejarah masyarakat Indonesia – ketika daerah perkotaan menggeser peranan komunitas pedesaan sebagai tempat berlangsungnya perubahan. Kalau tuntutan akan lahan dan tenaga kerja dari kaum penjajah telah mengubah tatanan masyarakat di abad XIX, maka pertumbuhan usaha perdagangan dan industri di abad XX merangsang pembangunan di bidang kehidupan sosial di pusat-pusat kegiatan tersebut (Koentowidjoyo, 1985:35).

Peranan perdagangan dan industri dalam menggerakkan mobilitas sosial terutama nampak pada industri rokok kretek yang terpusat di Kota Kudus. Semangat yang tinggi ini sebetulnya sudah bersifat laten untuk wilayah pesisir Jawa. Namun aktualisasinya tinggal menunggu lahirnya tokoh saja. Apabila kita kaitkan dengan tesisnya Clifford Geertz – anthropolog Amerika yang dikenal dengan karya spektakulernya *Religion of Java* bahwa ada benang merah kesejarahan antara tradisi Islam dan perdagangan – hal ini berarti ada kaitan antara tradisi santri dan golongan pedagang.

Tradisi Islam dalam bentuk perdagangan ini lahir karena Islam disiarkan lewat perdagangan – yaitu pantai utara Jawa saat itu banyak dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari Gujarat, Benggala, Melayu, Arab dan bangsa lainnya. Banyak dari mereka yang kemudian menetap dan berasimilasi dengan orang Jawa – di berbagai daerah banyak orang Jawa Hindu yang masuk Islam seiring dengan keruntuhan Majapahit. Namun wilayah

pesisir ini perekonomiannya tidak stabil karena pertentangan politik antara konsep pedalaman versus konsep pesisir. Sebagai misal kerajaan yang mengalami desintegrasi karena adanya pembrontakan dari Pajang yaitu kadipaten Pedalaman di Jawa Tengah Selatan. Dari siniliah mulai munculnya embrio kekuatan pedalaman bergerak terus hingga berdirinya kraton-kraton yang sekarang masih ada yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Sejak saat itulah para elite politik Jawa lebih mementingkan kekuasaan dari pada perdagangan. Walaupun begitu jiwa perdagangan itu masih bergerak terus membawa cikal bakal lahirnya etos kerja yang akurat – semangat inilah yang dibawa lari oleh Sunan Kudus akibat kekalahan politiknya.

Akibat dari kekalahan politik Sunan Kudus di Demak membuat Sunan Kudus menyingkir ke daerah Kudus serta membentuk suatu komunitas tersendiri, yaitu sebuah komunitas agama yang tidak didasari oleh kekuasaan. Walaupun begitu kekuasaan Pajang tidak bisa mengusik daerah Kudus karena kewibawaan sunan yang masih terus terjaga yang dulunya sebagai seorang tokoh pemerintahan di Demak. Ajaran-ajaran keislaman yang tersalurkan lewat pesantren cukup membentuk etika tersendiri, dan menjadikan daerah yang sangat ekslusif – hal ini masih terasakan sampai saat sekarang. Ajaran-ajaran inilah yang membuat penduduk menunaikan ibadah haji. Banyak setelah mereka pulang dari ibadah haji terus menjadi saudagar. Para saudagar ini memang sudah memiliki dua kemampuan yaitu semangat (etos kerja) dan modal yang cukup. Maka ketika muncul ide pembuatan rokok kretek – dua hal yang dimiliki oleh para saudagar inilah yang membuat berkembangnya rokok kretek di Kota Kudus sebagai industri. Hal seperti ini tidak terlahirkan dalam analisis Lance Castles dalam tesisnya yang berjudul *Religion. Politics and Economic Behavior in Java : The Kudus Cigarette Industri* (Yale University. 1967)

Mengenai rokok kretek proses kelahirannya sebetulnya sudah cukup lama di kenal oleh masyarakat Indonesia. Seperti kebiasaan merokok di Kraton Mataram, juga rokok telah diperdagangkan – seperti nampak dalam kisah Pranacitra dan Rara Mendut.

Secara historis kelahiran atau penemuan rokok kretek dirintis oleh mBok Ngasirah, seorang janda kusir delman Kardi. Sepeninggal suaminya mBok Ngasirah berwiraswasta membuat rokok kretek dengan ruang pemasaran di sekitar kawan-kawan almarhum suaminya.

Pada waktu memasarkan rokok kretek itu, mBok Ngasirah, menemui Niti Semito, yang waktu itu bekerja sebagai kusir delman. Pertemuan ini berlanjut dengan adanya usaha Niti Semito mengembangkan penemuan rokok kretek, tidak hanya menuntut perluasan pabrik, tetapi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengadaan bahan baku cengkih, tembakau dan kertas serta alat transportasi lainnya dalam pengiriman hasil industri. Sejak saat itu perusahaan rokok kretek yang dibangun oleh Niti Semito sebagai sentral peristiwa menggerakkan perusahaan di sekitarnya yang menunjang kelangsungan hidup pabrik rokok kretek Niti Semito (Afif Masluri, 1985:110).

Menurut Amen Budiman dan Onghokham dalam bukunya *Rokok Kretek* (1987) dijelaskan bahwa lahirnya industri rokok kretek di Kudus bahkan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Haji Jamahri, seorang penduduk di Kudus.

Pada suatu waktu Haji Jamahri menderita penyakit dada penyakit ini telah lama diidap olehnya, Ia benar-benar sangat menderita. Setiap kali serangan sesak nafas datang. Untuk mengobati penyakitnya yang telah lama merana ini ia mencoba memakai minyak cengkih, digosokkan di bagian dada dan punggungnya ternyata, ia merasa mengalami kebaikan, walaupun belum sembuh sama sekali. Selanjutnya ia mengunyah cengkih, hal ini berhasil lebih baik, sehingga terlintas dipikirannya untuk memakai rempah-rempah sebagai obat. Sedangkan caranya sangat sederhana sekali yaitu cengkih ini dirajang halus-halus, kemudian dicampurkan pada tembakau yang dipakainya untuk merokok. Dengan cara ini ia dapat menghisap asapnya sampai masuk ke dalam paru-parunya.

Tindakan Haji Jamahri ini membuat kesembuhan bagi penyakitnya. Cara pengobatan seperti ini dengan cepat terkenal di sekitar tempat tinggalnya. Maka teman-temannya dengan

segera menanyakan tentang hal ini, mereka mencoba rokok buatan Haji Jamahri, ternyata mengalami kenikmatan yang luar biasa. Karena demikian banyak permintaan maka Haji Jamahri membuat lebih banyak lagi rokok kreteknya, sehingga tercipta bentuk industri kecil-kecilan. Akibat dari kesuksesannya banyak orang di sekitarnya yang mengikutinya yang pada awalnya terkenal dengan "rokok cengkeh". Sejak saat itulah mulai berkembangnya industri rokok kretek di Kota Kudus. Menurut Amen Budiman dan Onghokham Haji Jamahri meninggal dunia pada tahun 1890, dengan demikian dapat diperkirakan lahirnya industri rokok kretek di Kudus pada sekitar tahun 1870 sampai 1890. (Amen Budiman dan Onghokham, 1987:106).

Sejak saat itulah mulai lahir sebuah wadah bagi semangat dan etos kerja yang tinggi bagi komunitas Islam dari sebuah masyarakat yang kelahirannya banyak ditentukan oleh perintah sejarah berupa kalimat keharusan untuk berdagang.

3. Rokok Kretek Kudus Survivalisme dalam Jeratan Struktur

Apabila kita mengamati proses perdagangan yang memunculkan kelas menengah – yang banyak dipengaruhi Islam, ternyata cukup banyak perubahan-perubahan yang tipikal – di antaranya tarik-menarik berupa netralisme baik oleh Pemerintah Belanda atau pemerintah Orde Baru saat sekarang ini.

Nampak pada saat sekarang isu yang sering disebut dengan politik "Kambing Hitam" yaitu strategi pemupukan konglomerasi oleh pemerintah di kalangan Tionghoa. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak ingin munculnya kelas pengusaha pribumi yang kuat yang jelas akan lahir dari golongan Islam. Ini pun telah terjadi pada masa kolonial.

Lahir dan berkembangnya rokok kretek di Kota Kudus banyak dipengaruhi oleh jeratan struktur baik itu politik pemerintah maupun kultural dan perang aliran dalam masyarakat yang sebagian besar berkecamuk dari kelompok abangan, santri dan priyayi. Seperti dikatakan oleh Lance Castles – sekalipun kelas menengah pribumi ada di Jawa pada masa

kekuasaan Belanda, dan sedikit banyak mempertalikan nilai-nilai golongan menengah itu dengan Islam ortodoks. Golongan ini terlalu lemah dan tersingkir untuk mengambil alih kepemimpinan dalam mengorganisasi pembangunan ekonomi. Kegagalan ini sebagian besar diakibatkan oleh politik Belanda, dan sebagian lagi karena persaingan dengan orang Cina yang selain dari posisi mereka dilindungi oleh Kompeni Belanda, kelihatannya karena alasan kultural mereka mampu memenangkan persaingan dengan pengusaha pribumi pada hampir semua bidang (Lance Castles, 1982:33).

Terbentuknya kapitalisme di kalangan peranakan Tionghoa di Jawa, bukan karena kerja keras mereka saja, tetapi juga karena peranan Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu munculnya bentuk Partnership VOC dengan kelompok Cina, yaitu berupa modal dan kepercayaan dagang. Sejak saat itu kelompok Cina mulai menguasai perekonomian Jawa.

Seperti diketahui pada tahun-tahun pertama kelahiran rokok kretek pada mulanya di Kudus dan sekitarnya, tetapi karena omzetnya yang semakin besar membuat golongan Cina terpikut untuk mengikuti jejak kelompok peribumi ini. Sejak saat itu terjadi persaingan yang cukup tajam di antara keduanya. Maka sampai kini sikap rasial masyarakat Kudus sebetulnya masih cukup tinggi.

Di Kudus pernah terjadi pergolakan akibat dari persaingan ini, yaitu pada tanggal 31 Oktober 1918, ini tersulut karena karnaval yang dilakukan masyarakat Cina dengan menggambarkan beberapa haji berjalan sambil membawa "ledek" dan mabuk-mabukkan Melihat hal ini para kiai dimotori para pengusaha melakukan rapat dan mengumpulkan batu-batu besar, ketika ditanya untuk apa batu-batu itu mereka menjawab untuk melampiaskan kemarahan para pengusaha rokok yang sebagian adalah beragama Islam Pergoalakan ini memakan banyak korban di kalangan orang Cina sehingga sempat datang pasukan Belanda yang didatangkan dari Semarang. Banyak pengusaha rokok kretek yang ditangkap dan diadili. Hal ini berakibat mundurnya usaha rokok kretek kaum pribumi di Kudus.

Tetapi setelah itu, sekitar lima tahun kemudian pabrik rokok kretek di Kudus mengalami perkembangan yang pesat Van Der Reijden menyajikan data mengenai perkembangan pabrik rokok di Kudus sebagai berikut:

Kebangsaan	Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan pada Tahun				
		1924	1925	1926	1927	1928
Jawa	Besar	6	6	6	6	6
idem	Menengah	12	14	15	17	18
idem	Kecil	7	8	8	9	10
Jawa	Jumlah	25	28	29	32	34
Tionghoa	Besar	6	6	7	7	7
idem	Menengah	4	4	6	6	6
idem	Kecil	–	–	–	1	1
Tionghoa	Jumlah	10	10	13	14	16
Jumlah Total		35	38	42	46	50

Sumber: Amen Budiman, 1987:109

Pada tahun 1928 ada sistem produksi yang disebut dengan cara "abon" yaitu para abon ini menerima cengkih dan tembakau dari para pabrik rokok, lalu mereka membuatnya di rumah masing-masing dan setelah jadi disetorkan pada pabrik lagi, dengan diseleksi kualitasnya mereka yang dianggap berkualitas akan terus menjadi langganan perusahaan rokok. Akibatnya banyak para penyeleksi yang menerima suap untuk memberikan penelitian bahwa rokok yang dibuat para abon masih layak untuk diterima, ini berakibat kualitas dari rasa rokok kretek mengalami penurunan, sehingga banyak dari pabrik rokok yang mulai bangkrut.

Menurut data yang diperoleh dari Museum Kretek Kudus dalam riwayatnya Niti Semito dinyatakan bahwa pada tahun 1929 – cengkih di Zanzibar dan Madagaskar terserang hama yang hebat, hal ini membuat harga cengkih naik cukup tinggi,

maka industri rokok di Kudus cukup terpukul, banyak dari mereka yang gulung tikar. Namun perusahaan milik Niti Semito ternyata masih tetap survive di atas pabrik rokok besar lainnya seperti milik Bapak H.M. Moselich Cab Tebu dan Cengkih, M. Atmo Widjoyo Cab. Guenoeng, dan H.M. Ashadie Cab Delimo.

Pada tahun 1932 muncul pajak rokok yang dikenakan oleh Pemerintah Belanda, hantaman memang selalu menyerang walaupun yang kali ini tidak begitu besar seperti kenaikan harga cengkih. Pada saat itu Pemerintah Kolonial Belanda juga menguasai firma-firma yang memonopoli tata niaga cengkih, yang dapat berjaya karena kuatnya keuangan korperasi Belanda, Masalah cengkih ini selalu muncul karena darinya dapat dikeruk keuntungan yang besar.

Di samping hal tersebut di atas adalah hambatan kultur yang membuat regenerasi mengalami kegagalan, banyak anak dari pengusaha rokok kretek yang memasuki kehidupan elite, mereka bersekolah di sekolahan Belanda. Ternyata sistem pendidikan Barat menyurutkan jiwa wira swasta mereka. Bahkan sampai saat sekarang gelar sarjana yang dianggap jabatan elite membuat anak dan cucu pengusaha itu beralih profesi ada yang menjadi dokter, insinyur, atau pegawai negeri. Kebiasaan hidup enak sejak kecil meninabobokan jiwa wiraswasta mereka, padahal zaman dulu kalangan mereka semangat membenci pegawai negeri atau mereka yang bekerja pada Pemerintah Belanda.

Suatu hal yang membuat kemerosotan pabrik rokok kretek di Kudus adalah tidak dibuatnya badan usaha di dalam perusahaan mereka. Perebutan warisan sering terjadi dan cita-cita ditutupnya industri malah kadang muncul karena warisan akan segera dibagi.

Walaupun begitu di sela-sela gelombang yang menghantam perusahaan – termasuk kebijaksanaan pemerintah sejak zaman kolonial hingga saat sekarang, masih nampak kesadaran sejarah di bidang ekonomi, kemandirian perekonomian mereka masih cukup tinggi. Empat perusahaan besar (Sukun, Djarum, Djambu

Bol, Noyorono) adalah wujud dari keberhasilan menangkap jiwa etos kerja – dan survivalisme pendahulu mereka.

Namun sejak tahun 1980-an industri rokok kretek di Kudus telah betul-betul terjebak dalam jeratan struktur, seiring dengan kemajuan teknologi – dengan diketemukannya sigaret kretek mesin, yang hasilnya berupa rokok kretek filter. Selera masyarakat sudah bergeser lebih senang yang berfilter – bisa disebut tuan dan lebih modis. Masyarakat lebih bergengsi kalau hanya merokok dari perusahaan rokok besar – di antara remaja atau para pemuda sering terjadi ejek-mengejek tentang merk rokok mereka. Hal ini berakibat matinya perusahaan rokok kecil. Di Kudus perusahaan rokok hanya tinggal beberapa saja padahal sebelumnya jumlahnya ratusan. Kondisi mereka yang sudah parah diperparah lagi dengan kenaikan harga cengkih saat sekarang.

Matinya pabrik rokok adalah matinya para buruh rokok yang harus menghidupi keluarganya – analogi sejarah terulang kembali masa kolonial terbentang di hadapan mata.

Maka dapat disimpulkan sejarah industri rokok kretek di Kudus selalu mengalami gelombang terjebak dalam jeratan struktur – tetapi sejarah mereka selalu berbiacara bahwa mereka selalu tetap dapat keluar dari jeratan itu. Semangat laten etos kerja yang dibawa Sunan Kudus itu masih berpusat dalam masyarakat Kudus – pergantian pengusaha sukses adalah bukti dari hal ini.

4. *Pengaruh Indonesia Rokok Kretek Kudus terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Kudus*

Di Kudus selalu beredar cerita yang disalurkan secara lisan-bahwa suatu ketika di Kerajaan Demak diadakan sarasehan yang dihadiri oleh Kiai Telingsing, Sunan Kudus, Sunan Kedu dan sunan-sunan yang lainnya. Setelah makan bersama, Sunan Kudus mengumpulkan sisa makanan yang lebih Tetapi secara berkelakar dicela oleh Sunan Kedu yang menganggap materialistis. Hal ini menyinggung perasaan Sunan Kudus, maka sejak saat itu keduanya bermusuhan. Pertengkaran ini dilanjurkan

dengan mengadu ayam di suatu tempat dan ayam Sunan Kedu mati – sejak saat itu tempat itu dinamakan dengan Gunung Pati Ayam. Ketika yang Sunan Kedu mati, Sunan Kudus berkata-bahwa semua kekayaan daerah Kedu akan menjadi milik kekayaan orang Kudus. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar kekayaan daerah Kedu berupa tembakau, setelah diolah dijual ke Kudus sebagai bahan baku pabrik rokok.

Banyak cerita yang mengisyaratkan kemandirian perekonomian mereka – yaitu ketika mereka menggugat pada bupati Kudus, karena para pengusaha itu selalu harus duduk di lantai kalau menghadap bupati, padahal mereka cukup dapat memberi nafkah beribu orang- desa usaha ini akhirnya berhasil. Akhirnya mereka boleh duduk di kursi. Peristiwa itu terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Mereka cukup dapat menjadi kelompok penekan.

Keluarga pengusaha di Kudus tidak mau menjadi pegawai negeri atau pada jaman kolonial Belanda mereka nampak antipati pada jabatan birokrasi, bahkan pernah muncul cerita kalau ada anak putri menangis dan tidak mau berhenti, pasti akan berhenti kalau ditakuti besok besarnya akan dikawinkan dengan pegawai negeri.

Semuanya menunjukkan kemandirian, maka layaklah kalau mereka disebut kelompok kelas menengah Indonesia. Hal ini terjadi karena dipengaruhi usaha industri rokok kretek yang mengalami kemajuan.

Masyarakat Kudus terutama Kudus Kulon cukup memiliki semangat entrepreneur yang dijiwai oleh etika Islam yang diantaranya diperolehkan berdagang sesuai dengan ajaran agama, mereka seakan-akan hidup seribu tahun lagi kalau mencari rejeki dan seakan-akan meninggal besok pagi kalau beribadah. Dengan memiliki rejeki yang banyak mereka dapat bersedekah dan beramal dengan leluasa. Etika semacam ini tidak nampak pada kelas priyayi atau abangan. Apalagi masyarakat Jawa abad XVII kehilangan perdagangan lautnya dan sesudah itu pedalaman hanya tinggal bentuk-bentuk organisasi yang semata-mata bersifat pertanian dan feodal.

Desa-desa boleh disamakan dengan rumah tangga yang tidak kenal mata uang, yang tidak kenal tukar-menukar yang tertutup dan memenuhi kebutuhan sendiri. Segala sesuatu mengenai kehidupan sosial atau organisasi kemasyarakatan di atas desa dikuasai oleh bentuk-bentuk feodal walaupun seluruhnya ada dalam tangan bangsa Indonesia. Hal ini berlaku baik untuk kehidupan kebudayaan dalam arti sempit maupun untuk administrasi, organisasi, militer dan kehidupan ekonomi. Suatu hal yang cukup aneh untuk melawan kondisi ini di masyarakat Kudus lama tidak terjadi semacam ini, karena masyarakat Kudus lama (Kudus Kulon) tidak mengenal kehidupan agraria persawahan.

Pada abad XIX sesudah perang Jawa, mulailah masa damai dalam negeri selama kurang lebih seratus tahun. Fungsi militer kaum bangsawan hilang kehidupan ekonomi ini yang lebih tinggi di atas desa, mengalihkan kerja rodi dan kewajiban menyerahkan hasil bumi menjadi organisasi kontrak di bawah pemimpin pengusaha Barat. Sehingga kaum bangsawan kehilangan fungsi ekonominya pula. Sesudah itu kehidupan ekonomi rakyat Indonesia terbatas pada kehidupan ekonomi di desa. Pada masa ini golongan menengah Indonesia termasuk juga masyarakat Kudus lama terlalu kecil untuk diharapkan mengadakan pembauran dan apa lagi komersialisasi golongan bangsawan – tetapi kondisi semacam ini berubah setelah abad XX, setelah lahirnya industri rokok kretek di Kudus lama – sirkulasi perekonomian kembali marak dan pancang-pancang bisnis mulai menyebar menjadi sistem bagi mereka yang terlibat – buruh rokok, pengusaha dan keluarganya, infra struktur kota, petani tembakau serta berkembang petani cengkih. Perubahan sosial seperti ini diakibatkan oleh pengaruh berkembangnya industri rokok di Kota Kudus Lama.

Keberhasilan perkembangan industri rokok di Kudus ternyata juga dipengaruhi oleh berkembangnya santri di Kudus Kulon sebagai kelas enterpreneur di samping motivasi berupa kesadaran bahwa mereka juga kelompok minoritas di tengah-

tengah masyarakat priyayi dan abangan – karena sebagai minoritas maka mereka berusaha mandiri secara ekonomi untuk mempertahankan indentitas kulturalnya.

Apalagi dikaitkan dengan tesisnya Mc. Cleland yang menyatakan dorongan yang pertama-tama muncul di kalangan masyarakat menengah adalah adanya kebutuhan akan motivasi untuk berprestasi atau *need achievemnt motovation* kiranya inilah faktor determinan bagi kemajuan masyarakat di Kudus Kulon-yang mempengaruhi perkembangan industri rokok waktu itu.

Perkembangan industri rokok yang pesat ternyata ikut berpengaruh pada kehidupan sosial budaya, yaitu semakin memacu kemandirian perekonomiannya, menumbuhkan minat mereka yang tinggi pada wiraswasta serta mengangap sikap ini berjalan secara turun temurun – mereka selalu bercita-cita menjadi orang kaya – hal ini terjadi ketika mereka memilih calon menantunya – persepsi mereka pun masih tinggi dan masih menganggap kalau mereka masih survive di bidang perekonomian.

Menyaksikan gerak langkah masyarakat Kudus selalu identik dengan rokok kretek, keringat mereka seakan berbau cengkih dan tembakau, di pagi hari ketika fajar subuh ketika matahari mulai menampakkan eksistensinya, Kudus sudah resmi dengan para pembatil rokok yang berjalan kaki memasuki pusat-pusat pabrik rokok, ada pula yang naik kepada serta banyak pula naik angkutan yang mereka sebut izuzu. Warung-warung makanan mulai bertumbuhan di sekitar pabrik untuk melayani para buruh pabrik ketika "laut" (istilah istirahat untuk orang Kudus). Infra struktur kota berkembang meningkat fasilitasnya, mulai dari pendidikan karena SMA–SMA kerja sama dengan mereka misalnya Pabrik Rokok Djarum yang menyediakan pusat komputer untuk latihan siswa SMA. Olah raga mengalami kemajuan pesat misal bulu tangkis yang menghasilkan atlit-atlit Nasional.

Etos kerja masyarakat Kudus lama (kudus kulon) kini merebak kesegala penjuru memasuki kawasan kudus wetan dan sekitarnya – walaupun *The Santri Middle Clase*, itu masih eksklusif di kudus kulon dilingkupi tembok-tembok besar rumah mereka.

Perkembangan Perusahaan Rokok Kretek di Daerah Karesidenan Jepara dan Rembang Antara Tahun 1929 sampai Tahun 1933

Kabupaten	Kebangsaan Pemilik	Jenis Perusahaan	Jumlah Perusahaan Pada Tahun				
			1929	1930	1932	1932	1933
Kudus	Jawa	Besar	7	7	5	4	7
idem	Tionghoa	idem	8	6	4	4	3
idem	Arab	idem	–	–	–	–	1
Pati	Tionghoa	idem	2	1	1	1	–
Jumlah	Perusahaan	Besar	17	14	10	9	11
Kudus	Jawa	Menengah	16	19	19	19	16
idem	Tionghoa	idem	8	10	9	7	6
idem	Arab	idem	–	–	–	1	–
Pati	Tionghoa	idem	–	1	1	1	2
Rembang	idem	idem	2	1	1	1	–
Blora	idem	idem	1	1	–	–	–
Jumlah Total Perusahaan Menengah			27	32	30	29	24
Kudus	Jawa	Kecil	14	17	20	79	155
idem	Tionghoa	idem	2	3	11	13	14
idem	Arab	idem	–	–	1	–	2
Pati	Jawa	idem	–	2	8	26	40
idem	Tionghoa	idem	5	6	12	19	22
Rembang	Jawa	idem	–	1	2	8	16
idem	Tionghoa	idem	1	3	7	4	9
Blora	Jawa	idem	–	–	1	4	10
idem	Tionghoa	idem	–	1	3	4	6
Jumlah Total Perusahaan Kecil			22	33	65	157	234
Jumlah Keseluruhan			66	79	105	195	269

Sumber : Amen Budiman – Onghokham, 1987 : 138

Perkembangan perusahaan rokok di Kudus berpengaruh besar terhadap lajunya pembangunan daerah-daerah sekitarnya, juga membawa kemajuan baik daerah penghasil tembakau. Karena sebelum kemajuan pabrik rokok daerah penghasil tembakau cukup minus penghasilan perekonomiannya.

Di samping itu cukai rokok yang disetorkan ke negara adalah nomor dua setelah gas dan minyak bumi, di tambah lagi pabrik rokok juga menyerap tenaga kerja yang jumlahnya puluhan ribu. Besarnya cukai yang disetorkan pada negara setiap tahunnya tidak kurang dari 150 milyar sedangkan tenaga kerja yang berhasil ditampung kurang lebih 49.814 orang. Sedangkan inkam perkapita yang menggambarkan tingkat kemakmuran rakyat dari tahun ke tahun terus meningkat.

Hadirnya pabrik rokok kretek juga memberi pekerjaan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari agen pengusaha warung, perusahaan pengangkutan, juga promosi, dan lain sebagainya. Pada saat pemerintah kesulitan menyalurkan lapangan kerja – pabrik rokok ternyata cukup memberi andil di dalam ikut memecahkan masalah.

Komunitas masyarakat dan lingkungan hunian di pedesaan dibangunnya pabrik rokok mengalami perubahan sosial yang cukup pesat. Dibangunnya brak-brak di berbagai kecamatan oleh perusahaan rokok Djarum ternyata cukup meningkatkan mobilitas masyarakat di bidang perekonomian kesejahteraan masyarakat ikut membaik seiring dengan kemajuan pabrik-pabrik rokok tersebut.

Munculnya pabrik rokok cukup membawa perubahan pada semangat kerja masyarakat Kudus dan sekitarnya.

Realisasi Ekspor Rokok Kretek PT. Djarum

Tujuan	Tahun 1990		Tahun 1991		Tahun 1992	
	Batang	US.$.	Batang	US.$.	Batang	US.$.
U.S.A.	13.324.800	322.764.00				
SINGAPORE	1.868.800	20.520.00				
MALAYSIA	33.384.000	422.890.00				
JEPANG	1.152.000	25.200.00				
SABAH	2.592.000	38.000.00				
BRUNEI	4.512.000	64.800.00				
AUSTRALIA	456.000	11.400.00				
SEREWAK	36.544.000	413.900.00				
NEDERLAND	204.800.000	4.480.00				
PHILIPINA	11.852.000	147.780.00				
JUMLAH	105.890.400	1.471.814.00	0	0,00	0	0

s/d Juni 1990

Sebagai misal data tentang eksport rokok dari PT Djarum Kudus menunjukkan industri rokok ikut berperan dalam pemasukan devisa negara.

Jumlah Karyawan P.T. "Djarum" Tahun 1989

KARYAWAN		TAHUN	JAN	FEB.	MART	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
BULANN	KDS		1.065	1.065	1.065	1.080	1.109	1.130	1.139	1.139	1.142	1.144	1.145	1.144
	SOLO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
HARIAN	KDS		7.003	7.036	7.047	7.120	7.708	7.129	7.167	7.347	7.344	7.245	7.169	7.066
	SOLO		59	59	59	59	57	57	55	55	55	55	55	54
BORONG	KDS	1989	10.659	10.622	10.574	10.504	10.420	10.403	9.795	9.746	9.761	9.743	9.708	9.658
	SOLO		477	471	471	471	415	386	374	349	335	316	316	311
BATIL	KDS		4.625	4.577	4.921	4.834	4.785	4.777	4.371	4.345	4.364	4.356	4.311	4.282
	SOLO		205	204	201	199	180	167	159	149	137	122	122	120
JUMLAH			24.101	24.042"	24.346	24.275	24.052	24.057	23.068	23.138	23.146	22.989	22.834	22.643

Sebagai misal data tentang karyawan P.T. Djarum Kudus menunjukkan bahwa indusri.

Rokok Kretek di Kudus berperanan ikut mengatasi masalah ketenaga kerja.

Jumlah Karyawan P.T. "Djarum" Tahun 1988.

KARYAWAN		TAHUN	JAN	PEB	MRT	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOP	DES
BULNAN	KDS		1.082	1.084	1.101	1.19	1.12	1.135	1.149	1.204	1.204	1.211	1.222	1.222
	SOLO		19	16	16	16	11	6	6	4	4	4	4	4
HARIAN	KDS		7.032	7.005	7.005	7.005	7.004	6.967	6.906	6.879	6.929	6.933	6.947	6.976
	SOLO		88	81	81	72	76	71	68	66	66	63	59	59
BORONG	KDS	1988	11.615	11.518	11.467	11.450	11.284	11.230	11.135	11.061	10.980	10.900	10.815	10.736
	SOLO		635	625	619	615	586	568	541	522	509	494	486	480
BATIL	KDS		5.427	5.323	5.281	5.229	5.108	5.046	5.012	4.957	4.912	4.879	4.816	4.686
	SOLO		306	300	298	295	286	273	261	240	230	219	211	208
JUMLAH			26.204	25.952	25.868	25.791	25.475	25.296	25.078	24.933	24.834	24.703	24.560	24.371

5. *Kesimpulan dan Penutup*

Perilaku masyarakat Kudus sampai saat sekarang menggambarkan susasana semangat dagang yang militan yang lebih didampingi budaya pesisiran kaum pedagang jaman masuknya Islam. Apabila disesuaikan dengan tesisnya Clifford Geertz bahwa ada benang merah kesejarahan antara Islam dan perdagangan, hal ini berarti adanya kaitan antara tradisi santri dengan golongan pedagang. Di masyarakat Kudus dapat diketemukan proses saling memotivasi antara tumbuhnya kewiraswastaan pada satu pihak dengan reformis Islam pada pihak lain. Reformis Islam di motori oleh Sunan Kudus semenjak kekalahan politik Sunan Kudus di Demak yang ingin mempertahankan hegemoni kekuasaan kerajaan tetap di pesisir. Hal ini yang membuat sampai saat sekarang masih nampak pilar-pilar bisnis masyarakat Kudus Lama masih berdiri kukuh.

Perpaduan antara etos kerja, perilaku keagamaan dan perdagangan ternyata menghasilkan perkembangan industri rokok kretek yang cukup pesat. Raja-raja rokok di Kudus yang telah tiada, ternyata menjadi mitos di bidang perekonomian bagi masyarakat Kudus – kebanggaan akhirnya menimbulkan kesadaran sejarah ekonomi. Karena kultur dapat dipandang sebagai proses yang menjembatani polaritas dan habituasi kelakuan manusia menurut pola kelakuan atau norma sosial tertentu akan menciptakan suatu kelembagaan sebagai realisasi nilai-nilai ideal tertentu, maka terciptalah pola hidup yang mempunyai corak atau gaya tertentu di sinilah ditemuinya etos dan terjadi di masyarakat Kudus.

Walaupun begitu perkembangan rokok kretek di Kudus sebagai industri cukup mengalami banyak hambatan bahkan boleh dikatakan sering terjebak dalam jeratan struktur. Jeratan ini muncul karena kultural, politik dan birokrasi pemerintah. Yang paling menghantam bagi hancurnya pabrik rokok adalah kenaikan harga cengkih yang sering kali dimainkan oleh para monopoli – seperti saat sekarang munculnya sebuah perusahaan besar dari Jakarta yang berusaha melakukan monopoli tata niaga cengkih cukup membuat kemelut di kalangan industri

rokok kretek. Masalah ini selalu muncul sejak kelahiran pabrik rokok itu sendiri pada awal abad XX ini.

Cukup diakui pula bahwa di kalangan keluarga pengusaha pabrik rokok kretek terjadi pergeseran nilai terutama menyangkut jiwa wiraswasta – tidak setangguh ayah-ayah mereka dahulu – diantara penyebab hal seperti ini adalah sistem pendidikan Barat yang berlanjut sampai saat sekarang – yang ternyata cukup menjauhkan semangat wiraswasta bagi kelangsungan generasi pengusaha. Mereka tidak begitu kuat di dalam menghadapi tantangan dan kebiasan dalam beradaptasi dengan peraturan perekonomian pemerintah juga pada umumnya perusahaan industri rokok kretek zaman dahulu tidak berbentuk badan usaha sehingga ketika terjadi suksesi kelemahan managemen dari generasi pengganti serta rebutan reputasi membuat perusahaan mengalami kemunduran.

Walaupun begitu saat sekarang mulai muncul kesadaran tentang bayang-bayang kesuksesan cikal bakal pengusaha, pada keluarga generasi ketika untuk mulai bangkit menegakkan usaha kakek mereka yang sudah hancur. Renaisance bagi industri rokok kretek di Kudus mulai muncul di kalangan keluarga dan sudah nampak prakarsa prakarsa untuk bangkit ke arah ini. Inilah yang biasa disebut sebagai survivalisme pengusaha rokok kretek di Kudus.

Kehadiran rokok kretek di Kudus sebagai industri cukup memberi pengaruh bagi perubahan masyarakat kota maupun pedesaan serta daerah penghasil tembakau atau cengkih. Perubahan ini menyangkut bidang kultur, sosial dan perekonomian.

Daftar Pustaka

Abdullah, Taufik, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan ekonomi,* Bandung : LP3ES, 1988.

Budiman Amen, *Onghokham, Rokok Kretek, Lintasan Sejarah dan Artinya Bagi Pembangunan Bangsa da Negaa* Kudus : PT Djarum Kudus, 1987.

Catls, Lance, *Tingkah Laku Agama, Politik dan Ekonomi di Jawa Industri rokok Kudus,* terjemahan J. Sirait Jakarta : Grafitas, 1982.

Graff, De., *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa,* Jakarta : PT Pustaka Grafiti Pers, 1986.

Kuntuwidjoyo, *Musim Kelas Menengah Indonesia Dalam mencari identitas 1910–1950,* Prisma No. 11.1985.

Mashuri, Afif, *Lahir dan Berkembangnya Perusahaan Rokok Kretek di Kudus,* Skripsi S1, Fak Sastra UNPAD, Bandung, 1985, Tidak diterbitkan.

Wawancara

Bapak Abdullah Baagil, pimpinan pabrik SAB Kudus.

Bapak T. Budi Santoso, Manager Produksi PT Djarum Kudus.

Bapak Mahmudi, Tokoh Masyarakat, ulama, dan Informan bagi penelitiannya Lance Castles.

Bapak Drs. Afif Mashuri, Kepala Museum Kretek Kudus.

Bapak-bapak pegawai rokok kretek di Kudus.

Ibu Rr. Sugiyanti, penduduk asal Kudus berusia 85 Tahun.

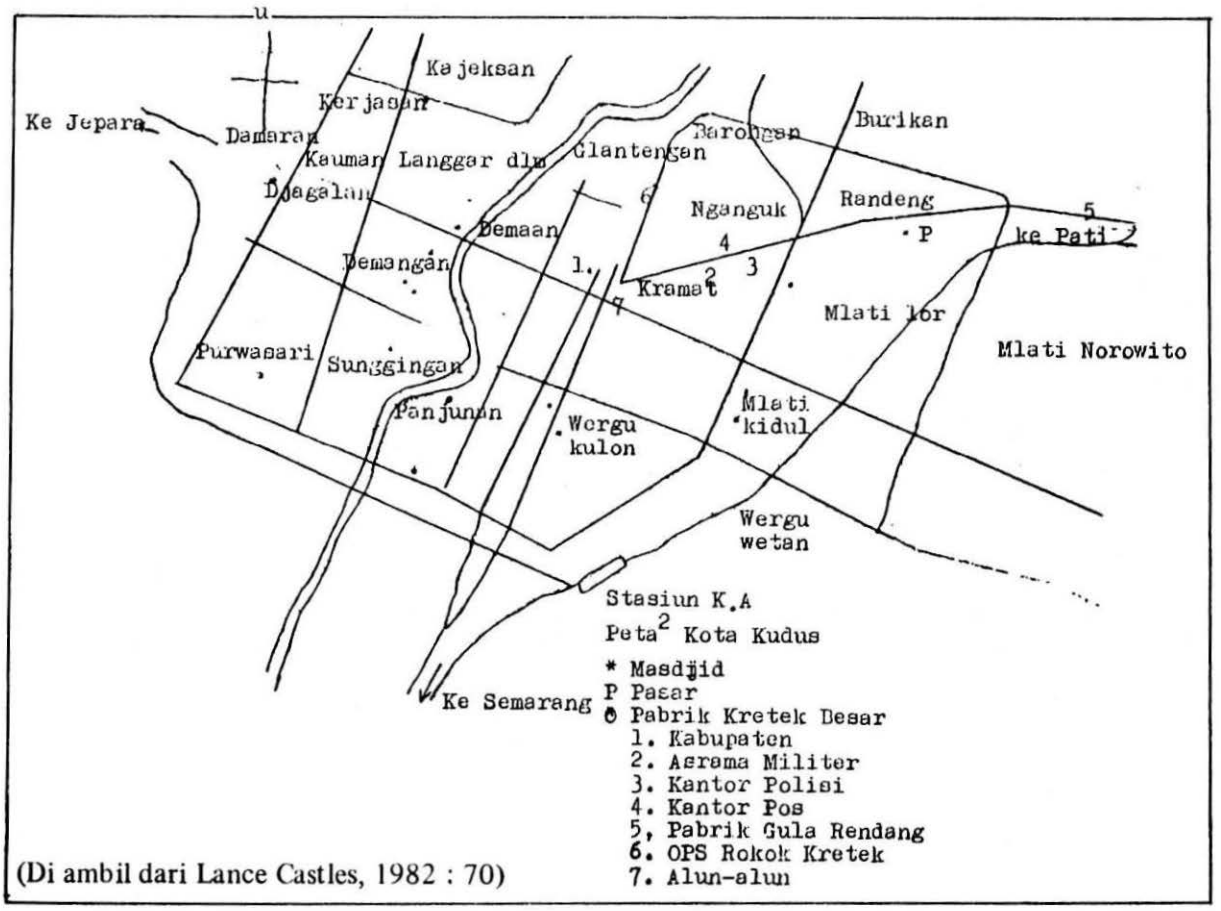

(Di ambil dari Lance Castles, 1982 : 70)

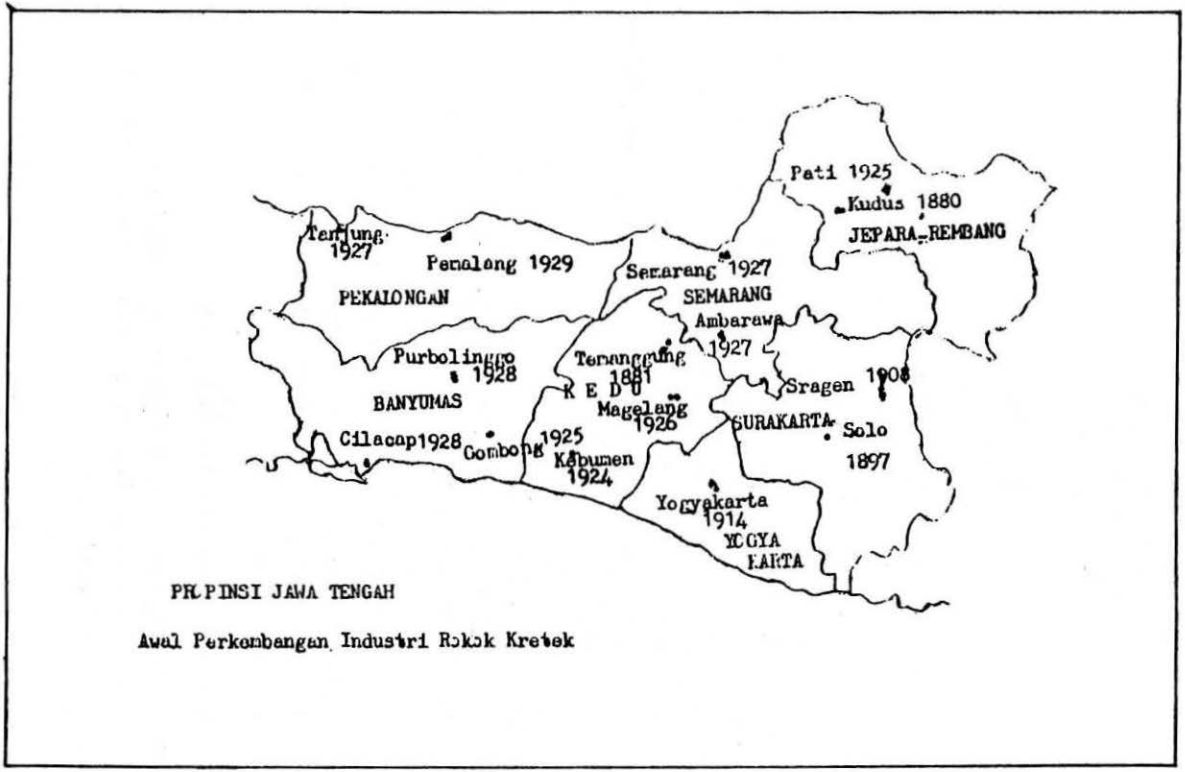

(Di ambil dari Amen Budiman, dan Ong Hokham, 1987 : 166)

HASIL SEMINAR SEJARAH NASIONAL V

A. Pengantar

Seminar Sejarah Nasional V diselenggarakan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah telah berlangsung di Semarang dari tanggal 27 sampai 30 Agustus 1990. Seminar yang diadakan dalam rangka Pengkajian Sejarah 45 Tahun Indonesia Merdeka bertemakan *Peranan Sejarah dalam Pembangunan Era Lepas Landas*, dihadiri oleh ± 400 peserta yang terdiri atas para peneliti, penulis, pengajar, pengabdi masyarakat, dan peminat sejarah. Para peserta berasal dari berbagai lembaga penelitian, pendidikan, pelayanan masyarakat, dan perorangan dari seluruh Indonesia. Setelah membaca, menyimak, dan membahas bahan masukan baik yang berupa ceramah umum makalah yang disajikan (lihat lampiran), maupun diskusi yang berlangsung selama Seminar, peserta Seminar sampai pada kesimpulan akhir sebagai berikut :

B. Simpulan Ceramah Umum dan Makalah

1: Peran Sejarah semakin penting dan tinggi nilai strateginya membangun bangsa dan negara dalam masa pembangunan menuju era lepas landas.

2. Oleh karena alasan tersebut butir 1, *penulisan* sejarah baik sebagai ilmu pengetahuan maupun bahan pendidikan tidak dapat diabaikan lagi dan perlu ditunjang dengan:
   a. pemutakhiran data dan penggalian sumber sejarah melalui kegiatan penelitian baik lapangan maupun kepustakaan;
   b. Penerapan holistik dan pendekatan antar bidang dalam kegiatan penelitian dan penulisan sejarah;
   c. Pengembangan cara kerja dan sistimatika pengungkapan yang disesuaikan dengan setiap tujuan penelitian dan penulisan sejarah;
   d. Perluasan lingkup dan orientasi ranah perhatian peneliti dan penulis sejarah (gerakan masyarakat, pedesaan, tokoh dan sebagainya);
   e. Penggunaan gaya bahasa dan cara penyajian yang disesuaikan dengan sasaran masyarakat pembaca.

3. Di bidang *pengajaran* sangat disadari pentingnya hal-hal yang berkenaan dengan :
   a. hak ikat dan tujuan pengajaran sejarah;
   b. jenjang pendidikan;
   c. perumusan GBPP dan penjabarannya;
   d. pemilihan cara/metod pengajaran sesuai dengan jenjang pendidikan;
   e. bahan dan sarana pengajaran;
   f. kwalifikasi pengajar.

4. Di bidang *kajian sejarah tematis dan kewilayahan* perlu dicatat hal-hal yang berkenaan dengan :
   a. *Sejarah perjuangan* adalah perjuangan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dalam mencapai harkat ke-

bangsaan (dan kemanusiaan) yang lebih tinggi; pengertian ini terutama dalam kaitannya dengan perjuangan penduduk Indonesia setelah berhadapan dengan kolonialisam sebagai suatu sistim;

b. *Perkembangan Industri* yang menimbulkan dampak di segala bidang kehidupan masyarakat, khususnya (terutama) ekonomi dan masyarakat dan nilai-nilai budaya.

c. *Penulisan Sejarah Kesenian,* yang hingga sekarang kurang mendapat perhatian dan menarik minat para sejarawan, sangat diperlukan untuk pembangunan bangsa.

5. *Kajian Jalan Sutera* merupakan salah satu kajian yang meluas keluar wilayah dan masyarakat Indonesia, sangat penting artinya untuk memahami kedudukan dan peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa di masa lampau dan memahami kemajemukan serta keanekaragaman kebudayaan bangsa yang berkembang di kepulauan Nusantara. Hasil kajian sejarah itu juga penting sebagai sumber ilham yang dapat merangsang kebanggaan kreativitas bangsa Indonesia dan pembangunan.

C. *Saran dan Rekomendasi*

1. Para sejarawan dituntut agar senantiasa meningkatkan kemampuan ilmiah dengan banyak melakukan pengkajian dan penulisan, disamping memperdalam ilmunya agar tidak tertinggal oleh kemajuan ilmu pada umumnya, dan penulisan sejarah bangsanya.

2. Para pengajar sejarah dituntut agar senantiasa meningkatkan kemampuan dengan memperbanyak bacaan secara vertikal (ilmiah, ketrampilan), dan mengembangkan cara/metod pengajaran yang tepat demi efektivitas upaya penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pengajaran.

3. Para pengabdi masyarakat di bidang kesejarahan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kepekaan dalam mengikuti peristiwa-peristiwa bersejarah di sekitarnya dengan memperbanyak bacaan dan mengikuti perkembangan sejarah sebagai disiplin ilmu maupun riwayat peristiwa di masa lampau.
4. Para sejarawan diharapkan dapat mengembangkan jaringan kerjasama, baik melalui jalur organisasi profesi maupun perorangan sehingga dapat memperlancar tukar menukar pengalaman, pemikiran dan mengikuti perkembangan sejarah sebagai disiplin ilmu.
5. Kerjasama yang baik antar lembaga yang berkaitan dengan kesejarahan baik pemerintah maupun masyarakat selama ini, hendaknya dibina dan ditingkatkan.
6. Masyarakat Sejarawan Indonesia sebagai organisasi profesi dituntut untuk meningkatkan peranannya, dan menjalin kerjasama dengan organisasi profesi dan lembaga-lembaga yang berkaitan lainnya.

Semarang, 29 Agustus 1990

Seminar Sejarah Nasional V

Lampiran 1

DAFTAR PEMBAWA MAKALAH

A. Subtema Umum

1. Prof. Dr. Haryati Soebadio
   Beberapa Catatan Tentang Kesetiakawanan Sosial dan Sejarah Perkembangan Bangsa.
2. M. Kharis Suhud
   Sejarah Sebagai Sarana Pewarisan Nilai 45.
3. Ismail
   Peranan Sejarah dalam Pembangunan, Suatu Uraian Tentang Wawasan Jati Diri, Sejarah dan Pembangunan.
4. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo
   Fungsi Sejarah dalam Pembangunan Bangsa, Kesadaran Sejarah, Identitas dan Kepribadian Nasional.

B. Subtema Sejarah Perjuangan

1. Drs. Agust Supriyono, MA.
   Kegagalan Pakubuwana V dalam mempertahankan Wilayah Kerjaan Surakarta tahun 1930.
2. Drs. Yuwono Dwi Priyantono
   Jaman Jepang di Jakarta (Suatu aktivitas Pemuda).
3. Drs. Agrar Sudrajat
   Legitimasi Monopoli Penggunaan Kekerasan Fisik dalam Tatanan Masyarakat Kolonial.
4. Dra. Endang Susilowati
   Afdeling B: Gerakan Rahasia di Priangan Timur Tahun 1919.
5. Dra. Endang Susilowati
   Politik Kooperasi MH Thamrin dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia.
6. Prof. Dr. Hamid Abdullah
   Revolusi 1945 dan Pembangunan Nasional.

7. Drs. Eka Bhuwana Putra
   Djawa Sinbun Kai. Situasi Persurat Kabaran di Jawa pada masa Pendudukan Jepang 1942–1945.
8. Drs. Zulfikar Ghazali
   Hisbullah: Salah satu cikal bakal TNI.
9. Dra. Ietje Marlina
   K.H. Z. Mustofa dalam Perlawanan Santri Terhadap Jepang tahun 1944.
10. Dra. GA. Manilet Ohorella
    Perlawanan Nuku di Tidore (1980–1905).

C. **Subtema Pengajaran Sejarah**

1. Dr. Said Hamid Hassan
   25 tahun Pendidikan Sejarah.
2. Dr. Sri Jutmini Rahardjo
   Metode Penemuan sebagai Proses untuk mewarisi Nilai-Nilai Bangsa.
3. Dr. Abu Su'ud
   Pengajaran Sejarah.
4. Drs. I Putu Gde Suwitha, SU.
   Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (Sebuah Pengalaman Mengajar).

D. **Subtema Penulisan Sejarah**

1. Dra. Mona Lohanda
   Pandangan Holistik terhadap Sumber Sejarah.
2. Dr. Abdurachman Suryomiharjo
   Masa Revolusi Indonesia: Suatu Tinjauan Historiografi.
3. Drs. Iman Hilman
   Permasalah Penulisan Sejarah Pedesaan.
4. Drs. Ridwan Melay
   Riau dan Sastra tulisnya; Pendekatan Filologi dalam Historiografi.
5. Drs. Ida Bagus Sideman
   Dan Hyang Nirartha dan Kawangsa di Bali.

6. Drs. Sugeng Priyadi
   Tinjauan Awal tentang Serat Babad Banyumas sebagai Sumber Sejarah.
7. Dra. Darmiati
   Dari Sela-sela Arsip antara Penulisan dan Fakta.
8. Dra. Tiurma Tobing
   Pelaksanaan Pemerintahan Militer di SWK. I/III lewat Arsip-arsip yang ada Juni 1948 – Juni 1949.

E. Subtema Sejarah Kesenian

1. Dr. Kuntowijoyo
   Sejarah Kebudayaan.
2. Drs. Tengku Luman Sinar, SH.
   Sejarah Seni Musik dan Tari Melayu di Sumatera Utara.
3. Dra. Yulianti Parani
   Sejarah Kesenian Moderen Dinamika Argumentatif dari Kebangkitan Kesenian.
4. Dra. Ratnaesih Maulana
   Hubungan Lukisan Gua-Gua Prasejarah dan Tradisi Masyarakat Dani Baliem di Jayawijaya.

F. Subtema Sejarah Industrialisasi

1. Dra. Tri Wahyuning M.I.
   Pedagang sebagai Dampak Industrialisasi di dalam Masyarakat: Satu Kajian Awal.
2. Dr. Djuliati Suroyo
   Industri Perkebunan dan Dampaknya pada Masyarakat Perkebunan Kopi di Karesidenan Kedu.
3. Dr. Suhartono
   Agro Industri dan Subsistensi Multikultur, Pajak, dan Kerja Wajib di Vorstenlanden (1850–1900).
4. Drs. Suharso
   Sejarah Industri Rokok Kretek Kudus: Survivalisme dalam Jeratan Struktur.

5. Drs. JR. Ghaniao
   Industri Sukabumi sehabis Perang: Potret Samar sebuah Perkembangan Fisik.
6. Dr. Suyatno Kartodirdjo
   Industrialisasi dan Dampaknya terhadap Masyarakat Indonesia.
7. Drs. Aminuddin Kasdi, MS
   Pengaruh Modernisasi Teknologi Pertanian Padi terhadap Masyarakat Pedesaan.

G. Silk Roads

1. Prof. Dr. T. Ibrahim Alfian
   Samudra Pasai Bandar Dagang dan Pusat Budaya.
2. Dr. Hasan M. Ambary
   Peranan Beberapa Bandar Utama di Sumatera Abad 7 – 16 M Dalam Jalur Jalan Sutra Melalui Lautan.
3. Drs. Uka Tjandrasasmita
   Perkembangan Kota Banten Lama Hubungannya dengan Jalan Sutra.
4. Dra. Inajati Adrisijanti M. Romli
   Ragam Rias Pesisir-Pesisir Sekitar Abad XVI.
5. Dr. Mukhlis P.
   Makassar (Somba Opu) dalam Jaringan Perdagangan di Indonesia Bagian Timur.
6. Prof. Drs. Suwardi, MS.
   Warisan Bahari di Sepanjang Selat Malaka.
7. Dr. Edi Sedyawati
   Data Awal Mengenai Interaksi Antar Golongan Dalam Sastra Pesisir.

Lampiran 2

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 0303/F/CJ/90

Tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA
SEMINAR SEJARAH NASIONAL DALAM RANGKA
PENGKAJIAN 45 TAHUN INDONESIA MERDEKA
(SEMINAR SEJARAH NASIONAL V)

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. Bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1990/1991 adalah mengadakan Seminar Sejarah Nasional V di Semarang.

b. Bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka perlu membentuk "Panitia Seminar Sejarah Nasional V".

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
   a. Nomor 44 tahun 1974;
   b. Nomor 237/M tahun 1978;
   c. Nomor 15 tahun 1984;
   d. Nomor 29 dan 30 tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222e/0/1990 tanggal 11 September 1990;
b. Nomor 0170/P/1990 tanggal 20 Maret 1990;

3. Surat pengesahan DIP tahun anggaran 199061991 tanggal : 592/XXIII/3/90.

Menetapkan :

PERTAMA : a. Membentuk Panitia Seminar Sejarah Nasional V yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut "Panitia Seminar" dengan tugas mempersiapkan melaksanakan serta menyelesaikan seminar Sejarah Nasional V di Semarang.

b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
2. Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara;
3. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pelabuhan Jalan Sutra.

KEDUA : Susunan/keanggotaan Panitia Seminar tersebut pada pasal "Pertama" seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Memberi wewenang kepada penanggung jawab Panitia Penyelenggara untuk membentuk Panitia Penyelenggara pusat dan daerah.

KEEMPAT : "Panitia Seminar" harus telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1990 dan mewajibkan ketua Panitia menyampaikan Laporan tertulis tentang penyelenggaraan dan hasil seminar serta pertanggung jawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

KELIMA : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Juni 1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

ttd.

DRS. GBPH. POEGER
NIP.: 130.204.562

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara;
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda;
7. Sekretariat Jenderal Depdikbud;
8. Inspektorat Jenderal Depdikbud,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud;
10. Kepala Balitbang Dikbud;
11. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
12. Semua Sekretaris Ditjen, Irjen dan Balitbang Dikbud dalam lingkungan Depdikbud,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud di Propinsi;
14. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perusahaan Negara dalam lingkungan Depdikbud,
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;

16. Semua Universitas/Institut/Sekolah tinggi & Akademi dalam lingkungan Depdikbud;
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
19. Direktorat Jenderal Anggaran;
20. Direktorat Jenderal Pajak;
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
22. Bappenas;
23. Ketua DPR. RI;
24. Komisi IX DPR. RI;
25. Pengurus Pusat Korpri;
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN : **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.**
Tanggal : **3 Juni 1990**
Nomor : **0303/F/CJ/90**

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar Sejarah Nasional V :

I. Pelindung :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. DR. Fuad Hasan.
2. Direktur Jenderal Kebudayaan Drs. GBPH. POEGER

II. Penasehat :
1. Prof. DR. Haryati Soebadio (Menteri Sosial RI).
2. Prof. DR. Harsya W. Bachtiar (Kabalitbang Dikbud)
3. H.M. Ismail (Gubernur KDH TK. I Prop. Jawa Tegah).

III. Panitia Pengarah :

Ketua : Prof. DR. S. Budhisantoso
Wakil Ketua : DR. Abdurachman Suryomihardjo
Sekretaris : Drs. Anhar Gonggong
Anggota :
1. Prof. DR. T. Ibrahim Alfian.
2. Prof. DR. Hamid Abdullah.
3. DR. AB. Lapian.
4. Drs. Bastomi Ervan.
5. DR. Edi Sedyawati.
6. Drs. RZ. Leirissa, MA.

IV. Penanggung Jawab Panitia Penyelenggara :

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Dra. Sutjiatiningsih.

V. Panitia Pengarah Seminar Bandar Pelabuhan Jalan Sutra (Silk Roads)

Ketua	:	Prof. DR. S. Budhisanto
Wkl. Ketua	:	DR. AB. Lapian.
Sekretaris	:	Drs. Anhar Gonggong.
Anggota	:	1. Drs. Bastomi Ervan.
		2. Drs. Uka Tjandrasasmita.
		3. Drs. Bambang Sumadio.
		4. FX. Soetopo.
		5. DR. Hasan Muarif Ambari.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

ttd.

DRS. GBPH. POEGER
NIP.: 130.204.562

Perpust
Jender